



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember

**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Semesta Berencana**

**Kabupaten
Jember**

Tahun 2025-2029





BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

✓ /

3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Jembrana.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana ...

✓

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan ada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan Program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai Sasaran RPJMD Semesta Berencana.

19. Program ...

41

19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD Semesta Berencana sesuai dengan periode RPJMD Semesta Berencana;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
 - e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD Semesta Berencana.

BAB III ...

21

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

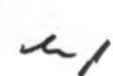
Isi dan uraian RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ...



BAB V PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Semesta Berencana dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD Semesta Berencana kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD Semesta Berencana dan Perubahan Renstra.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Semesta Berencana tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII ...

21

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

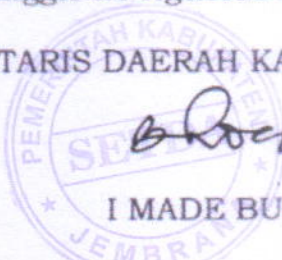
Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI JEMBRANA,

I MADE KEMBANG HARTAWAN

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI :
(8,37/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2025-2029 serta memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029, maka Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Semesta Berencana untuk memenuhi salah satu tugas Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah diperlukan adanya sinergitas antara Visi, Misi, dan Program Bupati dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Bali dan Perangkat Daerah. RPJMD Semesta Berencana diharapkan dapat menghasilkan perkembangan pembangunan yang bermanfaat dan dapat membuat masyarakat Daerah lebih Bahagia.

RPJMD ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Agar Visi, Misi, Program, Strategi, kebijakan umum, kegiatan dan sub kegiatan dapat terintegrasi maka akan diselenggarakan dalam aplikasi SIPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai keselarasan, kejelasan, serta ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, maka klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD 1-2

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya.....1-5

1.4 Maksud dan Tujuan 1-8

1.5 Sistematika Penulisan 1-8

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 2-1

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....2-1

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi.....2-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....2-26

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2-51

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2-59

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal 2-152

2.1.6. Kerja Sama Daerah.....2-156

2.1.7. Rencana Pembangunan Infrastruktur 2-159

2.1.8. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan
Pemerintah Daerah 2-162

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....2-164

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima
Tahun Terakhir.....2-164

2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan.....2-179

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan....2-184

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 2-188

2.3.1. Permasalahan 2-188

2.3.2. Isu Strategis Daerah 2-205



BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 3-1

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3-1

3.1.1 Visi Dan Misi 3-1

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran 3-6

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....3-14

3.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan.....3-14

3.2.2. Program Prioritas Daerah.....3-37

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4-1

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH 4-1

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4-34

4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....4-35

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....4-35

BAB V PENUTUP 5-1

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN 5-2

5.2 PEDOMAN TRANSISI 5-2

LAMPIRAN xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	1-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Jembrana	2-2
Gambar 2.2	Peta Hidrologi Kabupaten Jembrana.....	2-5
Gambar 2.3	Curah Hujan dan Suhu Udara di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	2-5
Gambar 2.4	Luas Lahan Sawah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-12
Gambar 2.5	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-13
Gambar 2.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-14
Gambar 2.7	Emisi GRK Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2024	2-15
Gambar 2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-17
Gambar 2.9	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024	2-18
Gambar 2.10	Persebaran Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024	2-19
Gambar 2.11	Kondisi Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	2-19
Gambar 2.12	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-19
Gambar 2.13	Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	2-20
Gambar 2.14	Piramida Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	2-21
Gambar 2.15	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024	2-22
Gambar 2.16	Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-22
Gambar 2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2030	2-24
Gambar 2.18	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2030	2-24
Gambar 2.19	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2030	2-25
Gambar 2.20	Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030.....	2-25
Gambar 2.21	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030.....	2-26
Gambar 2.22	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-27



Gambar 2.23	PDRB per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-30
Gambar 2.24	Indeks Gini Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-31
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-31
Gambar 2.26	Distribusi Pendapatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-32
Gambar 2.27	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-32
Gambar 2.28	Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-33
Gambar 2.29	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-34
Gambar 2.30	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-34
Gambar 2.31	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-35
Gambar 2.32	Skor PPH Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-36
Gambar 2.33	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-39
Gambar 2.34	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-40
Gambar 2.35	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-41
Gambar 2.36	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-42
Gambar 2.37	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-43
Gambar 2.38	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-43
Gambar 2.39	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-44
Gambar 2.40	Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-44
Gambar 2.41	Prevalensi Stunting Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-44
Gambar 2.42	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-45
Gambar 2.43	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-45
Gambar 2.44	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-46
Gambar 2.45	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-46

Gambar 2.46	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-47
Gambar 2.47	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-48
Gambar 2.48	Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-48
Gambar 2.49	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-49
Gambar 2.50	Indeks Pembangunan, Pemberdayaan, dan Ketimpangan Gender Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-51
Gambar 2.51	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-52
Gambar 2.52	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-52
Gambar 2.53	Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-53
Gambar 2.54	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Bekerja Bebas di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-53
Gambar 2.55	Rasio Ketergantungan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-54
Gambar 2.56	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-54
Gambar 2.57	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024	2-55
Gambar 2.58	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-55
Gambar 2.59	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-55
Gambar 2.60	Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali Tahun 2020–2024.....	2-56
Gambar 2.61	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-57
Gambar 2.62	Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2019–2023	2-58
Gambar 2.63	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-59
Gambar 2.64	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-61
Gambar 2.65	Nilai SAKIP Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-61
Gambar 2.66	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024	2-62
Gambar 2.67	Indeks Reformasi dan Birokrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-63
Gambar 2.68	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-64

Gambar 2.69	Jumlah dan Indeks Kriminalitas Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-65
Gambar 2.70	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-65
Gambar 2.71	Persentase Murid TK/RA di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-66
Gambar 2.72	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-68
Gambar 2.73	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-69
Gambar 2.74	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-69
Gambar 2.75	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-70
Gambar 2.76	Angka Putus Sekolah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-70
Gambar 2.77	Angka Melanjutkan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-71
Gambar 2.78	Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-71
Gambar 2.79	Angka Kematian dan Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-72
Gambar 2.80	Jumlah Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-72
Gambar 2.81	Angka Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-73
Gambar 2.82	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-73
Gambar 2.83	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-73
Gambar 2.84	Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-74
Gambar 2.85	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-75
Gambar 2.86	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-76
Gambar 2.87	Proporsi Bayi yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-77
Gambar 2.88	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-77
Gambar 2.89	Nonpolio AFP Rate Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-77
Gambar 2.90	Cakupan Penanganan Balita Pneumonia di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-78

Gambar 2.91	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-78
Gambar 2.92	Prevalensi dan Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-79
Gambar 2.93	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-79
Gambar 2.94	Cakupan Penanganan Penderita DBD di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-80
Gambar 2.95	Cakupan Penanganan Penderita Diare di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-80
Gambar 2.96	Proporsi Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-81
Gambar 2.97	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-81
Gambar 2.98	Cakupan Kunjungan Bayi, Balita, Ibu Hamil, dan Nifas di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-82
Gambar 2.99	Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-82
Gambar 2.100	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Murid Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-83
Gambar 2.101	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-84
Gambar 2.102	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-84
Gambar 2.103	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-85
Gambar 2.104	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-86
Gambar 2.105	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-87
Gambar 2.106	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-88
Gambar 2.107	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-88
Gambar 2.108	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Perdesaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-89
Gambar 2.109	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-89
Gambar 2.110	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-90
Gambar 2.111	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-91

Gambar 2.112	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-91
Gambar 2.113	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-92
Gambar 2.114	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-93
Gambar 2.115	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-93
Gambar 2.116	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-94
Gambar 2.117	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-95
Gambar 2.118	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-95
Gambar 2.119	Penanganan PPKS di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-96
Gambar 2.120	Penanganan PPKS di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-97
Gambar 2.121	Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per Tahun di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-98
Gambar 2.122	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-98
Gambar 2.123	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-98
Gambar 2.124	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-99
Gambar 2.125	Rasio Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-99
Gambar 2.126	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-100
Gambar 2.127	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-100
Gambar 2.128	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-101
Gambar 2.129	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-102
Gambar 2.130	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-103
Gambar 2.131	Rasio Melek Huruf Perempuan/Laki-Laki pada Kelompok Usia 15–24 Tahun Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-103
Gambar 2.132	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan pada Sektor Nonpertanian Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-104
Gambar 2.133	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-104

Gambar 2.134	Pengawasan dan Pembinaan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-105
Gambar 2.135	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024	2-106
Gambar 2.136	Indeks Kualitas Air Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-107
Gambar 2.137	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-107
Gambar 2.138	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Jembrana	2-108
Gambar 2.139	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Badan Usaha) oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-109
Gambar 2.140	Persentase Penanganan Timbunan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-109
Gambar 2.141	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-110
Gambar 2.142	Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-110
Gambar 2.143	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-111
Gambar 2.144	Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 oleh Swasta di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-111
Gambar 2.145	Cakupan Penerbitan KTP-el di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-112
Gambar 2.146	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-112
Gambar 2.147	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-113
Gambar 2.148	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-115
Gambar 2.149	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-115
Gambar 2.150	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-116
Gambar 2.151	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-117
Gambar 2.152	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-117
Gambar 2.153	Angka Kelahiran Remaja per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-118
Gambar 2.154	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di bawah 20 Tahun Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-118
Gambar 2.155	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-119

Gambar 2.156	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-119
Gambar 2.157	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-119
Gambar 2.158	Cakupan Anggota Bina Keluarga Ber-KB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-120
Gambar 2.159	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-122
Gambar 2.160	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024	2-122
Gambar 2.161	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-123
Gambar 2.162	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-123
Gambar 2.163	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-124
Gambar 2.164	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-124
Gambar 2.165	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-125
Gambar 2.166	Rasio Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024	2-125
Gambar 2.167	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-125
Gambar 2.168	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-126
Gambar 2.169	Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-126
Gambar 2.170	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Berkondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-127
Gambar 2.171	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-127
Gambar 2.172	Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-128
Gambar 2.173	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2022	2-128
Gambar 2.174	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2022	2-129
Gambar 2.175	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-129
Gambar 2.176	Persentase UKM non-BPR/LKM Aktif di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-130
Gambar 2.177	Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-130

Gambar 2.178	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-130
Gambar 2.179	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-131
Gambar 2.180	Persentase Keaktifan Organisasi Pemuda di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-132
Gambar 2.181	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-133
Gambar 2.182	Persentase Integrasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-134
Gambar 2.183	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-135
Gambar 2.184	Persentase Pelestarian Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023.....	2-135
Gambar 2.185	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-136
Gambar 2.186	Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-136
Gambar 2.187	Rasio Perpustakaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-137
Gambar 2.188	Jumlah Pustakawan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-137
Gambar 2.189	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020–2024.....	2-138
Gambar 2.190	Produksi Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-138
Gambar 2.191	Konsumsi Ikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024...	2-139
Gambar 2.192	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-139
Gambar 2.193	Kunjungan Wisata ke Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-140
Gambar 2.194	Proporsi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-140
Gambar 2.195	Produktivitas Padi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-141
Gambar 2.196	Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-141
Gambar 2.197	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-142
Gambar 2.198	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2022	2-143
Gambar 2.199	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-143
Gambar 2.200	Jumlah Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-144

Gambar 2.201	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-144
Gambar 2.202	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-145
Gambar 2.203	Proporsi SILPA terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-146
Gambar 2.204	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-147
Gambar 2.205	Proporsi Belanja Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-147
Gambar 2.206	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-148
Gambar 2.207	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-148
Gambar 2.208	Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-149
Gambar 2.209	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-149
Gambar 2.210	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-150
Gambar 2.211	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-151
Gambar 2.212	Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-151
Gambar 2.213	PDAM Tirta Amertha Jati	2-163
Gambar 2.214	Perumda Tribhuwana	2-163
Gambar 2.215	Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-167
Gambar 2.216	Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-168
Gambar 2.217	Realisasi PAD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-169
Gambar 2.218	Proporsi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-169
Gambar 2.219	Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Transfer Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024 (dalam Miliar Rupiah)	2-170
Gambar 2.220	Kemandirian Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-171
Gambar 2.221	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-171
Gambar 2.222	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-172
Gambar 2.223	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-176

Gambar 2.224	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-177
Gambar 2.225	Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-178
Gambar 2.226	Modal Kerja Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-178
Gambar 2.227	Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-179
Gambar 2.228	Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-180
Gambar 2.229	Pemetaan Intervensi Pembangunan Kewilayahan	2-216
Gambar 2.230	Pemetaan Perspektif Pembangunan Kewilayahan	2-217
Gambar 2.231	Alur Kerja Pembangunan Wilayah Bali-Nusra dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen.....	2-221
Gambar 2.232	Alur Kerja Pembangunan Wilayah Bali-Nusra dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM	2-222
Gambar 2.233	Arahan Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Jembrana.....	2-223
Gambar 3.1	Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Jembrana	3-3
Gambar 3.2	Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Jembrana dengan Provinsi Bali	3-4
Gambar 3.3	Penyelarasan Misi RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029	3-7
Gambar 3.4	Keselarasan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029	3-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana.....	2-6
Tabel 2.2	Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana.....	2-6
Tabel 2.3	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Jembrana	2-16
Tabel 2.4	Persebaran Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-18
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-20
Tabel 2.6	Jumlah Migrasi di Kabupaten Jembrana tahun 2020–2024.....	2-21
Tabel 2.7	Pekerjaan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-23
Tabel 2.8	Agama yang Dianut Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024.....	2-23
Tabel 2.9	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	28
Tabel 2.10	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	29
Tabel 2.11	Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-37
Tabel 2.12	Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-39
Tabel 2.13	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-39
Tabel 2.14	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-40
Tabel 2.15	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-41
Tabel 2.16	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-42
Tabel 2.17	Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024	2-47
Tabel 2.18	Laju Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional	2-58
Tabel 2.19	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-66
Tabel 2.20	Kondisi SD/MI di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-67
Tabel 2.21	Kondisi SMP/MTs di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-68
Tabel 2.22	Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-74
Tabel 2.23	Rasio Tenaga Medis dan Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-75



Tabel 2.24	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023	2-105
Tabel 2.25	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-131
Tabel 2.26	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-132
Tabel 2.27	Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-145
Tabel 2.28	Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-145
Tabel 2.29	Capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024.....	2-152
Tabel 2.30	Capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024.....	2-153
Tabel 2.31	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024.....	2-154
Tabel 2.32	Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024	2-155
Tabel 2.33	Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024	2-156
Tabel 2.34	Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Daerah Lain Tahun 2024	2-157
Tabel 2.35	Daftar Kerja Sama Sinergi Kabupaten Jembrana Tahun 2024	2-157
Tabel 2.36	Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pihak Ketiga Tahun 2024.....	2-158
Tabel 2.37	Rata-Rata Pertumbuhan (%) Realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-165
Tabel 2.38	Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024.....	2-173
Tabel 2.39	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-176
Tabel 2.40	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-177
Tabel 2.41	Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-178
Tabel 2.42	Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-181
Tabel 2.43	Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024	2-183
Tabel 2.44	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026–2030	2-187
Tabel 2.45	Permasalahan Pelayanan Umum Kabupaten Jembrana.....	2-190
Tabel 2.46	Isu Strategis Transformasi Pembangunan.....	2-207
Tabel 2.47	Daftar Arah Kebijakan Nasional Untuk Kabupaten Jembrana.....	2-224

Tabel 2.48 Tabel Rumusan Potensi dan Permasalahan dengan Isu Dinamis dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2025-2029 2-233

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.....3-10

Tabel 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030 3-15

Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2026–2030 3-35

Tabel 3.4 Perumusan Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 3-42

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah 4-2

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030 4-34

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030 4-36



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terletak di ujung barat Pulau Bali, memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan, tetapi juga memiliki berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi laju pembangunan daerah untuk menghantarkan masyarakat Jembrana menuju kesejahteraan. Kabupaten Jembrana memiliki posisi yang sangat strategis karena Jembrana berperan sebagai pintu gerbang utama (*the main gate of Bali*) untuk masuk ke Pulau Bali dari Pulau Jawa melalui jalur darat, jika dimanfaatkan lebih optimal secara tidak langsung akan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian yang luas dan subur, kekayaan hasil perikanan, serta daya tarik wisata yang didukung oleh keindahan alam yang masih alami dan kekayaan budaya yang khas, menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, Kabupaten Jembrana memiliki peluang untuk maju. Meskipun demikian, pembangunan tersebut perlu direncanakan dan dikendalikan sehingga berbagai permasalahan dan tantangan dalam optimalisasi potensi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelestarian lingkungan dapat diatasi secara komprehensif sehingga Jembrana dapat berkembang secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, salah satu di antaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diatur lebih rinci pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat

daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD juga memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Dalam konteks pergantian kepala daerah dibutuhkan instrumen untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, serta program kepala daerah terpilih dalam periode lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD juga memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penyusunan RPJMD ini dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down planning*, holistik dan tematik, integratif, serta spasial agar menghasilkan perencanaan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029 merupakan periode pertama pentahapan lima tahunan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2045. Pada periode pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jembrana berfokus pada penguatan modal dasar pembangunan. Hal ini diharapkan menjadi fondasi perwujudan Visi RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2045. Dalam prosesnya, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 disusun secara bersamaan atau simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD

Peraturan perundang-undangan yang diacu dan dipedomani dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4).

1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

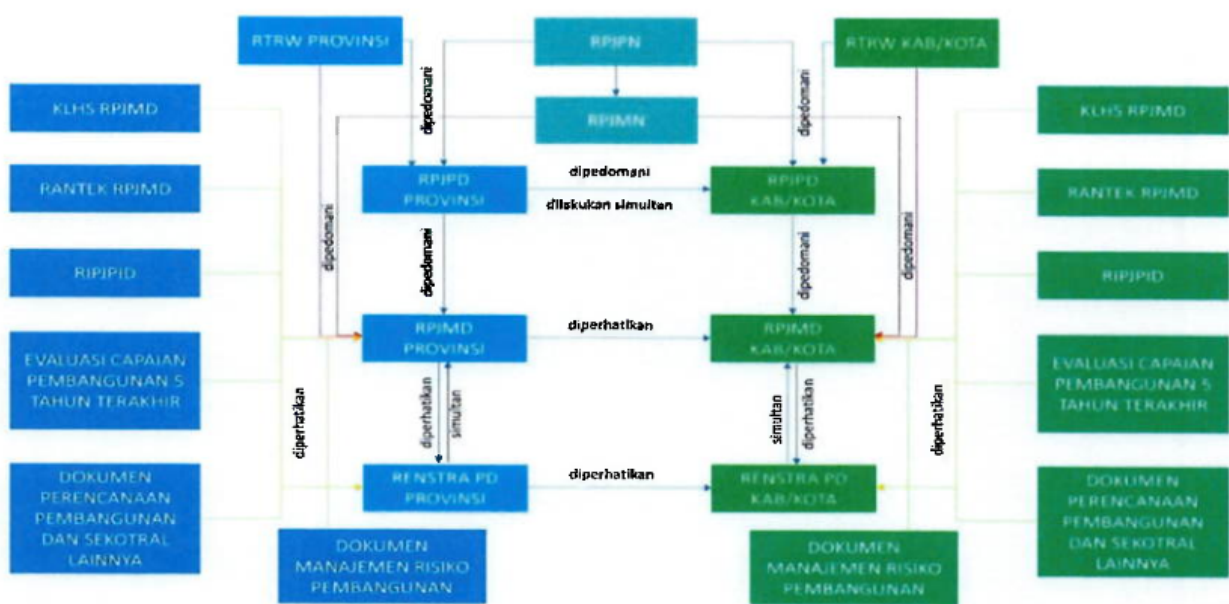
Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Bali dan RPJP Nasional. Selain itu, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana juga memperhatikan RPJMD Provinsi Bali yang berpedoman pada RPJM Nasional. Dokumen RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043 sebagai acuan dalam perencanaan berbasis keruangan, sehingga kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 selaras dengan arah pengembangan tata ruang yang telah ditetapkan.

Aspek keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan turut diperkuat melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, yang mencakup isu strategis, arah kebijakan, serta program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dokumen RPJMD juga mengintegrasikan berbagai

perencanaan sektoral lainnya guna memastikan sinergi antarprogram pembangunan.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif guna mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana.

Berikut ini keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat pusat maupun provinsi.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029

Di samping itu, penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam pengembangan Bali era baru melalui 3 dimensi utama pembangunan yang terintegrasi dan holistik. Ketiga dimensi tersebut adalah:

1. **Dimensi Adat, Agama, dan Tradisi Bali:** Dimensi ini menekankan pada penguatan dan pelestarian nilai-nilai luhur adat, agama Hindu, dan tradisi Bali sebagai fondasi utama pembangunan. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk:
 - o Memperkuat praktik dan pemahaman ajaran agama Hindu.

- Melestarikan dan mengembangkan seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
 - Memperkokoh desa adat (desa pakraman) sebagai unit sosial dan budaya.
 - Menjaga kesucian alam Bali yang diyakini memiliki nilai spiritual.
2. **Dimensi Sosial-Budaya:** Dimensi ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali secara menyeluruh, dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya. Ini meliputi upaya-upaya untuk:
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
 - Memperkuat kerukunan dan harmoni sosial.
 - Memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial.
 - Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
 - Melestarikan warisan budaya dan sejarah Bali.
3. **Dimensi Ekonomi:** Dimensi ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Bali yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Ini mencakup upaya-upaya untuk:
- Mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - Mendorong diversifikasi ekonomi di luar pariwisata (seperti pertanian, perikanan, industri kreatif).
 - Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
 - Menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - Mendorong inovasi dan kewirausahaan.

Dengan berpedoman pada ketiga dimensi utama ini, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menyusun program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi pembangunan Bali secara keseluruhan, yaitu mewujudkan Bali Era Baru yang *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan dan pedoman perangkat daerah serta *stakeholder* lainnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen RPJMD ini sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, tujuan dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. memberikan arah dan pedoman bagi pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih periode 2025-2030;
2. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta Rencana Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jembrana;
3. sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Jembrana agar terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029 terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi daerah memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum.

Gambaran keuangan daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan (tahun 2025 hingga tahun 2029) yang disusun berdasarkan

kinerja keuangan periode sebelumnya, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis, yang bersumber dari perangkat daerah yang mengampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah dengan memperhatikan isu di tingkat global, nasional, dan regional. Rumusan permasalahan merupakan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia, dirumuskan dari gambaran umum kondisi daerah dan Laporan KLHS RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029 maupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sementara itu, isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber seperti RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029, maupun hasil penjangkaran aspirasi.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat visi dan misi Bupati Jembrana yang diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah memuat uraian strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta program pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi program perangkat daerah yang memuat rumusan program perangkat daerah sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memuat rumusan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan

target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah, serta memuat pedoman transisi RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah disusun berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan dari pendekatan empat aspek pembangunan. Empat aspek tersebut meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Keempat aspek tersebut dianalisis secara deskriptif dan diagnostik.

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis dan demografi daerah. Analisis tersebut dilakukan secara antarwaktu dan antarwilayah. Dari hal ini, didapatkan fakta dan masalah yang perlu diselesaikan.

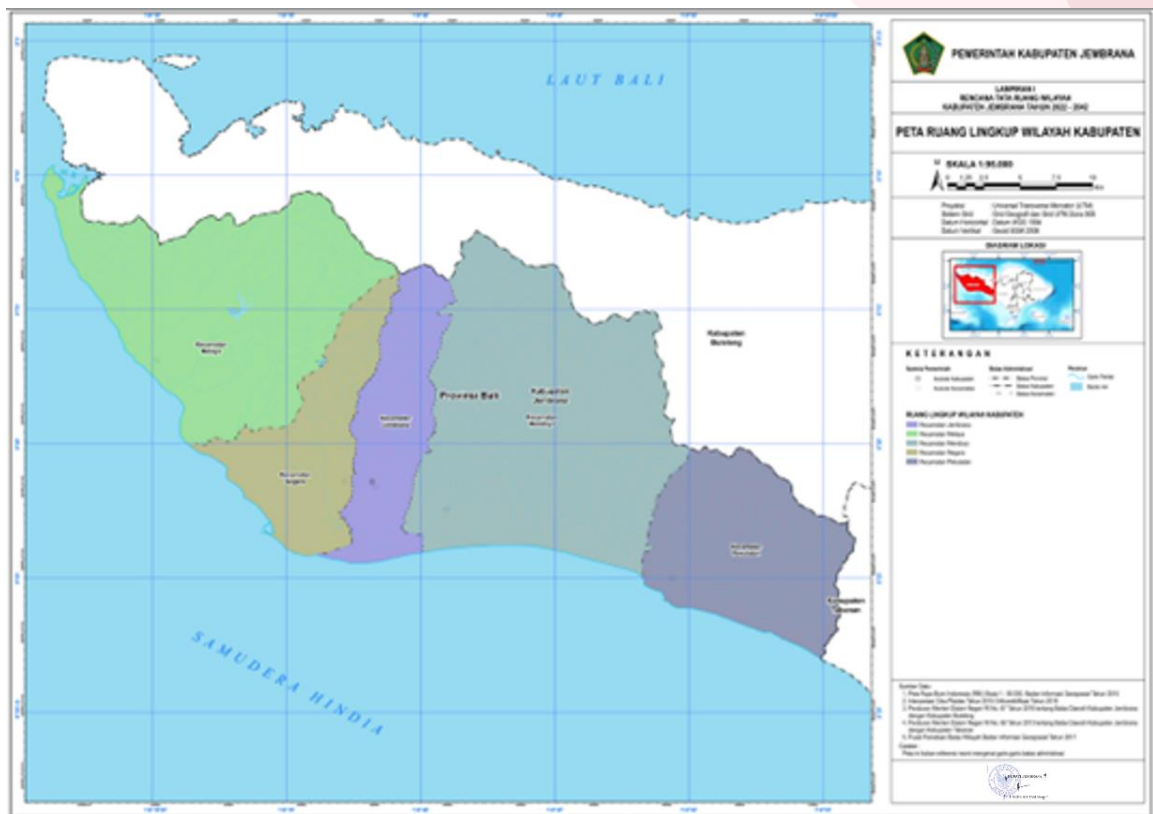
2.1.1.1. POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

A. Karakteristik Lokasi

Kabupaten Jembrana merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara astronomis, Kabupaten Jembrana berada di antara 8°09'30" - 8°28'02" Lintang Selatan dan 114°26'28" - 115°51'28" Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Jembrana berada di ujung Barat Pulau Bali dan menjadi pintu gerbang Provinsi Bali. Hal ini berarti Kabupaten Jembrana berperan sebagai penghubung antara kota-kota di Pulau Jawa dengan Kepulauan Sunda Kecil. Luas Kabupaten Jembrana mencapai 849,13 km² (15,19% dari luas Provinsi Bali). Kabupaten Jembrana dibagi menjadi 5 kecamatan, 41 desa, 10 kelurahan, 263 banjar dinas, dan 64 desa adat dengan batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tabanan
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Selat Bali

Kabupaten Jembrana memiliki kondisi geografis yang beragam. Kabupaten Jembrana memiliki tiga pulau kecil di barat Pulau Bali, yaitu Pulau Kalong, Pulau Burung, dan Pulau Gadung. Selain itu, Kabupaten Jembrana memiliki pesisir di sisi Selatan dan Barat serta pegunungan di sisi Utara yang memanjang dari Barat ke Timur. Beberapa gunung di Kabupaten Jembrana, seperti Gunung Merbuk (1.394 meter), Gunung Pakukajang (1.288 meter), Gunung Bangul (1.283 meter), dan Gunung Mesehe (1.210 meter). Peta Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Jemberana

Sumber: RTRW Kabupaten Jemberana Tahun 2023–2043

1. Topografi

Wilayah bagian Utara Kabupaten Jemberana dibentuk oleh deretan Pegunungan Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang, dan Gunung Batas dengan ketinggian berkisar 250–750 meter. Sementara itu, bagian Selatan Kabupaten Jemberana memiliki topografi yang relatif datar hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0–250 meter. Topografi Kabupaten Jemberana dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- datar (kemiringan 0–2%) yang tersebar terutama di Kecamatan Jemberana dan Kecamatan Negara dengan luas 22.063,50 hektar (2,43%);
- landai (kemiringan 2–15%) dengan luas 34.671,45 hektar (40,80%);
- bergelombang/berbukit (kemiringan 15–40%) dengan luas 35.628,39 hektar (41,93%); dan
- curam (kemiringan lebih dari 40%) dengan luas 12.609,75 hektar (14,84%).

2. Geologi

Kabupaten Jemberana memiliki lima jenis formasi batuan, yaitu Formasi Gamping Agung, Formasi Batuan Gunung Api Jemberana, Formasi Palasari, Formasi Aluvium, dan Aluvium Formasi Sorga. Batuan gunung api yang membentuk wilayah Kabupaten Jemberana berupa lava, breksi, dan tufa yang berumur kuartar kawah. Wilayah datar yang sebagiannya berupa

persawahan terbentuk dari gabungan batu pasir, konglomerat, dan batu gamping terumbu berumur kuartar (Formasi Palasari). Wilayah pesisir terbentuk dari endapan aluvium, yaitu pasir, lanau, lempung, dan kerikil yang dijumpai di Pengambangan, Tegal Badeng, Perancak, Yeh Kuning, Mendoyo, dan Pantai Gilimanuk.

Kabupaten Jembrana memiliki 17 gunung, termasuk gunung nonaktif. Kecamatan Melaya memiliki gunung terbanyak sehingga topografinya berbukit. Gunung tertinggi di Kabupaten Jembrana adalah Gunung Merbuk (1.386 meter) di Kecamatan Jembrana yang disusul Gunung Mesehe (1.300 meter) di Kecamatan Mendoyo, Gunung Bangul (1.253 meter) di Kecamatan Negara, dan Gunung Lesung (1.047 meter) di Kecamatan Mendoyo.

Kabupaten Jembrana memiliki lima jenis tanah, yaitu

- a. tanah latosol coklat dan litosol (inseptisol) yang terbentuk dari abu vulkanik intermediat dengan kandungan bahan organik yang rendah hingga sedang dan pH 4,5–5,5 serta tersebar di Kecamatan Mendoyo (25.985 hektar), Kecamatan Melaya (16.319 hektar), Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (14.130 hektar), dan Kecamatan Pekutatan (12.169 hektar);
- b. tanah aluvial coklat kelabu yang terbentuk dari endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 hektar, sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 hektar);
- c. tanah aluvial coklat kelabu yang terbentuk dari batu gamping dengan morfologi bergelombang hingga berbukit, dominan di Kecamatan Melaya (1.878 hektar);
- d. tanah regosol coklat kelabu yang terbentuk dari abu vulkanik intermediat dengan morfologi landai hingga bergelombang, sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara, Kecamatan Jembrana (772 hektar), dan Kecamatan Mendoyo (648 hektar); dan
- e. tanah aluvial hidromorf (sedimen darat dan laut) yang terbentuk dari lempeng pasir dan pecahan karang terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya sepanjang pantai selatan dan sekitar Desa Pengambangan dan Desa Cupel dengan luas kurang lebih 1.420 hektar.

Masing-masing jenis tanah di Kabupaten Jembrana memiliki tekstur yang berbeda. Umumnya tanah di Kabupaten Jembrana bertekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Sementara itu, tanah bertekstur kasar (pasir dan lempung berpasir) terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Jembrana.

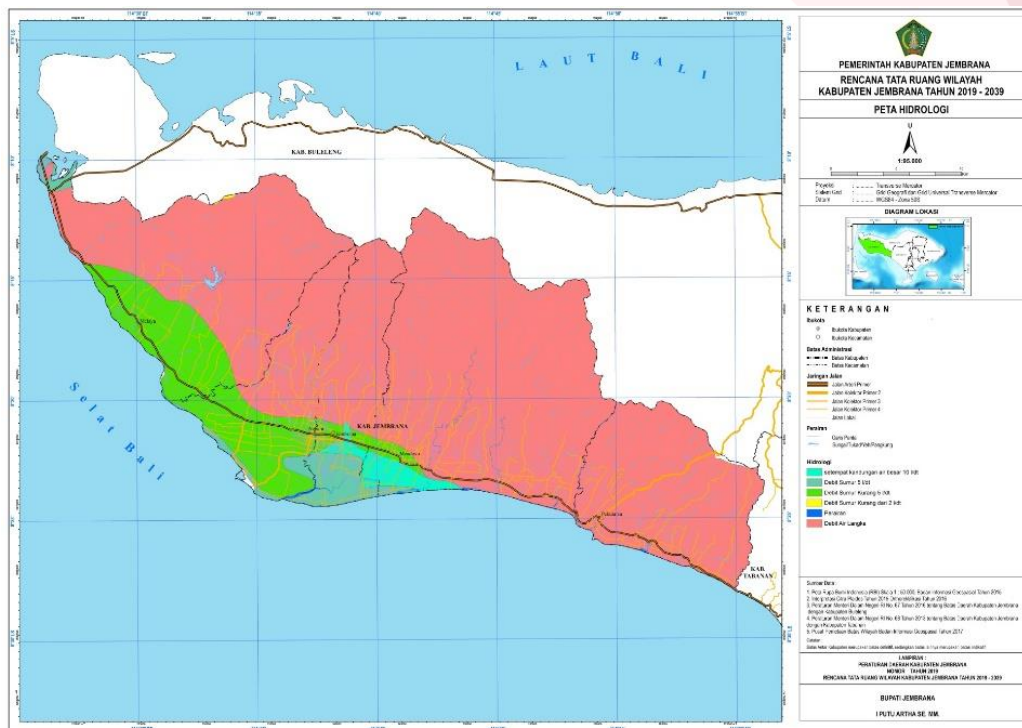
3. Hidrologi

Kabupaten Jembrana memiliki 44 sungai, 75 *pangkung*, 4 *tukad*, dan 2 *telabah* yang mengalir dari utara ke selatan yang masing-masingnya memiliki kawasan tangkapan hujan (*catchment area*) tertentu. Sungai terpanjang di Kabupaten Jembrana adalah Sungai Yeh Sumbul (70,90 km), sedangkan sungai terpendeknya adalah Sungai Perahu Mati (1,00 km). Sebaran sumber air di Kabupaten Jembrana terdiri dari:

- a. air permukaan (sungai, *pangkung*, *tukad*, *telabah*, dan Bendungan Palasari);
- b. air tanah (air yang bersumber dari bawah tanah); dan
- c. mata air (terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 liter/detik).

Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai di Kabupaten Jembrana dibagi menjadi dua. Pertama, sungai di bagian barat Kabupaten Jembrana (barat *Tukad Melaya*) yang hanya mengalir pada musim hujan karena rendahnya curah hujan dan kondisi tanah yang terbentuk dari batu gamping. Kedua, sungai yang mengalir sepanjang tahun (debit air pada musim kemarau relatif kecil), yaitu sungai di antara *Tukad Klatakan* (barat) dengan *Tukad Pulukan* (timur). Berdasarkan peta hidrogeologi Kabupaten Jembrana dari Subdirektorat Pendayagunaan Air Tanah Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (1986), kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

- a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antarbutir (*aquifers in which flow is intergranular*) yang terdiri dari (1) akuifer produktif dengan penyebaran luas, yaitu memiliki keterusan sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah, dan debit sumur umumnya 5–10 liter/detik; (2) akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, yaitu memiliki keterusan sedang hingga rendah, muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah hingga lebih dalam dari 10 meter di bawah tanah, dan debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik; dan (3) akuifer setempat dengan produktivitas sedang, yaitu akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, dan debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik.
- b. Akuifer (*fissured* atau *product*) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka yang terdiri dari (1) akuifer dengan produktivitas rendah setempat, yaitu umumnya memiliki keterusan sangat rendah, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas, dan dapat diperoleh di lembah atau zona pelapukan; dan (2) daerah air tanah langka.

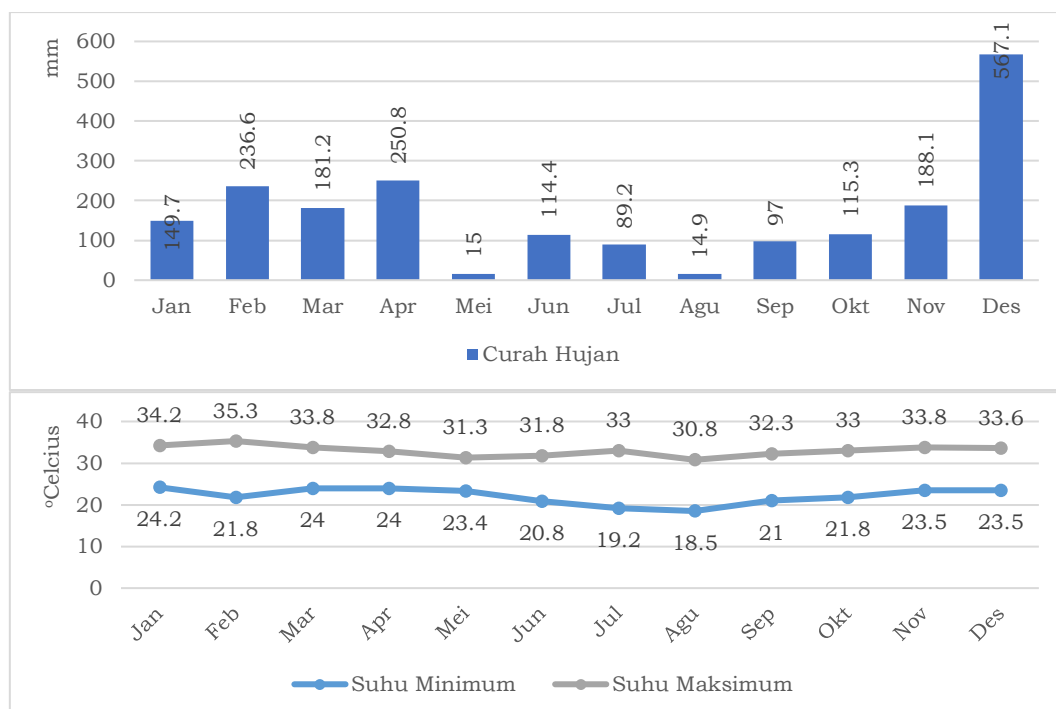


Gambar 2.2 Peta Hidrologi Kabupaten Jembrana

Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043

4. Klimatologi

Kabupaten Jembrana memiliki iklim tropis berpola monsunial dengan pergantian musim yang jelas seperti pada gambar di bawah. Suhu rata-rata di Kabupaten Jembrana berkisar 26,30–29,50°C pada tahun 2024. Kelembapan udara rata-rata di Kabupaten Jembrana berkisar 75,80–82,20% pada tahun yang sama.



Gambar 2.3 Curah Hujan dan Suhu Udara di Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2025

5. Penggunaan Lahan

Kabupaten Jembrana memiliki sebelas jenis guna lahan. Guna lahan terluasnya adalah hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi (39.778,40 hektar), sedangkan guna lahan tersempitnya adalah pelabuhan (38,62 hektar). Selain itu, Kabupaten Jembrana masih memiliki banyak lahan kosong (semak belukar).

Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana tergolong sebagai kawasan perkotaan. Buktinya dapat dilihat dari luasnya guna lahan bangunan permukiman kota meskipun guna lahan pertanian masih banyak ditemui di kedua kecamatan tersebut. Berbeda dengan keduanya, guna lahan di Kecamatan Melaya dan Kecamatan Mendoyo didominasi oleh hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi dan semak belukar. Guna lahan hutan di Kecamatan Pekutatan pun masih dominan.

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
1.	Bangunan permukiman desa	4.381,36
2.	Bangunan permukiman kota	830,36
3.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	1.939,39
4.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	39.778,40
5.	Hutan lahan tinggi sekunder kepadatan sedang	378,04
6.	Kebun campuran	7.561,73
7.	Pelabuhan	38,62
8.	Sawah dengan padi sepanjang tahun	8.979,88
9.	Semak belukar	20.752,26
10.	Sungai permanen	248,21
11.	Waduk multiguna	93,91

Sumber: Hasil digitasi citra Plaides 2015 orthorektifikasi 2016 dan hasil survei lapangan tahun 2018 dalam Laporan Fakta dan Analisis RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023–2043

Tabel 2.2 Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana

No.	Rencana Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
1.	Badan air	553,00
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	35.394,08
3.	Kawasan perlindungan setempat	7,00
4.	Kawasan konservasi	4.431,18
5.	Badan jalan	247,00
6.	Kawasan hutan produksi	2.384,47
7.	Kawasan pertanian	24.521,00
8.	Kawasan perikanan	461,00
9.	Kawasan pertambangan dan energi	3,00
10.	Kawasan pariwisata	3.756,00
11.	Kawasan peruntukan industri	1.762,00
12.	Kawasan permukiman	11.317,00
13.	Kawasan transportasi	36,00
14.	Kawasan pertahanan dan keamanan	7,00

Sumber: RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023–2043

Kabupaten Jembrana masih memiliki kawasan lindung yang luas. Kawasan lindungnya direncanakan seluas 40.385,26 hektar, sedangkan kawasan budidayanya seluas 44.494,47 hektar. Sebagian besar kawasan budidaya tersebut diperuntukkan sebagai kawasan pertanian, permukiman, dan pariwisata.

6. Kawasan Hutan

Kabupaten Jembrana didominasi oleh kawasan hutan lindung seluas 35.092,43 Ha atau sebesar 41,34% dari total luas wilayahnya. Kawasan hutan lindung tersebar pada bagian utara Kabupaten Jembrana yang merupakan zona perbukitan dan pegunungan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng. Selain hutan lindung, terdapat pula kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Kawasan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif berbasis hasil hutan kayu maupun non kayu. Di samping itu, terdapat pula kawasan taman nasional, yaitu Taman Nasional Bali Barat (4.298,54 Ha) dan Taman Nasional Perairan (767,07 Ha) yang terletak di bagian barat laut Jembrana, dengan konsentrasi utama di Kecamatan Melaya.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Jembrana yang didominasi oleh kawasan hutan menjadikannya memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan di Bali, terutama dalam mendukung keberlanjutan fungsi ekologis. Berdasarkan rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN), Kabupaten Jembrana difokuskan sebagai bagian dari sistem perlindungan kawasan hutan yang mencakup fungsi lindung dan produksi terbatas. Berdasarkan klasifikasi RKTN, kawasan hutan Jembrana didominasi oleh Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam yang terletak di utara, membentang secara kontinu dari Kecamatan Melaya hingga Pekutatan. Selain itu, terdapat Kawasan untuk Konservasi yang terkonsentrasi di barat laut Jembrana serta terdapat Kawasan Prioritas Rehabilitasi yang tersebar di bagian paling selatan dan timur dari kawasan hutan Jembrana.

Dalam konteks kebijakan nasional, wilayah Jembrana termasuk dalam cakupan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB). PIPIB merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan moratorium izin baru pada kawasan hutan primer dan lahan gambut. Berdasarkan instrumen tersebut, kawasan hutan Jembrana termasuk dalam kawasan yang dihentikan sementara pemberian izin barunya sebagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan primer dan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kecamatan yang memiliki cakupan wilayah penghentian izin baru terluas adalah Kecamatan Melaya, yang wilayah hutannya memanjang dari barat laut hingga ke bagian tengah kabupaten.

Kebijakan PIPIB ini juga mendukung pencapaian target *FOLU Net Sink* 2030, yaitu kondisi ketika sektor kehutanan dan lahan (*Forestry and Other Land Use/FOLU*) mampu menyerap emisi gas rumah kaca lebih besar daripada yang dilepaskan. Melalui penghentian pemberian izin baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, PIPIB secara langsung berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan—dua sumber utama emisi dari sektor lahan di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya implementasi target *FOLU Net Sink* di tingkat daerah, telah ditetapkan

lima kategori kegiatan mitigasi di Kabupaten Jembrana, yaitu RO 1 (Pencegahan Deforestasi Lahan Mineral), RO 11 (Peningkatan Areal Konservasi Tinggi), RO 12 (Pengelolaan Mangrove), RO 7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi), dan RO 8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi). Dari seluruh kategori tersebut, area mitigasi paling luas didominasi oleh RO 1 yang tersebar secara masif di wilayah bagian utara Jembrana, melintasi kecamatan Melaya hingga Pekutatan. RO 8 dan RO 7 tersebar lebih terbatas di sebelah selatan dan timur, sedangkan RO 12 lebih terkonsentrasi di wilayah pesisir barat dekat Melaya.

B. Peran Strategis Daerah

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terletak di ujung barat Pulau Bali. Wilayah ini memiliki peran strategis dalam konteks regional maupun nasional sebagai pintu gerbang utama keluar-masuk Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Keberadaan pelabuhan ini menjadikan Jembrana sebagai jalur penghubung vital antara Pulau Jawa dan Bali, serta simpul utama mobilitas barang, jasa, dan manusia antara dua pulau tersebut. Peran ini semakin diperkuat dengan rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Jalan tol ini tidak hanya akan mempercepat akses dan konektivitas dari Bali Barat ke kawasan ekonomi utama di Bali Selatan, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Jembrana. Selain itu, pengembangan kawasan industri Pengambangan yang tengah didorong di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kecamatan Negara, dirancang dapat mendukung sektor perikanan dan mewujudkan ekonomi biru. Di sisi lain, posisi Jembrana yang strategis sebagai jalur lintas Pulau Jawa dan Bali membuka peluang besar bagi pengembangan pariwisata transit, khususnya bagi wisatawan yang melintasi wilayah ini menuju destinasi wisata utama di Bali. Sinergi pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan ini menempatkan Jembrana sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di Bali yang berpotensi menghasilkan *backwash* dan *trickling down effect* ke wilayah sekitarnya. Dengan tata kelola yang baik, Jembrana diharapkan mampu memperkuat perannya dalam mendukung konektivitas, pengembangan industri, dan pengembangan pariwisata nasional.

2.1.1.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Berdasarkan kontribusi ekonomi, serapan tenaga kerja, dan penggunaan lahannya, potensi utama Kabupaten Jembrana adalah sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Pertumbuhan sektor tersebut didorong oleh posisi yang strategis dan kemudahan akses dengan adanya jalan nasional di lintas selatan Pulau Bali. Dengan besarnya potensi

pengembangan yang dimilikinya, Kabupaten Jembrana berupaya menjadi pusat pengembangan Bali bagian barat dengan strategi

- a. memantapkan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Pulau Bali bagian barat sekaligus ibu kota Kabupaten Jembrana yang terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Singaraja;
- b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah melalui keterpaduan fungsi pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, pusat kegiatan pariwisata, kawasan industri, pelabuhan, kawasan agropolitan, dan kawasan minapolitan serta integrasinya dengan Kawasan Perkotaan Negara dan kawasan perdesaan;
- c. memantapkan wilayah sebagai pusat kegiatan industri skala nasional berbasis pemanfaatan hasil pertanian dan sumber daya pesisir dan kelautan;
- d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan khusus berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; dan
- e. meningkatkan aksesibilitas; mengembangkan dan memelihara keterkaitan antarkawasan perkotaan di dalam wilayah dan antarwilayah, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan khusus dan kawasan perdesaan, dan antara kawasan perkotaan dengan wilayah di sekitarnya.

2.1.1.3. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

A. Daya Dukung Lahan

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, Kabupaten Jembrana masih terdapat keseimbangan antara wilayah yang telah melampaui daya dukung lahan (55,72% atau 47.298,27 Ha) dengan wilayah yang belum terlampaui (44,28% atau 37.582,73 Ha). Wilayah yang belum terlampaui daya dukung umumnya tersebar di wilayah pesisir selatan hingga sebagian besar Kecamatan Pekutatan, sedangkan wilayah yang telah melampaui daya dukung terkonsentrasi pada wilayah tengah hingga sisi utara. Kecamatan Pekutatan merupakan kecamatan terbesar dengan total wilayah yang belum terlampaui yakni sebesar 89,99%. Wilayah dengan daya dukung terlampaui paling besar berada di Kecamatan Negara yakni mencapai 80,10%.

B. Status Air

Pada tahun 2023, wilayah Kabupaten Jembrana didominasi oleh wilayah yang belum melampaui status air, yakni mencapai 74,12% atau 62.913,36 Ha. Kondisi tersebut menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. Namun, sebagian wilayah di sisi selatan Kabupaten Jembrana telah melampaui status air yang disebabkan adanya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Hasil prediksi tahun 2030 menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh wilayah yang belum melampaui status air yakni 60.350,58 Ha atau 71,16%. Wilayah yang telah melampaui diproyeksikan mengalami peningkatan hingga 28.84% dari total wilayah di Kabupaten Jembrana. Kondisi tersebut menyebar di sekitar pusat kegiatan yakni di sisi Selatan wilayah. Selain diukur menggunakan status air, kondisi air di Kabupaten Jembrana juga diukur menggunakan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air. Secara umum kebutuhan air Kabupaten Jembrana mencapai 372.282.541,29 m³ yang mana masih dapat tercukupi dengan ketersediaan air yang mencapai 791.651.270,07 m³. Seiring dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan air pada 2030 diproyeksikan akan meningkat hingga 372,282.541,29 m³. Hal ini masih dapat tercukupi oleh ketersediaan air di Kabupaten Jembrana.

C. Status Pangan

Status pangan merupakan perhitungan kapasitas ketersediaan pangan baik secara matematis maupun spasial. Pada tahun 2023, status pangan dari 92,49% wilayah Kabupaten Jembrana belum terlampaui yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecuali di sekitar perkotaan dan jalan utama. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung pangan di wilayah ini masih mencukupi. Sedangkan pada tahun 2030, status pangan di wilayah yang belum terlampaui mengalami penurunan hingga mencapai 85,90%. Penurunan ini terjadi akibat tumbuhnya perkotaan sehingga meningkatkan jumlah alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun. Selain itu, kebutuhan pangan Kabupaten Jembrana tahun 2023 yang mencapai 242.638.938,00 kalori per tahun masih dapat dipenuhi melalui ketersediaan yang mencapai angka 56.417.165.777,10 kalori per tahun. Sedangkan pada tahun 2030, ketersediaan pangan diproyeksikan akan menurun hingga 55.504.421.376,54 kal/tahun yang mungkin terjadi akibat penurunan lahan pertanian di wilayah ini. Jika dilihat lebih dalam, Kecamatan Jembrana menjadi wilayah dengan kebutuhan pangan tertinggi yang tidak diikuti dengan ketersediaan pangan yang tinggi. Seiring dengan penambahan penduduk dan pertumbuhan wilayah, hal ini menjadi isu yang harus diperhatikan.

D. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

Kondisi jasa ekosistem, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, menunjukkan tingkat keberagaman yang bervariasi. Secara umum, kinerja layanan lingkungan hidup dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti jasa ekosistem penyedia pangan, penyedia air, pengaturan air, dan pengaturan kualitas udara.

1) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Jembrana menunjukkan kondisi yang tidak merata antarkecamatan. Penyumbang kualitas jasa ekosistem penyedia pangan terbesar berada di Kecamatan Mendoyo dari lahan seluas 13.452,71 Ha (kualitas sangat tinggi) dan 8.431,93 Ha (kualitas tinggi). Sementara itu, penyumbang kualitas jasa ekosistem yang rendah berada di Kecamatan Melaya dengan luas 816,87 Ha. Meskipun demikian, dari total 84.881 Ha terdapat 34.579,77 Ha jasa ekosistem berkualitas tinggi dan 33.712,66 Ha jasa ekosistem berkualitas sangat tinggi di Kabupaten Jembrana. Proporsi ini menunjukkan sebagian besar wilayah Kabupaten Jembrana memiliki kapasitas tinggi dalam menyediakan jasa ekosistem pangan.

2) Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Jembrana menunjukkan dominasi kelas sedang dan rendah dengan luas 59.314,92 Ha (sedang) dan 16.030,92 Ha (rendah). Dominasi jasa ekosistem kelas sedang hingga rendah tersebar merata di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Mendoyo dan Melaya atau bagian selatan dengan aktivitas manusia yang tinggi. Sementara itu, kualitas penyediaan air kelas tinggi masih sangat terbatas dan umumnya berada di zona hulu yang bergunung-gunung.

3) Jasa Ekosistem Pengaturan Air

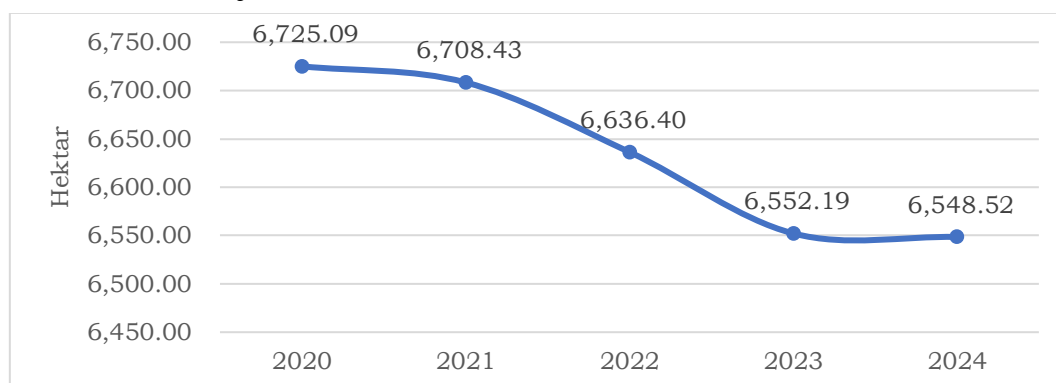
Kondisi jasa ekosistem pengaturan air di Kabupaten Jembrana menunjukkan kualitas yang bervariasi, dengan kelas sangat tinggi dan rendah yang hampir seimbang. Kelas rendah mendominasi seluas 27.529,38 Ha, sedangkan kelas tinggi seluas 21.645,51 Ha. Kualitas jasa ekosistem kelas tinggi menunjukkan adanya dominasi tutupan hijau, terutama di wilayah Mendoyo dan bagian utara Kabupaten Jembrana. Sementara itu, jasa ekosistem dengan kelas rendah mengindikasikan adanya tekanan penggunaan lahan yang lebih insentif, terutama di wilayah dataran rendah dan perkotaan.

4) Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Jasa ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Jembrana menunjukkan kondisi yang bervariasi. Kecamatan Mendoyo memiliki kontribusi paling besar dalam menyumbang nilai jasa ekosistem dengan total 29.731,81 Ha, yang didominasi oleh kategori sangat tinggi dan sedang masing-masing seluas 16.649,85 Ha dan 12.710,20 Ha. Nilai jasa ekosistem ini menunjukkan kualitas udara yang baik di Kecamatan Mendoyo, sejalan dengan adanya tutupan hijau yang mendominasi di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Jembrana dan Negara memiliki kontribusi yang relatif rendah, sejalan dengan tingginya aktivitas perkotaan di wilayah tersebut.

E. Alih Fungsi Lahan Sawah

Luas lahan sawah di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2024. Hal ini dikarenakan maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan infrastruktur pendukungnya serta perubahan komoditas tanam menjadi tanaman perkebunan. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2020, terjadi alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Pekutatan seluas 20 hektar yang disertai pencetakan sawah baru di Kecamatan Melaya seluas 35 hektar.



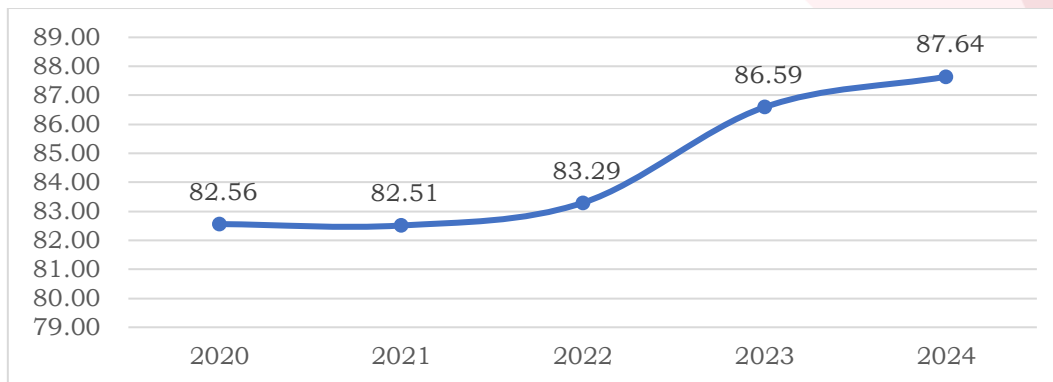
Gambar 2.4 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2025)

2.1.1.4. BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan seperti pada gambar di bawah ini. Apabila melihat komponennya, komponen ketersediaan dan pemanfaatan pangan memiliki nilai lebih rendah dibanding keterjangkauan pangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap ketersediaan dan pemanfaatan pangan di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.5 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pangan Nasional: Indeks Ketahanan Pangan 2020–2024

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada proporsi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat dan aktif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Jembrana mencapai 7,6% pada tahun 2023. Angka ini menempatkan Jembrana di peringkat lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Bali seperti Badung (1,23%), Gianyar (1,66%), Kota Denpasar (1,7%), Tabanan (3,15%), Bangli (3,71%), dan Klungkung (4,94%). Sementara itu, pada tahun 2024, data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Jembrana menunjukkan penurunan di angka 5,68%, lebih rendah dibanding Kabupaten Buleleng (6,66%), namun lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali (3,20%).

C. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

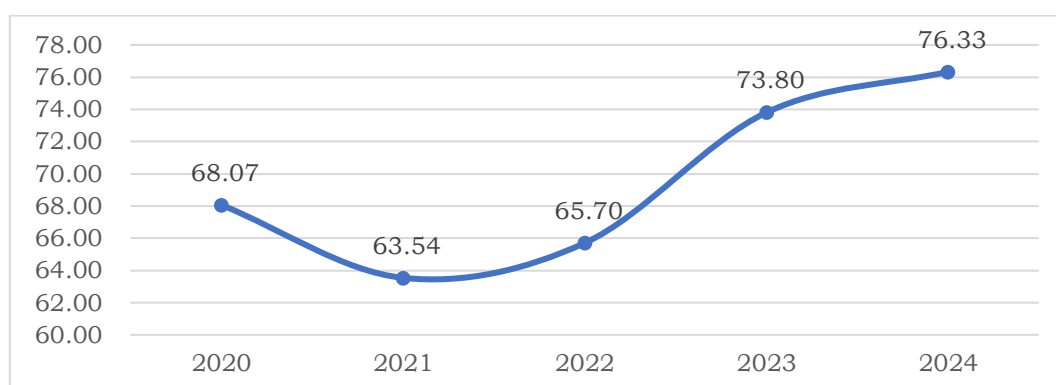
Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Jembrana melibatkan berbagai pihak penyedia layanan, termasuk PERUMDA Tirta Amertha Jati, PAMDES, dan PAMSIMAS. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat Jembrana dilakukan untuk mencapai akses universal dan terjangkau terhadap air minum yang aman, sejalan dengan target global pada tahun 2030. Mengacu pada indikator yang digunakan oleh BPS dan berdasarkan ketersediaan data, indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Data indikator ini untuk Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif dengan beberapa penurunan pada tahun 2021 dan 2023. Akses terhadap sumber air minum layak tumbuh dari 93,82% tahun 2020; lalu menurun menjadi 92,11% tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 97,23%, namun kembali menurun menjadi 96,02% tahun 2023.

Selain faktor geografis, keterbatasan infrastruktur dan jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah yang terpencil atau dengan kepadatan penduduk rendah, masih menjadi tantangan dalam pemenuhan akses air minum layak bagi

masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan air bersih terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, sementara sumber air baku justru menurun kapasitasnya, terutama saat kemarau. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum menetapkan target pencapaian 100% akses air minum layak pada tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, inovasi program, serta peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

2.1.1.5. LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

Lingkungan hidup berkualitas dapat diukur melalui indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup dihitung dari indeks kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Jembrana menunjukkan tren menurun dari tahun 2020 sampai 2021, seperti pada gambar di bawah ini. Meskipun demikian, nilainya meningkat kembali pada tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

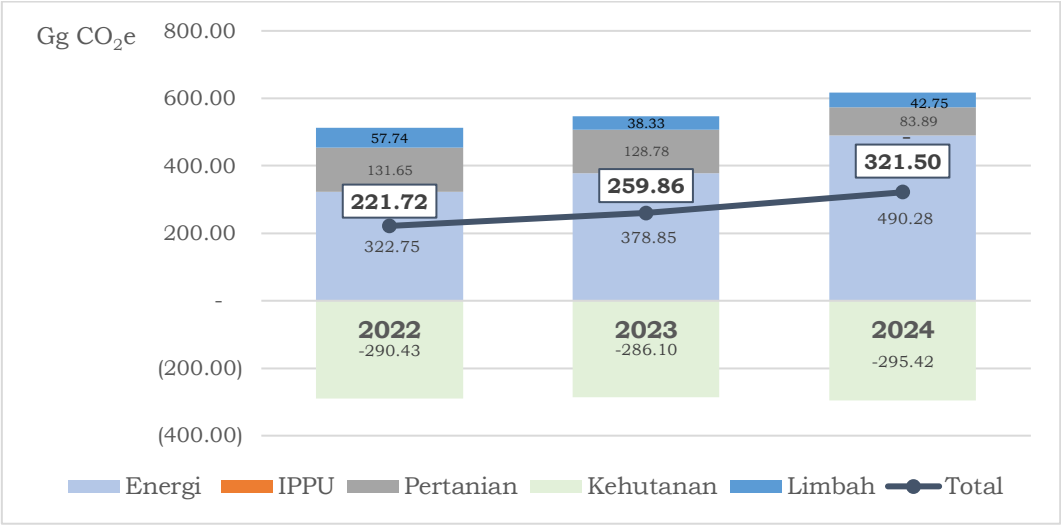
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

2.1.1.6. RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

A. Penurunan Intensitas Emisi GRK

Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas-gas yang menyerap dan memerangkap energi panas di atmosfer dan memicu terjadinya efek rumah kaca, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa jenis GRK meliputi karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan dinitrogen oksida (N_2O). Umumnya, gas tersebut dihasilkan dari lima sektor utama: energi, industri (IPPU), pertanian, kehutanan, dan limbah.

Pada tahun 2022, total emisi Kabupaten Jembrana tercatat sebanyak 221,72 Gg CO₂, meningkat menjadi 259,86 Gg CO₂ di tahun 2023 dan 321,50 Gg CO₂ di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya emisi yang dihasilkan oleh sektor energi, sedangkan kapasitas serapan karbon oleh sektor kehutanan belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut. Grafik emisi GRK dari lima sektor utama di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.7 Emisi GRK Kabupaten Jembrana Tahun 2022-2024

Sumber: <https://signsmart.menlhk.go.id>

Berdasarkan perhitungan emisi GRK, emisi total di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan sebesar 17,21% (2023) dan 23,72% (2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa Jembrana belum berhasil mencapai target penurunan emisi yang ditetapkan Provinsi Bali. Meskipun demikian, berbagai intervensi strategis dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian target provinsi, seperti transisi energi bersih, peningkatan efisiensi energi, rehabilitasi hutan, serta optimalisasi sektor limbah dan pertanian.

B. Indeks Risiko Bencana

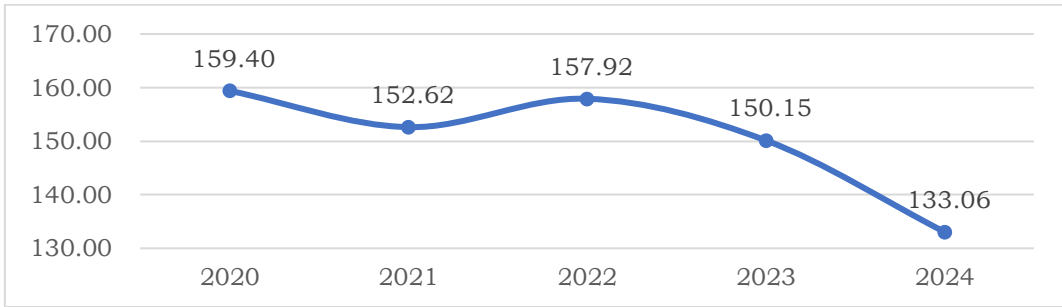
Indeks risiko bencana Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, tingkat kapasitas Kabupaten Jembrana termasuk kategori sedang, meskipun telah menurun pada tahun 2024 dengan nilai 133,06. Hal ini perlu ditingkatkan ke depannya. Terdapat sepuluh potensi bencana di Kabupaten Jembrana yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Jembrana

No.	Potensi Bencana	Lokasi
1.	Banjir	Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang umumnya kering, yang diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain meluapnya air akibat dari curah hujan tinggi. Potensi luas bencana banjir di Kabupaten Jembrana adalah 244,74 km² yang berada pada kelas rendah. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Melaya yaitu seluas 78,88 km², sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Pekutatan yaitu seluas 19,30 km². Wilayah yang dominan masuk dalam kelas tinggi memiliki potensi bahaya banjir, sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah, serta wilayah yang berdekatan dengan sungai. Luapan air sungai pada saat musim hujan merupakan salah indikator yang digunakan untuk mendefinisikan lokasi-lokasi berpotensi terdampak banjir. Salah satu sungai yang sangat berpotensi mengakibatkan banjir berbarengan dengan kondisi air pasang adalah Sungai Perancak, yang di bagian hilir bertemu dengan Tukad Ijo Gading dan Tukad Aya Timur.
2.	Banjir Bandang	Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa material longsor atau runtuhnya bendungan alam, yang dipicu dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Jembrana adalah 86,54 km² yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 30,17 km², sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Negara yaitu seluas 8,75 km².
3.	Cuaca Ekstrem	Cuaca ekstrem adalah fenomena meteorologi yang ekstrem, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa. Potensi luas bahaya cuaca ekstrem di Kabupaten Jembrana adalah 314,58 km² yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Melaya yaitu seluas 115,92 km², sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Pekutatan yaitu seluas 32,8 km².
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gelombang ekstrem adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Potensi luas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Jembrana adalah 7,16 km² yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Melaya yaitu seluas 2,14 km², sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Negara yaitu seluas 0,92 km².
5.	Gempa Bumi	Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan. Potensi luas bahaya gempa bumi di Kabupaten Jembrana adalah 811,88 km² yang berada pada kelas rendah. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 294,94 km², sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Jembrana yaitu seluas 91,29 km². Adanya potensi gempa bumi tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya sesar aktif di Negara termasuk sesar potensi aktif Gilimanuk.

No.	Potensi Bencana	Lokasi
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar potensi bahan yang terbakar (misalnya: pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jembrana adalah 811,25 km ² yang berada pada kelas rendah. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 294,94 km ² , sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Jembrana yaitu seluas 91,09 km ² .
7.	Kekeringan	Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan karena tingkat curah hujan lebih rendah dari curah hujan normal. Potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Jembrana adalah 841,80 km ² yang berada pada kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 294,49 km ² , sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Jembrana yaitu seluas 93,97 km ² .
8.	Tanah Longsor	Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Jembrana adalah 842,35 km ² yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Mendoyo yaitu seluas 294,94 km ² , sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Jembrana yaitu seluas 93,97 km ² .
9.	Tsunami	Tsunami merupakan bencana dengan karakter <i>fast-onset disaster</i> atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Jembrana berpotensi terdampak tsunami. Wilayah yang paling tinggi dampaknya ada di Kecamatan Mendoyo, selain itu yang sangat potensi terdampak juga adalah pesisir Kecamatan Jembrana tepatnya di muara aliran Sungai Perancak. Diketahui bahwa Sungai Perancak memiliki muara sungai yang sangat luas dan berpotensi meningkatkan wilayah disekitarnya terdampak dari adanya potensi tsunami. Hal ini sudah sering terjadi ketika adanya gelombang pasang, maka pasang air laut akan mengalir mengikuti Sungai Perancak dan menggenangi wilayah sekitarnya.
10.	Likuifaksi	Likuifaksi adalah perubahan material yang padat (<i>solid</i>), dalam hal ini berupa endapan sedimen atau tanah sedimen, menjadi seperi cairan (<i>liquid</i>). Potensi luas bahaya likuifaksi di Kabupaten Jembrana adalah 87,76 km ² yang berada pada kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Negara yaitu seluas 36,18 km ² , sementara kecamatan dengan luas bahaya paling rendah adalah Kecamatan Pekutatan yaitu seluas 0 km ² atau tidak memiliki wilayah yang berpotensi terdampak bahaya likuifaksi.

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

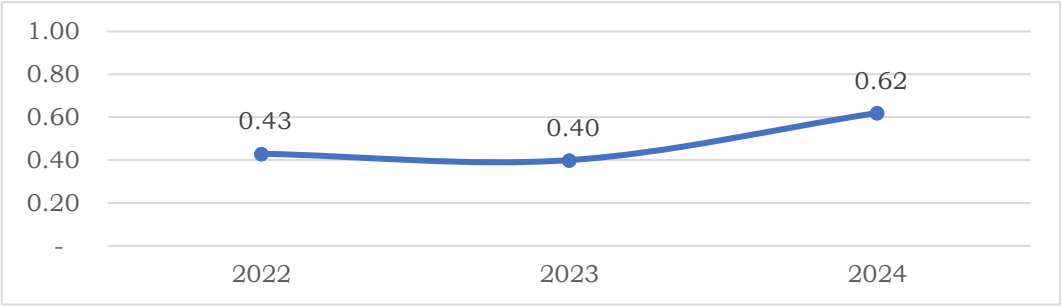


Gambar 2.8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana — inaRISK (2024)

C. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan ukuran kesiapan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana di suatu daerah. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Jembrana cenderung berada dalam kategori sedang, meskipun telah mengalami peningkatan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan ketahanan daerah di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.9 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (2025)

2.1.1.7. ASPEK DEMOGRAFI

Aspek demografi menjelaskan struktur, persebaran, dinamika, dan komposisi penduduk. Kemudian, dilakukan proyeksi penduduk hingga lima tahun ke depan. Hasil proyeksi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

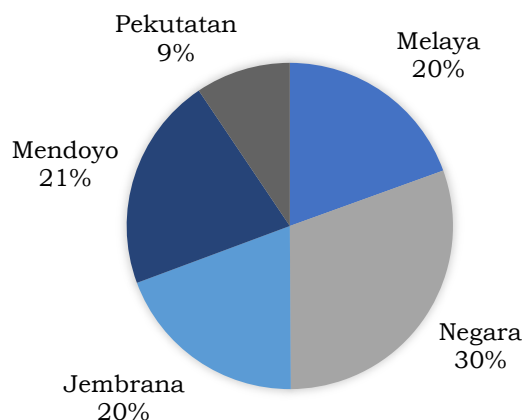
A. Struktur, Persebaran, dan Dinamika Penduduk

Pada tahun 2024, Kabupaten Jembrana memiliki penduduk sejumlah 330.221 jiwa, paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Negara, yaitu 100.451 jiwa (30,42%). Sebaliknya, Kecamatan Pekutatan hanya memiliki 31.123 penduduk (9,42%). Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana terus meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana mencapai 2,09% per tahun dengan laju tertinggi di Kecamatan Negara dan terendah di Kecamatan Pekutatan.

Tabel 2.4 Persebaran Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

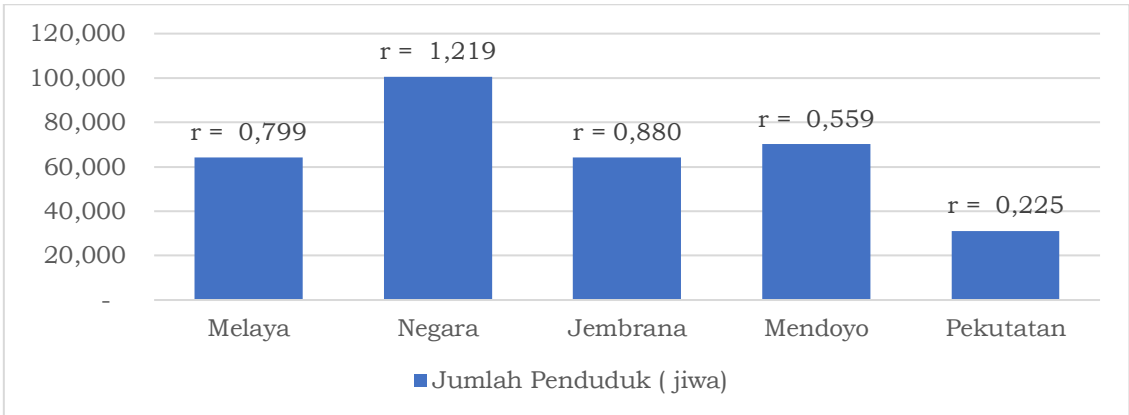
Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Melaya	61,49	62,48	63,67	63,82	64,33
Negara	95,74	97,35	99,29	99,24	100,45
Jembrana	61,81	62,69	63,76	63,61	64,17
Mendoyo	67,54	68,51	69,71	69,76	70,15
Pekutatan	30,48	30,90	31,42	31,05	31,12
Kabupaten Jembrana	317,06	321,93	327,85	327,48	330,22

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024; Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024



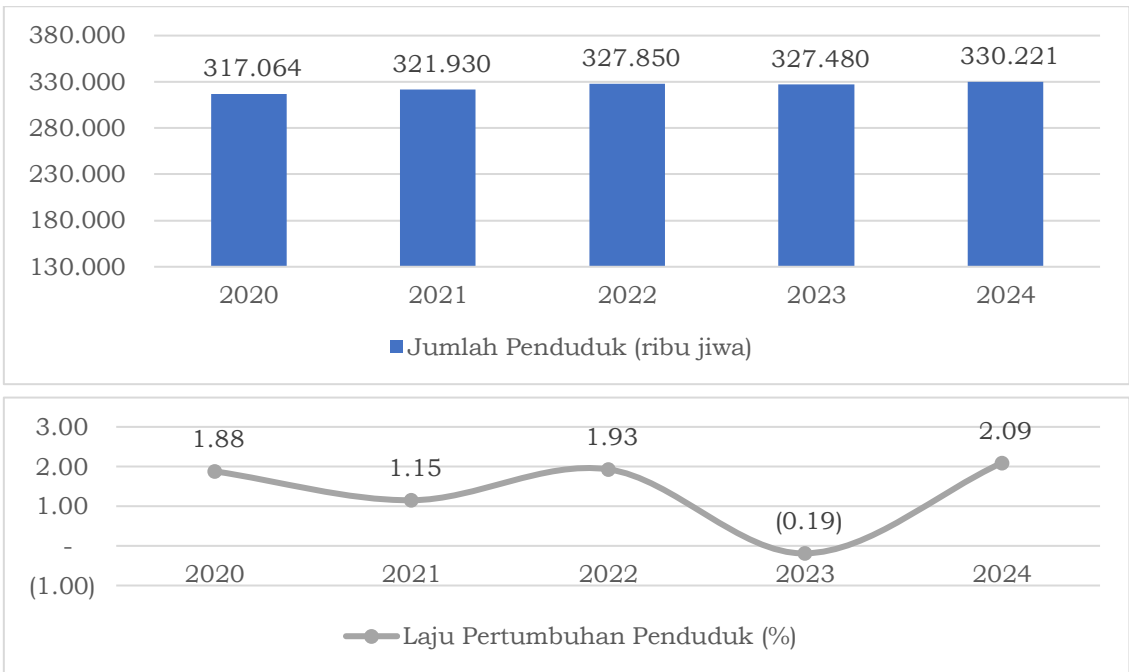
Gambar 2.10 Persebaran Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024



Gambar 2.11 Kondisi Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 2.12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020-2024; Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024

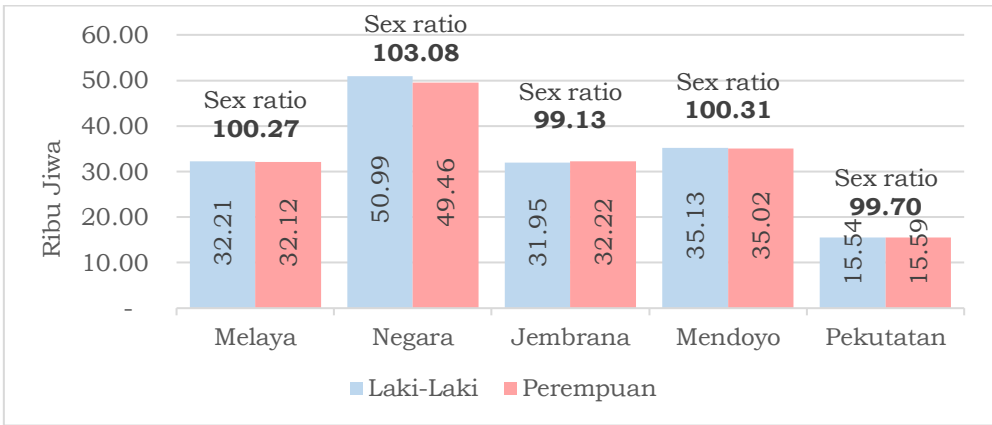
Dengan wilayah seluas 849,13 km², kepadatan penduduk Kabupaten Jembrana sebanyak 389 jiwa/km² pada tahun 2023 dan menurun menjadi 388 jiwa/km² pada tahun 2024. Kecamatan berpenduduk terpadat di Kabupaten Jembrana adalah Kecamatan Negara. Jumlah penduduk di Kecamatan Negara cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2024. Hal ini terjadi seiring dengan pertumbuhan Kecamatan Negara sebagai pusat perkotaan di Kabupaten Jembrana. Sementara itu, kecamatan berpenduduk terjarangnya adalah Kecamatan Mendoyo. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melaya	229,62	311,83	316,85	322,89	323,65	280,16
Negara	97,56	756,84	769,57	784,90	784,51	1.029,63
Jembrana	89,58	657,76	667,13	678,51	676,92	716,33
Mendoyo	297,41	229,35	232,64	236,71	236,88	235,86
Pekutatan	134,96	235,09	238,33	242,34	239,49	230,61
Kabupaten Jembrana	849,13	376,65	382,43	389,46	389,02	388,89

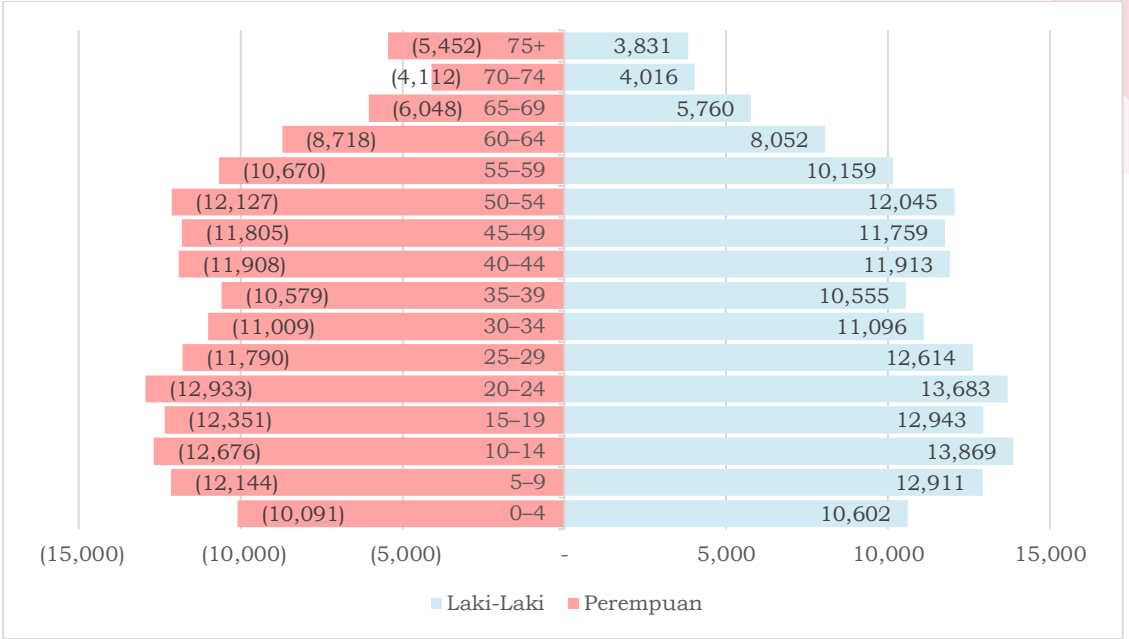
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020-2024; Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024

Struktur penduduk Kabupaten Jembrana diidentifikasi dari sebaran umur dan jenis kelamin. Berdasarkan keduanya, kelompok usia produktif mendominasi penduduk Kabupaten Jembrana pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang per kecamatannya. Melihat kondisi piramida penduduk Kabupaten Jembrana, jumlah kelahiran masih cenderung tinggi meskipun sudah mulai terkontrol. Hal ini dapat diidentifikasi dari bentuk piramida yang tidak lagi ekspansif sempurna.



Gambar 2.13 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024



Gambar 2.14 Piramida Penduduk Kabupaten Jemberana Tahun 2024

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jemberana Semester 2 Tahun 2024

Selain kelahiran dan kematian, migrasi juga memengaruhi dinamika penduduk. Jumlah migrasi keluar di Kabupaten Jemberana relatif lebih tinggi dibanding migrasi masuk. Artinya, pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan penduduk Jemberana relatif lemah. Jumlah migrasi di Kabupaten Jemberana pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

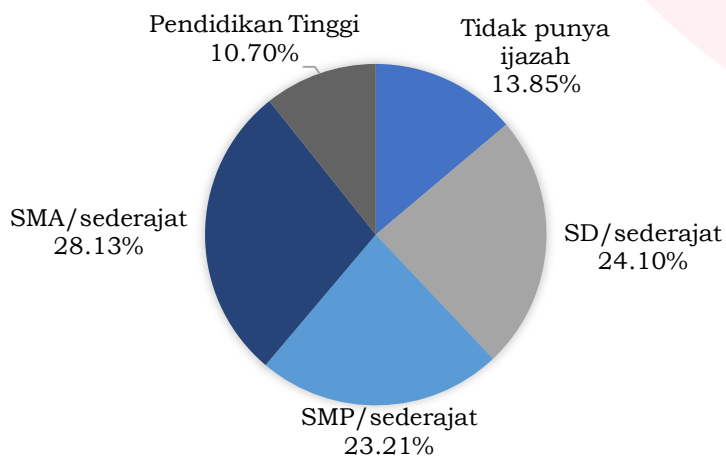
Tabel 2.6 Jumlah Migrasi di Kabupaten Jemberana tahun 2020–2024

Jenis Migrasi	2020	2021	2022	2023	2024
Migrasi masuk	2.159	2.679	2.574	2.421	2.186
Migrasi keluar	2.551	2.877	3.050	3.001	3.137
Migrasi netto	-392	-198	-476	-580	-951

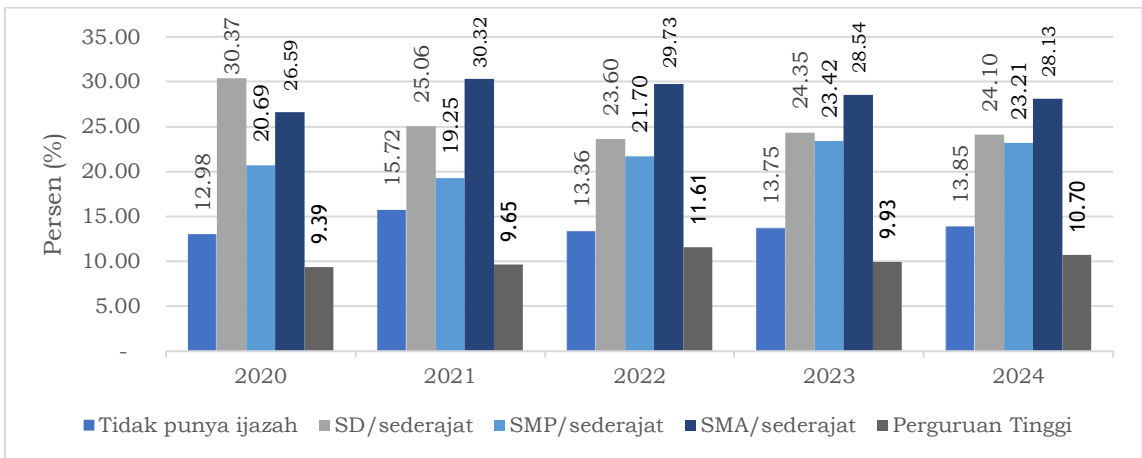
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

B. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan diidentifikasi dari jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan. Pada tahun 2024, sebagian besar (68,98%) penduduk Kabupaten Jemberana telah menamatkan pendidikan, sedangkan sisanya (31,02%) tidak/belum sekolah. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Jemberana pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.15 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2025



Gambar 2.16 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2020-2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Ketidakkonsistenan tren ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, dinamika sosial, serta faktor internal sekolah seperti ketidakihtuluan atau siswa yang tidak naik kelas pada tahun berjalan. Selain itu, faktor eksternal seperti tingginya angka kelahiran turut memengaruhi jumlah penduduk yang belum memiliki ijazah pada periode tersebut.

C. Komposisi Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Komposisi penduduk menurut lapangan usaha berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Komposisi penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.7 Pekerjaan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sektor Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	45.619	49.491	41.374	39.251	39.255
Pertambangan dan penggalian	409	310	-	-	421
Industri pengolahan	31.868	34.619	31.325	37.737	40.980
Pengadaan listrik dan gas	483	483	379	1.456	564
Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	576	424	927	1.434	1.052
Konstruksi	12.538	11.686	11.471	13.419	15.837
Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	30.104	33.614	43.678	51.088	51.087
Transportasi dan pergudangan	2.386	3.613	3.578	5.662	7.031
Penyediaan akomodasi dan makan minum	8.755	9.168	10.588	13.812	13.167
Informasi dan komunikasi	0	244	590	596	701
Jasa keuangan dan asuransi	2.465	3.178	4.441	2.606	2.643
Real estate	-	-	-	180	-
Jasa perusahaan	965	845	1.538	2.971	1.080
Administrasi, pertahanan, dan jaminan sosial	7.365	7.457	5.962	8.156	7.736
Jasa pendidikan	5.821	5.696	8.550	7.647	10.086
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3.698	3.605	2.276	2.741	3.420
Jasa lainnya	5.151	7.327	5.605	9.076	6.548
Jumlah	158.203	171.760	172.282	197.832	201.608

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (2025)

D. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Sebagian besar penduduk Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 beragama Hindu (71%). Komposisi penduduk menurut agama rinci di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.8 Agama yang Dianut Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2024

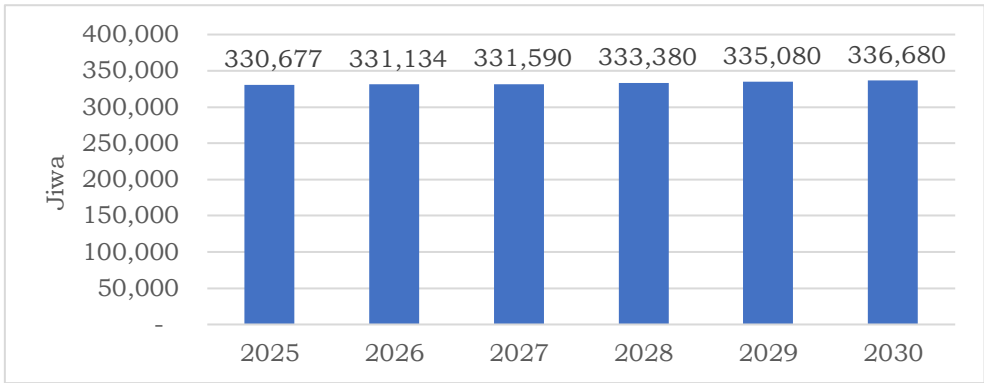
Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Kong Hu Chu	Kepercayaan
Melaya	17.851	2.092	1.295	43.024	67	-	1
Negara	45.792	1.349	732	52.111	451	16	-
Jembrana	13.676	513	361	49.187	429	1	2
Mendoyo	5.412	180	30	64.503	23	-	-
Pekutatan	5.799	62	251	25.006	5	-	-
Kabupaten Jembrana	88.530	4.196	2.669	233.831	975	17	3

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024



E. Proyeksi Penduduk

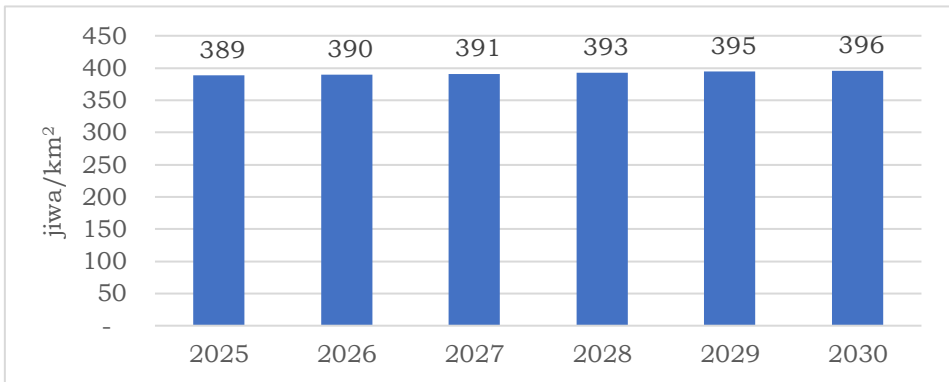
Pada tahun 2030, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana diproyeksikan meningkat menjadi 336.680 jiwa. Hal ini sesuai dengan hasil proyeksi linear sebagaimana tren sebelumnya. Lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah.



Gambar 2.17 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

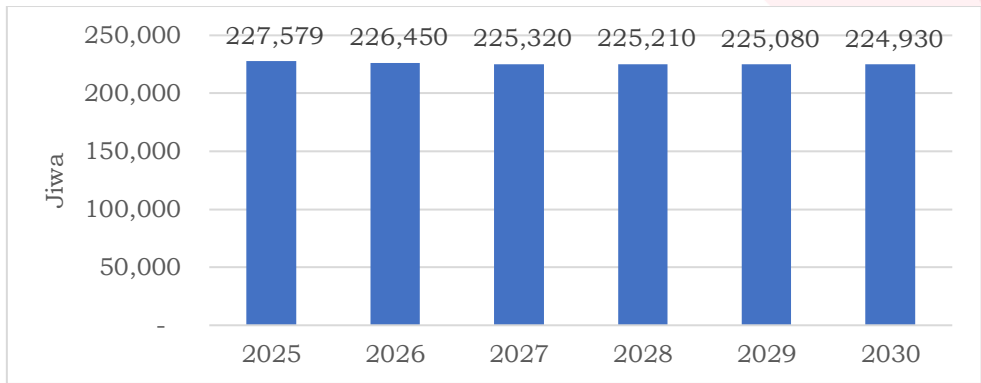
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk pun turut meningkat. Meskipun demikian, peningkatannya tidak begitu signifikan, yaitu masih di bawah 400 jiwa/km². Lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah.



Gambar 2.18 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

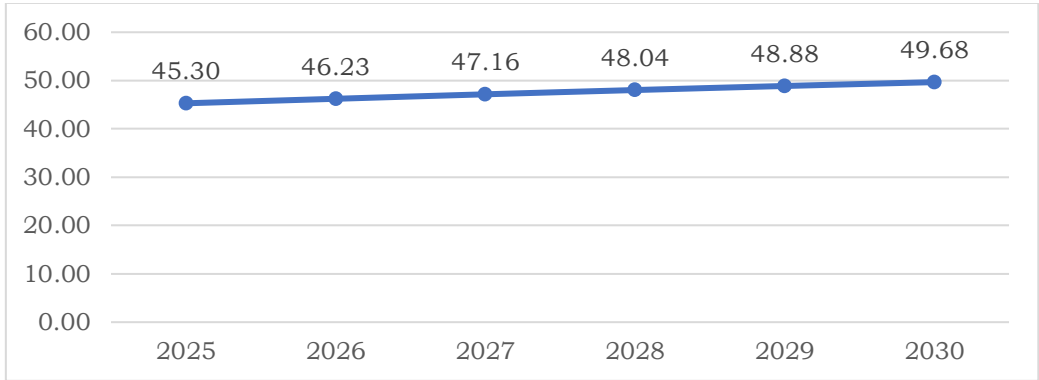
Selama lima tahun ke depan, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Jembrana cenderung menurun. Peningkatannya relatif lebih lambat dibanding jumlah penduduk usia nonproduktif. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat menopang penduduk usia nonproduktif tersebut.



Gambar 2.19 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Jemberana Tahun 2025-2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

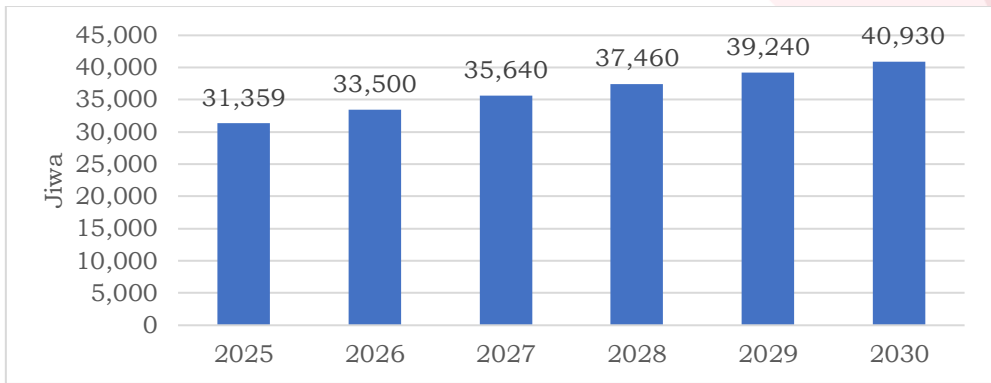
Angka Ketergantungan di Kabupaten Jemberana diproyeksikan mengalami peningkatan di tahun 2025 hingga tahun 2030 yang mengindikasikan semakin meningkatnya pula beban usia produktif di Kabupaten Jemberana.



Gambar 2.20 Proyeksi Angka Ketergantungan di Kabupaten Jemberana Tahun 2025-2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Bonus Demografi diproyeksikan akan terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Jemberana pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Peningkatan jumlah usia produktif harus diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang besar. Oleh sebab itu, hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadinya pengangguran. Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Jemberana diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga tahun 2029 seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Oleh sebab itu, pembangunan daerah kedepannya harus bersifat inklusif, mengingat peningkatan usia rentan yang diproyeksikan akan terjadi.



**Gambar 2.21 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut di Kabupaten Jember
Tahun 2025-2030**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.1.2.ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

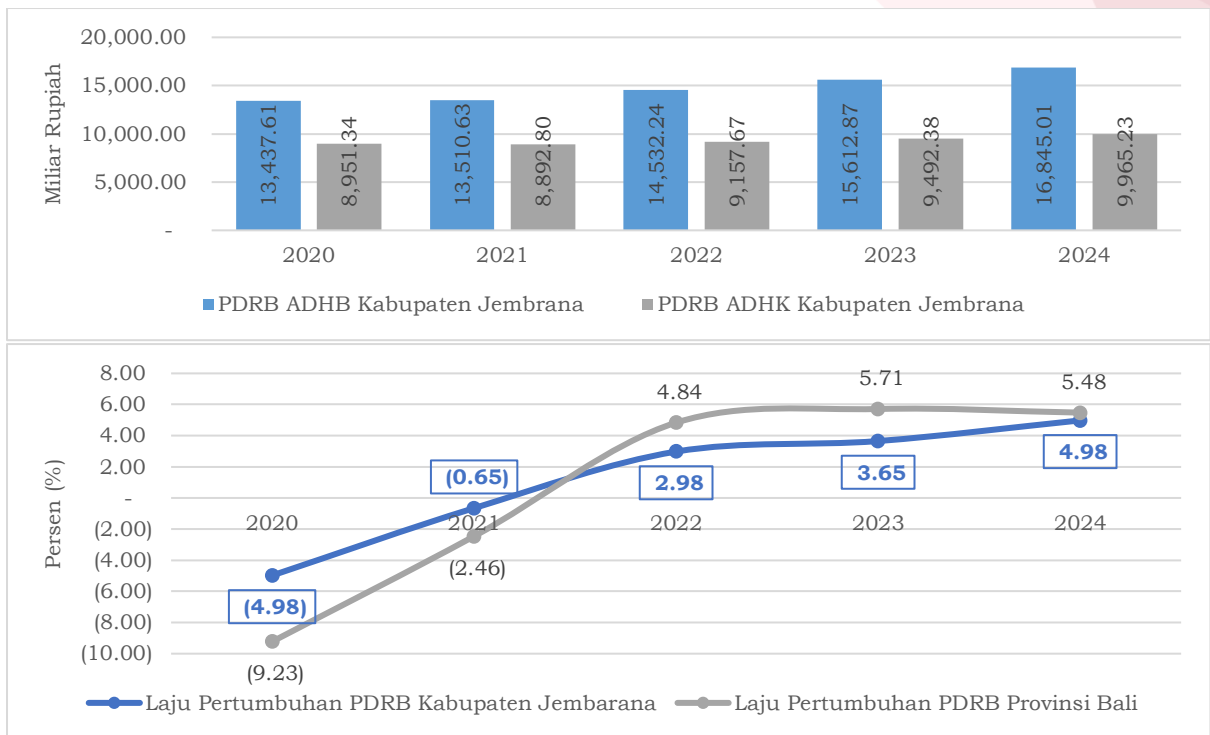
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan taraf hidup masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Penjelasan tersebut didapatkan dari indikator makro pembangunan. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan interpretasi datanya.

2.1.2.1. KESEJAHTERAAN EKONOMI

Kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi menjelaskan taraf hidup masyarakat dari perspektif ekonomi. Berikut penjelasannya.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Jember terus mengalami pertumbuhan, baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) (lebih dari 7,00%) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) (lebih dari 2,90%), kecuali pada tahun 2020–2021 seperti pada gambar di bawah. Meskipun demikian, pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Jember berada di posisi ketiga terbawah di Provinsi Bali. Meskipun mengalami penurunan ketika pandemi, perekonomian Kabupaten Jember segera tumbuh dengan cepat. Bahkan, lebih cepat dibanding Provinsi Bali pada tahun 2021. Hal ini didukung oleh stimulus ekonomi untuk sektor usaha kerakyatan dan gencarnya kegiatan vaksinasi sebagai upaya pencegahan penularan covid-19. Ke depannya, subsektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara efektif sebagai pembangkit ekonomi tambahan di Jember. Pada tahun 2022-2024 terlihat peningkatan laju pertumbuhan secara positif yang meningkat dari 2,98% menjadi 4,98% secara progresif.



Gambar 2.22 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Jembrana. Sektor tersebut diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Meskipun demikian, setelah pandemi Covid-19, sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa keuangan dan asuransi tumbuh dengan cepat. Keempat sektor tersebut menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana pasca pandemi Covid-19.

Tabel 2.9 Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No	Sektor/Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2.930,62	1,78	3.070,58	4,78	3.189,29	3,87	3.383,13	6,08	3.815,64	22,65
2.	Pertambangan dan penggalian	118,37	-4,08	119,32	0,80	123,08	3,15	130,30	5,87	134,83	0,80
3.	Industri pengolahan	695,98	4,36	716,62	2,97	775,28	8,19	826,38	6,59	888,42	5,27
4.	Pengadaan listrik dan gas	19,58	1,14	19,75	0,87	21,39	8,30	23,84	11,45	24,22	0,14
5.	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	11,16	0,45	10,84	-2,87	11,09	2,31	11,36	2,43	11,89	0,07
6.	Konstruksi	1.400,61	-1,20	1.458,17	4,11	1.560,61	7,03	1.590,39	1,91	1.623,41	9,64
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1.338,38	-5,99	1.376,93	2,88	1.515,98	10,10	1.647,70	8,69	1.711,99	10,16
8.	Transportasi dan pergudangan	1.952,10	-12,00	1.832,22	-6,14	1.992,43	8,74	2.281,48	14,51	2.505,12	14,87
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.647,11	-23,29	1.488,19	-9,65	1.725,73	15,96	1.913,85	10,90	2.113,00	12,54
10.	Informasi dan komunikasi	887,84	10,97	932,30	5,01	920,10	-1,31	962,91	4,65	1.006,94	5,98
11.	Jasa keuangan dan asuransi	455,59	-2,52	466,84	2,47	564,16	20,85	642,05	13,81	731,78	4,34
12.	Real estat	631,17	0,34	646,30	2,40	686,32	6,19	711,53	3,67	724,72	4,30
13.	Jasa perusahaan	105,21	-2,93	107,65	2,32	121,41	12,78	131,17	8,04	142,72	0,85
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	391,02	3,24	393,77	0,70	408,83	3,82	407,50	-0,33	426,84	2,53
15.	Jasa pendidikan	324,46	1,03	326,00	0,47	329,30	1,01	326,23	-0,93	337,60	2,00
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	324,6	3,82	346,49	6,74	359,63	3,79	375,56	4,43	386,77	2,30
17.	Jasa lainnya	203,81	-3,90	198,66	-2,53	227,61	14,57	247,49	8,73	259,13	1,54

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2022–2023

Tabel 2.10 Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

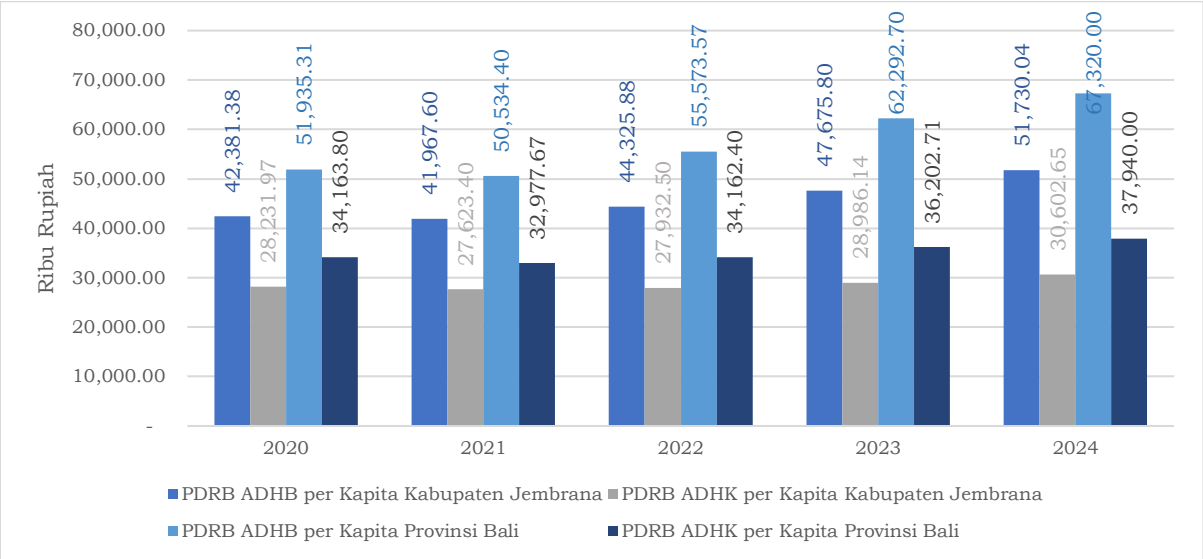
No	Sektor/Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
		Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.825,00	0,70	1.874,90	2,73	1.875,69	0,04	1.905,21	1,57	2.076,37	20,84
2.	Pertambangan dan penggalian	76,40	-4,16	76,53	0,17	76,86	0,43	78,74	2,45	78,82	0,79
3.	Industri pengolahan	457,78	2,54	465,42	1,67	485,45	4,30	498,83	2,76	518,61	5,20
4.	Pengadaan listrik dan gas	10,97	0,18	11,06	0,82	11,80	6,69	12,84	8,81	13,01	0,13
5.	Pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang	8,77	-0,57	8,44	-3,76	8,46	0,24	8,45	-0,12	8,72	0,09
6.	Konstruksi	928,52	-2,74	947,16	2,01	972,18	2,64	974,30	0,22	985,03	9,88
7.	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	933,69	-6,60	941,35	0,82	992,32	5,41	1.042,51	5,06	1.066,39	10,70
8.	Transportasi dan pergudangan	1.222,94	-13,53	1.142,53	-6,58	1.189,90	4,15	1.297,38	9,03	1.378,02	13,83
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.016,30	-20,66	952,02	-6,32	1.019,15	7,05	1.082,10	6,18	1.156,60	11,61
10.	Informasi dan komunikasi	759,43	10,70	788,36	3,81	765,21	-2,94	788,76	3,08	811,13	8,14
11.	Jasa keuangan dan asuransi	298,83	-2,85	292,39	-2,16	316,43	8,22	350,49	10,76	393,42	3,95
12.	Real estat	493,90	0,39	499,76	1,19	503,94	0,84	507,42	0,69	508,22	5,10
13.	Jasa perusahaan	70,21	-4,42	69,71	-0,71	74,83	7,34	78,25	4,57	83,34	0,84
14.	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	270,96	0,04	266,87	-1,51	266,93	0,02	258,70	-3,08	270,16	2,71
15.	Jasa pendidikan	220,67	-0,03	220,14	-0,24	220,30	0,07	216,95	-1,52	218,39	2,19
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	224,90	1,83	235,51	4,72	237,84	0,99	242,70	2,04	245,89	2,47
17.	Jasa lainnya	132,07	-6,35	127,64	-3,35	140,37	9,97	148,74	5,96	153,12	1,54

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2022–2023

Berdasarkan tabel di atas, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Agar tidak turun drastis apabila terjadi kejadian serupa, perlu dilakukan pengelolaan dan perencanaan lebih lanjut terhadap pengembangan sektor ekonomi tersebut. Selain itu, perlu pula dilakukan peragaman sektor ekonomi di Kabupaten Jembrana sehingga tidak bergantung terhadap satu atau beberapa sektor ekonomi tertentu. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kapasitas Kabupaten Jembrana dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.

B. PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan meskipun terdapat penurunan pada masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, PDRB per kapita Kabupaten Jembrana selalu berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah. Selain itu, Kabupaten Jembrana berada di peringkat keempat PDRB per kapita terendah pada tahun 2023 di Provinsi Bali.

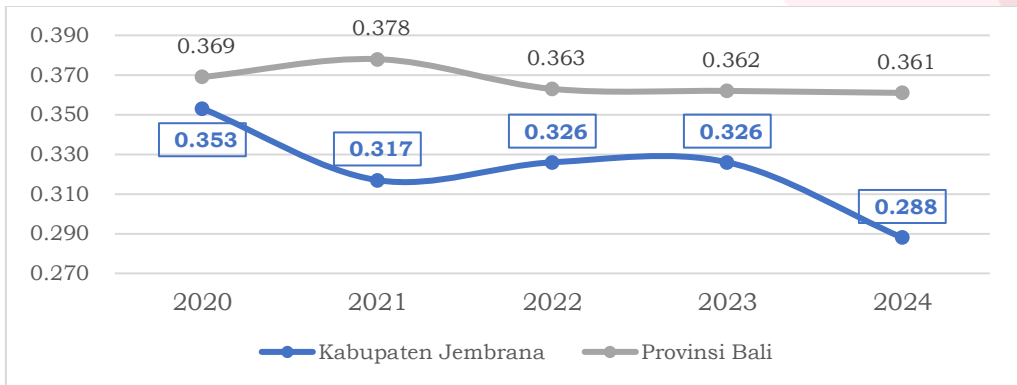


Gambar 2.23 PDRB per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

C. Indeks Gini

Indeks gini Kabupaten Jembrana tergolong sedang (0,3–0,5) dan menunjukkan tren penurunan meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020. Meskipun demikian, indeks gini Kabupaten Jembrana selalu berada di bawah indeks gini Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Jembrana relatif lebih rendah dibanding Provinsi Bali. Meskipun bersifat fluktuatif, indeks gini Kabupaten Jembrana menunjukkan nilai terendahnya pada tahun 2024 dengan nilai 0,288.

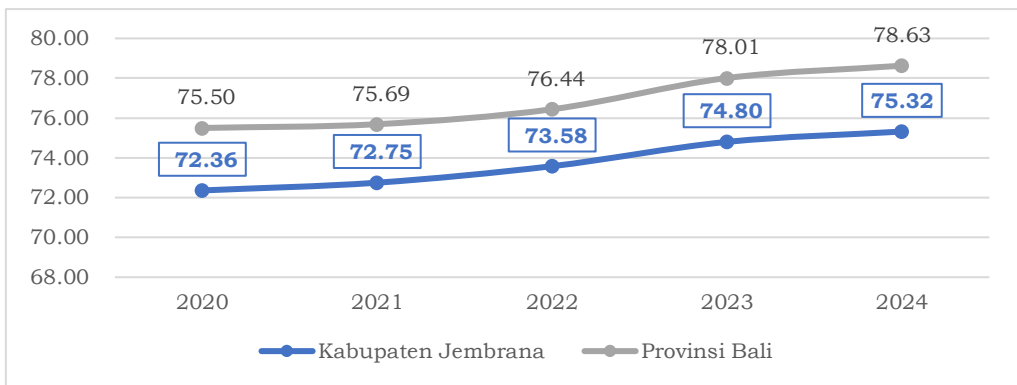


Gambar 2.24 Indeks Gini Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Jembrana cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini didorong oleh perbaikan pada sektor sosial. Meskipun demikian, indeks pembangunan manusia Kabupaten Jembrana masih di bawah Provinsi Bali seperti gambar di bawah ini.

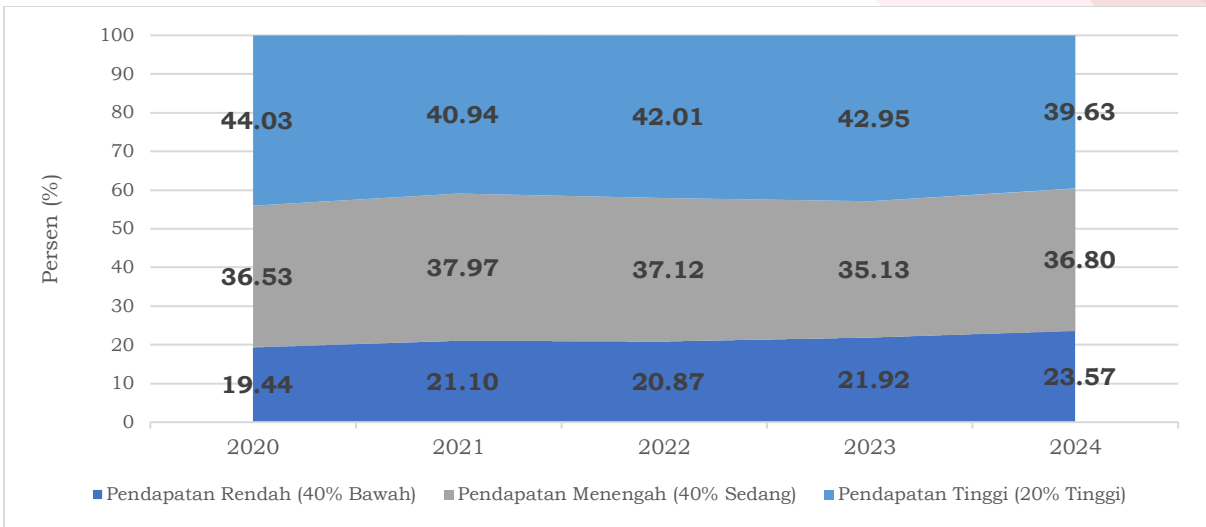


Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

E. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

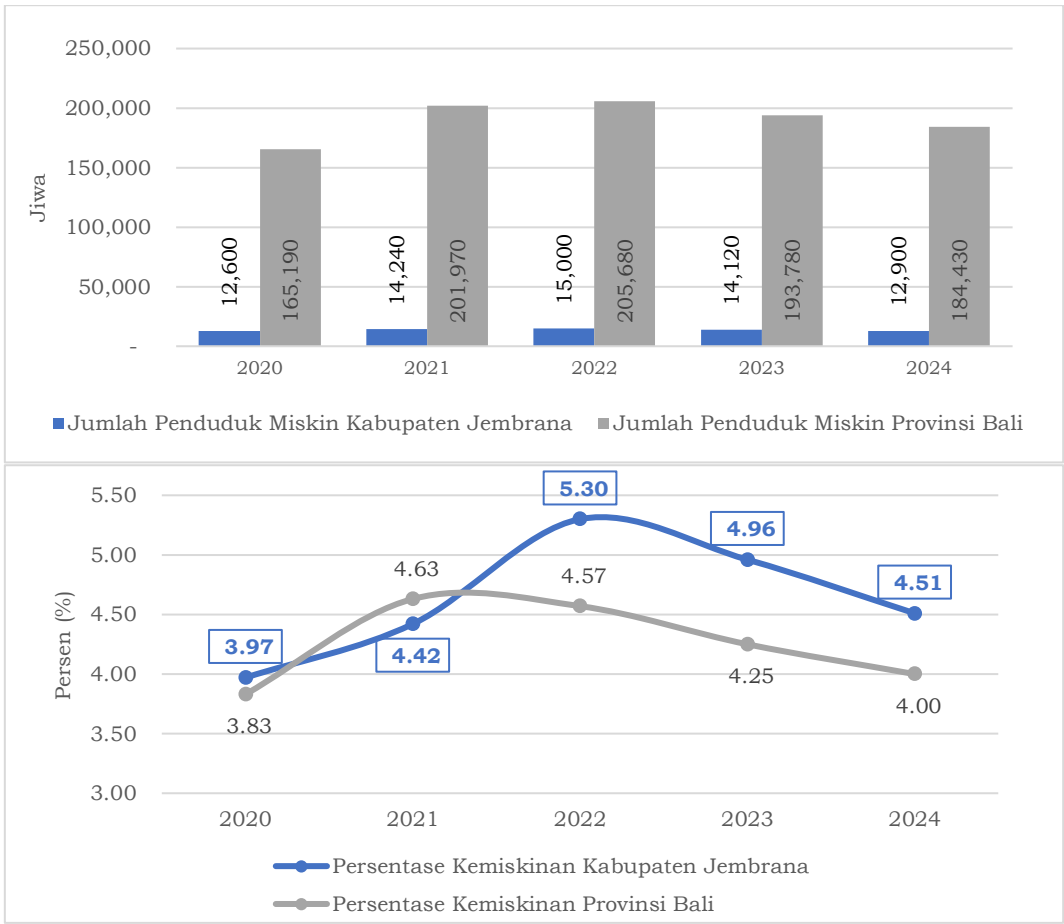
Bank dunia membagi pendapatan penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu 40% pendapatan terendah, 40% menengah, dan 20% tertinggi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2023, Kabupaten Jembrana memiliki ketimpangan pendapatan rendah (lebih dari 17%), yaitu 21,92%. Angka ini meningkat menjadi 23,57 di tahun 2024, berbeda hampir 2% dari tahun sebelumnya. Distribusi pendapatan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.26 Distribusi Pendapatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

F. Persentase Penduduk Miskin

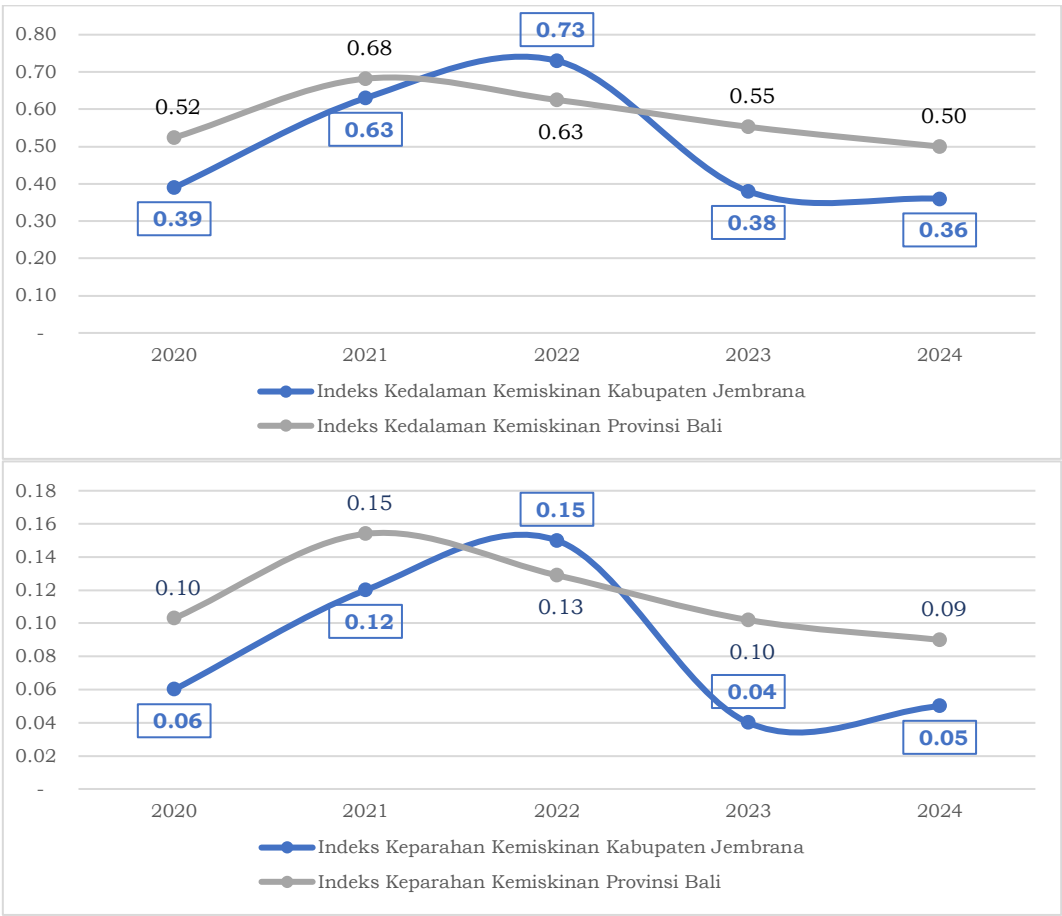
Persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana mencapai titik terendahnya, yaitu 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan karena pandemi Covid-19. Berbeda dengan sebelum masa pandemi, persentase penduduk miskin Kabupaten Jembrana kini berada di bawah Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah.



Gambar 2.27 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

G. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif, tetapi menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Tren serupa juga ditemukan pada indeks keparahan kemiskinannya yang menunjukkan kesenjangan antarpenduduk miskin relatif menurun. Tren dan perbandingannya dengan Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar di bawah.

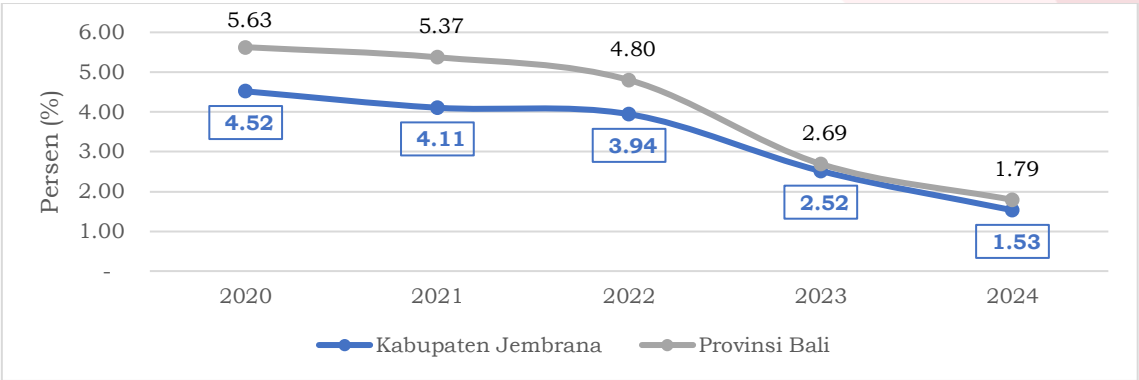


Gambar 2.28 Kesenjangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jembrana terlihat fluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja, terutama sektor pariwisata, yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, berbagai stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta percepatan pemulihan ekonomi berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,11% pada tahun 2021 dan terus menurun seperti pada gambar di bawah. Meskipun demikian, isu ketenagakerjaan di Kabupaten Jembrana masih menjadi fenomena yang pelik, terutama peningkatan arus migrasi dari Pulau Jawa sehingga diperlukan program perencanaan tenaga kerja.

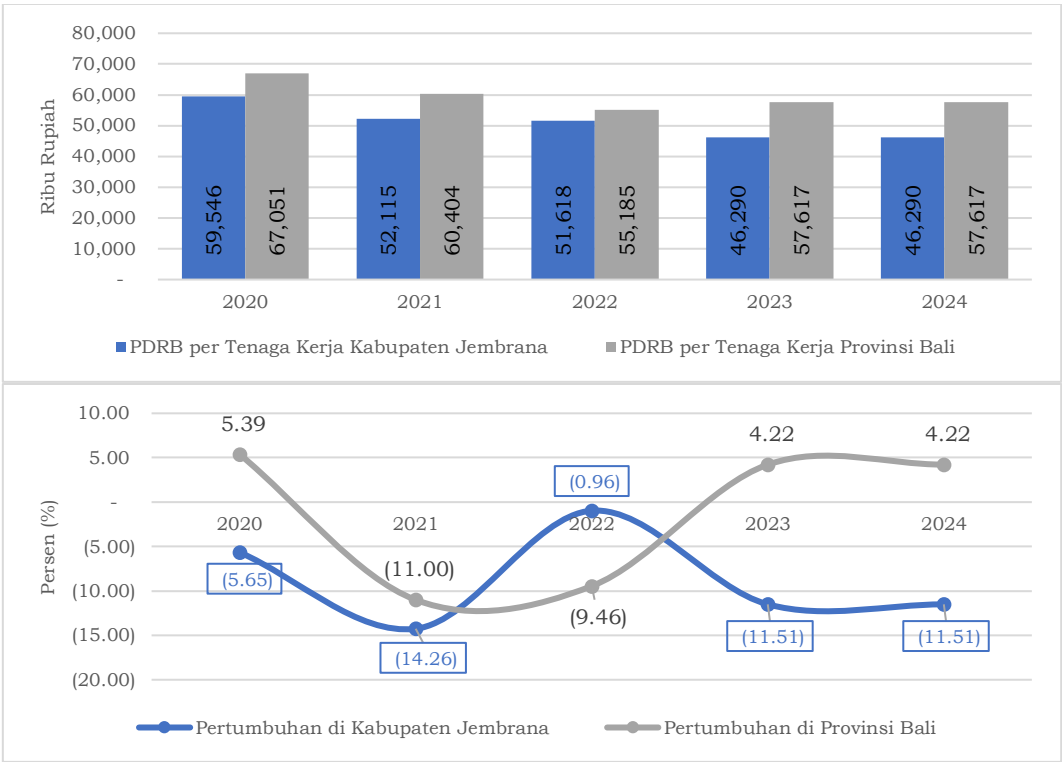


Gambar 2.29 Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

I. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dihitung berdasarkan PDRB ADHK untuk menunjukkan tingkat produktivitas. Nilai PDRB per tenaga kerja Kabupaten Jembrana selalu berada di bawah Provinsi Bali dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Tren dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.30 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2024 dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (2025)

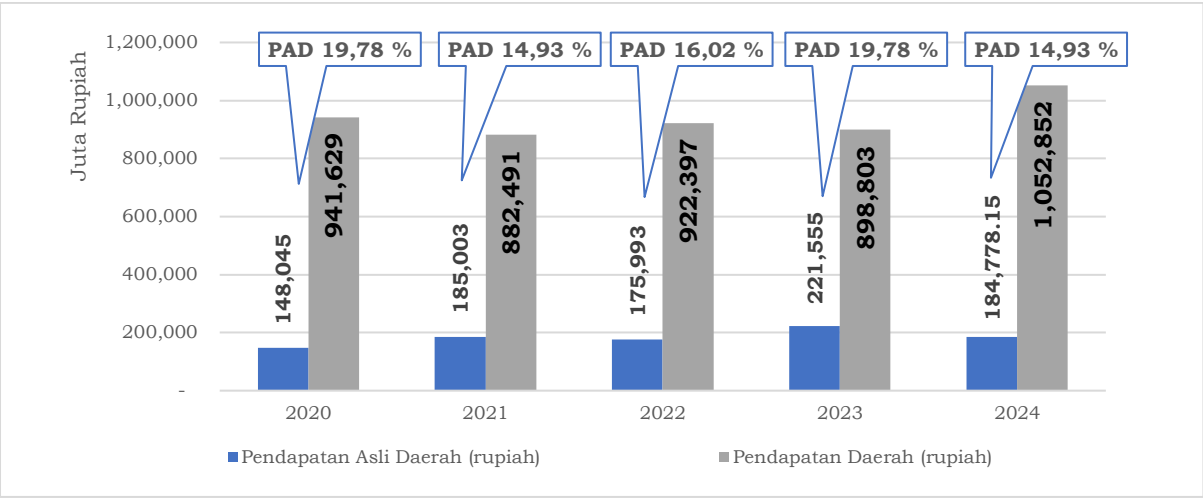
J. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Persentase keluarga prasejahtera di Kabupaten Jembrana tercatat sebesar 4% dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan dalam upaya penurunan jumlah keluarga

prasejahtera selama periode tersebut, sehingga diperlukan strategi intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

K. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Persentase pendapatan asli daerah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini menunjukkan kemandirian Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan keuangannya. Lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah.



Gambar 2.31 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

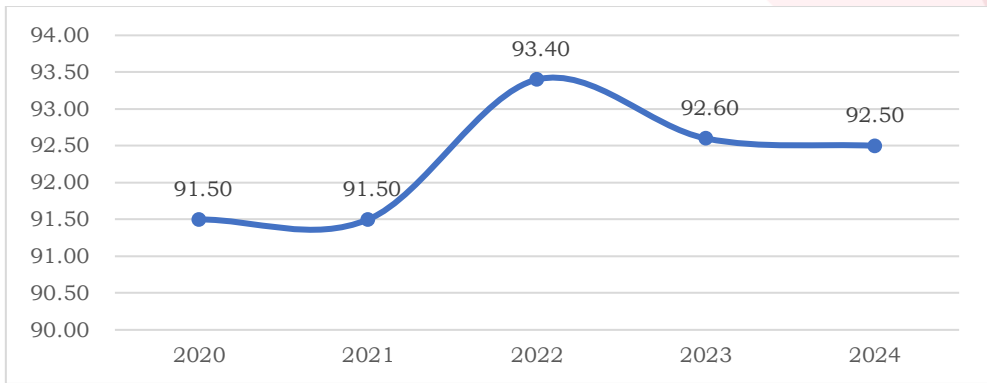
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

L. Opini Badan Pengawas Keuangan

Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) berisi kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini berarti tidak terdapat ketidaksesuaian material pada pos laporan keuangan dan tidak sama sekali pula memengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.

M. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH digunakan untuk mengukur ketahanan pangan berdasarkan ragam konsumsi pangan dan gizi seimbang yang digunakan untuk mengantisipasi gizi buruk dan penyakit terkait. Berdasarkan skor PPH-nya seperti pada gambar di bawah, Kabupaten Jembrana berhasil mencukupi pangan penduduknya. Skor PPH Kabupaten Jembrana selalu lebih dari 90,00 meskipun terdapat fluktuasi.



Gambar 2.32 Skor PPH Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2020–2024

N. Penguatan Cadangan Pangan

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jember, belum ada peraturan bupati tentang cadangan pangan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jember sudah cukup pangan. Dengan kata lain, tidak ada daerah rawan pangan.

O. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Jember tidak pernah mengalami kerawanan pangan. Hal ini didukung sifat agraris Kabupaten Jember sehingga mampu menyediakan pangan pokok. Selain itu, distribusi pangan pun dinilai lancar dan menjangkau seluruh masyarakat.

P. Produksi Sektor Pertanian

Komoditas pertanian utama Kabupaten Jember meliputi padi, pisang, semangka, jagung, mangga, dan berbagai komoditas subsektor pertanian lainnya, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias. Berdasarkan tabel di bawah, produksi sektor pertanian Kabupaten Jember selama delapan tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan

- a. sayur-sayuran: tanaman sayur yang dibudidayakan di sawah, seperti kacang-kacangan, cabai, semangka, mentimun, dan melon dianggap sebagai komoditas kedua sehingga lahan tanamnya menggunakan sisa lahan tanam padi;
- b. buah-buahan: produksi tanaman buah dipengaruhi kondisi cuaca, iklim, dan serangan OPT serta terdapat kompetisi lahan dengan komoditas perkebunan dan kehutanan, seperti aneka tanaman kayu bahan industri; dan
- c. biofarmaka dan tanaman hias: fluktuasi produksi kedua jenis komoditas ini dikarenakan jarang nya pembudidayaan secara intensif

dan luas, yaitu hanya sebagai hobi, mengingat masyarakat tidak memiliki kebiasaan budidaya tanaman hias dan biofarmaka sebagai sumber penghasilan sebagaimana kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli.

Pada tahun 2024, padi menjadi komoditas utama subsektor tanaman pangan. Komoditas utama lainnya adalah tomat (hortikultura), pisang (buah-buahan), soka (pohon), dan jahe (biofarmaka).

Tabel 2.11 Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi	58.980,0	55.026,4	60.841,9	60.301,0	51.412,75
Jagung	7.586,0	3.561,0	3.653,1	3.270,14	4.493,46
Kedelai	1.109,0	1.464,0	1.551,0	1.550,69	558,53
Kacang tanah	95,3	26,6	50,5	3,05	36,70
Kacang hijau	228,9	61,1	25,6	4,25	-
Ubi kayu	232,1	408,3	120,0	142,00	120,50
Ubi jalar	7,8	18,9	-	-	4,31
Bawang merah	9,2	-	-	-	-
Cabai besar	76,7	101,2	92,2	42,91	56,58
Cabai kecil	5,1	31,8	-	-	-
Cabai rawit	46,9	288,0	138,3	92,20	95,23
Kacang panjang	26,7	85,0	61,0	57,96	55,80
Kangkung	-	5,8	1,7	-	7,20
Ketimun	122,0	98,7	171,5	309,00	164,45
Petsai	-	11,7	20,0	3,00	-
Terong	55,5	57,3	60,2	95,41	97,26
Tomat	16,3	40,9	98,5	32,30	168,00
Melinjo	-	-	-	-	1,00
Alpukat	22,9	0,7	24,1	21,39	119,92
Belimbing	19,7	54,6	10,0	12,59	19,55
Duku	29,0	2,7	5,6	4,22	195,17
Durian	528,4	382,9	452,9	2.354,49	1.610,57
Jambu air	27,1	118,9	35,5	70,66	81,00
Jambu biji	129,4	20,6	35,3	49,03	44,15
Jeruk besar	76,6	5,1	5,0	4,00	6,00
Jeruk siam	61,3	91,8	111,1	149,60	236,00
Mangga	870,8	851,4	2.796,1	1.679,84	4.403,08
Manggis	100,3	763,9	28,3	399,49	708,71
Melon	112,5	105,8	60,0	96,60	165,00

Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nangka	303,2	107,4	156,1	50,48	116,90
Nanas	1,5	4,4	3,4	14,29	31,48
Pepaya	50,3	271,4	637,3	1.495,03	1.431,86
Pisang	19.394,3	18.671,6	18.667,6	12.876,69	24.208,98
Rambutan	471,9	1.371,8	375,1	563,74	619,22
Salak	139,1	44,7	189,9	71,77	48,70
Sawo	85,0	66,4	98,1	87,30	113,52
Semangka	10.123,0	8.813,4	14.872,5	7.622,15	11.427,25
Sirsak	7,4	18,5	16,9	2,00	12,13
Sukun	10,3	40,5	0,5	-	-
Anggrek (tangkai)	-	600,0	240,0	375,00	420,00
Mawar (tangkai)	-	435,0	2.790,0	1.100,00	450,00
Palem (pohon)	-	95,0	300,0	400,00	285,00
Pisang-pisangan (tangkai)	-	350,0	550,0	800,00	400,00
Soka (pohon)	-	290,0	800,0	950,00	645,00
Jahe	-	8,4	171,6	14,70	5,25
Kencur	-	3,8	3,9	0,95	0,25
Kunyit	-	21,4	27,1	17,18	6,55
Laos	-	49,0	144,2	109,28	45,61
Lidah buaya	-	1,6	3,7	2,00	1,20
Mahkota dewa	-	1,3	-	-	-
Mengkudu	-	1,0	2,0	1,05	1,70

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2025)

Q. Produksi Sektor Perkebunan

Hasil produksi sektor perkebunan Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel di bawah. Produksi sektor perkebunan Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 cenderung fluktuatif karena cuaca ekstrem dan faktor geografis. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, komoditas kakao Kabupaten Jembrana termasuk unggul dan memiliki potensi pengembangan yang besar.

Tabel 2.12 Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	3.009,0	2.949,6	2.943,5	3.112,4	3.259,06
Kelapa dalam	16.695,7	17.025,3	17.087,6	17.893,5	17.555,63
Kelapa genjah	318,0	304,6	304,6	291,6	295,31
Cengkeh	658,0	617,2	617,5	392,0	192,88
Kopi	274,2	287,3	281,6	284,4	270,63
Tembakau	20,0	-	1,3	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2025)

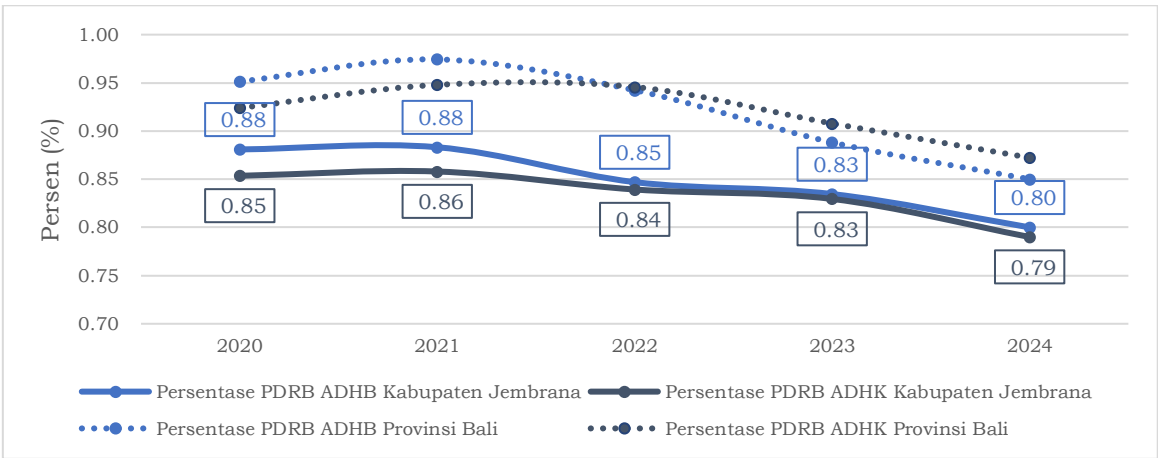
R. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Bali, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana selalu lebih rendah.

Tabel 2.13 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB sektor (miliar rupiah)	118	119	123	130	134
PDRB ADHK sektor (miliar rupiah)	76	77	77	79	78,82
PDRB ADHB total (miliar rupiah)	13.438	13.511	14.532	15.613	16.845
PDRB ADHK total (miliar rupiah)	8.951	8.920	9.158	9.492	9.965
Kontribusi di PDRB ADHB (%)	0,88	0,88	0,85	0,83	0,80
Kontribusi di PDRB ADHK (%)	0,85	0,86	0,84	0,83	0,79

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025



Gambar 2.33 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

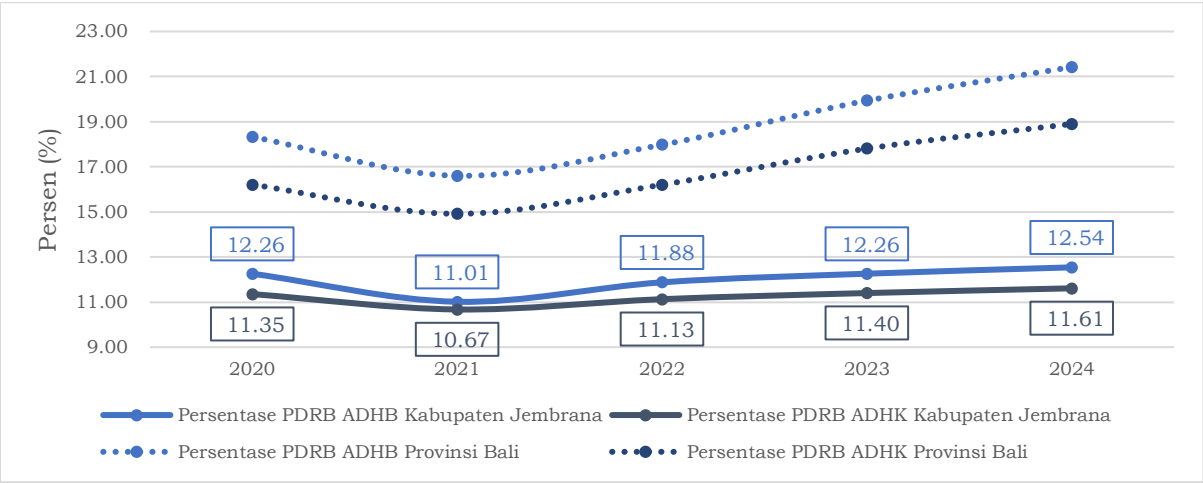
S. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata dihitung dari PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena sektor inilah yang paling mendekati meskipun tetap berkaitan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan meskipun tumbuh pasca-pandemi Covid-19. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Bali, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana selalu lebih rendah. Oleh karena itu, dibangun *Paramount Theme Park* (Taman Kerthi Bali Semesta) untuk meningkatkan pariwisata.

Tabel 2.14 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB sektor (miliar rupiah)	1.647	1.488	1.726	1.914	2.113
PDRB ADHK sektor (miliar rupiah)	1.016	952	1.019	1.082	1.156
PDRB ADHB total (miliar rupiah)	13.438	13.511	14.532	15.613	16.845
PDRB ADHK total (miliar rupiah)	8.951	8.920	9.158	9.492	9.965
Kontribusi di PDRB ADHB (%)	12,26	11,01	11,88	12,26	12,54
Kontribusi di PDRB ADHK (%)	11,35	10,67	11,13	11,40	11,61

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

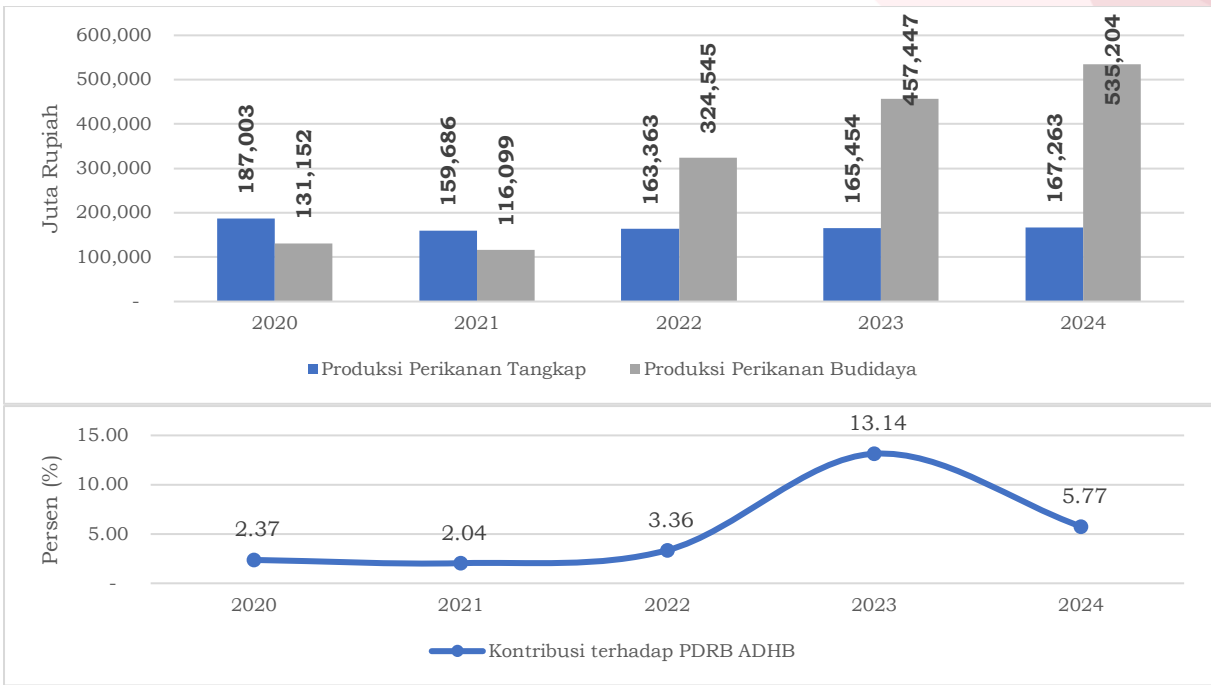


Gambar 2.34 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

T. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dihitung dari nilai produksi perikanan. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan, kecuali pada tahun 2021.



Gambar 2.35 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan 2022 dan Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

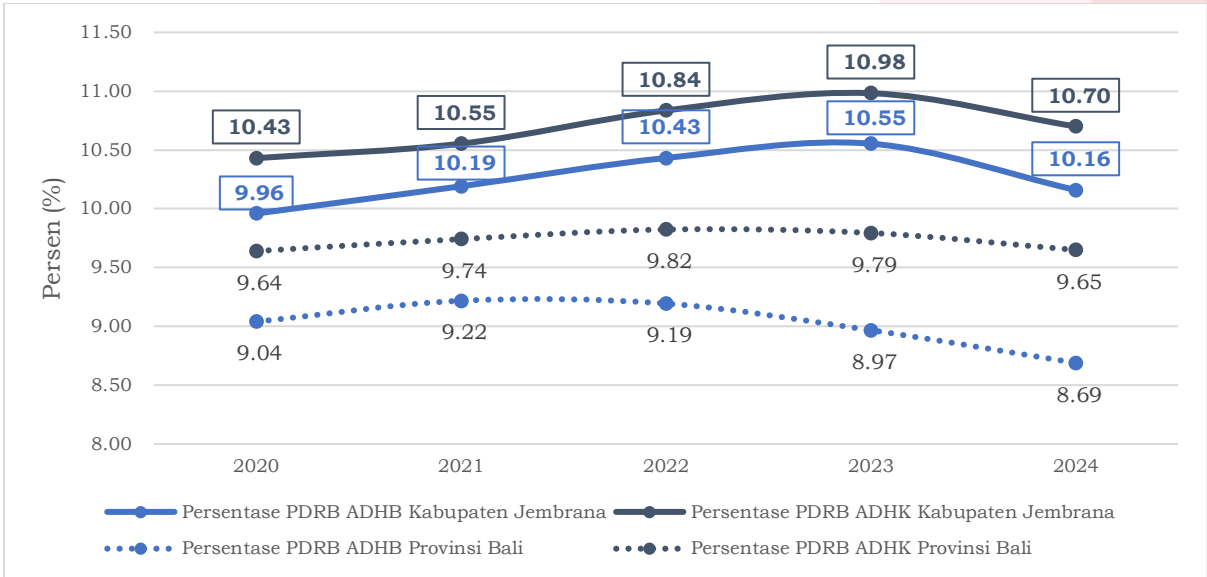
U. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan dihitung dari PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor karena sektor inilah yang paling mendekati. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan dan lebih tinggi dari Provinsi Bali.

Tabel 2.15 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB sektor (miliar rupiah)	1.339	1.377	1.516	1.648	2.113
PDRB ADHK sektor (miliar rupiah)	934	941	992	1.043	1.066
PDRB ADHB total (miliar rupiah)	13.438	13.511	14.532	15.613	16.845
PDRB ADHK total (miliar rupiah)	8.951	8.920	9.158	9.492	9.965
Kontribusi di PDRB ADHB (%)	9,96	10,19	10,43	10,55	10,16
Kontribusi di PDRB ADHK (%)	10,43	10,55	10,84	10,98	10,70

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025



Gambar 2.36 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

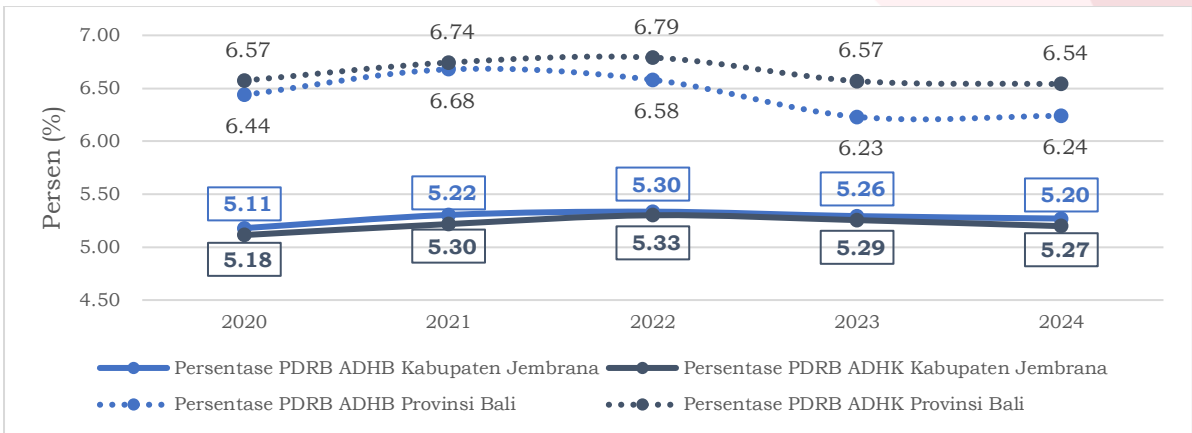
V. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan dihitung dari PDRB sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan, tetapi selalu di bawah Provinsi Bali. Pertumbuhan sektor tersebut perlu didorong karena berperan penting dalam menunjang perekonomian daerah dalam kaitannya dengan nilai tambah barang dan jasa, lapangan kerja, dan devisa.

Tabel 2.16 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Komponen	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB sektor (miliar rupiah)	696	717	775	826	888
PDRB ADHK sektor (miliar rupiah)	458	465	485	498	518
PDRB ADHB total (miliar rupiah)	13.438	13.511	14.532	15.613	16.845
PDRB ADHK total (miliar rupiah)	8.951	8.920	9.158	9.492	9.965
Kontribusi di PDRB ADHB (%)	5,18	5,30	5,33	5,29	5,27
Kontribusi di PDRB ADHK (%)	5,11	5,22	5,30	5,26	5,20

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

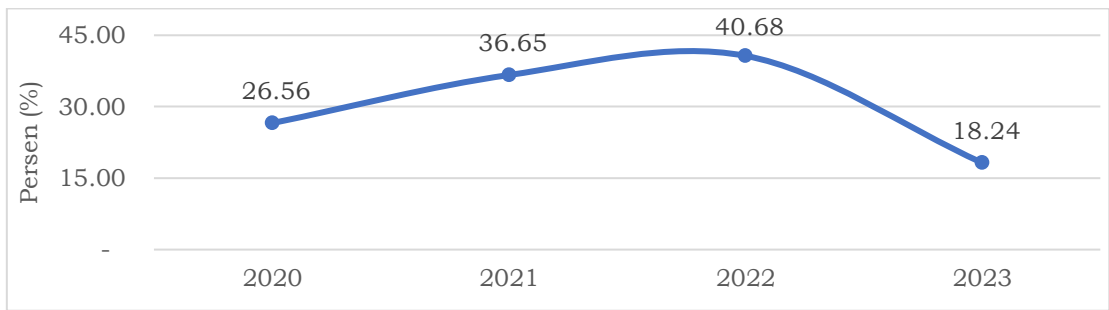


Gambar 2.37 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

W. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Kabupaten Jembrana fluktuatif selama tahun 2020–2023. Secara umum, trennya menunjukkan peningkatan dari tahun 2020, tetapi menurun pada tahun 2023.

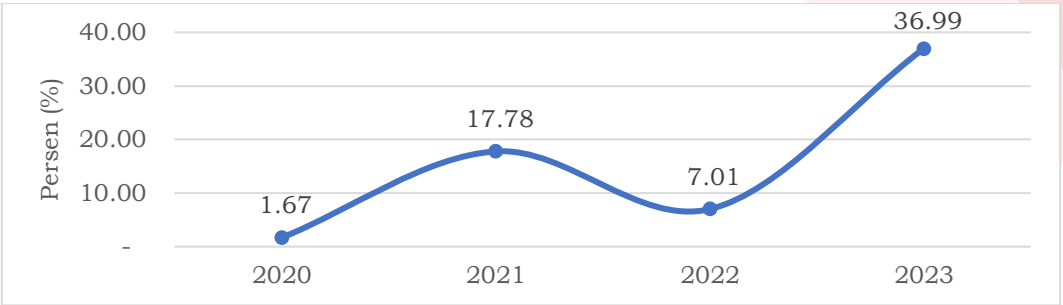


Gambar 2.38 Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2023) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023)

X. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri memperlihatkan peningkatan jumlah industri yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan daya beli dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam kasus Kabupaten Jembrana, pertumbuhan industri yang dimaksud adalah pertumbuhan industri kecil dan menengah. Selama rentang waktu 2020–2023, pertumbuhan industri di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif seperti pada gambar di bawah.

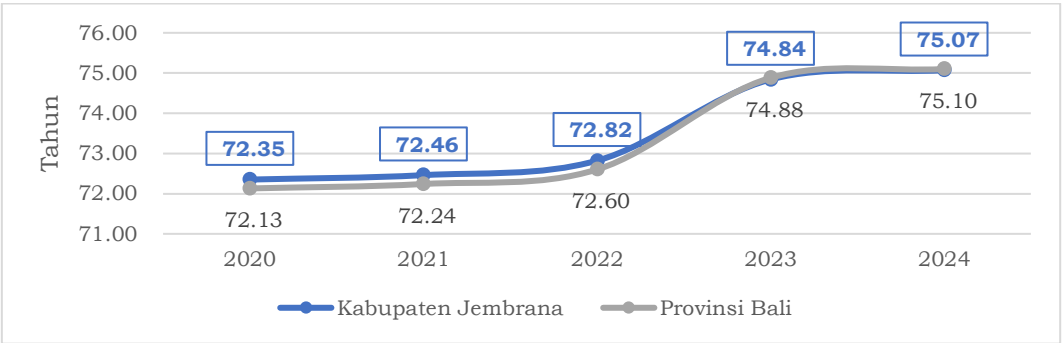


Gambar 2.39 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2023)

2.1.2.2. KESEHATAN UNTUK SEMUA

A. Angka Usia Harapan Hidup

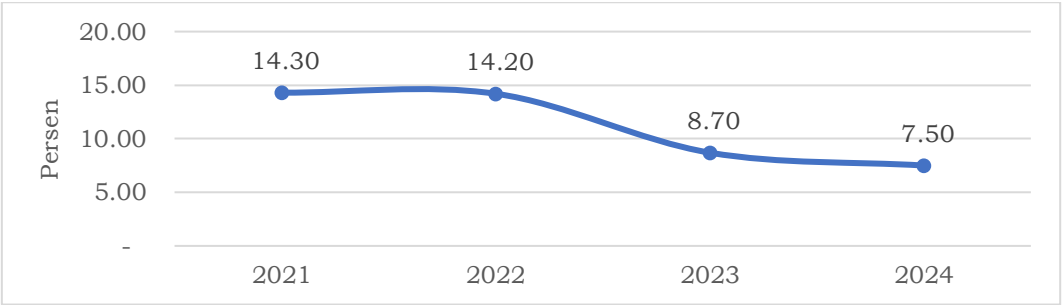
Usia harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan penduduk. Usia harapan hidup Kabupaten Jembrana menunjukkan tren kenaikan dan selalu berada di atas Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah. Hal ini menunjukkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Jembrana relatif tinggi.



Gambar 2.40 Usia Harapan Hidup Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

B. Prevalensi Stunting

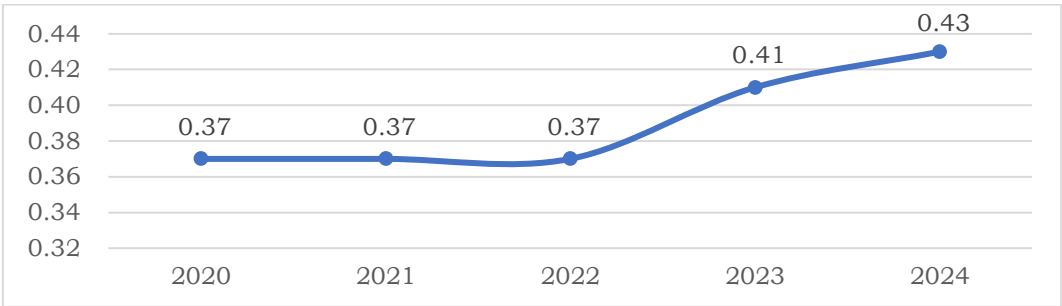
Prevalensi stunting merupakan persentase jumlah anak balita (di bawah usia lima tahun) yang mengalami stunting. Prevalensi stunting Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini seiring dengan program penanganan stunting yang diimplementasikan oleh Pemkab Jembrana. Namun, kondisi ini masih memerlukan perhatian khusus agar mampu tertangani secara optimal.



Gambar 2.41 Prevalensi Stunting Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024
Sumber: Survey Kesehatan Indonesia (2023), Dinas PPAPKB (2025)

C. Indeks Keluarga Sehat

Indeks keluarga sehat adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Indeks keluarga sehat Kabupaten Jembrana meningkat secara perlahan dari tahun ke tahun. Namun, angka ini masih dalam kategori sedang dan memerlukan pengoptimalan untuk menciptakan keluarga yang sehat.

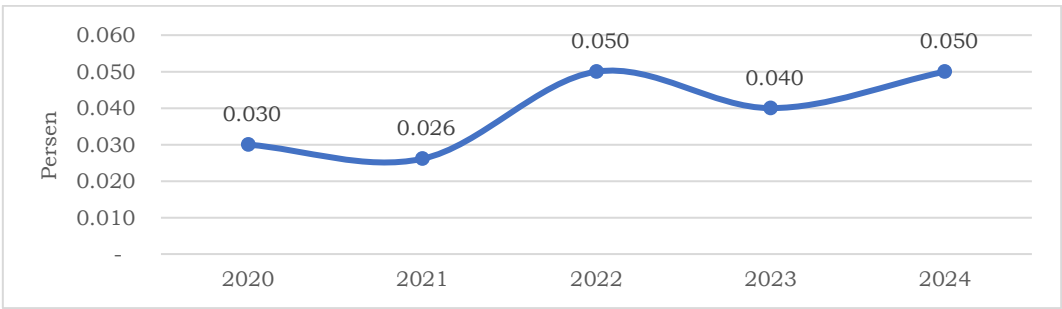


Gambar 2.42 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (2025)

D. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah balita yang berstatus gizi menurut berat badan dan umur dengan $Z\text{-score} \leq 3$ SD dan/atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus kwasiorkor). Gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan yang sesuai yang dipengaruhi oleh pola asuh dan pengetahuan orang tua mengenai makanan dan pola asuh. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif dengan persentase tertinggi pada tahun 2022 dan 2024 meskipun masih termasuk rendah.

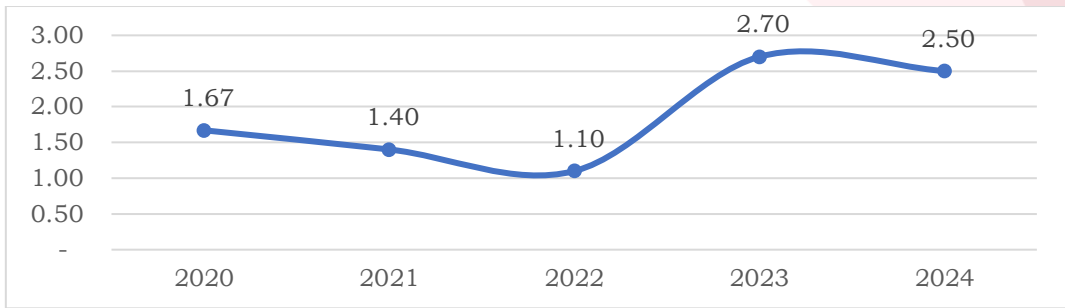


Gambar 2.43 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

E. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah balita yang berstatus gizi menurut berat badan dan umur dengan $Z\text{-score}$ antara -2 SD hingga -3 SD. Menurunkan prevalensi balita gizi kurang (malnutrisi, *stunting*, dan *wasting* termasuk agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir, prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif, cenderung menurun dari 2020 hingga 2022, namun meningkat dengan nilai tertinggi pada tahun 2023.



Gambar 2.44 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

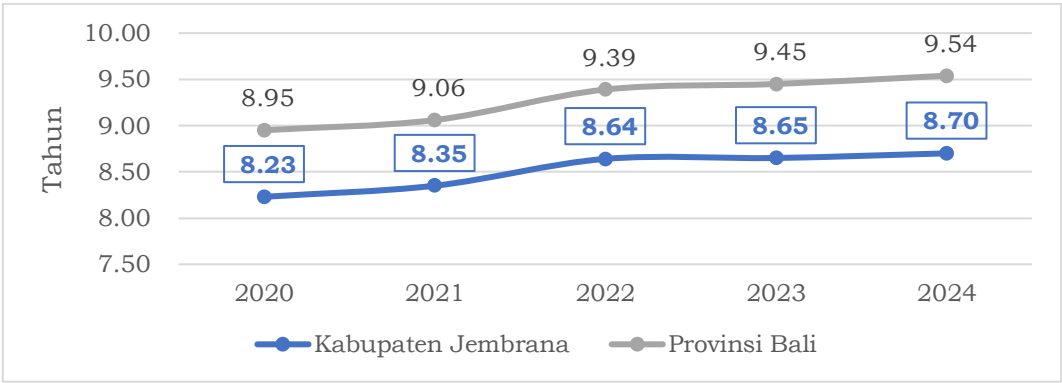
F. Cakupan Desa Siaga Aktif

Sejak tahun 2020, Kabupaten Jembrana telah memiliki 51 desa siaga dengan tingkat keaktifan mencapai 73,13% pada tahun 2022. Desa Siaga dibentuk agar masyarakat dapat hidup sehat secara mandiri. Kedepannya perlu meningkatkan persentase keaktifan tersebut agar tujuan penciptaan desa siaga dapat tercapai.

2.1.2.3. PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dinilai berdasarkan lamanya bersekolah penduduk di atas usia 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren kenaikan. Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah Kabupaten Jembrana selalu berada di bawah Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah sehingga tidak semua penduduk mampu bersekolah hingga pendidikan tinggi. Mahalnya biaya sekolah menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa putus sekolah dan harus membantu orang tuanya bekerja.



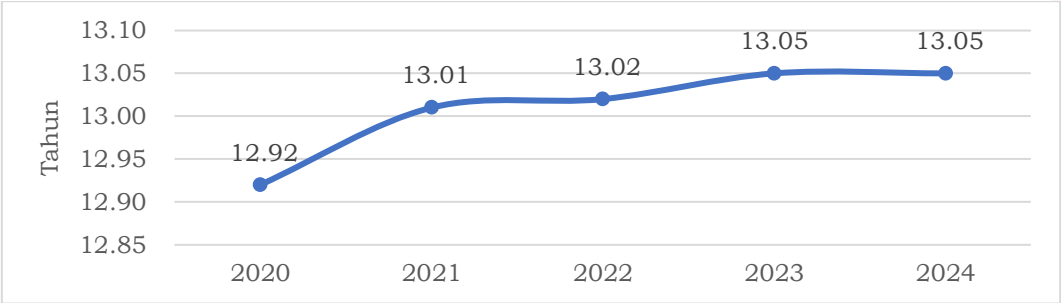
Gambar 2.45 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berada pada angka 12-13. Hal

tersebut mengindikasikan tingginya harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan formal. Nilai tersebut juga mengindikasikan adanya harapan masyarakat Jembrana untuk menempuh pendidikan tinggi.



Gambar 2.46 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Jembrana (2025)

C. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kecakapan menggunakan angka dan simbol dalam matematika dasar, pemecahan masalah praktis, dan analisis informasi untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Angka literasi/numerasi Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan.

Tabel 2.17 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024

No.	Komponen	Jenjang Pendidikan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Literasi	SD (umum)	57,90	68,56	78,70	84,14
2.		SMP (umum)	61,30	77,16	84,21	89,45
3.		SMA (umum)	69,48	70,80	85,09	85,70
4.	Numerasi	SD (umum)	30,90	53,77	69,43	81,70
5.		SMP (umum)	40,60	53,52	79,53	86,14
6.		SMA (umum)	40,09	55,81	81,23	80,85

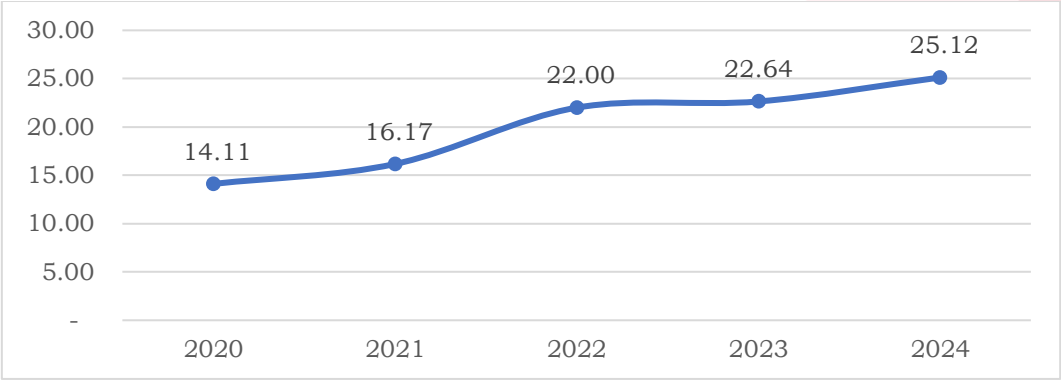
Sumber: Laporan Rapor Kabupaten Jembrana dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2025)

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah ukuran untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan literasi dalam berbagai bidang. Berdasarkan data milik BPS Kabupaten Jembrana, Indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Jembrana tahun 2024 berada pada angka 57,54. Hal ini menunjukkan peningkatan dari nilai IPLM tahun 2023 yang bernilai 56. Nilai tersebut menunjukkan belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Jembrana.

E. APK Pendidikan Tinggi

Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi merupakan ukuran proporsi partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. APK pendidikan tinggi Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan menjadi 25,12 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan tinggi.

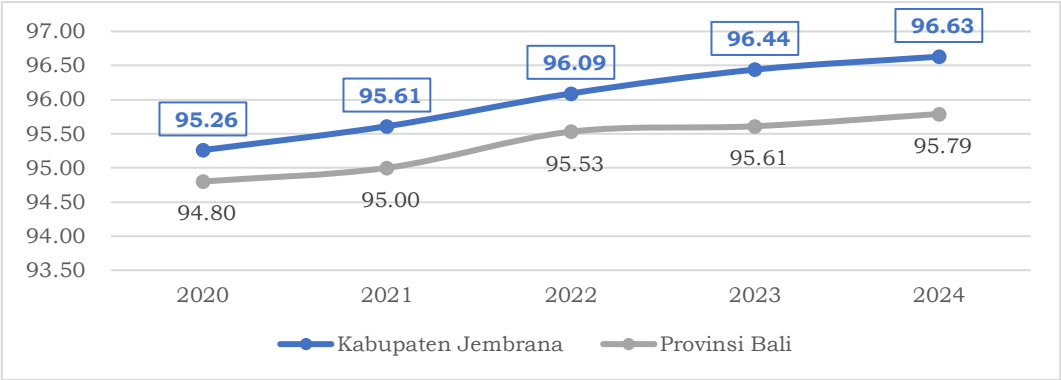


Gambar 2.47 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana (2025)

F. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf dinilai untuk penduduk di atas usia 15 tahun. Angka melek huruf Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Angka melek huruf Kabupaten Jembrana selalu berada di atas Provinsi Bali.



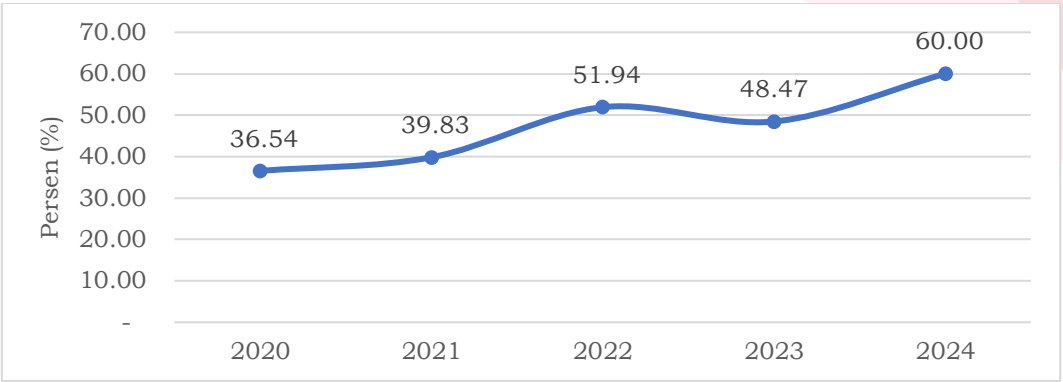
Gambar 2.48 Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

2.1.2.4. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

A. Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial termasuk tanggung jawab negara untuk melindungi sosial-ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan, persentase peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Jembrana masih cenderung rendah seperti pada gambar di bawah.



Gambar 2.49 Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2020–2025 (Diolah)

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator yang mencerminkan ketercakupan perlindungan sosial bagi pekerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2024 mencapai 65,63. Nilai ini menunjukkan belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan sosial yang memerlukan peningkatan.

2.1.2.5. BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memotret kondisi kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah. Pada tahun 2022, indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Kabupaten Jember adalah 80,07 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali (77,95) dan nasional (72,39). Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Jember berfluktuasi menjadi 76,02 pada tahun 2023 dan 76,47 pada tahun 2024 (Kesbangpol, 2025).

B. Seke/ Kelompok Kesenian yang Aktif

Berdasarkan LKjIP Kabupaten Jember tahun 2021-2023, kelompok kesenian yang aktif bergerak di Kabupaten Jember berada pada nilai 100%. Hal ini menunjukkan masih kuatnya eksistensi kelompok kesenian di wilayah ini.

C. Cakupan Budaya Tak Benda Lestari

Berdasarkan laporan kinerja Kabupaten Jember tahun 2022–2023, cakupan pelestarian budaya tak benda mengalami penurunan yang signifikan, dari 100% pada tahun 2022 menjadi hanya 12,5% pada tahun 2023. Meskipun demikian, terjadi peningkatan pada tahun 2024 dengan cakupan sebesar 44,44% (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025).

D. Cakupan Budaya Benda Lestari

Berbeda dengan cakupan budaya tak benda, cakupan budaya benda yang masih lestari di Kabupaten Jembrana justru mengalami peningkatan, dari 91,66% pada tahun 2022 menjadi 96,31% pada tahun 2023. Namun, angka tersebut menurun menjadi 93,61% pada tahun 2024 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025). Meskipun tergolong tinggi, capaian ini masih belum optimal dan tetap memerlukan perhatian berkelanjutan untuk menjaga kelestarian budaya benda di Kabupaten Jembrana.

E. Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama

Penyelesaian konflik antar umat beragama di Kabupaten Jembrana tahun 2022 hingga 2024 sudah optimal, berada di angka 100%. Hal ini harus dijaga untuk terus mewujudkan ketenteraman dalam bermasyarakat.

F. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan merupakan alat ukur ketercapaian pembangunan kebudayaan. Indeks pembangunan kebudayaan Kabupaten Jembrana tahun 2024 berada pada nilai 71,36. Nilai tersebut di atas nilai nasional yang mengindikasikan pembangunan kebudayaan Jembrana tergolong baik meski dapat dioptimalkan.

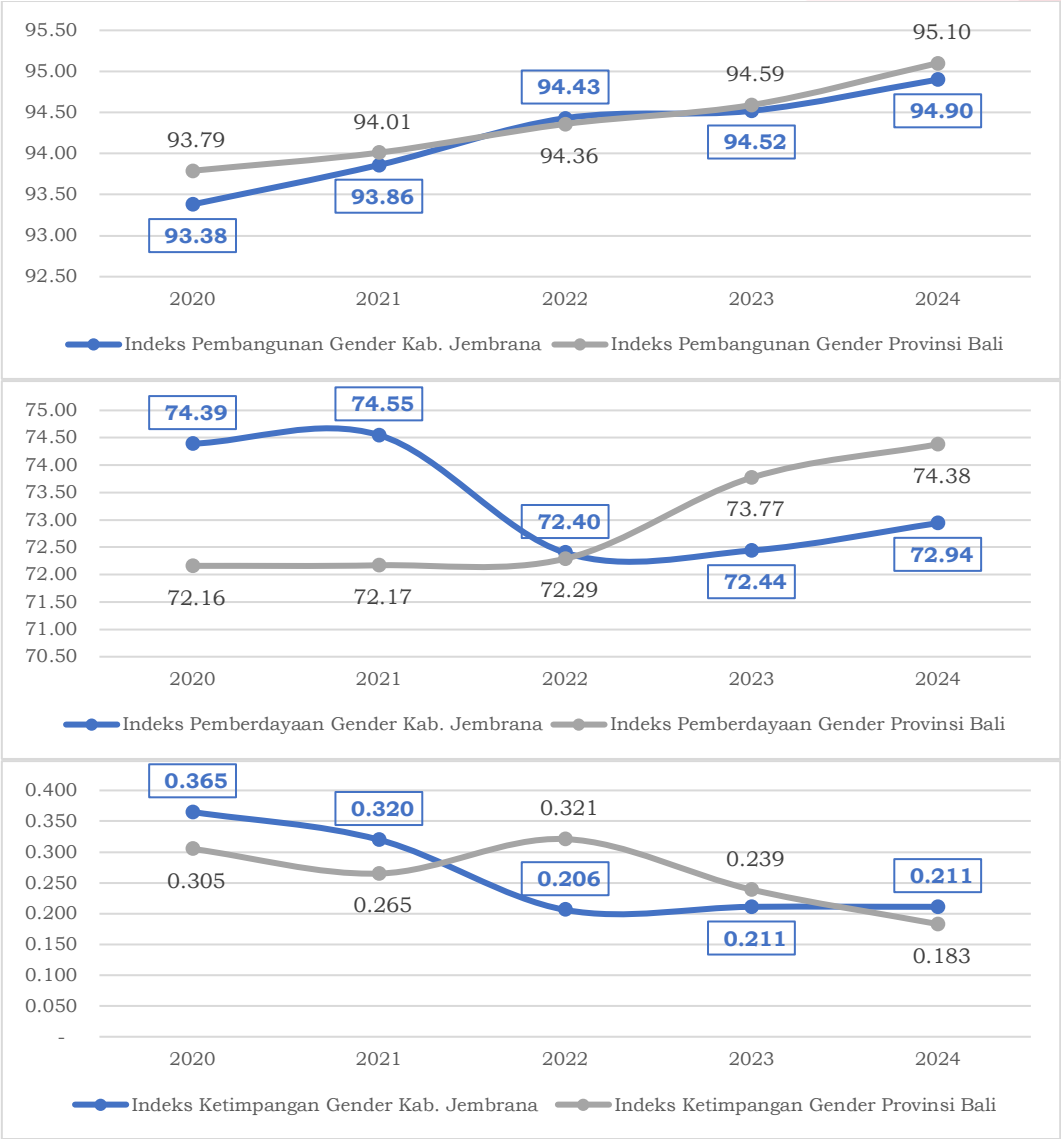
2.1.2.6. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak merupakan penilaian Upaya perlindungan anak yang telah berhasil diimplementasikan dalam wilayah tertentu. Berdasarkan data milik Kementerian PPPA, indeks perlindungan anak Kabupaten Jembrana tahun 2022 berada pada angka 64,21. Nilai ini menunjukkan masih belum optimalnya perlindungan anak di Kabupaten Jembrana.

B. Indeks Pembangunan, Pemberdayaan, dan Ketimpangan Gender

Indeks pembangunan gender menunjukkan pencapaian pembangunan manusia sebagaimana indeks pembangunan manusia yang memerhatikan ketimpangan gender. Indeks pembangunan gender Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil meskipun selalu berada di bawah Provinsi Bali. Tren serupa juga ditemukan pada indeks pemberdayaan gender yang menunjukkan pertumbuhan tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan politik. Hal berbeda diidentifikasi pada indeks ketimpangan gender yang menunjukkan tren fluktuatif.



Gambar 2.50 Indeks Pembangunan, Pemberdayaan, dan Ketimpangan Gender Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (2025)

2.1.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

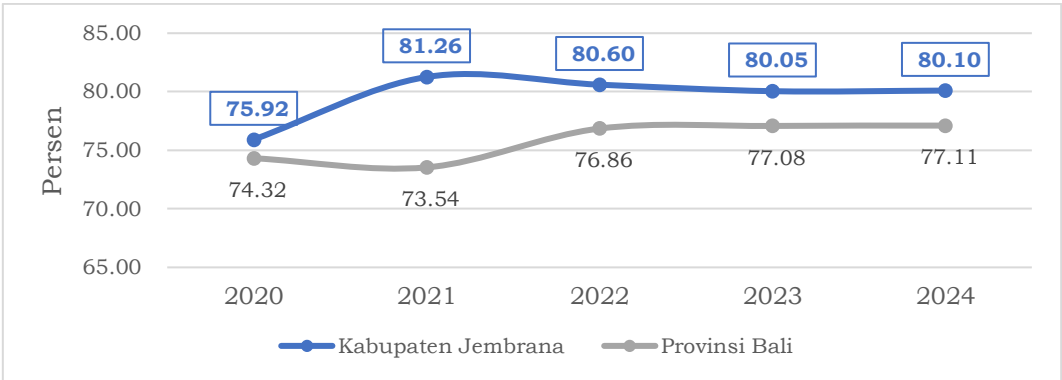
Aspek daya saing menjelaskan kemampuan daerah di bidang ekonomi, sumber daya manusia, fasilitas/infrastruktur wilayah, dan iklim investasi untuk bersaing dengan daerah lain. Penjelasan tersebut didapatkan dari indikator makro pembangunan. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan interpretasi datanya.

2.1.1.3.1. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya saing sumber daya manusia merupakan bagian dari aspek daya saing. Daya saing sumber daya manusia menjelaskan kondisi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Berikut penjelasannya.

A. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jembrana terlihat fluktuatif. Meskipun demikian, tetap menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2020 yang mulai berada di atas Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah.

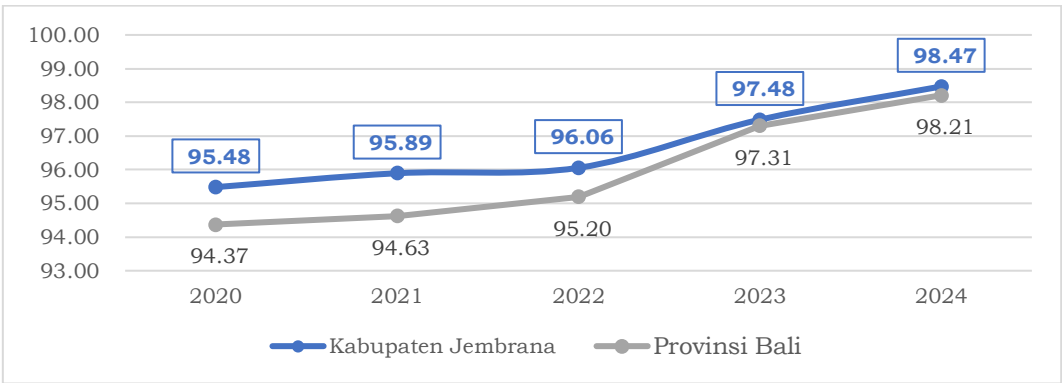


Gambar 2.51 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

B. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk bekerja di Kabupaten Jembrana terlihat fluktuatif. Meskipun demikian, angkanya selalu berada di atas 95 seperti pada gambar di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jembrana.

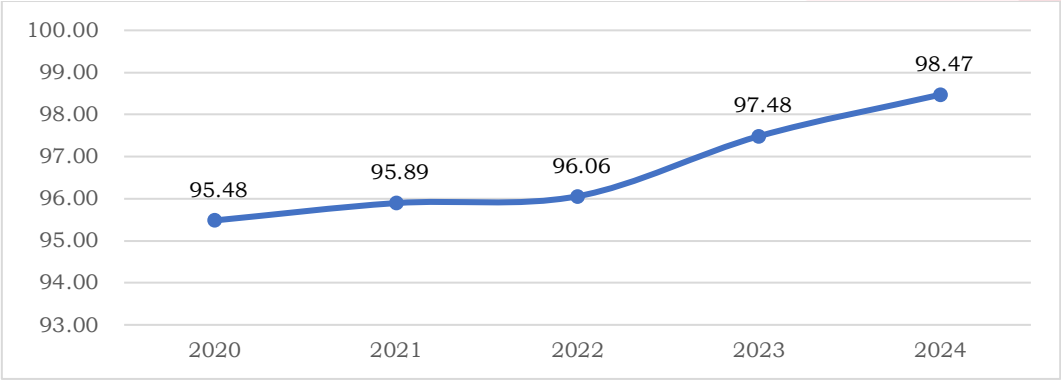


Gambar 2.52 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

C. Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

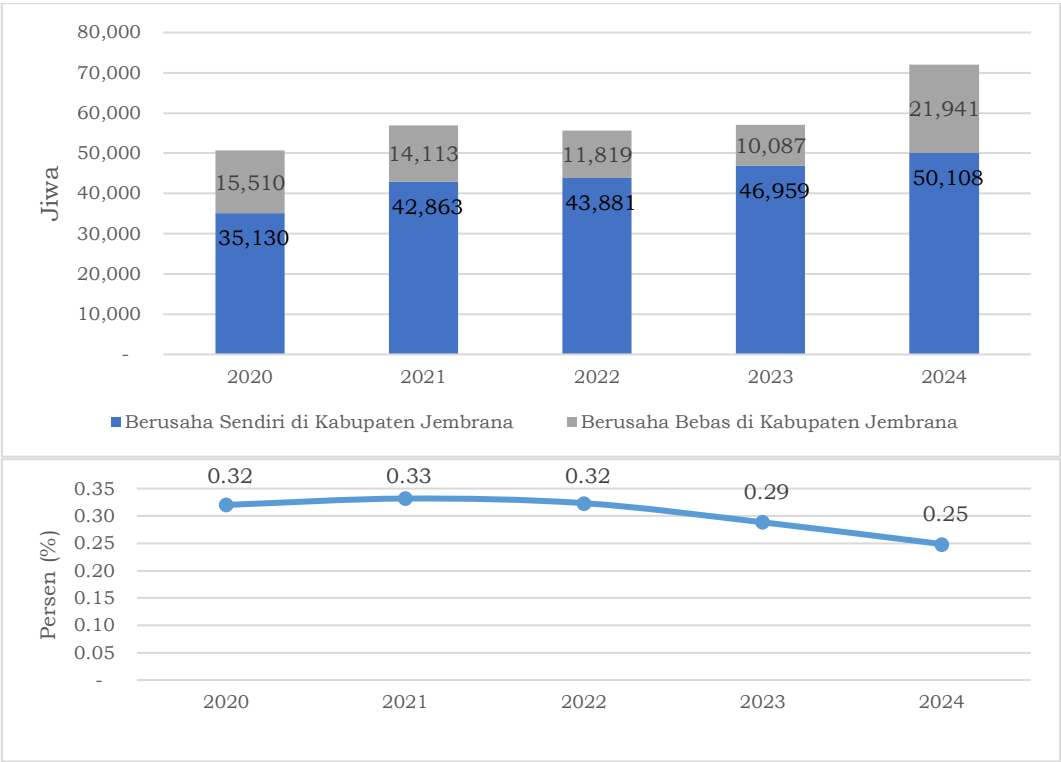
Rasio kesempatan kerja Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, persentasenya terus meningkat pasca pandemi Covid-19. Hal lain yang memengaruhi penurunannya adalah ketidaksesuaian kompetensi, kurangnya akses informasi dan pelatihan, dan faktor internal pencari kerja.



Gambar 2.53 Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

D. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja

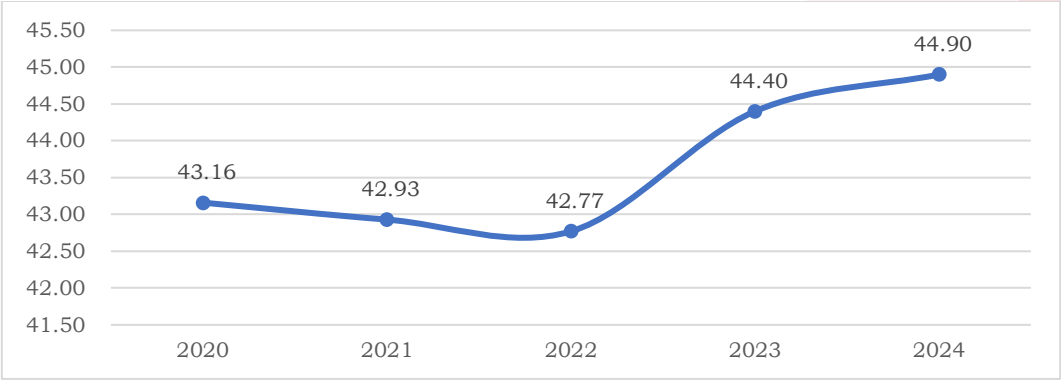
Tenaga kerja yang berusaha sendiri bekerja dengan menanggung risiko ekonomis dan tidak memiliki pekerja, termasuk pekerjaan yang memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan bekerja bebas di Kabupaten Jembrana cenderung menurun meskipun selalu berada di atas Provinsi Bali.



Gambar 2.54 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Bekerja Bebas di Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

E. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Jembrana yang berusia produktif. Akan tetapi, rasio ketergantungan kembali meningkat pada tahun 2023 seperti pada gambar di bawah.

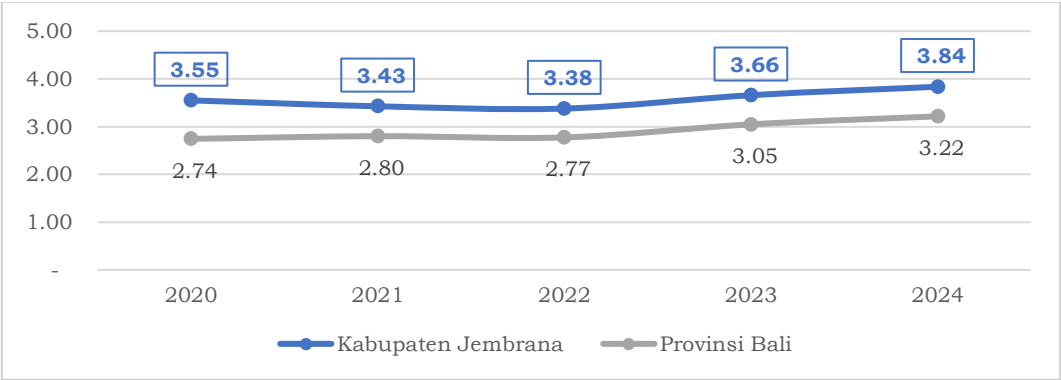


Gambar 2.55 Rasio Ketergantungan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024 dan Badan Pusat Statistik (2025)

2.1.3.2. IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan persentase orang yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar terhadap angkatan kerja. Rasio kewirausahaan Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif.

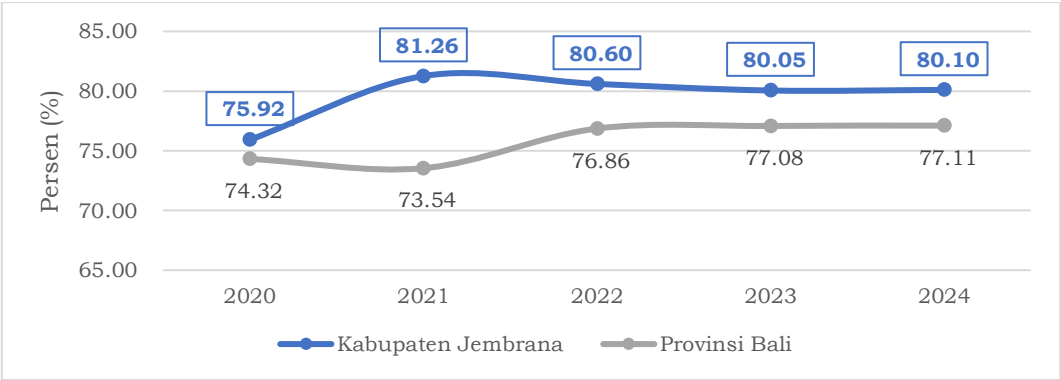


Gambar 2.56 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jembrana terlihat fluktuatif. Meskipun demikian, trennya masih cenderung naik sejak tahun 2020 dan selalu berada di atas Provinsi Bali.

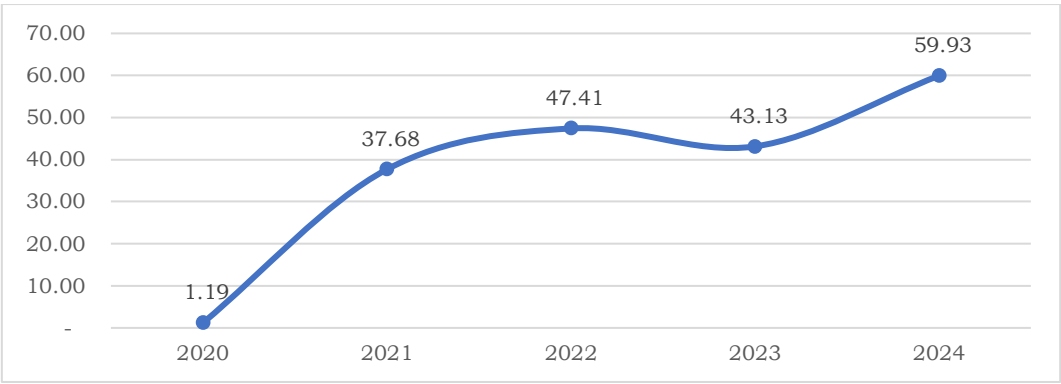


Gambar 2.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan ukuran tingkat inovasi yang diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Indeks inovasi daerah Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks inovasi daerah Kabupaten Jembrana meningkat dari 37,68 (2021) menjadi 59,93 (2024). Meskipun demikian, nilai tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana. Capaian pada tahun 2020 ke 2021 menunjukkan perubahan yang ekstrem karena adanya perbedaan metode atau persepsi dalam perhitungan indeks.

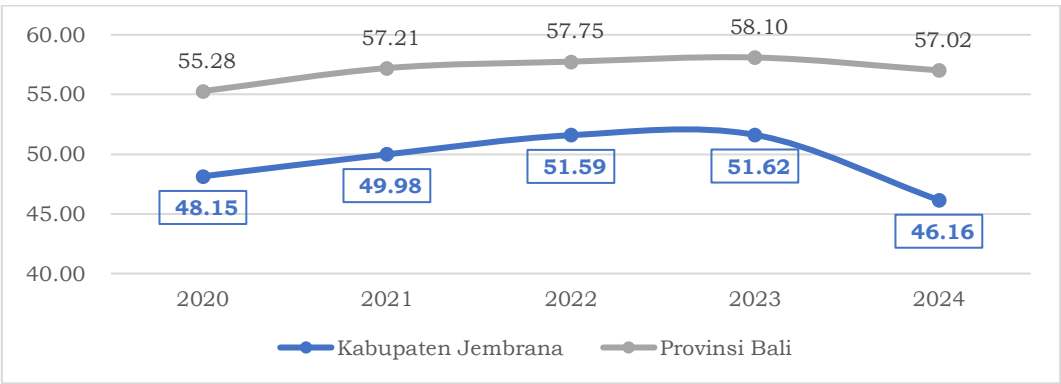


Gambar 2.58 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

D. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan meskipun berada di bawah Provinsi Bali seperti pada gambar di bawah. Artinya, penduduk Kabupaten Jembrana semakin sejahtera. Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Jembrana merosot ke angka 46,16 seperti pada gambar di bawah.

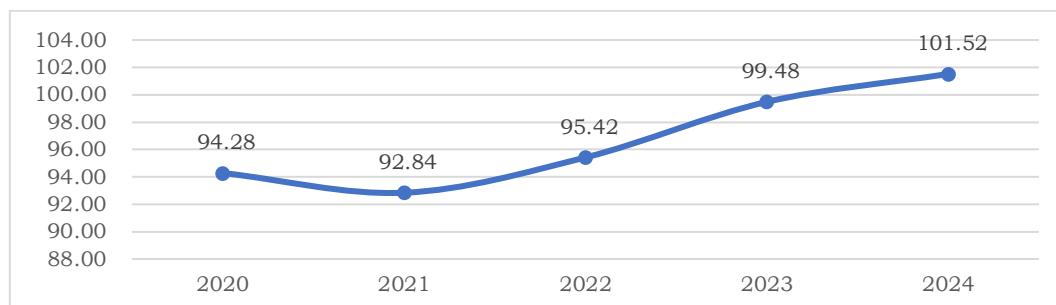


Gambar 2.59 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dan Provinsi Bali dalam Angka 2015–2024 dan Badan Pusat Statistik (2025)

E. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani di Provinsi Bali menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2020 hingga 2023, nilainya masih di bawah 100,00 yang berarti harga yang diterima petani lebih rendah daripada harga produk yang dibutuhkan petani. Meskipun demikian, nilai ini terus naik hingga mencapai 101,52 pada tahun 2024.



Gambar 2.60 Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2020–2025

F. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung berdasarkan produktivitas setiap sektor per angkatan kerja. Produktivitas total daerah di Kabupaten Jembrana meningkat dari 15,10 pada tahun 2020 menjadi 15,30 pada tahun 2021.

G. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan berdasarkan tiga pilar, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappenas, indeks pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Jembrana menunjukkan tingkat yang memuaskan ($4 \leq \text{IPEI} < 8$). Pada tahun 2020 dan 2021, IPEI Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan dari 4,99 menjadi 5,80. Pada tahun 2023, nilainya menjadi 5,98 namun masih lebih rendah dari Provinsi Bali (7,04) dan Nasional (6,17). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif, kinerja Kabupaten Jembrana masih sedikit tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, sehingga dibutuhkan percepatan program penguatan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

2.1.3.3. PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Penerapan ekonomi hijau dan biru memberikan gambaran mengenai kondisi transformasi ekonomi yang ditunjukkan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat melalui

beberapa indikator indeks ekonomi hijau, indeks ekonomi biru Indonesia, dan porsi EBT dalam bauran energi primer. Namun, ketiga indikator tersebut belum terukur di level pemerintah Kabupaten Jembrana.

2.1.3.4. TRANSFORMASI DIGITAL

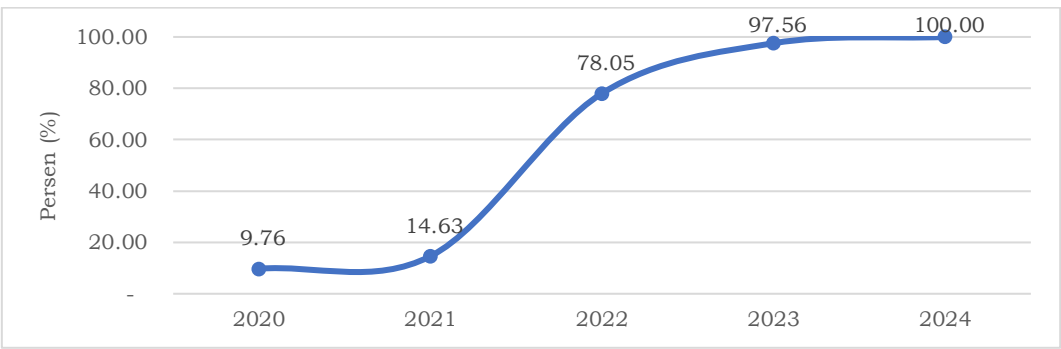
Transformasi digital menjelaskan mengenai pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Transformasi digital dapat terukur melalui indikator indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, indeks tersebut belum terukur di lingkup wilayah Kabupaten Jembrana.

2.1.3.5. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Integrasi ekonomi domestik dan global berfokus pada upaya mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa indikator seperti pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, koefisien variasi harga antar wilayah, rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, dan tingkat inklusi keuangan per kabupaten. Namun, saat ini Kabupaten Jembrana belum mengukur indikator-indikator tersebut.

2.1.3.6. PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Persentase desa berstatus swasembada (mandiri) di Kabupaten Jembrana terus meningkat. Pada tahun 2023, hanya tersisa satu desa yang masih berstatus nonmandiri, yaitu Desa Warnasari, Kecamatan Melaya. Pada tahun 2024, seluruh desa di Kabupaten Jembrana memiliki status mandiri.



Gambar 2.61 Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2021–2025

2.1.3.7. STABILITAS EKONOMI MAKRO

A. Tingkat Inflasi

Pengukuran laju inflasi di Provinsi Bali hanya dilakukan di Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Dikarenakan Kota Singaraja relatif lebih dekat, analisis laju inflasi Kabupaten Jembrana dilakukan berdasarkan laju inflasi Kota Singaraja. Berdasarkan data terbaru, laju inflasi *year-on-year* di Kota Singaraja mengalami peningkatan dari 2,80% pada Januari 2024 menjadi 3,71% pada Maret 2024, sebelum sedikit menurun ke 3,69% pada April 2024.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi di Jembrana meliputi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pendidikan; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain itu, tekanan inflasi tahunan cenderung meningkat pada awal tahun akibat lonjakan permintaan selama perayaan keagamaan seperti Galungan, Nyepi, dan Ramadan. Meskipun terdapat peningkatan tekanan harga pada beberapa bulan, inflasi di Kabupaten Jembrana masih terkendali dengan laju yang relatif stabil di bawah 4%. Tren ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga, meskipun terdapat faktor musiman yang mempengaruhi pergerakan inflasi.

Tabel 2.18 Laju Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan Nasional

No.	Bulan/Tahun	Singaraja	Denpasar	Bali	Nasional
Inflasi Bulanan (month-to-month)					
1.	Desember 2024	1,93	2,69	2,34	1,57
2.	November 2024	1,98	2,82	2,50	1,55
3.	Oktober 2024	1,71	2,96	2,51	1,71
4.	September 2024	1,78	2,99	2,67	1,84
5.	Agustus 2024	1,69	2,95	2,32	2,12
6.	Juli 2024	2,07	3,04	2,53	2,13
7.	Juni 2024	2,14	3,18	2,71	2,51
8.	Mei 2024	2,92	3,52	3,54	2,84
9.	April 2024	0,07	0,53	0,32	0,25
10.	Maret 2024	0,89	0,87	0,93	0,52
11.	Februari 2024	0,51	0,65	0,61	0,37
12.	Januari 2024	-0,22	-0,08	-0,09	0,04
13.	Desember 2023	0,43	0,49	-	0,41
14.	November 2023	0,87	0,33	-	0,38
15.	Oktober 2023	0,44	0,15	-	0,17
16.	September 2023	-0,05	-0,03	-	0,19
17.	Agustus 2023	0,27	0,21	-	-0,02
18.	Juli 2023	0,25	0,36	-	0,21
19.	Juni 2023	0,22	-0,08	-	0,14
20.	Mei 2023	0,37	0,34	-	0,09
Inflasi Bulanan (month-to-month)					
1.	Januari 2024	2,80	2,12	2,61	2,57
2.	Februari 2024	3,02	2,72	2,98	2,75
3.	Maret 2024	3,71	3,43	3,67	3,05
4.	April 2024	3,69	3,94	4,02	3,00
Inflasi Tahunan					
1.	2023	4,31	2,54	-	2,61
2.	2022	4,63	6,44	-	5,51
3.	2021	2,39	2,01	-	1,87
4.	2020	2,48	0,55	-	1,68



No.	Bulan/Tahun	Singaraja	Denpasar	Bali	Nasional
5.	2019	2,42	2,37	-	2,72
6.	2018	1,88	3,40	-	3,13
7.	2017	3,38	3,31	-	3,61
8.	2016	4,57	2,94	-	3,02
9.	2015	2,97	2,70	-	3,35
10.	2014	10,32	8,03	-	8,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2024)



Gambar 2.62 Laju Inflasi Provinsi Bali Tahun 2019–2023

Sumber: Bank Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (2024)

2.1.3.8. DAYA SAING FASILITAS/INFRASTRUKTUR WILAYAH

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah merupakan bagian dari aspek daya saing. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, baik yang telah tersedia maupun akan dibangun, sesuai dokumen perencanaan pembangunan nasional/sektoral lainnya. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah diukur berdasarkan indeks infrastruktur/kualitas layanan infrastruktur. Hingga saat ini, belum dilakukan pengukuran indeks tersebut di Kabupaten Jembrana.

2.1.3.9. DAYA SAING IKLIM INVESTASI

Daya saing iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing. Daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah, seperti kemudahan berinvestasi, situasi politik, dan keamanan dan ketertiban daerah.

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

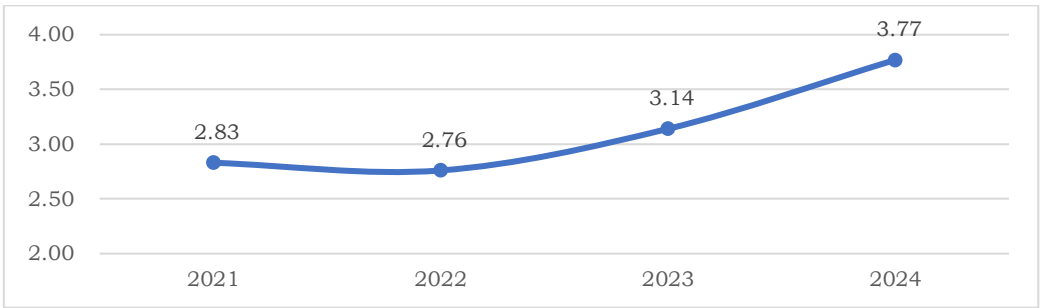
2.1.4.1. REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum merupakan ukuran pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi hukum di wilayahnya. Berdasarkan data milik Kementerian PAN RB, indeks reformasi hukum Kabupaten Jembrana tahun 2024 hampir optimal dengan nilai 98,2.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indeks SPBE Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kematangan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jembrana. Namun, nilai ini masih dapat ditingkatkan dan dioptimalkan untuk memberikan penerapan SPBE yang lebih baik.



Gambar 2.63 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024

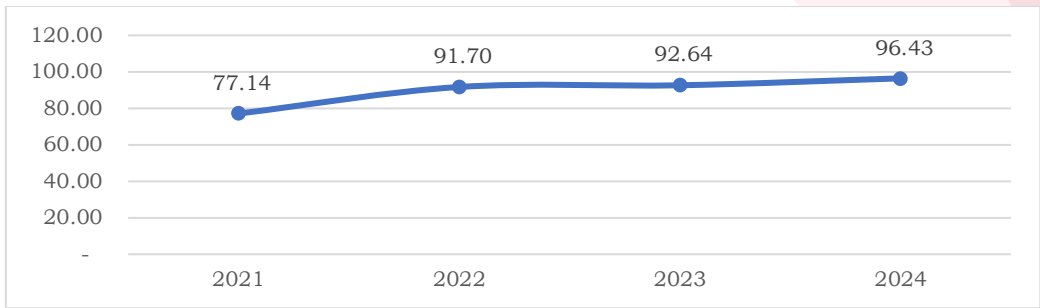
Sumber: Kementerian PAN RB (2025) dan Mahkamah Konstitusi (2021-2024)

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan ukuran kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan data milik Kementerian PAN RB, indeks pelayanan publik Kabupaten Jembrana meningkat dari 3,34 pada tahun 2023 menjadi 3,65 pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian ini perlu ditingkatkan untuk mendorong optimalisasi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana.

D. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik adalah penilaian kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat. IPKP Kabupaten Jembrana berada mengalami peningkatan yang signifikan. Indeks tersebut tumbuh dari 77,14 (2021) menjadi 96,43 (2024). Nilai tersebut tergolong tinggi meski masih dapat ditingkatkan dan dioptimalkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.64 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Jember Tahun 2021–2024

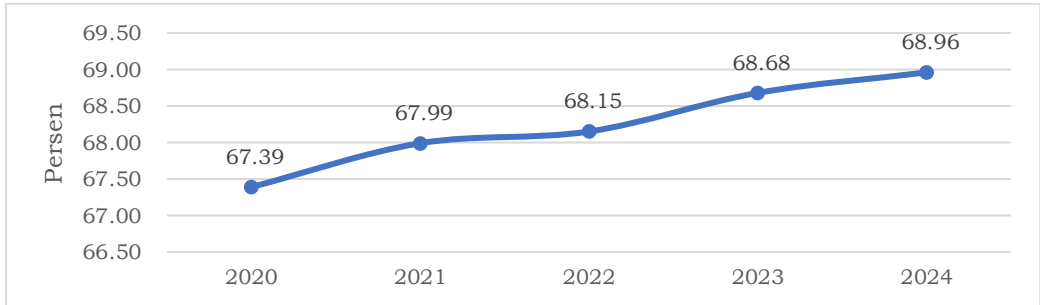
Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

E. Indeks Sistem Merit (indeks)

Indeks sistem merit adalah ukuran untuk menilai penerapan kebijakan dan manajemen ASN dalam lingkup wilayah tertentu. Berdasarkan LKJIP BKPSDM Kabupaten Jember tahun 2021-2024, Indeks sistem merit Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang mencapai 0,65 menjadi 0,74 pada tahun 2023 dan 2024. Nilai tersebut menunjukkan masih perlunya optimalisasi efektivitas penerapan kebijakan dan manajemen ASN di Kabupaten Jember.

F. Nilai SAKIP (%)

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP diketahui melalui hasil evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP. Berdasarkan data laporan kinerja, nilai SAKIP Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 67,99 dan meningkat menjadi 68,15 pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 68,58. Ini mengindikasikan upaya perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2024, nilai SAKIP Kabupaten Jember meningkat menjadi 68,96.



Gambar 2.65 Nilai SAKIP Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

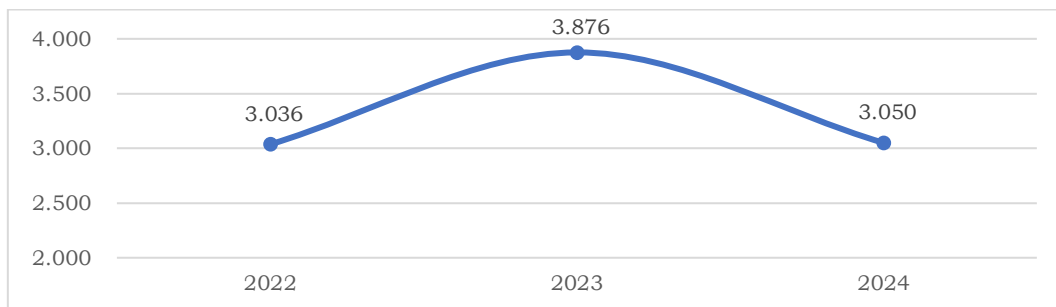
G. Nilai Maturitas SPIP (Level)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas SPIP dinilai dalam beberapa level, umumnya dari Level 1 (Rintisan/Rintis) hingga Level 5 (Optimum). Semakin tinggi levelnya, semakin baik dan terintegrasi sistem pengendalian intern yang diterapkan.

Berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Jembrana, seperti Lampiran Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Roadmap Reformasi Birokrasi*, disebutkan bahwa Maturitas SPIP Kabupaten Jembrana telah mencapai Level 3. Level 3 dalam maturitas SPIP biasanya diartikan sebagai "Terdefinisi" atau "Terkelola" (beberapa kerangka memiliki nomenklatur sedikit berbeda, namun maknanya serupa). Ini berarti:

- Telah Terdokumentasi: Proses dan kebijakan SPIP telah ditetapkan dan didokumentasikan dengan baik.
- Diterapkan Secara Konsisten: SPIP telah diterapkan secara konsisten di sebagian besar unit kerja.
- Ada Pengukuran: Kinerja pengendalian sudah mulai diukur, meskipun mungkin belum sepenuhnya terintegrasi.
- Risiko Teridentifikasi: Risiko-risiko utama sudah mulai diidentifikasi dan dikelola.

Meskipun Level 3 merupakan pencapaian yang baik dan menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola, masih ada ruang untuk perbaikan menuju Level 4 (Terkelola dan Terukur/Terpadu) dan Level 5 (Optimum). Peningkatan ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas SAKIP dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah.



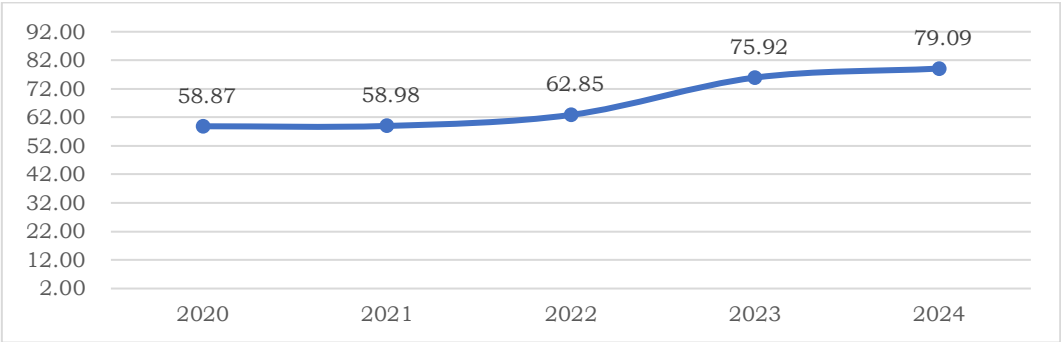
Gambar 2.66 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024

Sumber: Kementerian PANRB (2024) dan Lampiran Perbup Jembrana No 45 tahun 2023 (dalam RPJPD Jembrana)

Nilai maturitas SPIP Kabupaten Jembrana tahun 2022-2024 berkisar pada angka 3. Hal ini menunjukkan pencapaian yang baik, tetapi masih dapat dioptimalkan.

H. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Jembrana tahun 2020-2022 cenderung stagnan pada kisaran nilai 50-60. Namun, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 75,92 (B). Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi juga mengalami peningkatan menjadi 79,09 (A). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil implementasi pelaksanaan reformasi dan birokrasi.



Gambar 2.67 Indeks Reformasi dan Birokrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian PANRB (2024); Lampiran Perbup Jembrana No 45 tahun 2023 (dalam RPJPD Jembrana); Sekretariat Daerah Kab. Jembrana (2025)

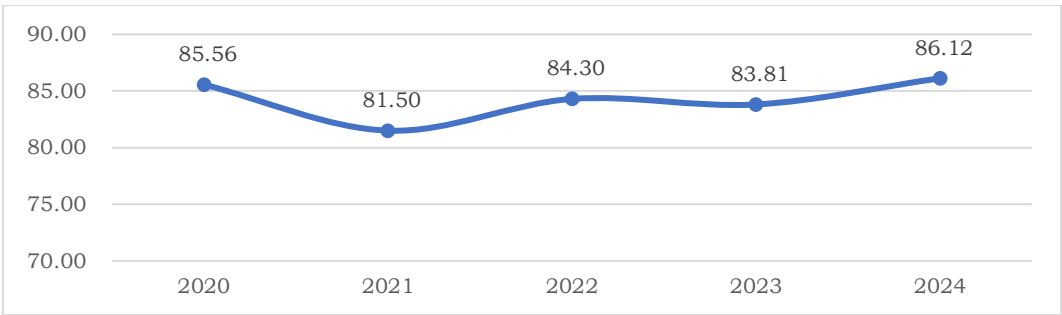
I. Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City)

Evaluasi implementasi kota cerdas merupakan ukuran ketercapaian pengembangan dan implementasi *smart city* dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi yang dirilis oleh Kementerian KOMINFO tahun 2023 dan 2024, implementasi kota cerdas Kabupaten Jembrana masih berada dalam kisaran angka 2,72 dan 2,9. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan serta optimalisasi implementasi program kota cerdas di Kabupaten Jembrana.

J. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari pendapat masyarakat (harapan dan kebutuhan) terhadap pelayanan pemerintah. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren kenaikan indeks yang berarti pelayanan publik di Kabupaten Jembrana sudah baik. Pada masa pandemi Covid-19, nilai indeks

kepuasan masyarakat cenderung rendah karena tutupnya kantor dan sulitnya adaptasi masyarakat terhadap prosedur administrasi secara daring. Pada tahun 2022, indeks kepuasan masyarakat berhasil dinaikkan melalui berbagai inovasi pelayanan.



Gambar 2.68 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sekretariat Daerah

K. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun 2024, indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Jember mencapai 77,07. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi dan peningkatan kapasitas untuk mengoptimalkan kinerja ASN di lingkup Kabupaten Jember.

L. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember tahun 2024 mencapai 94,06. Nilai tersebut menunjukkan kondisi perencanaan pembangunan daerah yang sudah baik.

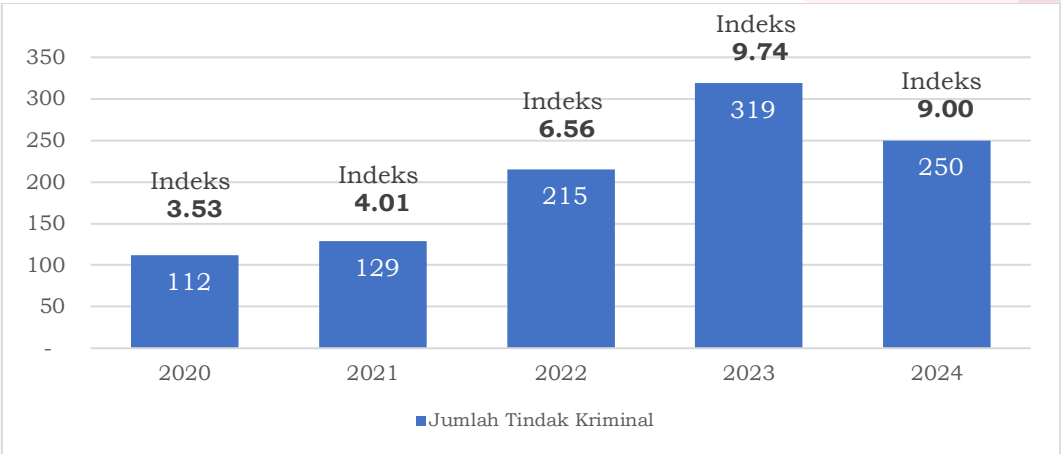
2.1.4.2. HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A. Persentase Penegakan Perda

Sesuai dengan laporan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tahun 2020-2024, persentase penegakan peraturan daerah di Kabupaten Jember telah optimal pada angka 100%.

B. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Jumlah kriminalitas di Kabupaten Jember cenderung meningkat sejak tahun 2020. Meskipun demikian, jumlah tersebut berkurang pada tahun 2024 menjadi 250 tindak kriminal dengan indeks 9,00 (artinya, ditemukan 9 kasus kriminal per 10.000 penduduk).

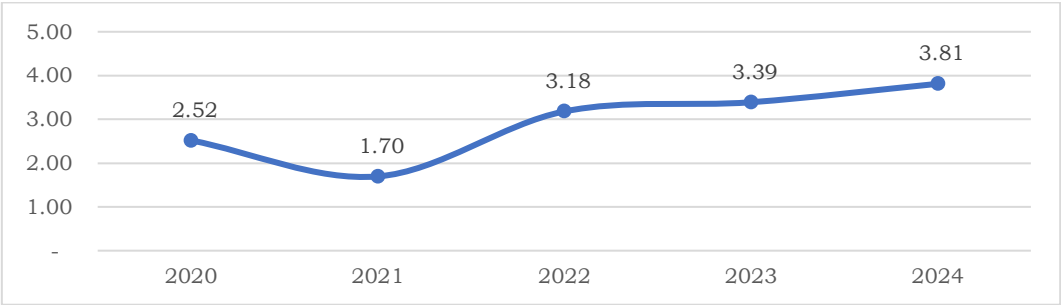


Gambar 2.69 Jumlah dan Indeks Kriminalitas Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepolisian Resor Jembrana 2025 (Diolah)

2.1.4.3. KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Indeks daya saing daerah merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks daya saing daerah Kabupaten Jembrana tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan tren penurunan, sedangkan capaian pada tahun-tahun setelahnya menunjukkan tren pertumbuhan.



Gambar 2.70 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan IDSD Kabupaten Jembrana 2020–2021 dan Indeks Daya Saing Daerah 2022–2024

2.1.4.4. KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), perlu dilakukan penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Target pendidikan yang perlu dicapai, yaitu

- a. pendidikan dasar dan menengah gratis;
- b. akses yang sama terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas;

- c. akses yang sama ke pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi;
- d. peningkatan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan untuk kesuksesan finansial;
- e. hilangnya semua diskriminasi dalam pendidikan;
- f. literasi dan numerasi universal;
- g. pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global;
- h. pembangunan dan peningkatan sekolah inklusif dan aman;
- i. perluasan beasiswa pendidikan tinggi untuk negara berkembang; dan
- j. peningkatan pasokan guru yang berkualitas di negara berkembang.

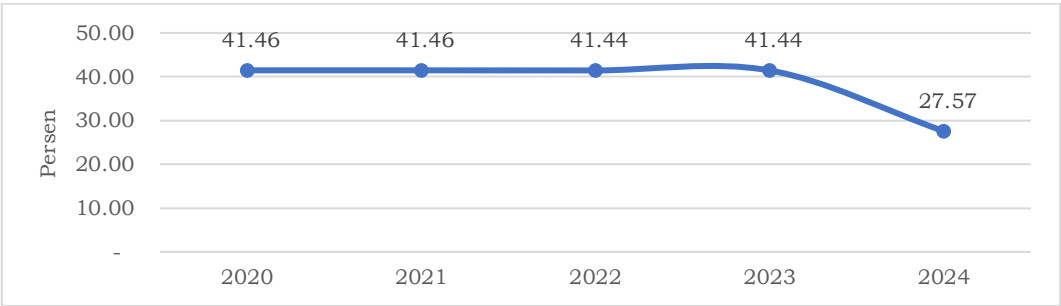
1) Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini ditujukan kepada anak usia prasekolah (hingga usia 6 tahun). Jumlah TK/RA di Kabupaten Jembrana lebih dari jumlah desa/kelurahannya. Jumlah dan persentase murid TK/RA di Kabupaten Jembrana pun menunjukkan tren pertumbuhan seperti pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2.19 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sekolah	155	158	159	157	147
Jumlah guru	536	515	496	517	490
Jumlah murid	5.790	5.420	5.510	5.750	5.937

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025



Gambar 2.71 Persentase Murid TK/RA di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2025)

2) Kondisi Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar ditujukan untuk penduduk usia 7–15 tahun yang diberikan dalam dua jenjang, yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lainnya yang sederajat. Jumlah SD/MI di Kabupaten Jembrana telah

memenuhi kebutuhan penduduk usia 7–12 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah yang masih berada di bawah 1:672 sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dengan asumsi setiap sekolah memiliki 24 rombongan belajar. Dari peraturan yang sama, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di sekolah dasar pun masih berada di bawah 1:28. Selain itu, rasio guru terhadap murid masih berada di bawah 1:20 sesuai standar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Meskipun demikian, perlu menambah jumlah guru yang berkualifikasi S-1/D-IV karena proporsinya belum 100%.

Tabel 2.20 Kondisi SD/MI di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sekolah berkondisi baik	100,00	100,00	78,00	82,75	95,13
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:106	1:157	1:135	1:152	1:208
Rasio guru terhadap murid	1:15	1:15	1:14	1:13	1:14
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (sekolah umum)	1:20	1:20	1:19	1:19	1:18
Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	75,73	75,73	98,99	100,00	99,34

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2021–2026; LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2020–2023; Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024; Data Pokok Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2024)

Jumlah SMP/MTs di Kabupaten Jembrana telah memenuhi kebutuhan penduduk usia 12–15 tahun. Hal ini dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah yang masih berada di bawah 1:1.056 sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dengan asumsi setiap sekolah memiliki 33 rombongan belajar. Dari peraturan yang sama, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di sekolah menengah pertama pun masih berada di bawah 1:32. Selain itu, rasio guru terhadap murid masih berada di bawah 1:20 sesuai standar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Meskipun demikian, perlu meningkatkan proporsi guru yang berkualifikasi S-1/D-IV.

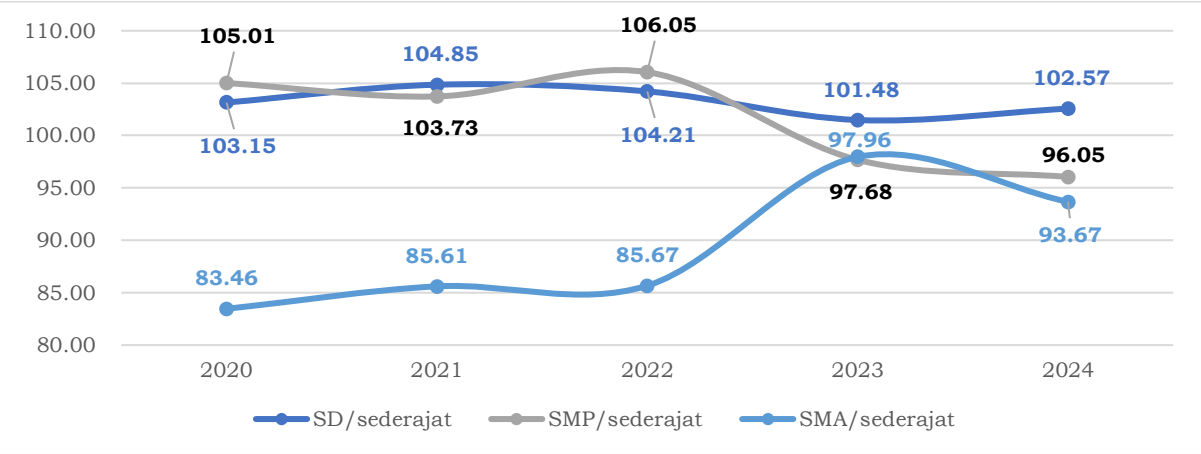
Tabel 2.21 Kondisi SMP/MTs di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase sekolah berkondisi baik	100,00	100,00	88,00	88,45	95,23
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1:379	1:369	1:269	1:424	1:454
Rasio guru terhadap murid	1:15	1:14	1:14	1:14	1:17
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (sekolah umum)	1:31	1:31	1:31	1:31	1:29
Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	85,09	85,09	99,78	100,00	97,82

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2021–2026; LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2020–2023; Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024; Data Pokok Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2024)

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk usia berapa pun pada jenjang sekolah tertentu. Di Kabupaten Jembrana, APK SD dan SMP atau sederajat menunjukkan tren fluktuatif dengan nilai di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat murid yang tidak bersekolah sesuai usia jenjangnya. Berbeda dengan keduanya, APK SMA/ sederajat mengalami tren pertumbuhan dan pada tahun 2023 hampir mencapai 100%.

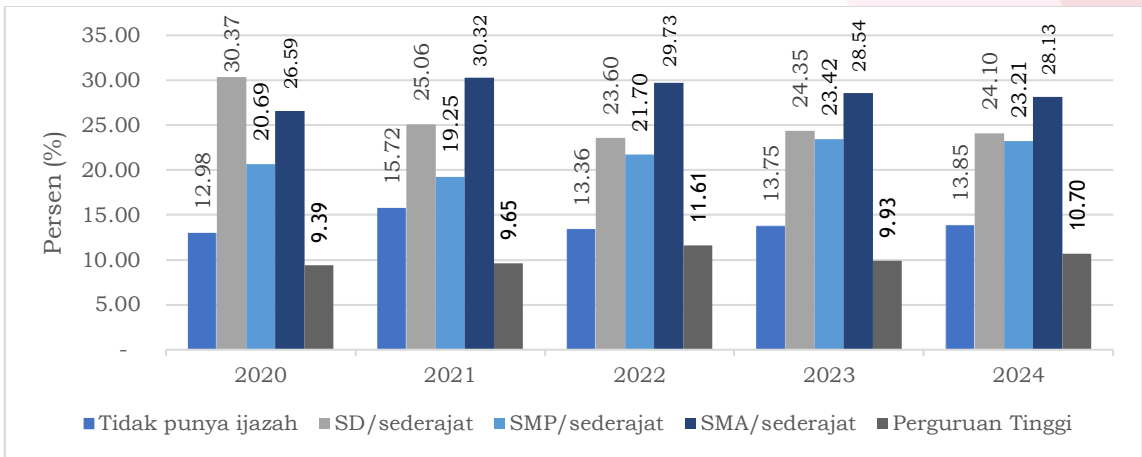


Gambar 2.72 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

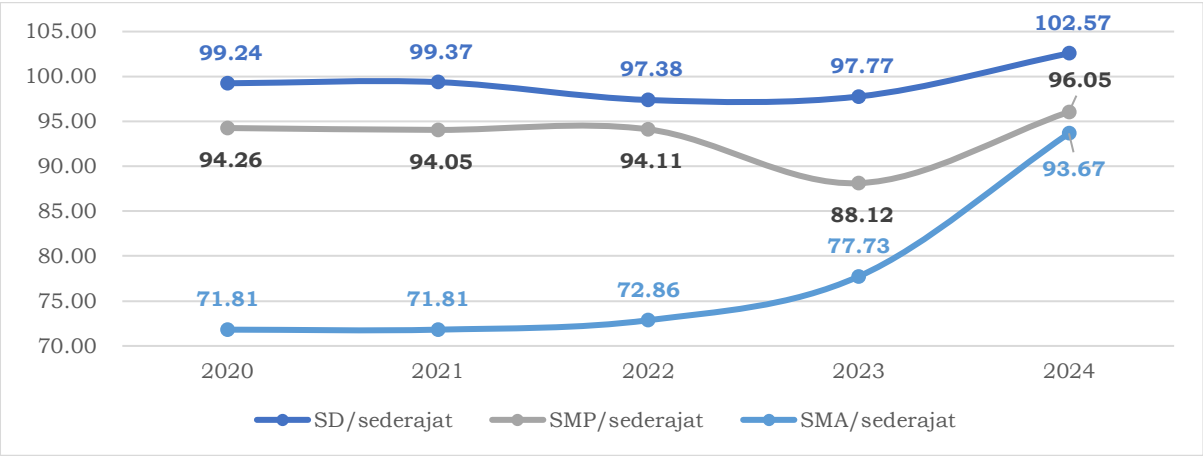
Pada tahun 2024, sebagian besar penduduk Kabupaten Jembrana telah menamatkan pendidikan dasar. Meskipun lebih dari 38% penduduk Kabupaten Jembrana belum menamatkannya, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan menengah dan tinggi terus meningkat seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.73 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

5) Angka Partisipasi Murni

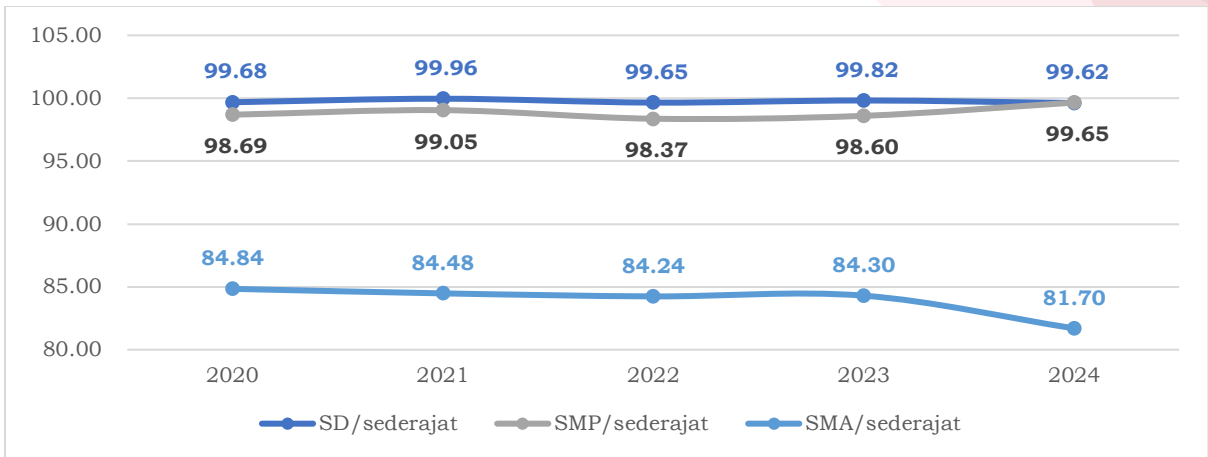
Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan partisipasi bersekolah penduduk berusia sesuai dengan jenjangnya. Di Kabupaten Jembrana, APM SD dan SMP atau sederajat menunjukkan tren penurunan meskipun tetap berada di atas 90%, kecuali APM SMP/ sederajat pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan APM, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Berbeda dengan keduanya, APM SMA/ sederajat mengalami tren pertumbuhan.



Gambar 2.74 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025

6) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjangnya. Di Kabupaten Jembrana, APS setiap jenjang sekolah menunjukkan tren fluktuatif dengan nilai lebih dari 98% untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat serta 84% untuk jenjang SMA/ sederajat.

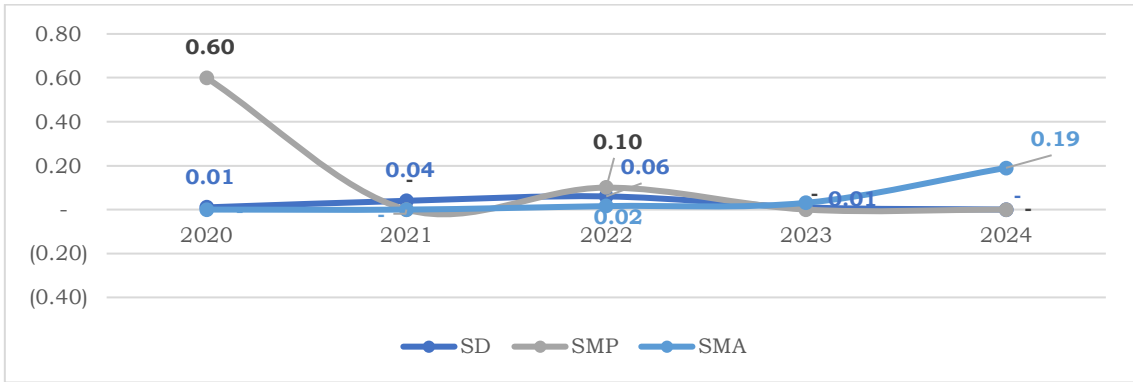


Gambar 2.75 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2020–2024

7) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan persentase murid yang berhenti bersekolah sebelum menamatkan pendidikan jenjang tertentu. Angka putus sekolah di Kabupaten Jember relatif rendah.



Gambar 2.76 Angka Putus Sekolah Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

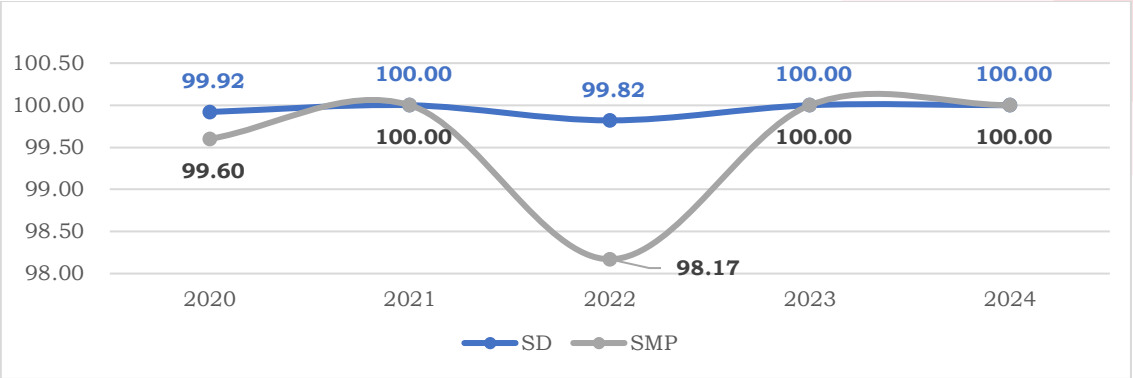
Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2020–2020; Data Pokok Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (2025)

8) Angka Kelulusan

Angka kelulusan SD dan SMP atau sederajat Kabupaten Jember selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

9) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan menunjukkan persentase murid yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Angka melanjutkan SD dan SMP atau sederajat di Kabupaten Jember menunjukkan tren fluktuatif dengan nilai lebih dari 98%.

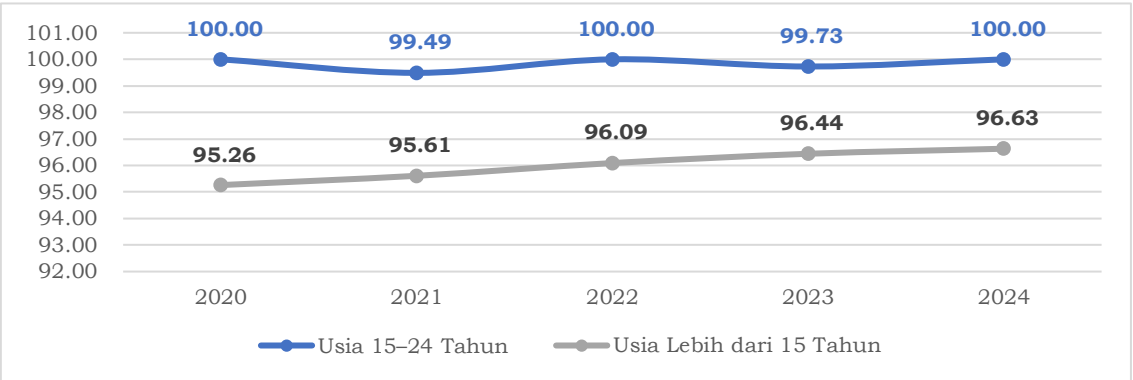


Gambar 2.77 Angka Melanjutkan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun 2020–2023 dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (2025)

10) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Kabupaten Jembrana untuk penduduk usia 15–24 tahun terlihat fluktuatif, sedangkan penduduk secara umum menunjukkan tren pertumbuhan. Angka melek huruf Kabupaten Jembrana terbilang tinggi, yaitu lebih dari 95%.



Gambar 2.78 Angka Melek Huruf Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2025 dan Badan Pusat Statistik (2025)

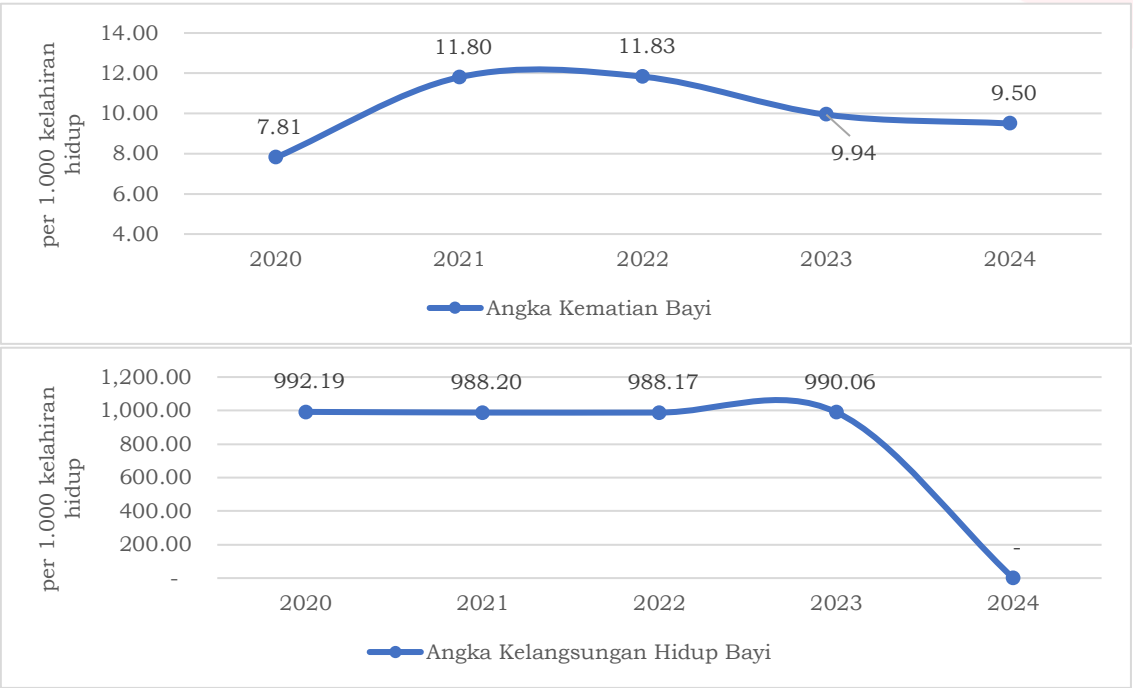
2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi investasi yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan juga menjadi bagian dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis capaian pembangunan kesehatan sebagai dasar perencanaan kesehatan.

1) Angka Kematian dan Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi menunjukkan jumlah kematian bayi (berusia kurang dari 1 tahun) terhadap 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan jumlah bayi yang berhasil hidup hingga berusia 1 tahun. Angka kematian dan kelangsungan hidup bayi dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan terhadap bayi, anak, ibu, dan bahkan keseluruhan penduduk. Angka kematian bayi Kabupaten Jembrana cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan

kurangnya kualitas pelayanan kesehatan, kurangnya asupan gizi, dan kurang sehatnya ibu hamil dan melahirkan di Kabupaten Jembrana.

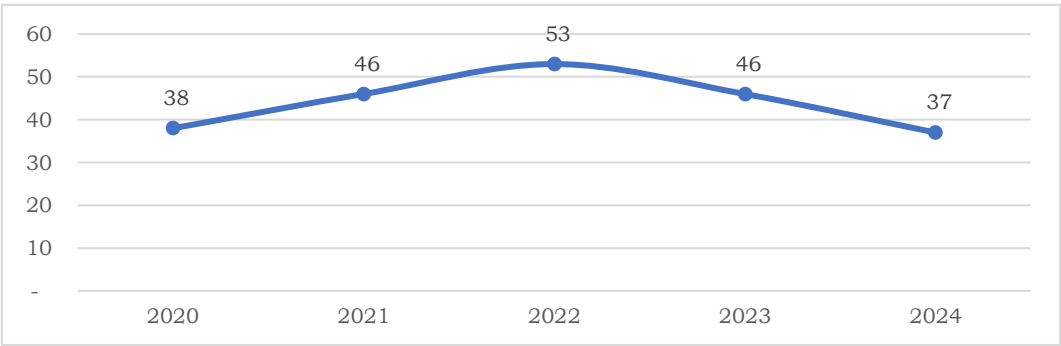


Gambar 2.79 Angka Kematian dan Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

2) Jumlah Kematian Balita

Jumlah kematian balita di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif. Jumlah kematian balita pada tahun 2020 sebanyak 38 bayi, Jumlah tersebut meningkat signifikan hingga tahun 2022 sebelum akhirnya menurun hingga tahun 2024 dengan capaian akhir sebanyak 37 bayi.

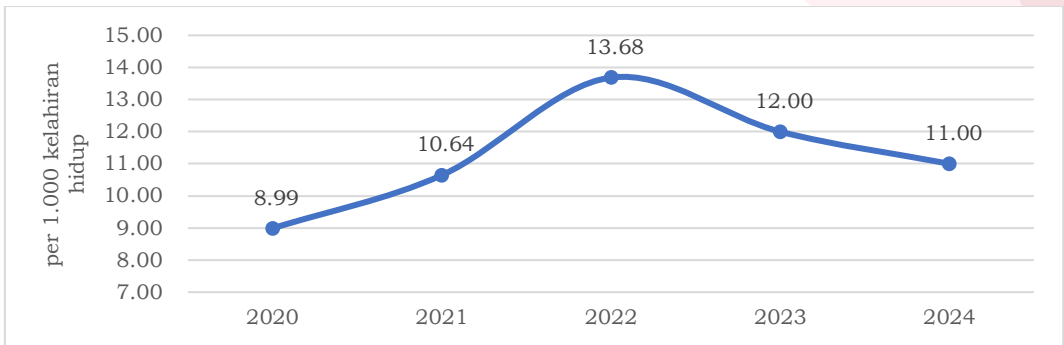


Gambar 2.80 Jumlah Kematian Balita Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Dinas Kesehatan (2025)*

3) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menunjukkan jumlah kematian balita (anak usia 1–5 tahun) terhadap 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita dapat digunakan untuk menilai kualitas kesehatan balita dan hal-hal yang memengaruhinya, seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi, dan kecelakaan. Angka kematian balita Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif.

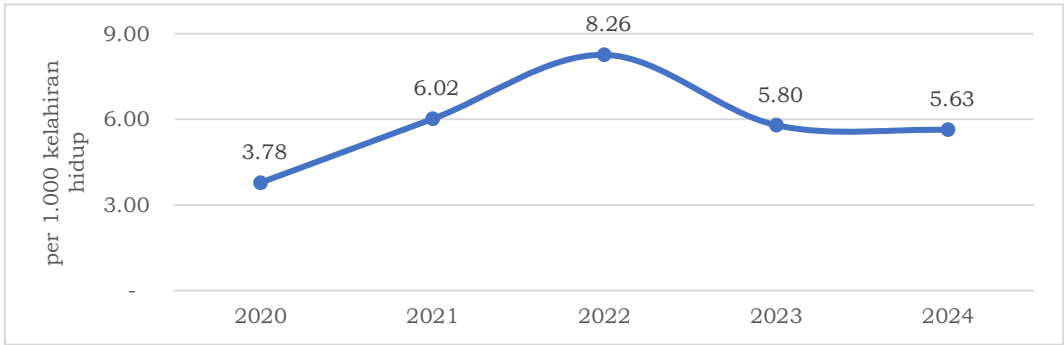


Gambar 2.81 Angka Kematian Balita Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2022–2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

4) Angka Kematian Neonatal

Angka kematian neonatal (kematian bayi endogen) menunjukkan jumlah kematian bayi sebulan pertama terhadap 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal umumnya disebabkan oleh hal-hal yang dibawa anak sejak lahir dan kehamilan. Angka kematian neonatal cenderung fluktuatif.

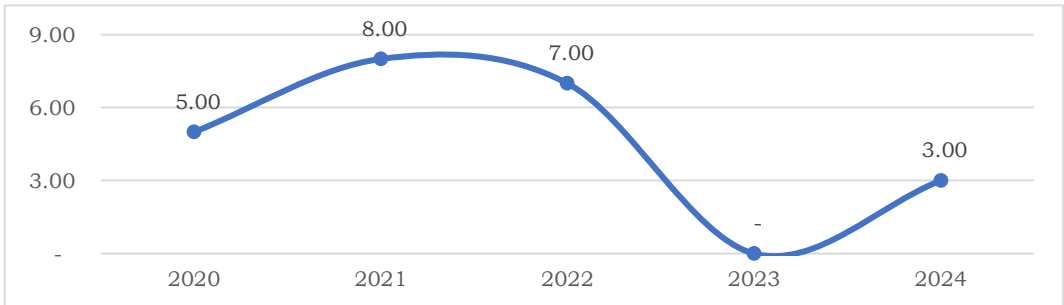


Gambar 2.82 Angka Kematian Neonatal Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jember 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2022–2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

5) Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jember memiliki tren fluktuasi. Tahun 2021 dan 2022 menjadi tahun dengan jumlah kasus kematian tertinggi yakni 8 dan 7 kasus kematian, sedangkan pada tahun selanjutnya tidak terdapat kasus kematian ibu. Meskipun tergolong rendah, keberadaan kasus kematian ibu perlu menjadi fokus penanganan.

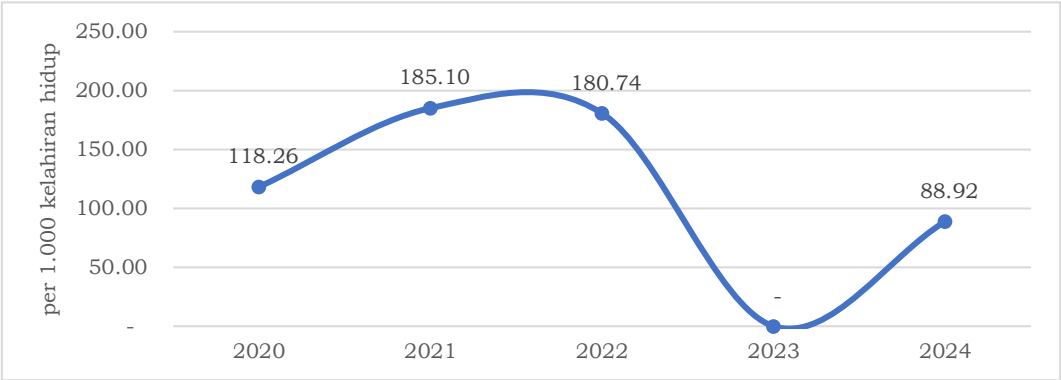


Gambar 2.83 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: *Dinas Kesehatan (2025)*

6) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu menunjukkan jumlah kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas terhadap 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu digunakan untuk menilai kesadaran PHBS, status gizi dan kesehatan, dan pelayanan kesehatan, serta kondisi kesehatan lingkungan. Angka kematian ibu Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, pada tahun 2023, tidak terdapat kematian ibu di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.84 Angka Kematian Ibu Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023), dan Dinas Kesehatan (2025)

7) Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk

Rasio ketersediaan fasilitas kesehatan dihitung berdasarkan jumlah posyandu per 1.000 balita; jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (pustu) per 1.000 penduduk, dan jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Rasio posyandu cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2022 dan 2023; sedangkan rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu, serta rumah sakit cenderung menurun. Meskipun demikian, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Jembrana masih memenuhi standar minimal nasional.

Tabel 2.22 Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per 1.000 balita	21,14	21,74	17,35	20,65	21,44
Rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Dinas Kesehatan (2025), dan Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024

8) Rasio Tenaga Medis dan Kesehatan terhadap Penduduk

Rasio tenaga medis dan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah tenaga medis dan kesehatan per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang

dimaksud adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; sedangkan tenaga kesehatan yang dimaksud adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang sebagiannya berwenang melakukan upaya kesehatan. Rasio tenaga medis dan kesehatan cenderung fluktuatif dengan rasio tertinggi dicapai pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio tenaga medis di Kabupaten Jembrana masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan kesehatan sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jembrana juga turut meningkat.

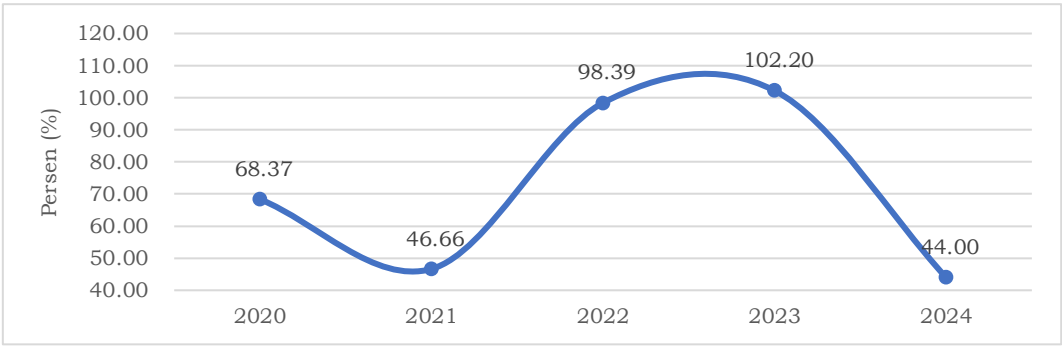
Tabel 2.23 Rasio Tenaga Medis dan Kesehatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio tenaga medis	0,75	0,75	0,74	0,54	0,63
Rasio tenaga kesehatan	2,73	3,18	3,18	2,49	2,74

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

9) Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

Komplikasi kebidanan adalah keadaan abnormal yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi secara langsung, seperti ketuban pecah dini, pendarahan vagina, hipertensi dalam kehamilan dengan atau tanpa pretibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet/tidak maju), dan infeksi masa nifas. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Jembrana sudah mulai baik.



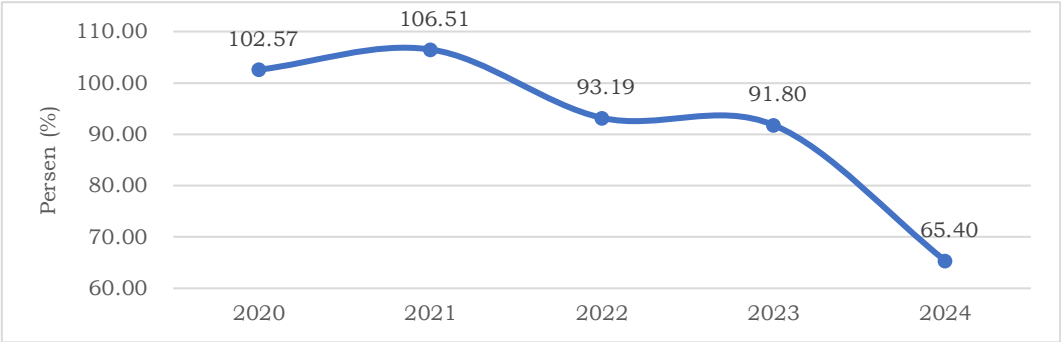
Gambar 2.85 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023 dan Dinas Kesehatan (2025)*

10) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pertolongan persalinan oleh bidan dan/atau dokter yang memiliki surat tanda register termasuk standar pelayanan persalinan, baik persalinan

normal maupun dengan komplikasi. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif dengan angka tertinggi tercapai pada tahun 2021. Meskipun demikian, angka tersebut sudah termasuk tinggi.



Gambar 2.86 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

11) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization*

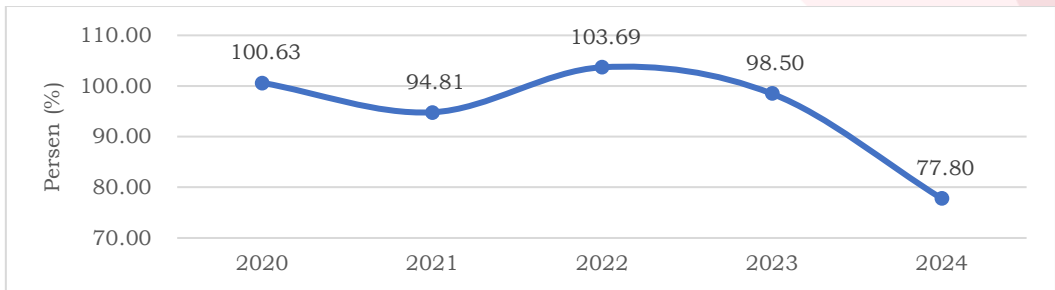
Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* menunjukkan persentase desa/kelurahan yang lebih dari 80% bayinya mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG sekali, DPT tiga kali, Hepatitis B empat kali, polio empat kali, dan campak empat kali) selama setahun. Pada tahun 2020 hingga 2023, seluruh desa/kelurahan di Jembrana termasuk dalam *universal child immunization*. Persentase tersebut turun menjadi 80,40% pada tahun 2024 (Dinas Kesehatan, 2025).

12) Cakupan Perawatan Balita Gizi Buruk

Cakupan perawatan balita gizi buruk di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

13) Proporsi Bayi yang Diimunisasi Campak

Proporsi bayi yang diimunisasi campak menunjukkan persentase bayi yang setidaknya telah diimunisasi campak sekali yang digunakan untuk menilai cakupan imunisasi dasar. Proporsi bayi yang diimunisasi campak di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas pelayanan kesehatan anak, dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Jembrana.

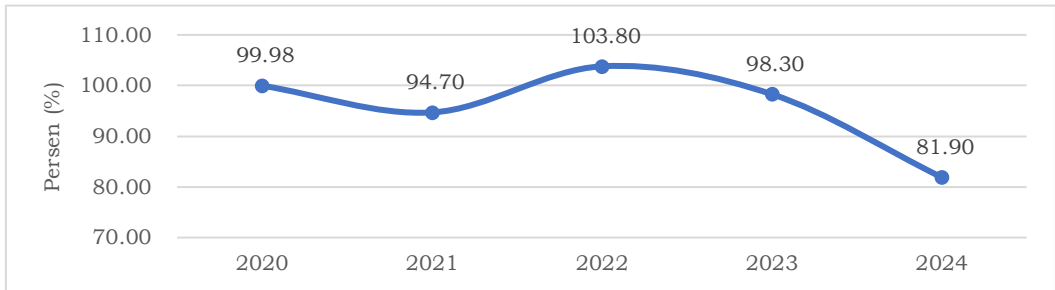


Gambar 2.87 Proporsi Bayi yang Diimunisasi Campak di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023 dan Dinas Kesehatan (2025)

14) Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap

Cakupan imunisasi bayi lengkap di Kabupaten Jembrana mengalami kecenderungan penurunan hingga nilai 81,90% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan cakupan pemberian imunisasi lengkap yang perlu diperhatikan oleh pemerintah khususnya untuk meningkatkan cakupan imunisasi lengkap.

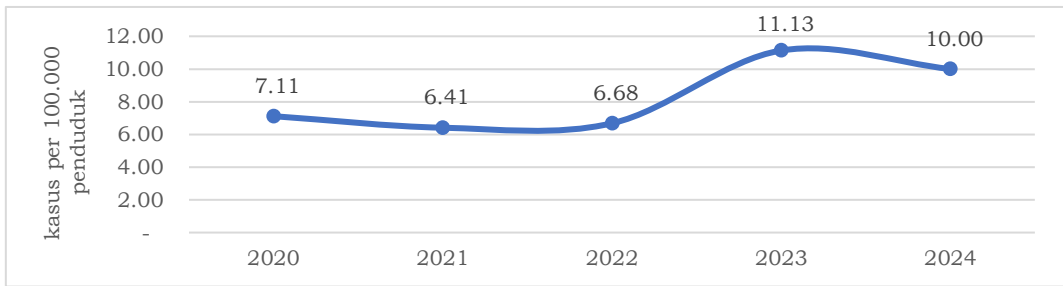


Gambar 2.88 Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

15) Nonpolio AFP Rate

Nonpolio AFP rate menunjukkan jumlah kasus AFP (*acute flaccid paralysis*; kondisi kelumpuhan bersifat *flaccid* pada anak usia kurang dari 15 tahun yang terjadi secara mendadak, bukan karena kecelakaan) nonpolio terhadap 100.000 penduduk. *Nonpolio AFP rate* Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022 dan 2023. Tingginya *nonpolio AFP rate* Kabupaten Jembrana (lebih dari 2,00) menunjukkan perlunya penanganan lebih lanjut terhadap nonpolio AFP.

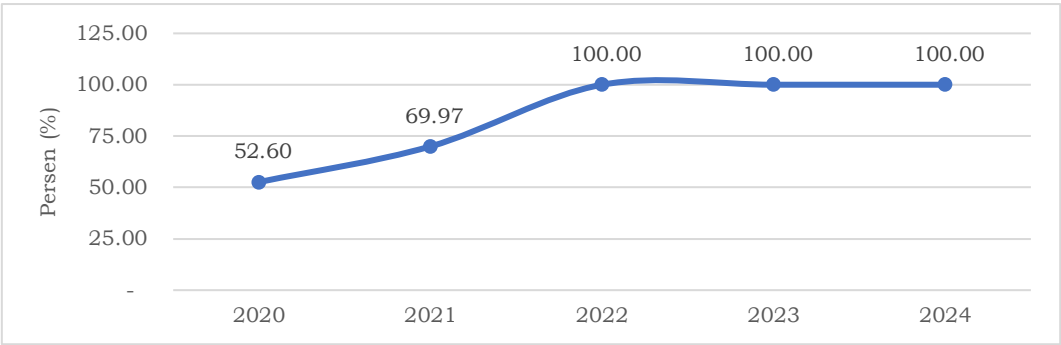


Gambar 2.89 Nonpolio AFP Rate Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2024)

16) Cakupan Penanganan Balita Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut pada jaringan paru-paru yang ditandai batuk dan napas cepat atau sukar. Cakupan penanganan balita pneumonia di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif.

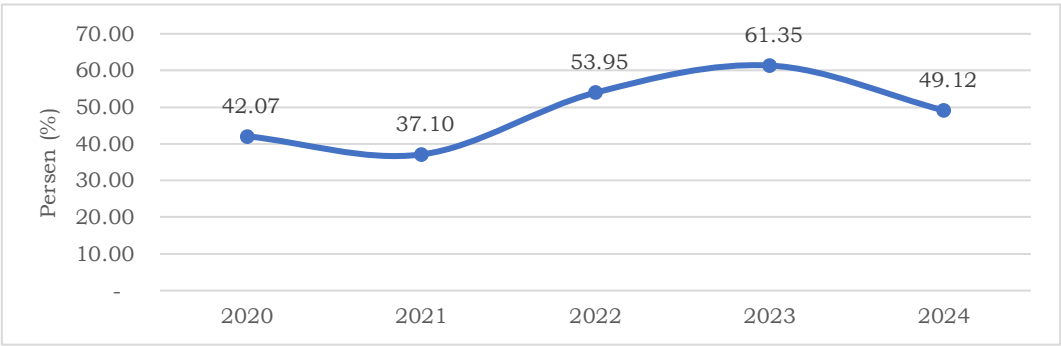


Gambar 2.90 Cakupan Penanganan Balita Pneumonia di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

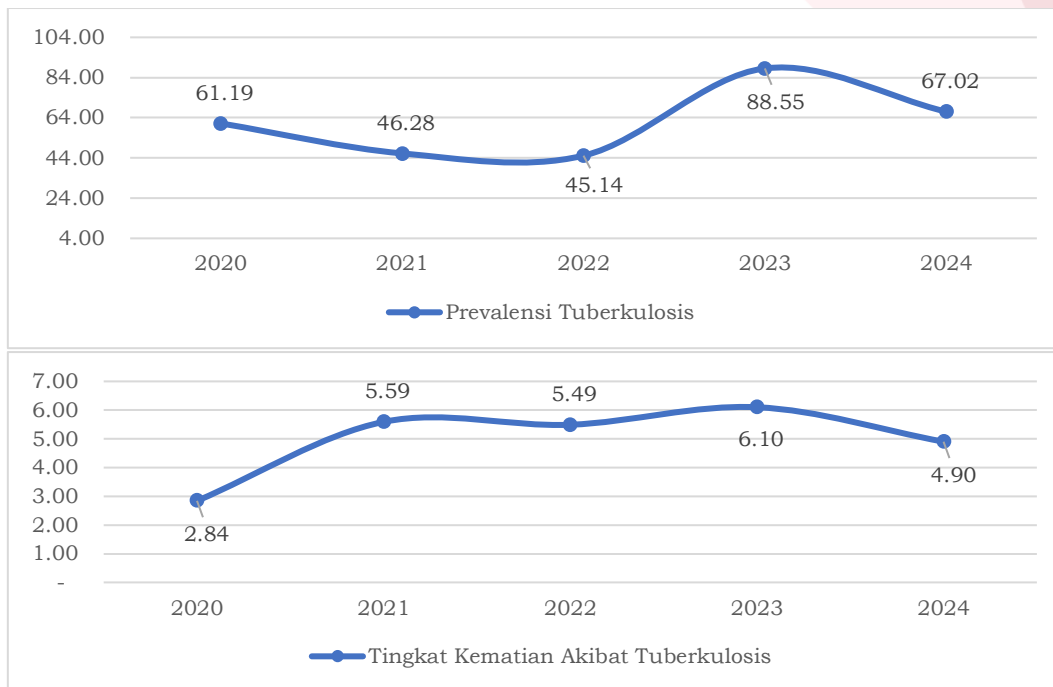
17) Kasus Tuberkulosis

Prevalensi tuberkulosis di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Dengan cakupan penemuan dan penanganan penderita tuberkulosis yang cenderung fluktuatif (meskipun belum 100%), hal ini mengindikasikan meningkatnya ketahanan penduduk terhadap tuberkulosis. Meskipun demikian, tingkat kematian akibat tuberkulosis masih relatif tinggi sehingga perlu perbaikan pelayanan kesehatan.



Gambar 2.91 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023 dan Dinas Kesehatan (2025)

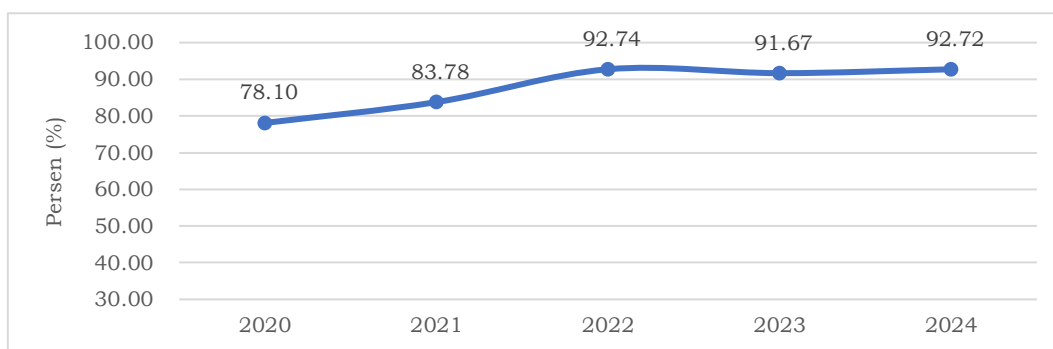


Gambar 2.92 Prevalensi dan Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis per 100.000 Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)*

18) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilainya konsisten di atas 90% kecuali pada tahun 2020 dan 2021.

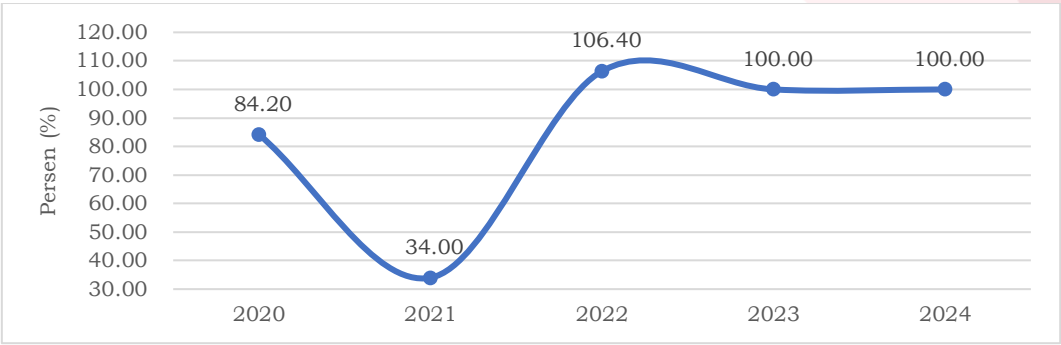


Gambar 2.93 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: *Dinas Kesehatan (2025)*

19) Cakupan Penanganan Penderita DBD

Cakupan penanganan penderita DBD menunjukkan persentase penanganan DBD terhadap penderitanya. Cakupan penanganan penderita DBD di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat.

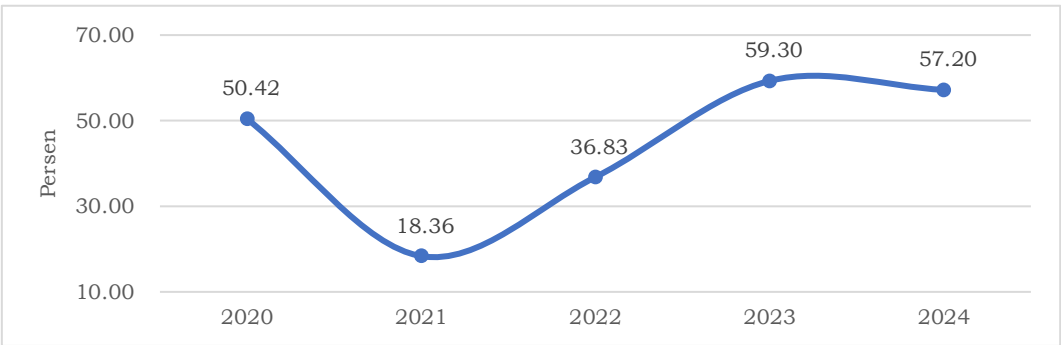


Gambar 2.94 Cakupan Penanganan Penderita DBD di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jemberana (2023)

20) Cakupan Penanganan Penderita Diare

Cakupan penanganan penderita diare menunjukkan persentase penanganan diare terhadap jumlah penderitanya. Cakupan penanganan penderita diare di Kabupaten Jemberana cenderung menurun, kecuali pada tahun 2022 dan 2023.



Gambar 2.95 Cakupan Penanganan Penderita Diare di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2024

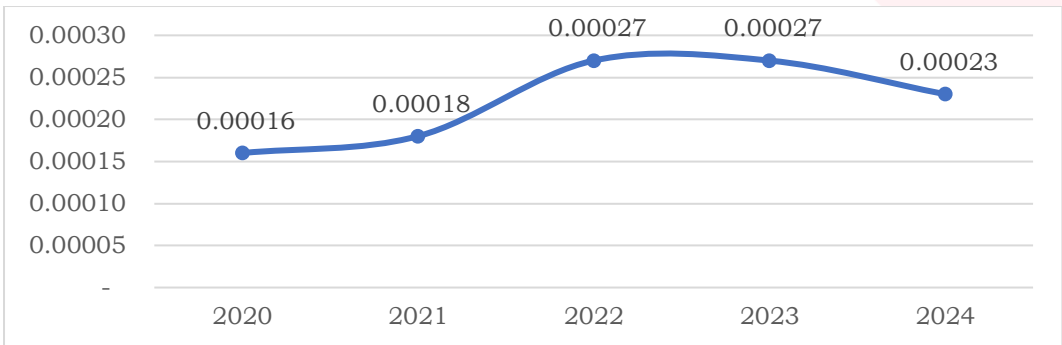
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jemberana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jemberana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)

21) Angka Kejadian dan Tingkat Kematian Akibat Malaria

Selama lima tahun terakhir, tidak terdapat kejadian dan kematian akibat malaria di Kabupaten Jemberana, kecuali kejadian pada tahun 2020 dan 2023, yaitu 1 orang.

22) Proporsi Prevalensi HIV/AIDS

Proporsi prevalensi HIV/AIDS menunjukkan persentase penduduk yang menderita HIV/AIDS. Proporsi prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Jemberana menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2024. Proporsi prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Jemberana masih relatif rendah.

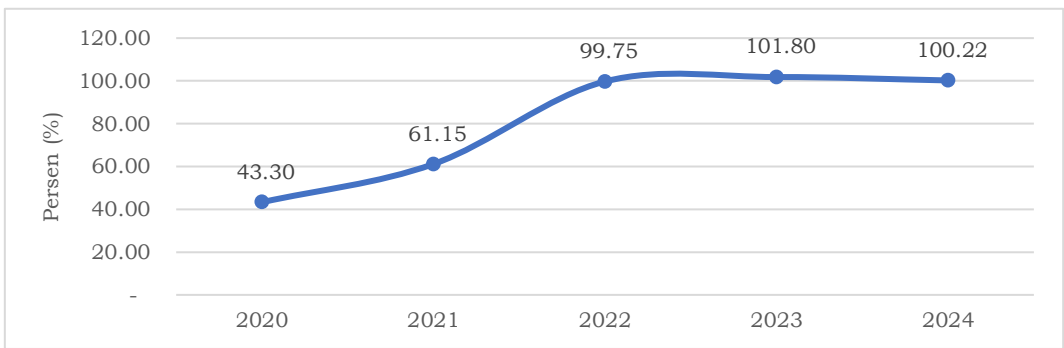


Gambar 2.96 Proporsi Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

- 23) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan dan telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh penderita hipertensi telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Kondisi ini perlu dipertahankan di masa yang akan datang.



Gambar 2.97 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

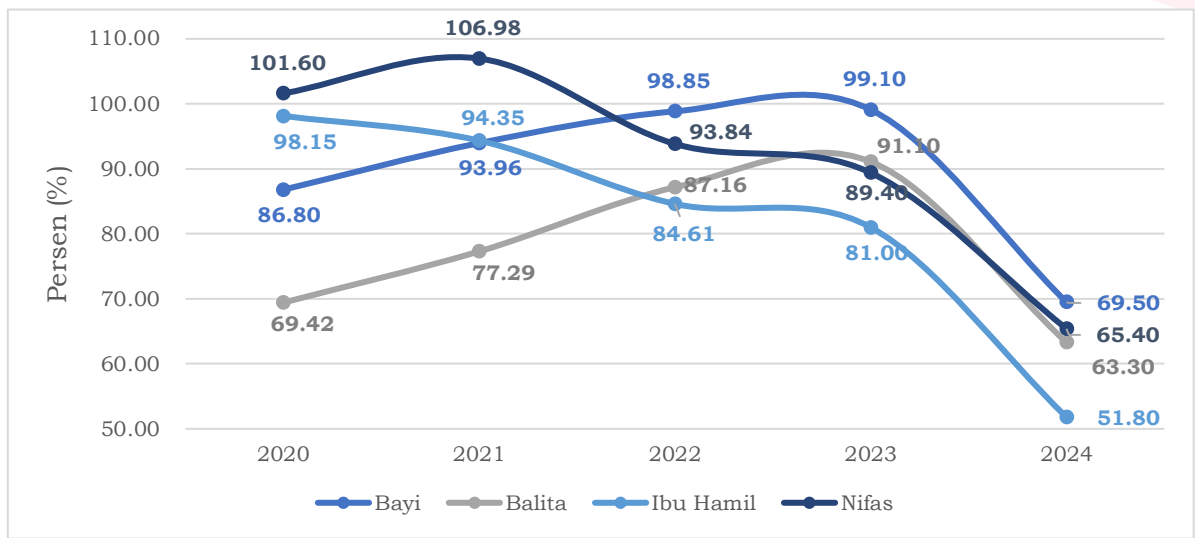
- 24) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Jember menunjukkan capaian yang fluktuatif, tetapi cenderung meningkat di akhir periode. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin sebesar 0,00% pada tahun 2020, diperkirakan akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi akses dan penyelenggaraan layanan rujukan. Meskipun demikian, capaian pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 100% sejak tahun 2021 hingga 2024.

- 25) Cakupan Kunjungan Bayi, Balita, Ibu Hamil, dan Nifas

Cakupan kunjungan bayi, balita, ibu hamil, dan nifas menunjukkan persentase kunjungan bayi (4 kali), balita (8 kali), ibu hamil (4 kali), dan nifas

(3 kali). Cakupan kunjungan tersebut di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, cakupan keempat kategori kunjungan tersebut masih belum mencapai 100% sehingga perlu ditingkatkan.



Gambar 2.98 Cakupan Kunjungan Bayi, Balita, Ibu Hamil, dan Nifas di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

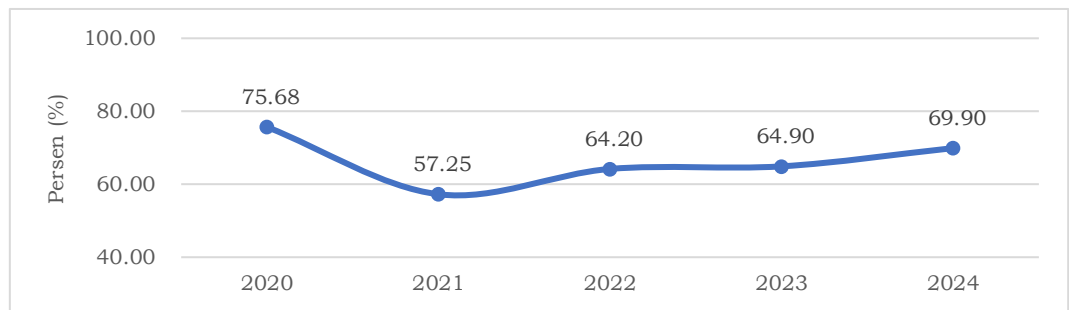
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023, Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)

26) Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas dihitung dengan membandingkan jumlah puskesmas dengan kecamatan, sedangkan cakupan pustu dihitung dengan membandingkan jumlah pustu dengan desa/kelurahan. Selama 5 tahun terakhir, jumlah puskesmas dan pustu di Kabupaten Jembrana tidak berubah. Artinya, cakupan puskesmas dan pustu pun tetap, yaitu masing-masing 200,00% dan 78,43%.

27) Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal

Komplikasi neonatal adalah kondisi yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi neonatal. Cakupan penanganan komplikasi neonatal di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022 dan 2023.

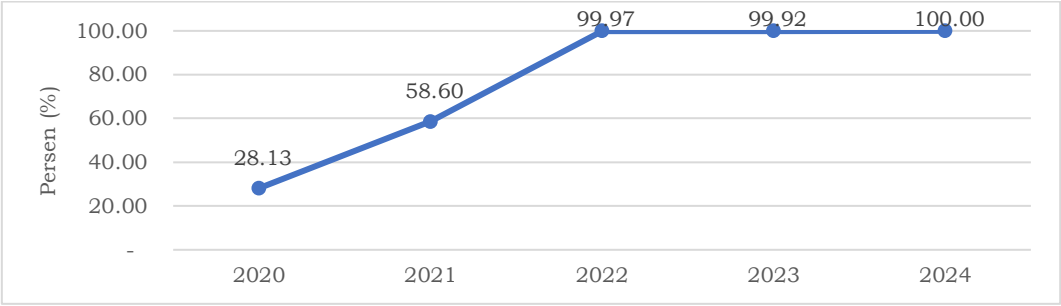


Gambar 2.99 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatal di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Jembrana 2020–2023 dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023), dan Dinas Kesehatan (2025)

28) Cakupan Penjaringan Kesehatan Murid

Cakupan penjaringan kesehatan murid di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, cakupan penjaringan kesehatan murid hanya sebesar 28,13%, kemudian meningkat menjadi 58,60% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terus berlanjut menjadi 99,97% pada 2022 dan 99,92% pada 2023. Pada tahun 2024, cakupan tersebut telah mencapai angka optimal, yakni 100%.



Gambar 2.100 Cakupan Penjaringan Kesehatan Murid Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Kesehatan (2025)

29) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

30) Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Diberikan Rumah Sakit

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan rumah sakit di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

31) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi dalam 24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami kejadian luar biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam 24 jam di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

32) Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan salah satu indikator RIBK yang diselaraskan dalam RPJMD. Indikator ini baru dibentuk per Februari 2025 di Kabupaten Jembrana sehingga belum tersedia data tahun 2020–2024.

33) Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup

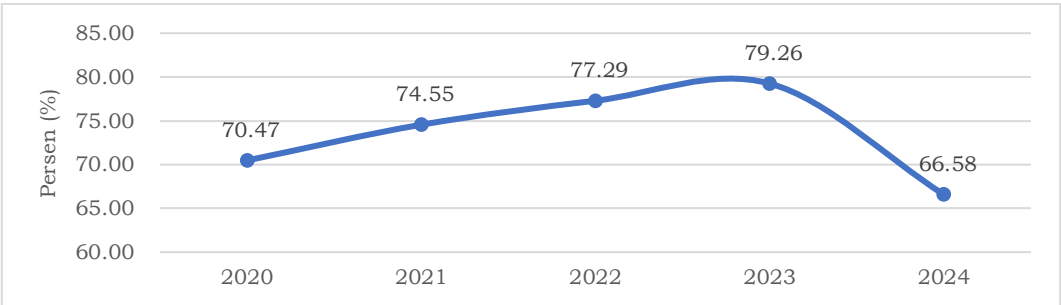
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan salah satu indikator RIBK yang diselaraskan dalam RPJMD. Indikator ini baru dibentuk per Juni 2025 di Kabupaten Jembrana sehingga belum tersedia data tahun 2020–2024.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan erat dengan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Jembrana. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 66,58%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan perlu mendapatkan perhatian lebih agar kualitas jalan dapat dipertahankan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

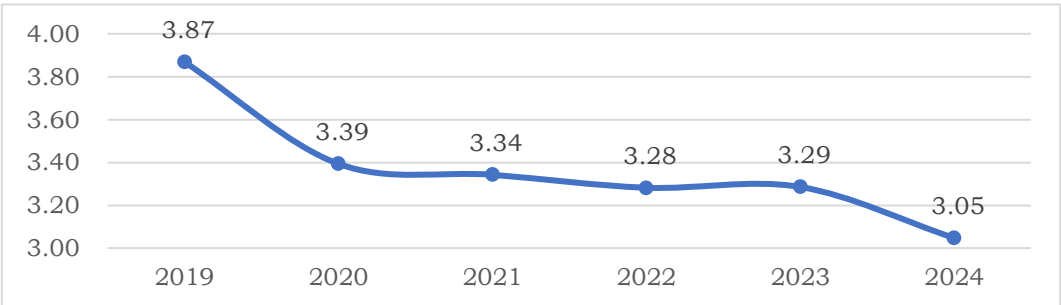


Gambar 2.101 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk didapatkan dari penghitungan total jumlah panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Jembrana. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pertambahan jumlah penduduk yang meningkat di Kabupaten Jembrana, tetapi tidak diimbangi dengan jumlah pembangunan jaringan jalan yang baru.



Gambar 2.102 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

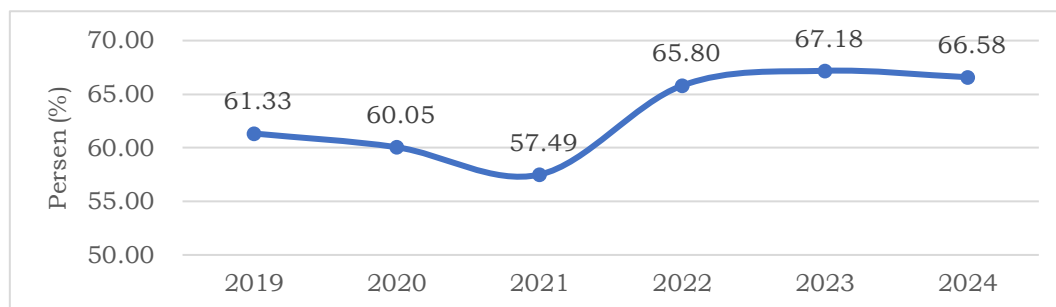
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2023); Kabupaten Jembrana dalam Angka 2025 (Diolah)

3) Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat

Persentase kawasan permukiman di Kabupaten Jembrana yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat sejak tahun 2020 menunjukkan besaran yang stagnan, yaitu 0%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lebar jaringan jalan yang ada sudah mampu mendukung aksesibilitas moda transportasi beroda empat di seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Jembrana dan hal ini harus dipertahankan.

4) Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik didapatkan melalui penghitungan total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan kabupaten di Kabupaten Jembrana dan dikali 100%. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung meningkat dengan penurunan pada tahun 2020, 2021, dan 2024. Hal ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan jalan kabupaten untuk menjaga kualitas jaringan jalan di Kabupaten Jembrana supaya dapat mengoptimalkan nilai persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.



Gambar 2.103 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2023); Kabupaten Jembrana dalam Angka 2025 (Diolah)

5) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air

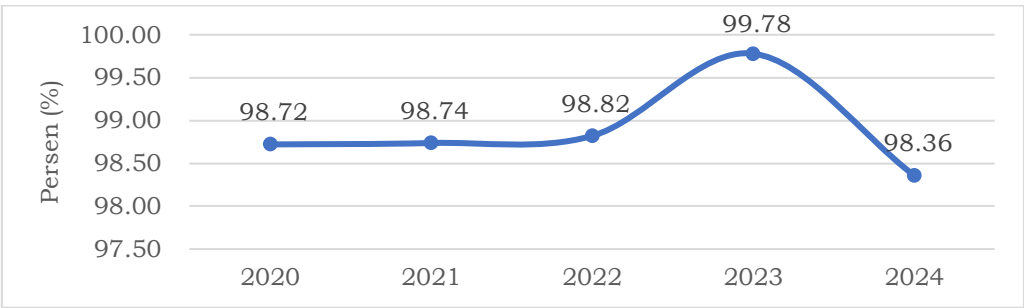
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air didapatkan melalui penghitungan total panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dibagi dengan total panjang jalan kabupaten dan dikali 100%. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase pada tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan nilai yang tetap, yaitu 2,89%. Hal ini mengindikasikan belum ada peningkatan jumlah trotoar dan drainase yang dilakukan sehingga harus diprioritaskan.

6) Persentase Sempadan jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, tidak terdapat sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima maupun bangunan rumah liar di Kabupaten Jembrana yang ditunjukkan dengan nilai persentase yang selalu bernilai 0%. Hal tersebut sudah sangat baik dan harus dipertahankan.

7) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi didapatkan melalui penghitungan total jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi dengan jumlah rumah tinggal dan dikali 100%. Persentase rumah tangga bersanitasi (IPAL DSDP dan Komunal) di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat dan selalu berada di atas 90 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 98,36%. Meskipun nilainya masih tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya potensi penurunan akses atau keberlanjutan layanan sanitasi yang perlu diantisipasi agar capaian tidak terus menurun dan target sanitasi layak tetap terjaga.



Gambar 2.104 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

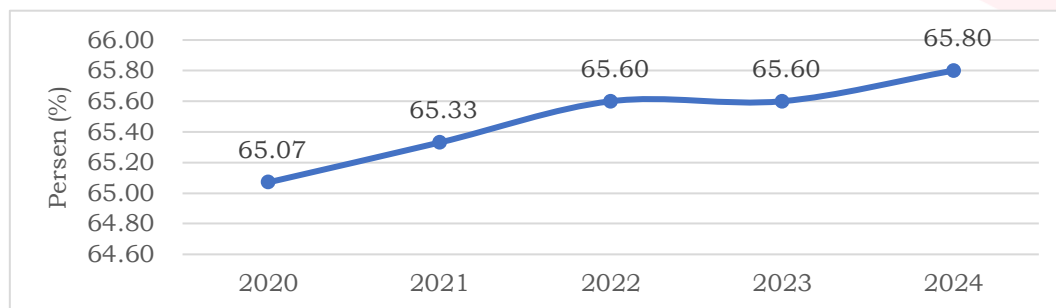
8) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 0% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

9) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dihitung dengan membagi panjang drainase tersumbat dengan panjang drainase dan dikali 100%. Di Kabupaten Jembrana, persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat cenderung meningkat hingga tahun 2024. Akan tetapi, persentase drainase dalam kondisi baik masih tergolong rendah, yang mengindikasikan masih banyak saluran drainase dalam kondisi tidak baik/pembuangan aliran air

yang tersumbat. Hal ini harus menjadi fokus perhatian dalam pembangunan daerah.



Gambar 2.105 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

10) Tidak Terjadi Genangan Lebih Dari Dua Kali Setahun

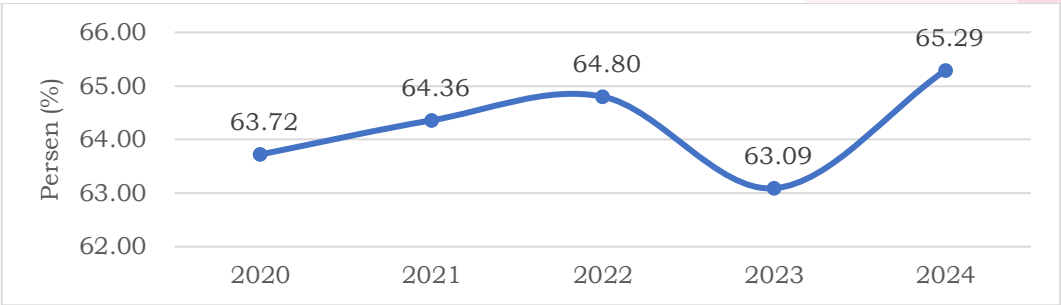
Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, tidak terdapat genangan lebih dari dua kali setahun di Kabupaten Jember. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pergerakan limpasan air serta resapan air hujan sudah baik dan harus dipertahankan.

11) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dapat dilakukan dengan penghitungan jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor. Berdasarkan data Dinas PUPRKP (2025), tidak terdapat pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kabupaten Jember sejak tahun 2020.

12) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dapat diketahui dengan membagi luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan luas irigasi kabupaten dan dikali 100%. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Jember cenderung meningkat dari tahun 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas dari irigasi kabupaten. Nilai persentase yang masih relatif rendah juga menunjukkan bahwa pembangunan dan perbaikan irigasi perlu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.



Gambar 2.106 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

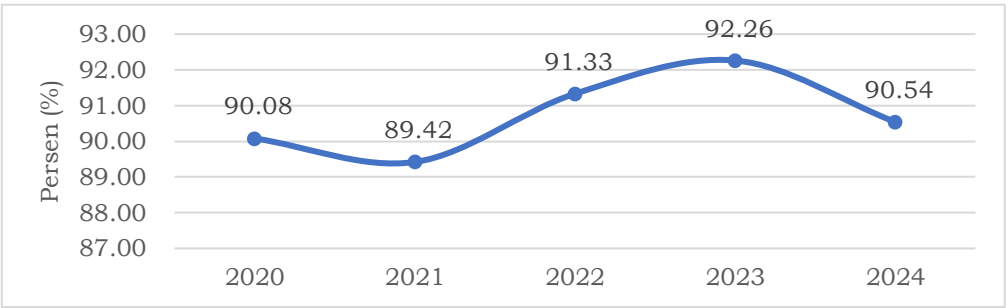
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

13) Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dapat diketahui dengan penghitungan total panjang saluran irigasi dibagi dengan luas lahan budidaya pertanian. Berdasarkan data Dinas PUPRPKP Kabupaten Jembrana (2025), rasio jaringan irigasi dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung stagnan yaitu dengan nilai 0,05.

14) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk dan dikali 100%. Di Kabupaten Jembrana, persentase ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penduduk berakses air minum mencapai 90,08%, turun menjadi 89,42% pada tahun 2021, kemudian naik signifikan hingga 2023 menjadi 92,26%, lalu turun kembali menjadi 90,54% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan layanan air minum, baik dari sisi ketersediaan, distribusi, maupun kualitas infrastruktur, yang perlu segera direspons dalam perencanaan pembangunan sektor air bersih.

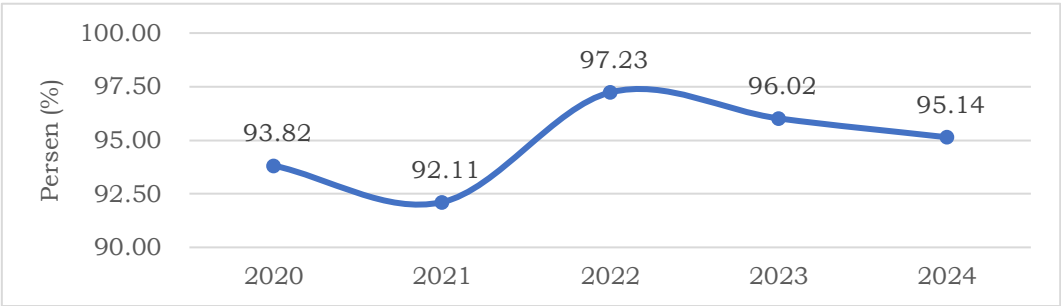


Gambar 2.107 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025) dan LKJIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman 2023

15) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Perdesaan

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan dapat dihitung dengan membagi antara jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dan jumlah penduduk seluruhnya, kemudian dikali 100%. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan pedesaan menunjukkan besaran yang fluktuatif, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Walaupun sudah mencapai 95,14% pada tahun 2024, perlu adanya peningkatan lebih lanjut agar seluruh rumah di Kabupaten Jembrana dapat memiliki akses yang baik terhadap air minum layak, perkotaan, dan pedesaan.

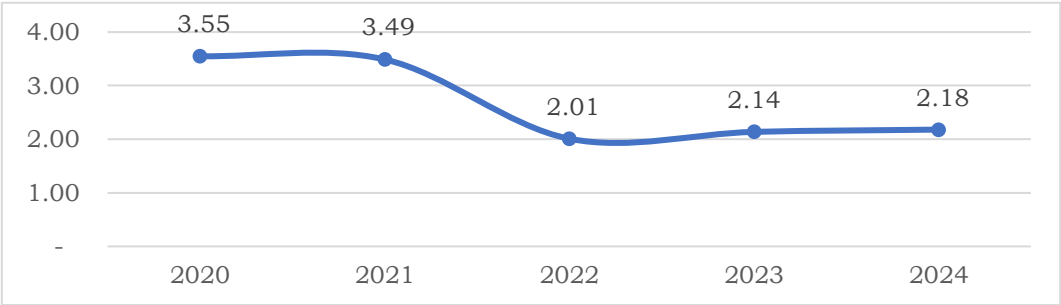


Gambar 2.108 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan, dan Perdesaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2025

16) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk dapat dilihat dengan penghitungan total jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk dan dikali 1.000. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Jembrana dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa tempat ibadah harus menjadi fokus pembangunan, seiring bertambahnya jumlah penduduk.

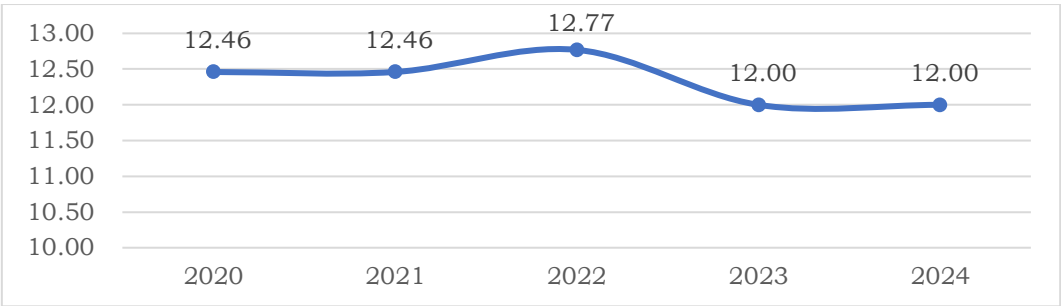


Gambar 2.109 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020-2025 (Diolah)

17) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB dapat dihitung dengan membandingkan antara luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber-HPL/HGB. Berdasarkan gambar di bawah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ketertiban dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Jembrana, tetapi nilai persentase tersebut masih dapat dioptimalkan lebih lagi.



Gambar 2.110 Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

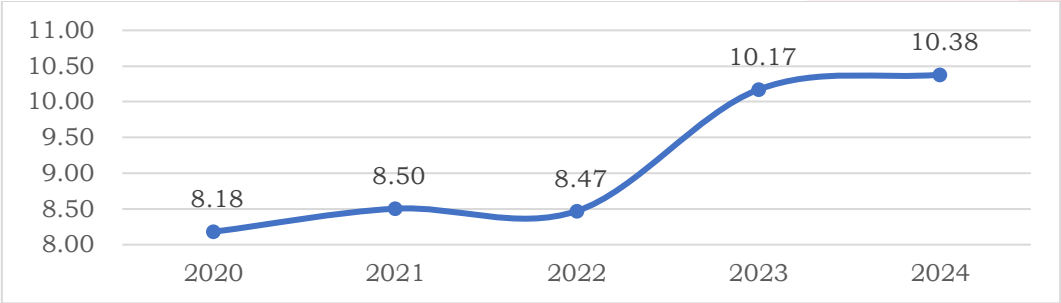
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

18) Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20% Dari luas Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan

Persentase luasan RTH Publik di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 cenderung stagnan yaitu di angka 23%. Pada tahun 2023, capaian tersebut sedikit menurun menjadi 22,83%, kemudian mengalami penurunan lebih signifikan menjadi 12,00% pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan catatan penting karena besaran tersebut jauh di bawah ambang batas ideal, yaitu minimal 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan penataan ruang.

19) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dapat diketahui dengan membagi jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Berdasarkan gambar di bawah, dapat dilihat bahwa rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, bangunan atau rumah di Kabupaten Jembrana masih banyak yang belum memiliki IMB meskipun pengajuan IMB di Kabupaten Jembrana terus meningkat.



Gambar 2.111 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

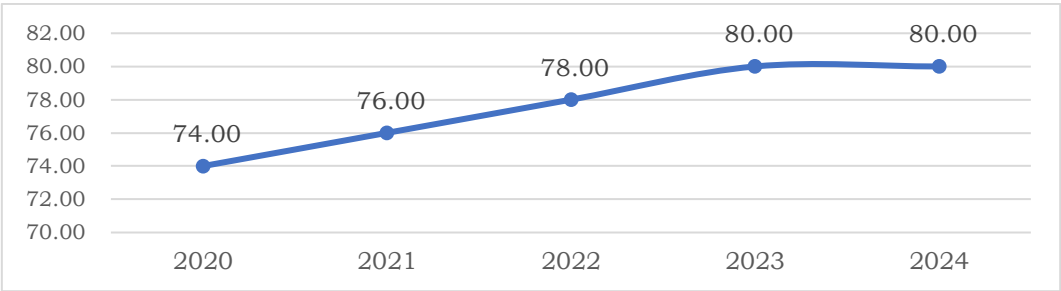
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

20) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Indikator ruang publik yang berubah peruntukannya dapat diketahui dengan penghitungan total jumlah ruang publik yang berubah fungsi dibagi dengan jumlah ruang publik yang tersedia dan dikali 100%. Berdasarkan data Dinas PUPRPKP (2025), tidak terdapat ruang publik di Kabupaten Jembrana yang berubah fungsi sejak tahun 2020. Akan tetapi, terjadi peningkatan luasan ruang publik dari tahun ke tahun sejalan dengan penetapan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Jembrana.

21) Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan tersebut harus terus dipertahankan supaya pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana dapat semakin sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur dalam RTRW.



Gambar 2.112 Persentase Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

22) Persentase Zona Rawan Banjir dan Genangan yang Tertangani

Persentase zona rawan banjir dan genangan yang tertangani di Kabupaten Jembrana mencapai 68,19% pada tahun 2024. Capaian ini tergolong cukup tinggi, tetapi masih dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak kerugian yang ditimbulkan dari banjir.

23) Persentase Rumah Tangga Menggunakan Penerangan Listrik

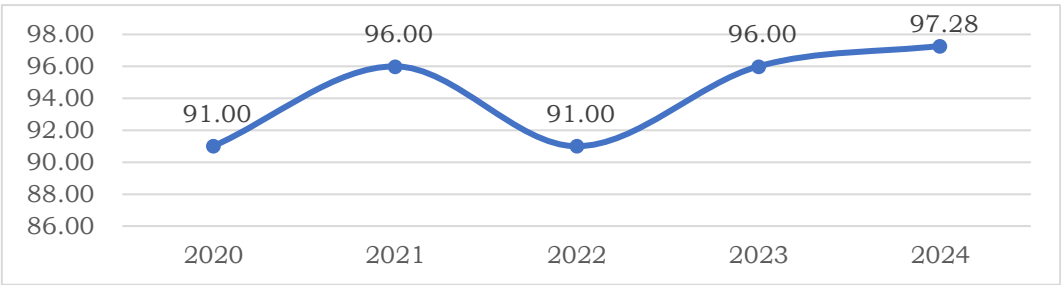
Persentase rumah tangga menggunakan penerangan listrik di Kabupaten Jembrana pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh rumah tangga sudah teraliri listrik sehingga akses terhadap energi listrik di wilayah ini sudah terpenuhi sepenuhnya.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah termasuk kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Rumah dan kawasan permukiman menjadi tempat tinggal, berlindung, berkegiatan, dan bersosialisasi yang membentuk identitas dan kepribadian individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren peningkatan. Hal ini harus dipertahankan supaya dapat terjadi keseimbangan antara pertumbuhan rumah layak huni dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana.

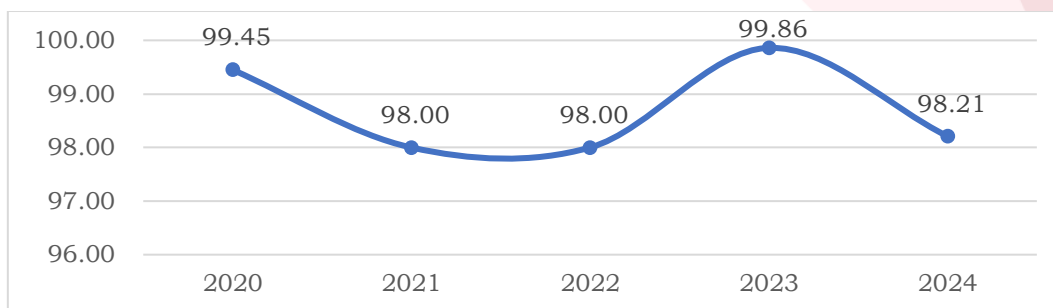


Gambar 2.113 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dihitung dengan membandingkan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini dikarenakan intervensi pengurangan kekumuhan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dinilai sudah cukup efektif. Meskipun demikian, rasio permukiman layak huni di Kabupaten Jembrana masih dapat dioptimalkan lagi.

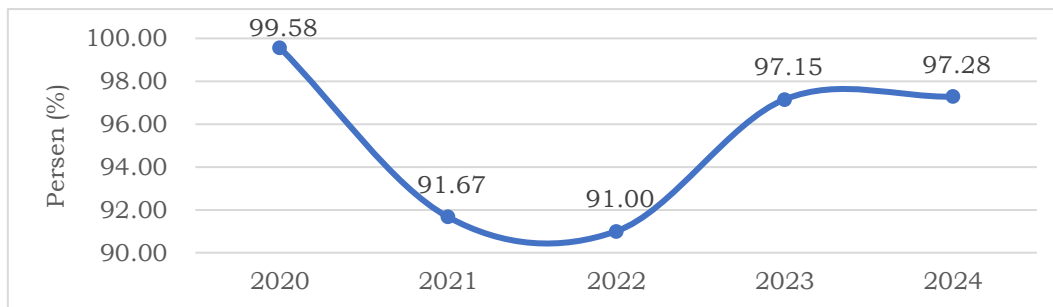


Gambar 2.114 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah. Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Jembrana relatif berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2.115 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

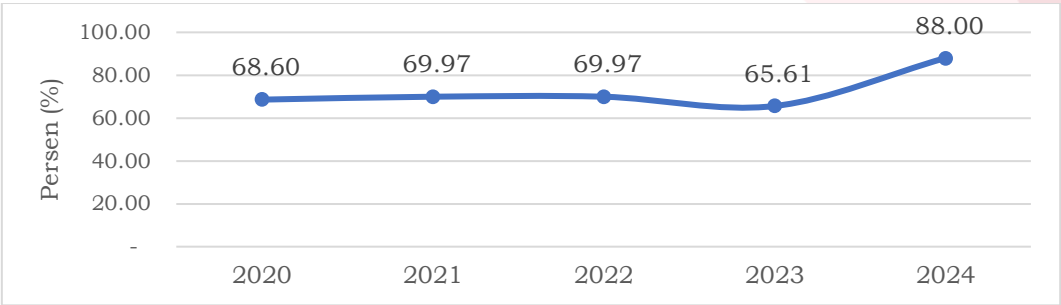
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

4) Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Jembrana cenderung stagnan di angka 0,12% pada tahun 2020 hingga 2023. Capaian tersebut turun menjadi 0,10% pada tahun 2024. Meskipun nilainya rendah, hal ini tetap perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga ke depannya tidak ada lagi lingkungan permukiman kumuh.

5) Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menunjukkan persentase jumlah lingkungan yang didukung PSU terhadap lingkungan perumahan. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2024.



Gambar 2.116 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (2025)

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (linmas) termasuk kebutuhan tingkat rendah manusia. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan fisiologis, seperti makan, minum, dan hubungan seksual. Oleh karena itu, ketenteraman, ketertiban umum, dan linmas harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

1) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

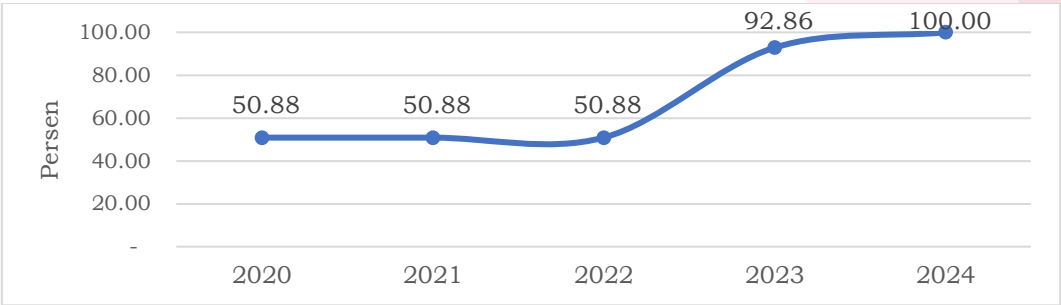
Pada tahun 2021 hingga 2024, terdapat 1.641 petugas linmas. Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja tidak melaksanakan penggerakan petugas linmas di Kabupaten Jember. Pada masa pandemi Covid-19 tersebut, linmas diemban langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) di Kabupaten Jember selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan. Awalnya, cakupan ini stagnan di angka 50,88% dari tahun 2020 hingga 2022, kemudian meningkat menjadi 92,86% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024.

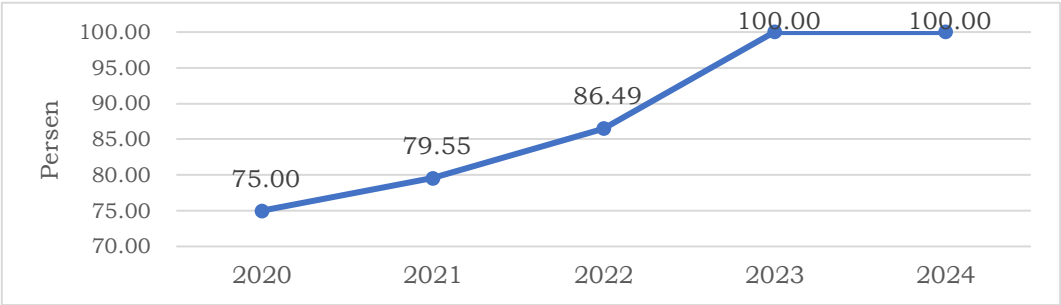


Gambar 2.117 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2025); Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2023)

4) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) menunjukkan persentase penanganan kebakaran selama 15 menit di dalam WMK. Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK di Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan.



Gambar 2.118 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan WMK di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (2025); Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2023)

5) Persentase Penegakan Peraturan Daerah

Persentase penegakan peraturan daerah di Kabupaten Jember selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

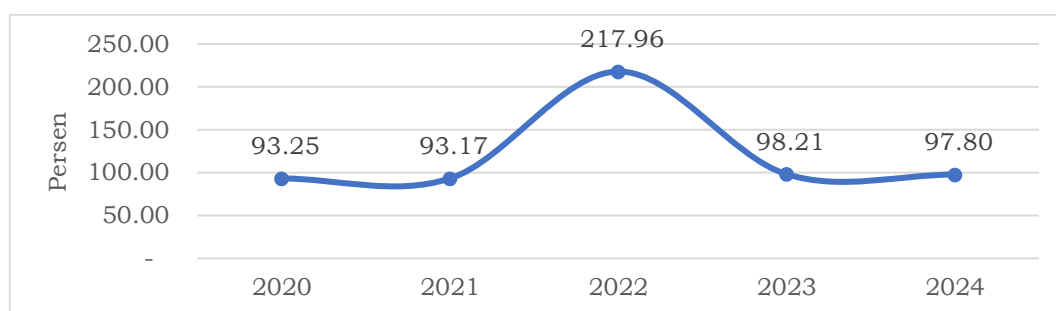
6. Sosial

Aspek sosial tidak dapat dipisahkan dari sifat dasar manusia. Dalam hal ini, kebutuhan sosial yang dipenuhi berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, perlindungan korban bencana dan penanganan fakir miskin perlu diprioritaskan sehingga kemandirian dan peran individu dan masyarakat dalam pembangunan turut meningkat.

1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan PPKS mencakup PPKS yang memperoleh bantuan sosial, PPKS tertangani, dan PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar. PPKS tersebut termasuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang memiliki hambatan, kesulitan, dan gangguan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara memadai dan wajar.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Sosial, capaian penanganan PPKS di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat, dari 93,25% pada tahun 2020 menjadi 97,80% pada tahun 2024. Pada tahun 2022, capaian penanganan PPKS mencapai 217,96% atau melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya serapan anggaran yang bersumber dari APBN (Kementerian Sosial RI), anggaran provinsi (Dinsos, PPPA Provinsi Bali), dan APBD Kabupaten Jembrana untuk penanganan PPKS. Bantuan yang diberikan berupa alat bantu disabilitas, peralatan sekolah, bantuan makanan, hingga pendampingan psikososial bagi anak terlantar.



Gambar 2.119 Penanganan PPKS di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Sosial 2020–2023 dan Dinas Sosial (2025)

- 2) Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama atau Kelompok Sosial-ekonomi Sejenis

Panti sosial bertugas melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat, terutama kelompok rentan dan PPKS. Salah satu upayanya adalah memberikan program pemberdayaan sosial. Sejak tahun 2020, seluruh panti sosial di Kabupaten Jembrana telah menerima bantuan, seperti peralatan dagang.

- 3) Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Panti sosial bertugas melakukan pendampingan terhadap keluarga dan masyarakat, terutama kelompok rentan dan PPKS. Salah satu upayanya adalah menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2020, seluruh panti sosial di Kabupaten Jembrana telah menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial.

- 4) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang Menyediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerja sama antarperangkat pelayanan sosial di akar rumput, meliputi usaha kelompok, lembaga, dan jaringan pendukungnya. Sejak tahun 2020, persentase WKSBM yang menyediakan prasarana dan sarana pelayanan

kesejahteraan sosial stagnan pada angka 41,17%. Oleh karena itu, perlu peningkatan ke depannya.

5) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

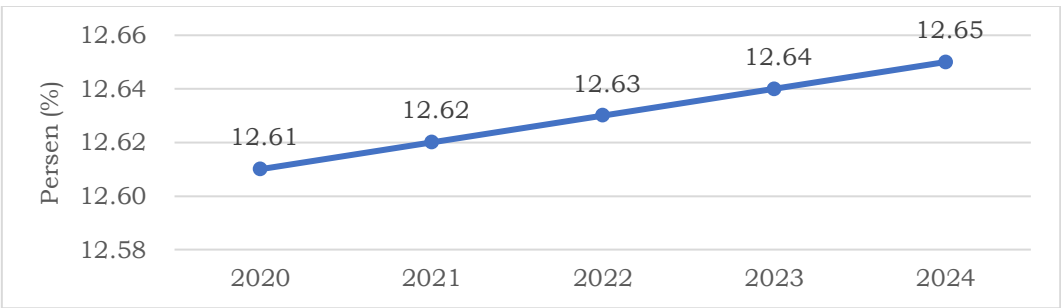
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020 hingga 2024.

6) Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020.

7) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat. Capaian ini tumbuh dari 12,61% pada tahun 2020 menjadi 12,65% pada tahun 2024. Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah. Rendahnya persentase penerima jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia menjadi perhatian pemerintah daerah supaya jaminan sosial dapat dirasakan lebih lagi di seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 2.120 Penanganan PPKS di Kabupaten Jembrana Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial (2025)

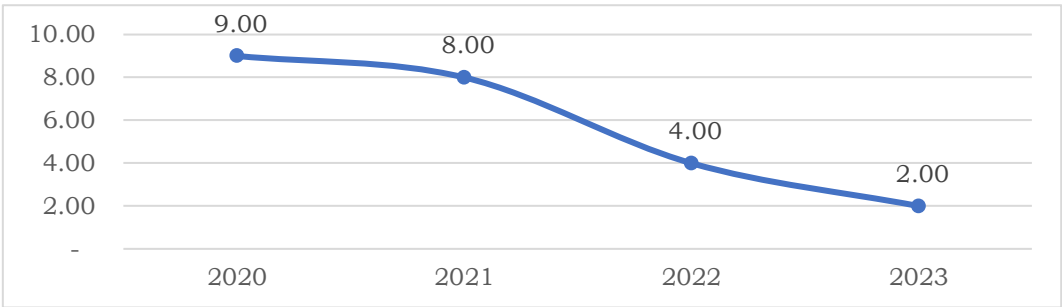
B. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan pada awalnya hanya terkait dengan buruh. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja diperluas menjadi pekerja. Pekerja yang dimaksud adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

1) Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan dari 2020 hingga tahun 2023

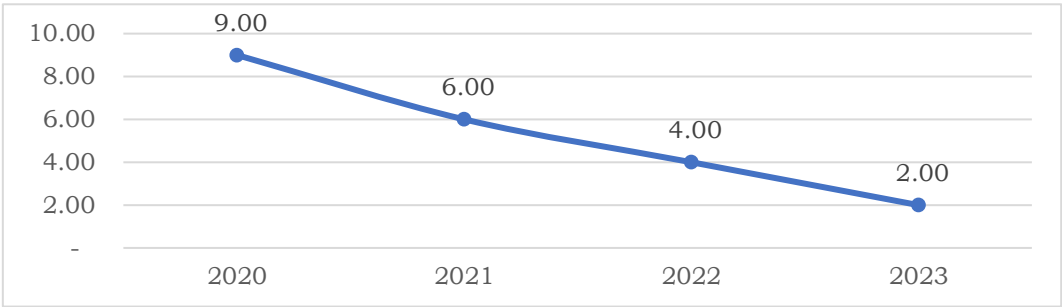


Gambar 2.121 Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per Tahun di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (2024)

2) Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama di Kabupaten Jembrana menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

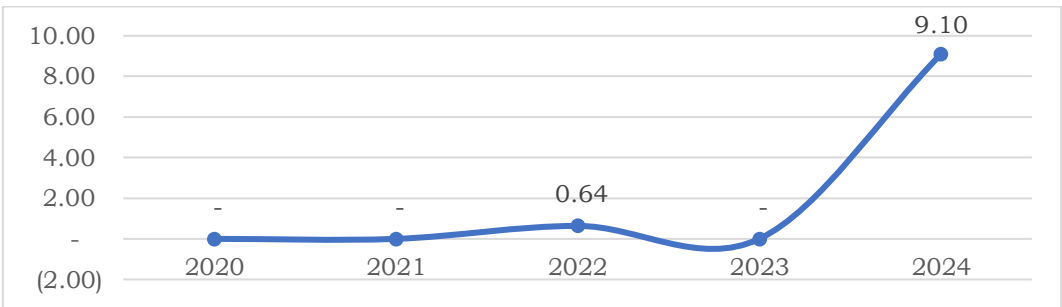


Gambar 2.122 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (2024)

3) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja dipengaruhi oleh ketersediaan kesempatan kerja dan tingkat hubungan pemerintah dengan badan usaha. Besaran penempatan kerja di Kabupaten Jembrana cenderung rendah. Oleh karena itu, penyediaan kesempatan kerja di Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan.



Gambar 2.123 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

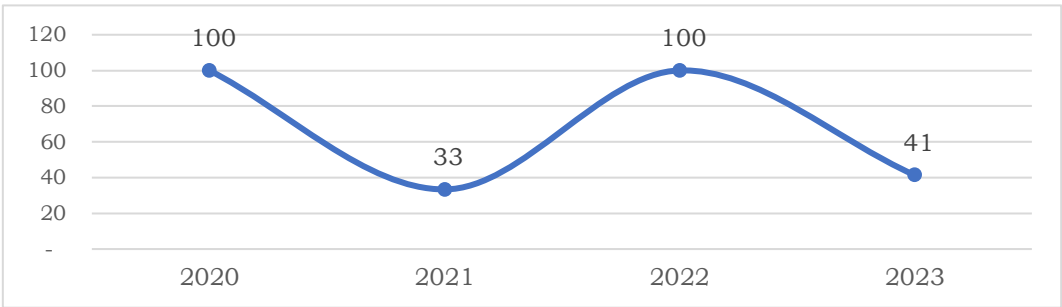
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2021–2025 (Diolah)

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, tidak ditemukan jumlah kasus perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana.

5) Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Pelatihan tenaga kerja dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja. Pelatihan yang dimaksud mencakup keterampilan, kemasyarakatan, dan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang dilatih di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, jumlahnya terus bertambah sejak pandemi Covid-19.

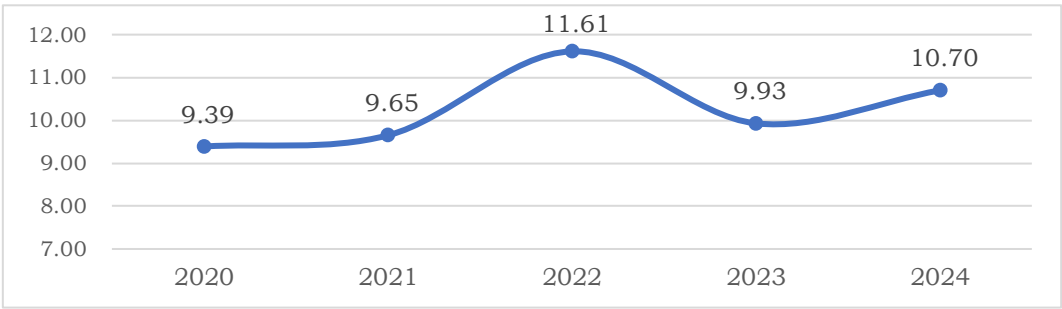


Gambar 2.124 Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2021–2024

6) Rasio Lulusan Perguruan Tinggi

Rasio lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan, kecuali pada tahun 2023. Hal ini perlu ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kompetensi tenaga kerja.



Gambar 2.125 Rasio Lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2021–2025

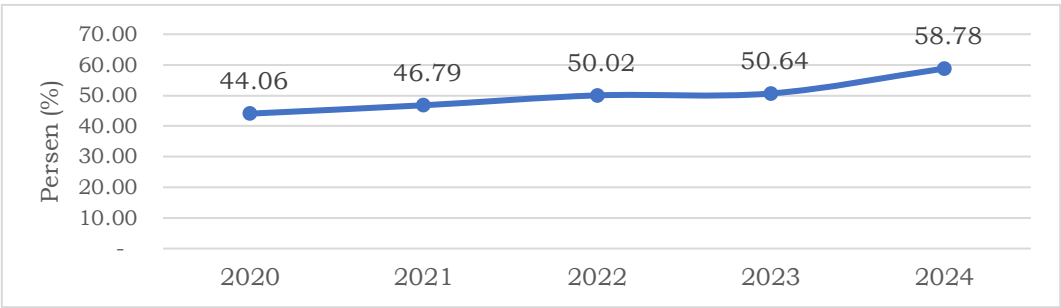
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender merupakan komitmen global sejak tahun 1952. Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan perlu turut mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta sarana menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan haknya. Persentase partisipasi perempuan di Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai bertumbuh. Hal ini membuktikan partisipasi perempuan di Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah baik.

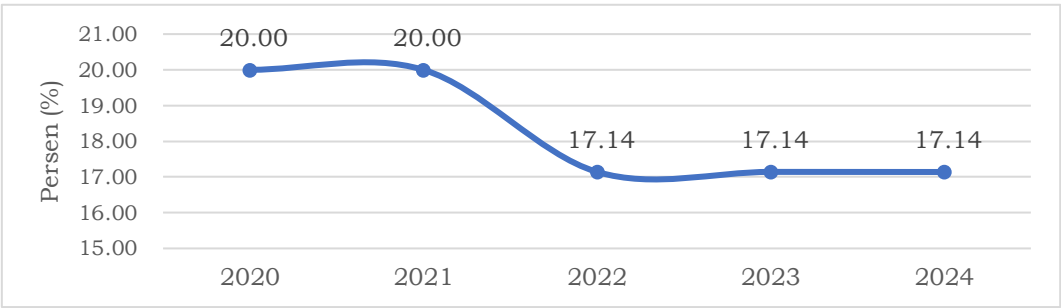


Gambar 2.126 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Profil Gender Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (2025)

2) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan serta sarana menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan haknya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Jembrana hanya terdapat penurunan pada tahun 2022.



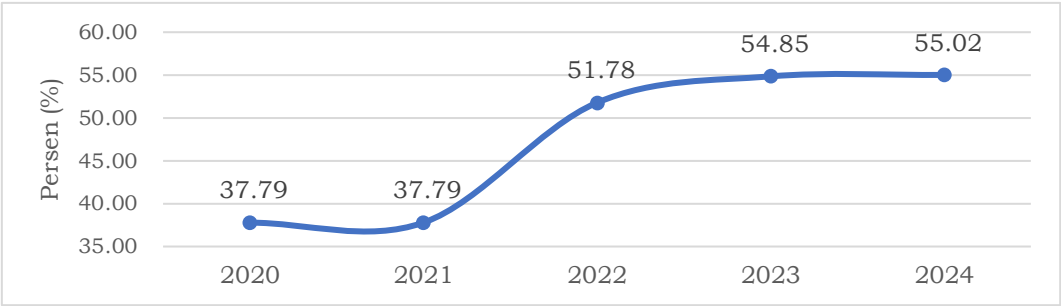
Gambar 2.127 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2021–2025

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan peran perempuan di lembaga swasta. Partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat. Perkembangan teknologi dan transformasi digital membuka peluang perempuan untuk bekerja sehingga

terjadi peningkatan yang signifikan dalam partisipasi perempuan di Lembaga Swasta pada tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, peningkatan juga terjadi selaras dengan peran pemerintah dalam memfasilitasi pelatihan dan membuka lapangan kerja melalui program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kepercayaan diri untuk terjun ke dunia profesional dan mandiri secara finansial sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.



Gambar 2.128 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (2025)

4) Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

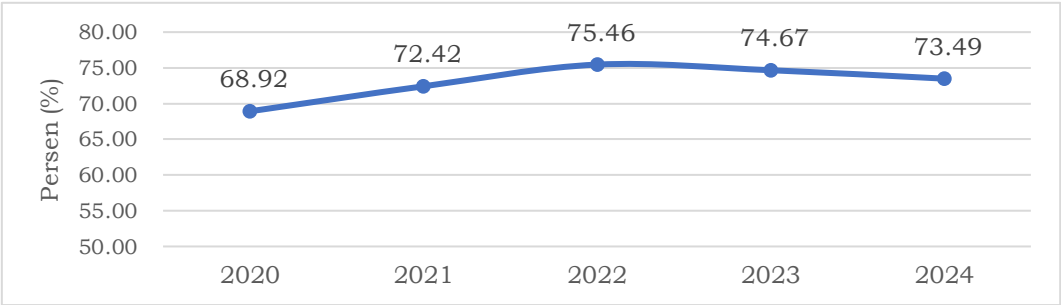
Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan persentase kasus KDRT terhadap jumlah rumah tangga. Kasus KDRT yang dihitung tersebut merupakan kasus yang dilaporkan sehingga masih ada kemungkinan kasus-kasus lain yang jumlahnya lebih banyak. Rasio KDRT Kabupaten Jember relatif rendah, yaitu 0,1% selama tahun 2020-2024.

5) Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Kabupaten Jember tidak memiliki tenaga kerja di bawah umur 18 tahun.

6) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tingkat kesempatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Jember menunjukkan tren yang meningkat, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024.



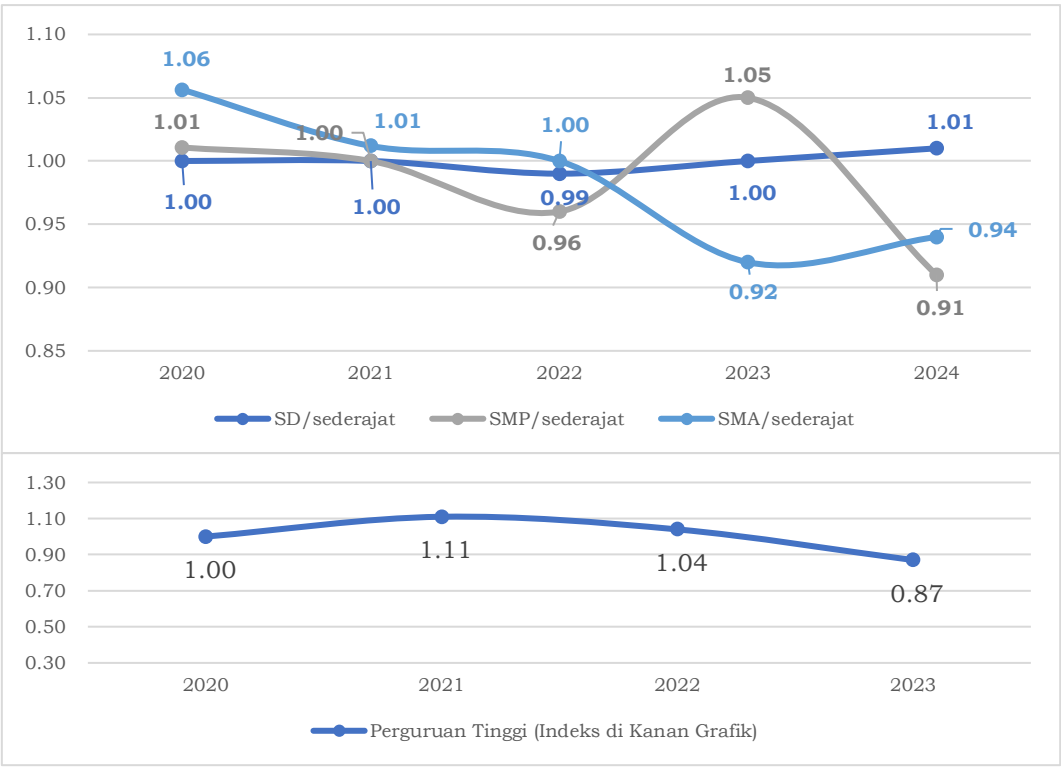
Gambar 2.129 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

7) Cakupan Layanan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Cakupan layanan ini meliputi penanganan pengaduan yang diberikan oleh petugas terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu, cakupan layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKY di rumah sakit, cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di unit pelayanan terpadu, cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, cakupan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, cakupan layanan pemulangan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dan cakupan layanan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Cakupan layanan ini seluruhnya mencapai nilai 100% di Kabupaten Jember dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

8) Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan/Laki-Laki

Di Kabupaten Jember, tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara APM laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah mendapatkan akses yang adil dan setara, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

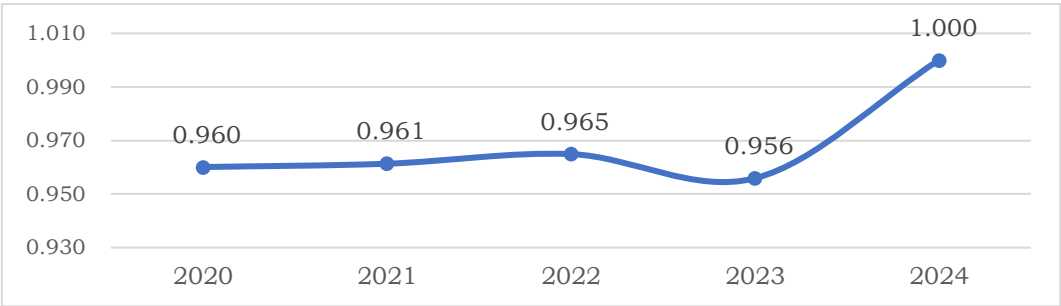


Gambar 2.130 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2021–2024 dan Badan Pusat Statistik (2025)

9) Rasio Melek Huruf Perempuan/Laki-Laki Kelompok Usia 15–24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan/laki-laki Kabupaten Jember untuk penduduk usia 15–24 tahun menunjukkan tren peningkatan. Angka melek huruf perempuan dan laki-laki pada tahun 2024 menunjukkan rasio yang sama atau setara. Akan tetapi, pada tahun-tahun sebelumnya, angka melek huruf perempuan cenderung lebih rendah daripada laki-laki.

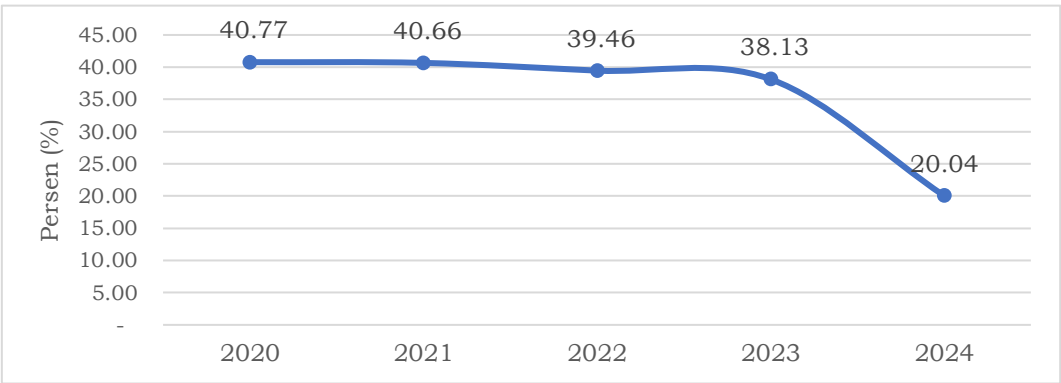


Gambar 2.131 Rasio Melek Huruf Perempuan/Laki-Laki pada Kelompok Usia 15–24 Tahun Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2021–2025 (Diolah)

10) Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan pada Sektor Nonpertanian

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan pada sektor nonpertanian di Kabupaten Jember menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020. Kontribusi perempuan tersebut dihitung dari data jumlah buruh/karyawan/pegawai perempuan.



Gambar 2.132 Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan pada Sektor Nonpertanian Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2021–2025

11) Cakupan Layanan

Cakupan layanan meliputi cakupan layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, layanan pemulangan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, serta layanan reintegrasi sosial. Seluruh cakupan layanan tersebut sudah mencapai angka 100 pada tahun

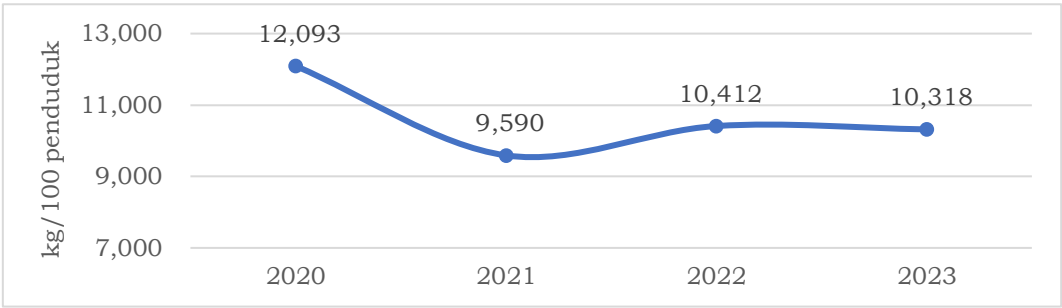
2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa cakupan layanan sudah sangat baik dan harus dipertahankan.

3. Pangan

Pangan termasuk kebutuhan primer manusia. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan untuk mendukung terciptanya ketahanan pangan. FAO (1996) menyebutkan bahwa terdapat empat komponen ketahanan pangan, yaitu kecukupan, stabilitas, aksesibilitas dan keterjangkauan, dan kualitas ketersediaan pangan.

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari dalam (produksi dan cadangan pangan) dan luar daerah. Ketersediaan pangan secara berkelanjutan berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan (kg/100 penduduk) Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali pada tahun 2022.



Gambar 2.133 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2023) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

2) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan energi dan protein per kapita dihitung dari sembilan jenis bahan makanan. Ketersediaan energi dan protein per kapita Kabupaten Jembrana telah ideal berdasarkan standar 2.200 kkal/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari.

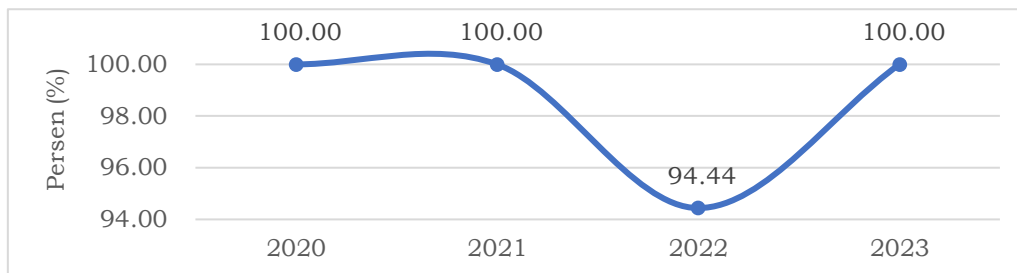
Tabel 2.24 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Indikator	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Energi	kkal/kapita/hari	2.342	2.044	2.550	2.300
Protein	gram/kapita/hari	88,76	79,61	90,57	113,5

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2023) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

3) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan pangan perlu diawasi karena berhubungan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dihitung dari perbandingan antara jumlah sampel uji dengan hasil uji pangan aman. Di Kabupaten Jembrana, tidak terdapat masalah keamanan pangan, kecuali pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, satu sampel uji memiliki kandungan pestisida yang melampaui batas sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap petani, terutama petani kacang panjang.



Gambar 2.134 Pengawasan dan Pembinaan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

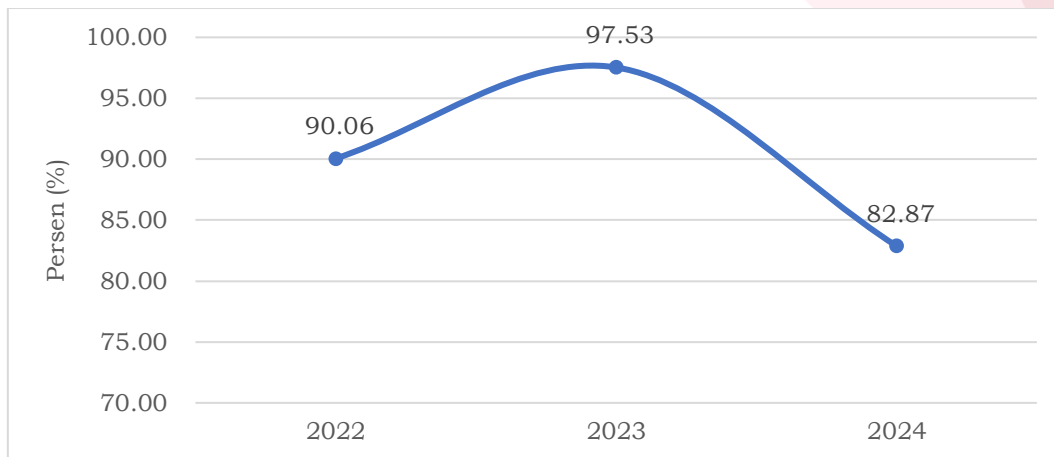
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan (2023) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

4. Pertanahan

Pertanahan menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Pertanahan berhubungan dengan penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang yang kemudian terkait dengan aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Dalam rangka penertiban lahan, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah menerbitkan sertifikat lahan. Persentase luas lahan bersertifikat mengalami fluktuasi. Hal ini harus terus dipertahankan. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat pengukuran lahan bersertifikat di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.135 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Jember Tahun 2022–2024

Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021–2026 dan LPPD Kabupaten Jember Tahun 2022 dalam RKPD Kabupaten Jember Tahun 2023

2) Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian izin lokasi mengindikasikan tingkat investasi di daerah. Di Kabupaten Jember tahun 2020–2021, belum ada pengajuan izin lokasi karena keterbatasan lahan. Di sisi lain, keterbatasan data pertanahan menunjukkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan masih belum optimal. Pada tahun 2022 terdapat 300 penyelesaian izin lokasi dan 9 penyelesaian izin lokasi pada tahun 2023.

5. Lingkungan Hidup

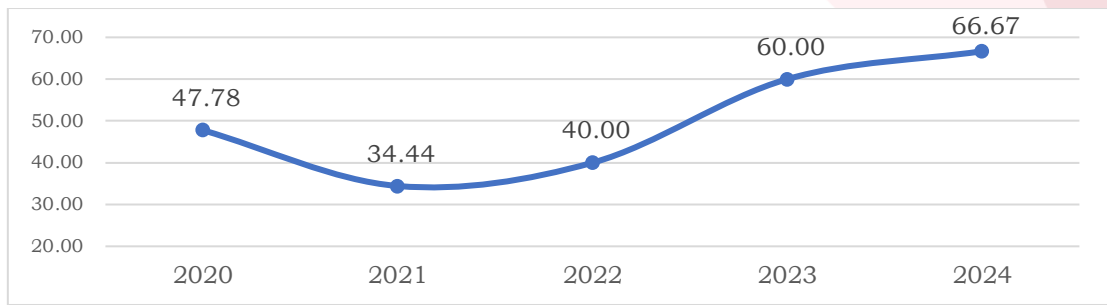
Lingkungan hidup memiliki jasa ekosistem yang dapat dimanfaatkan manusia. Sebagai balasan timbal-balik, manusia perlu melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan demikian, fungsi lingkungan hidup akan terus lestari.

1) Penyusunan RPPLH dan KLHS

RPPLH dan KLHS telah tersusun dan telah terintegrasi sebagian dalam rencana pembangunan sejak tahun 2020. Selain itu telah dilakukan penyusunan KLHS sebanyak 3 dokumen (RPJMD, RTRW, dan RDTR Negara) pada tahun 2020, 2 dokumen (RDTR Pekutatan dan Pengambengan) pada tahun 2022, dan 5 dokumen (RPJPD, RPJMD, serta RDTR Gilimanuk, Mendoyo, dan Yehembang) pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat penyusunan 1 dokumen KLHS.

2) Indeks Kualitas Air

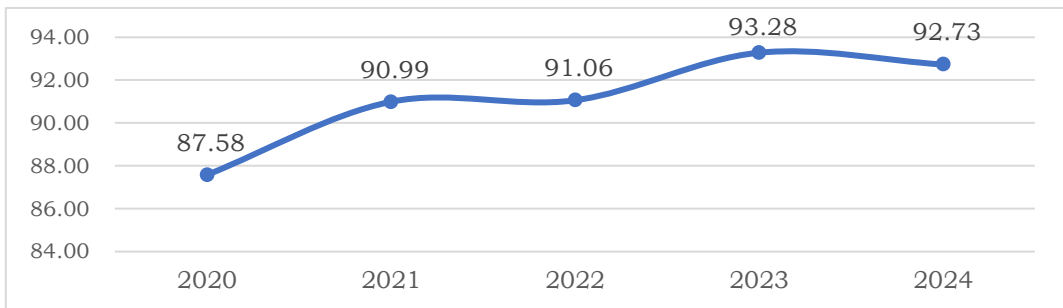
Indeks kualitas air Kabupaten Jember mulai naik kembali setelah sebelumnya turun hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya perilaku BABS di sungai, kurangnya prasarana dan sarana pemantauan kualitas air sungai, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sungai yang paling tercemar di Kabupaten Jember adalah Sungai Ijogading.



Gambar 2.136 Indeks Kualitas Air Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2024

3) Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara menunjukkan kualitas udara terhadap kandungan sulfur oksida dan nitrogen oksida. Indeks kualitas air Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang meningkat. Meskipun demikian, indeks tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bertambahnya polusi udara karena aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi.



Gambar 2.137 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2024

Namun untuk perhitungan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 dengan nilai 92,73 merupakan hasil capaian yang menggunakan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 thun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana perhitungan hasil rata dari masing – masing parameter yaitu Nitrogen Dioksida (NO2) dan Sulfur Dioksida (SO2). Dengan dasar perhitungan sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (Ieu - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk tahun 2025 – 2029 untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) akan di hitung berdasarkan 3 (tiga) parameter yaitu Nitrogen Dioksida (NO2) mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, Sulfur Dioksida (SO2) mewakili emisi dari industry dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya dan Particulate Matter 2,5 (PM2,5) mewakili emisi kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu

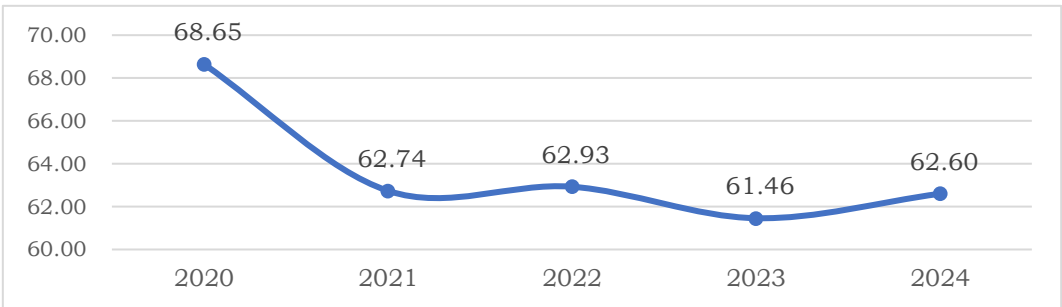
jalanan dan konstruksi. Untuk perhitungan yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana perumusan Indeks Kualiatas Udara dengan parameter (NO2 SO2 PM2,5 sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$
$$I_{INA} = \text{Rata - rata Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$$
$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$$
$$\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu } INA}$$

4) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan keberhasilan konservasi dan rehabilitasi hutan. Indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan penghijauan dan realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit perbaikan dalam kualitas tutupan lahan.

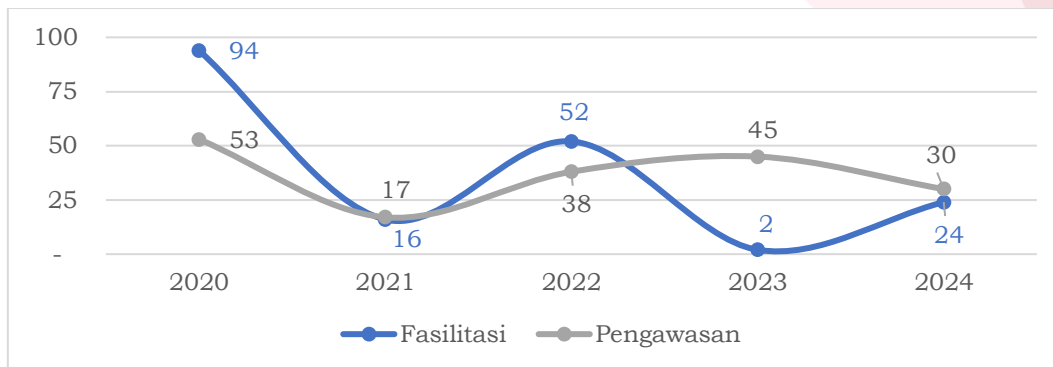


Gambar 2.138 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2024

5) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

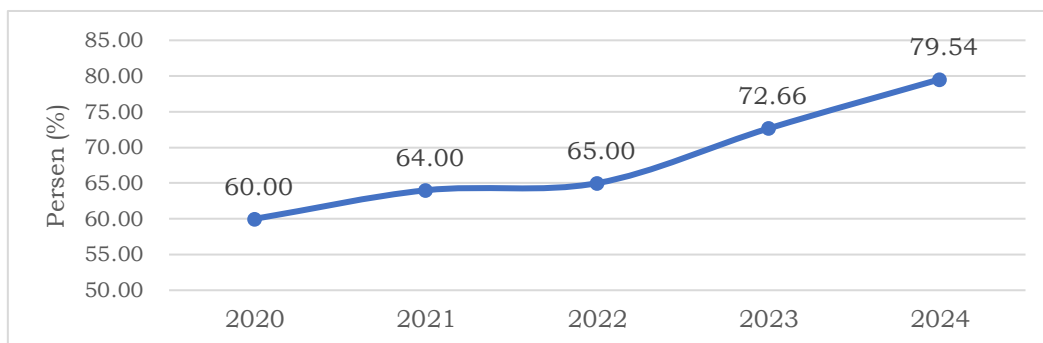
Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif.



Gambar 2.139 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH (Badan Usaha) oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2024

6) Persentase Penanganan Timbunan Sampah

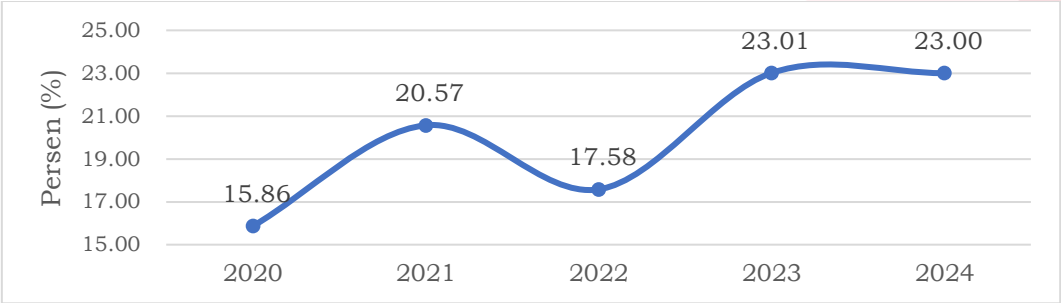
Persentase penanganan timbunan sampah di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan pada 2020-2024. Meskipun demikian, penanganannya masih belum 100%. Penurunan persentase penanganan timbunan sampah pada 2020 terjadi akibat kurang optimalnya pemilahan sampah di TPST karena berkurangnya tenaga kerja dan *conveyor belt* yang mengalami kerusakan. Selain itu, juga terdapat ketidaksinkronan data dengan kondisi riil di lapangan. Belum optimalnya penanganan sampah terjadi akibat rendahnya tingkat pemilahan sampah di sumbernya serta mesin RDF yang belum beroperasi secara optimal.



Gambar 2.140 Persentase Penanganan Timbunan Sampah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2023

7) Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga

Penanganan sampah terbaik dimulai dengan mengurangi sampah rumah tangga. Persentase pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah dalam menekan jumlah sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat.



Gambar 2.141 Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2023 dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2023)

8) Peningkatan Kapasitas serta Prasarana dan Sarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah

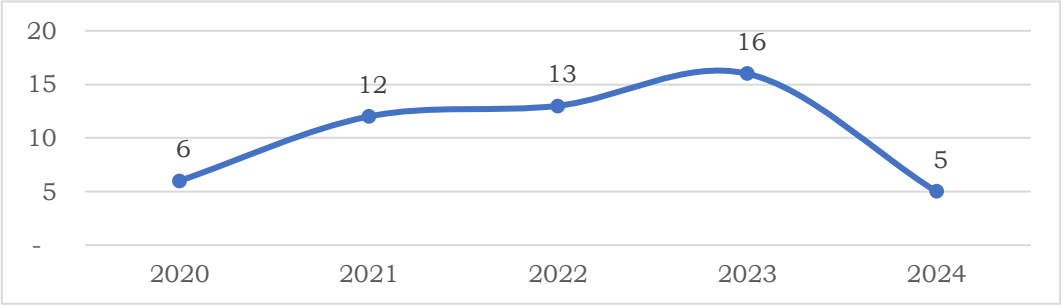
Peningkatan kapasitas serta prasarana dan sarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 2 orang. Sementara itu, pada tahun 2020-2022 tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas serta prasarana dan sarana pejabat pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Jember. Pada tahun 2024 juga tidak terdapat aktivitas tersebut.

9) Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidup terlaksana pada tahun 2024 masing-masing adalah satu. Sementara itu pada tahun 2020-2023 tidak dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup.

10) Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, lokasi usaha, dan dampaknya di Kabupaten Jember cenderung fluktuatif.

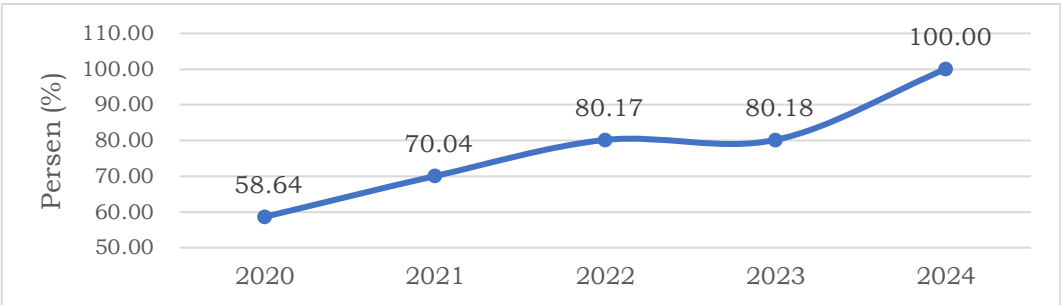


Gambar 2.142 Pengaduan Masyarakat Terkait Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2024)

11) Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren kenaikan. Pada 2024, seluruh wilayah Kabupaten Jembrana telah terlayani oleh pengolahan persampahan.

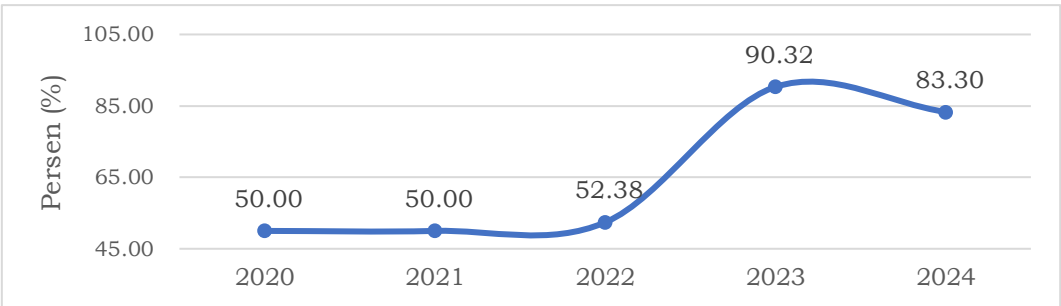


Gambar 2.143 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2024)

12) Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 oleh Swasta

Swasta berkewajiban mengelola limbah B3 atas hasil usahanya. Di Kabupaten Jembrana, ketaatan pengelolaan limbah B3 oleh swasta menunjukkan tren pertumbuhan. Meskipun demikian, ketaatannya belum mencapai 100% dan mengalami penurunan pada 2024. Penurunan kondisi ini terjadi seiring dengan masa transisi swasta pada perubahan kebijakan penyimpanan limbah B3. Penurunan juga terjadi akibat adanya kegiatan penyumbang timbulan limbah (praktik mandiri tenaga kesehatan) yang belum bisa dijangkau dalam pembinaan.



Gambar 2.144 Persentase Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 oleh Swasta di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Lingkungan Hidup 2020–2024

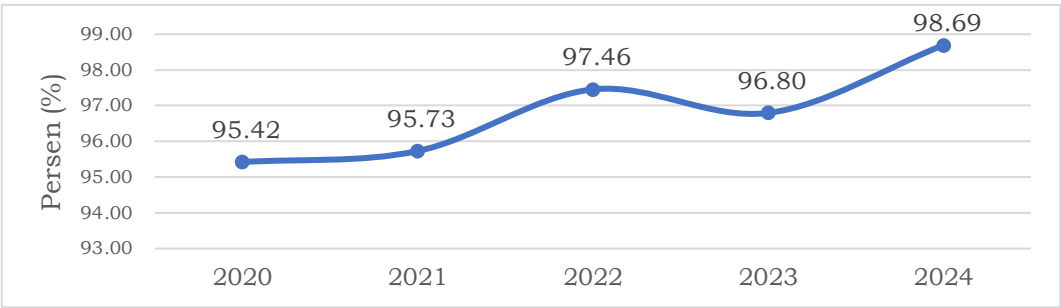
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah

dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.

1) Cakupan Penerbitan KTP-el

Kartu tanda penduduk (KTP) elektronik adalah identitas diri resmi yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP-el di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Meskipun demikian, belum semua penduduk wajib ber-KTP-el telah memiliki KTP-el.

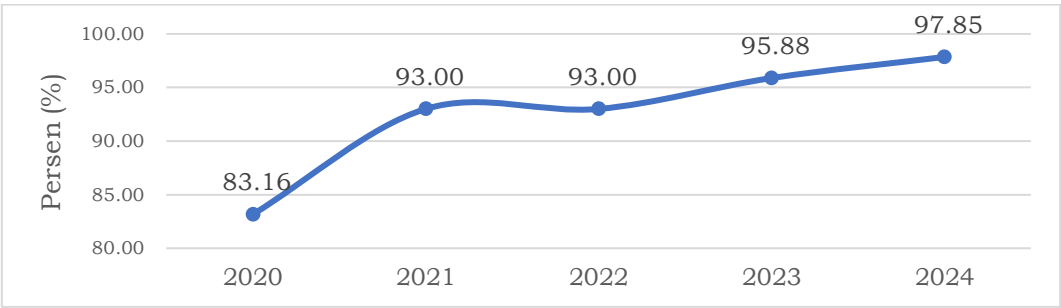


Gambar 2.145 Cakupan Penerbitan KTP-el di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020–2023 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

2) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Akta kelahiran termasuk syarat pendaftaran sekolah dan administrasi kependudukan lainnya sebelum pemiliknya memiliki KTP-el. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Meskipun demikian, kepemilikan akta kelahiran belum 100%.

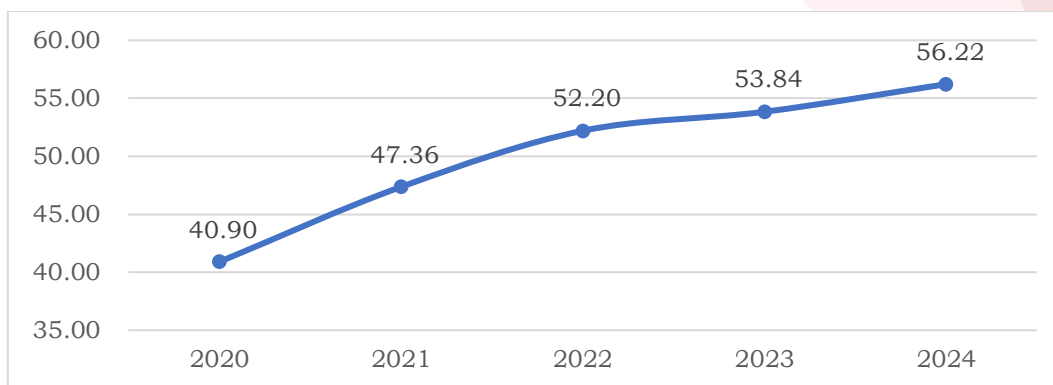


Gambar 2.146 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020–2023 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

3) Rasio Pasangan Berakta Nikah

Akta nikah adalah bukti resmi pernikahan yang diakui sah oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Meskipun demikian, rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Jembrana masih cenderung rendah.



Gambar 2.147 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Jembrana (2022) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

4) Ketersediaan Basis Data Kependudukan

Ketersediaan basis data kependudukan memudahkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan, menganalisis, dan menyajikan data kependudukan. Sebelumnya, basis data kependudukan Kabupaten Jembrana sudah dapat diakses dengan mudah. Akan tetapi, sejak tahun 2022, penyajian basis data kependudukan telah dialihkan menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

5) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP berbasis nomor induk kependudukan (NIK) telah diwajibkan sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hal ini diharapkan dapat memudahkan identifikasi dan menghindari data palsu dan ganda. Berdasarkan hal ini pula, sejak tahun 2011, Kabupaten Jembrana telah melaksanakannya dengan baik.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah proses pembangunan manusia yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri. Pemberdayaan yang dimaksud mencakup seluruh aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dan desa mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya sendiri sehingga meningkatkan kualitas hidup secara umum.

1) Cakupan Prasarana dan Sarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan prasarana dan sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sejak tahun 2020 hingga

2022, tetapi menurun menjadi 95% pada tahun 2023 dan 2024. Masih terdapat aset desa dinas yang berstatus belum jelas/tidak tercatat, seperti kantor kepala dusun di tanah adat. Selain itu, tapal batas desa serta sinkronisasi program pun belum jelas.

2) Jumlah Kelompok Binaan LPM

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berperan sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tumbuh secara swadaya. LPM menjadi mitra pemerintah dalam koordinasi pembangunan masyarakat. Sejak tahun 2020, terdapat 13 kelompok binaan LPM di Kabupaten Jembrana. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 20 kelompok LPM yang terbina.

3) Jumlah Kelompok Binaan dan Keaktifan PKK

Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) mewadahi peran perempuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejak tahun 2020, jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Jembrana mencapai 859 dengan tingkat keaktifan PKK mencapai 100%. Hal ini menunjukkan aktifnya PKK di Kabupaten Jembrana untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan keluarga.

4) Keaktifan Lembaga Swadaya Masyarakat

Sejak tahun 2020, tingkat keaktifan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Jembrana hanya mencapai 9,80% sehingga perlu ditingkatkan.

5) Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi

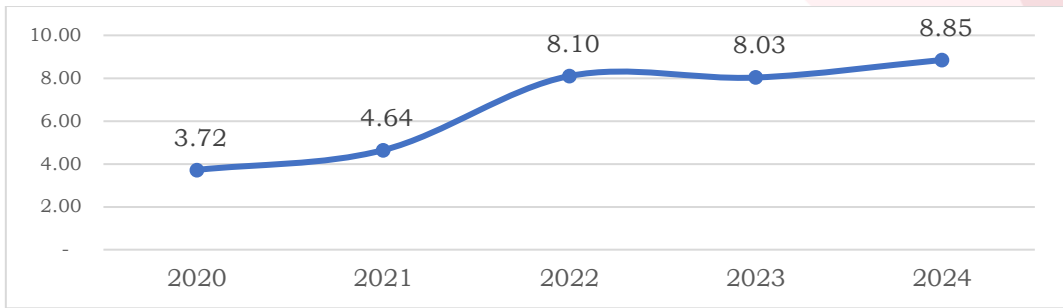
Sejak tahun 2020, belum terdapat lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi.

6) Keaktifan Posyandu

Sejak tahun 2020, tingkat keaktifan posyandu di Kabupaten Jembrana selalu mencapai 100% sehingga perlu dipertahankan.

7) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat swadaya masyarakat menunjukkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa. Tingkat swadaya masyarakat di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan.



Gambar 2.148 Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2025)

8) Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

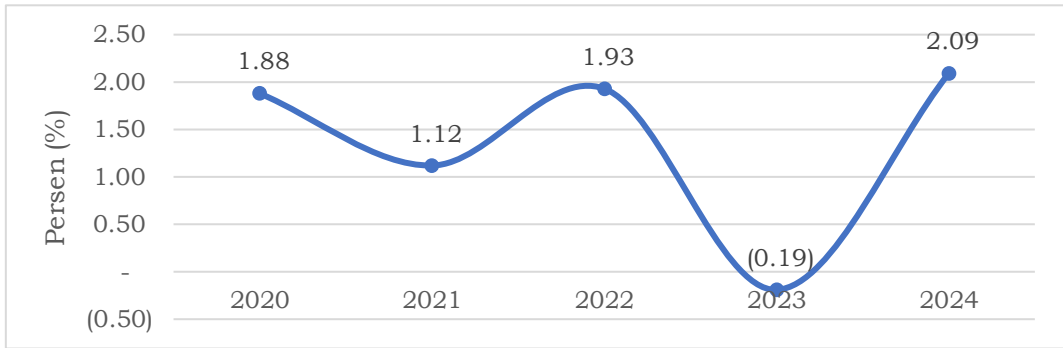
Sejak tahun 2020, belum terdapat pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jembrana.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah apabila tidak dikendalikan dan dibina. Keluarga berencana hadir sebagai program pengendalian penduduk. Harapannya, tercipta keluarga kecil bahagia sejahtera di Kabupaten Jembrana.

1) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 relatif tinggi. Kemudian angka laju pertumbuhan penduduk cukup sedikit fluktuatifnya dari tahun 2021 hingga tahun 2024.



Gambar 2.149 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024; Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Semester 2 Tahun 2024

2) Total Fertility Rate

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jembrana 2022 dan Dinas PPPAPKB tahun 2023, TFR Kabupaten Jembrana tahun 2020 sebesar 2,30 dan nilai TFR mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi 2,02. Pada tahun 2022 dan 2023-2024, nilai TFR berkisar di antara 2,15 dan 2,13 yang mengindikasikan rata-rata perempuan di Kabupaten Jembrana melahirkan 2–3 kali.

3) Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

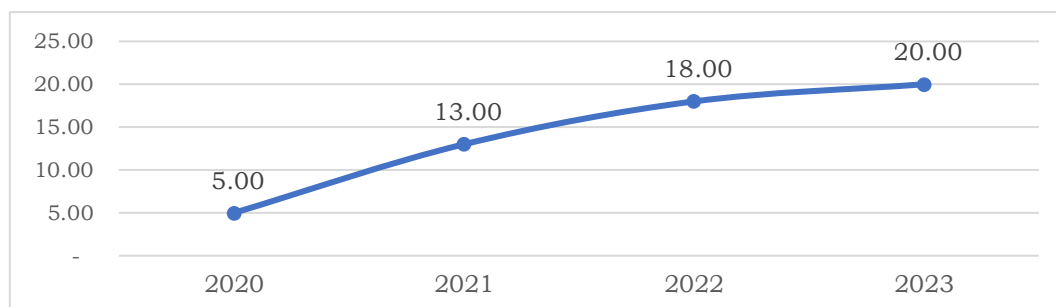
Persentase perangkat daerah meliputi perangkat daerah (Dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB dan yang menyusun serta memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai persentase stagnan di angka 100%.

4) Jumlah Kebijakan yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Kabupaten Jembrana belum memiliki kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

5) Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat jumlahnya dari tahun 2020 hingga tahun 2023.



Gambar 2.150 Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2024)

6) Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan kependudukan cenderung konstan dengan jumlah sebanyak 1.

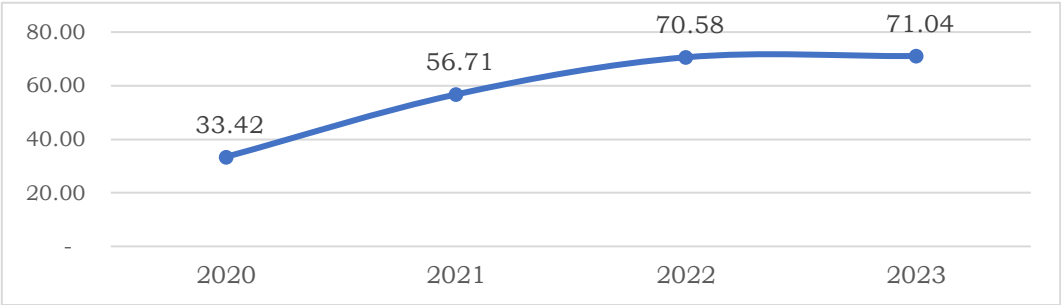
7) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Berdasarkan data DPPPAPPKB Kabupaten Jembrana tahun 2023, rata-rata jumlah anak pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar 1,6. Sementara itu pada tahun 2024, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Jembrana mencapai 2,13. Artinya, rata-rata keluarga di

Kabupaten Jembrana memiliki 1–2 anak. Dalam lingkup nasional, pemerintah menganjurkan untuk memiliki dua anak. Hal ini menandakan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Jembrana sudah cukup berhasil.

8) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB dapat diketahui berdasarkan persentase antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur. Berdasarkan gambar di bawah, dapat terlihat bahwa rasio akseptor KB di Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 sampai tahun 2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022, rasio akseptor KB mengalami peningkatan yang mengindikasikan adanya peningkatan jumlah pasangan usia subur yang memanfaatkan fasilitas kesehatan.

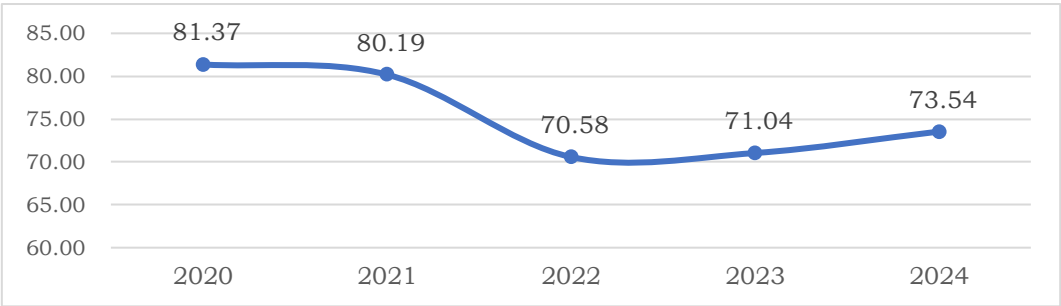


Gambar 2.151 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2024)

9) Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun di Kabupaten Jembrana cenderung mengalami penurunan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah sebagai bentuk upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jembrana.

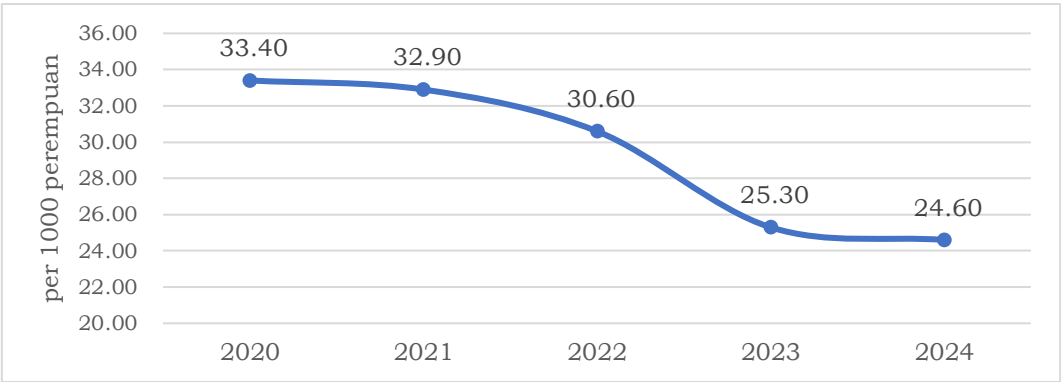


Gambar 2.152 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

10) Angka Kelahiran Remaja per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan.

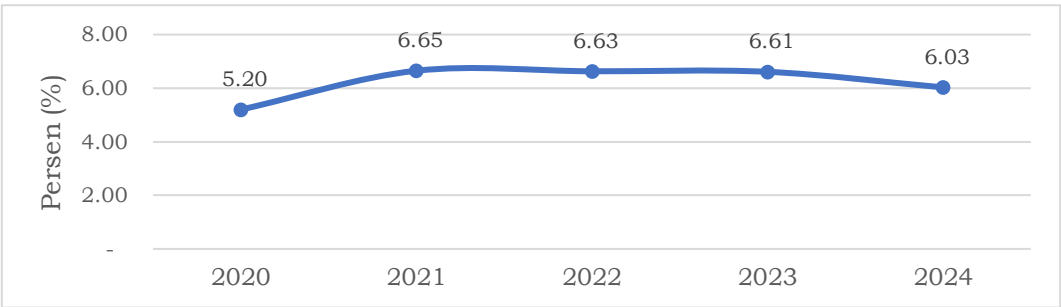


Gambar 2.153 Angka Kelahiran Remaja per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

11) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Jember cenderung berada pada kisaran angka 5-6 dari tahun 2020 hingga 2024.

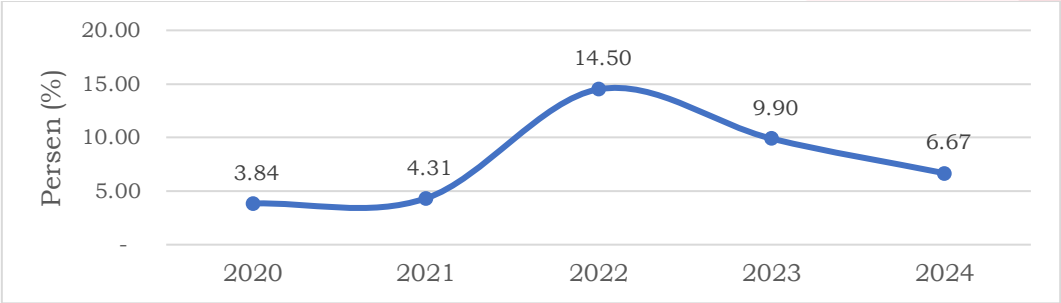


Gambar 2.154 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di bawah 20 Tahun Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

12) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Jember cenderung fluktuatif perubahannya, khususnya dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun demikian, cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi mengalami penurunan.

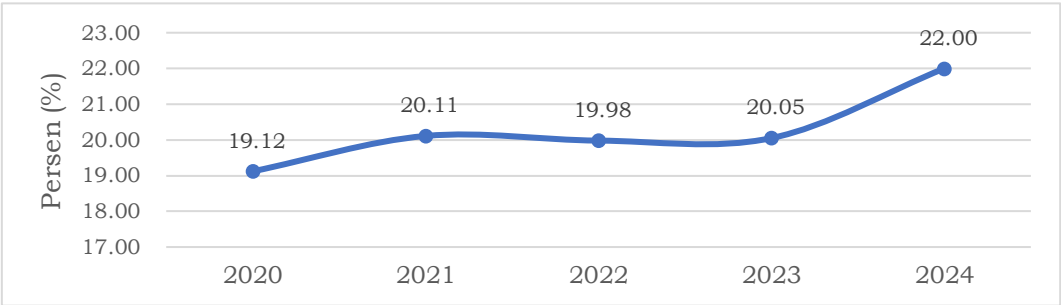


Gambar 2.155 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

13) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat.

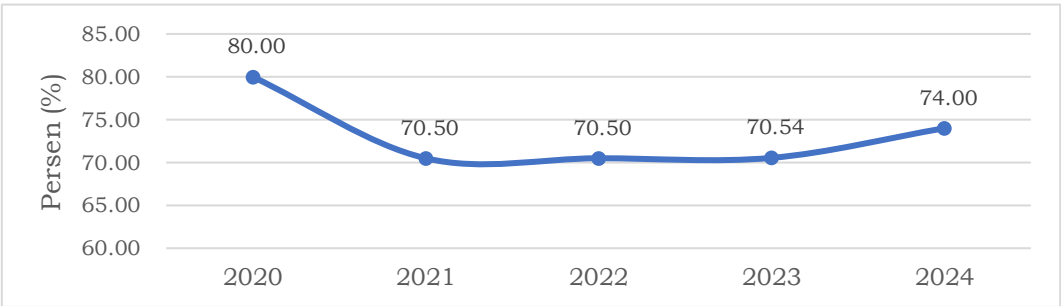


Gambar 2.156 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

14) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Sejak tahun 2020 hingga 2023, persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi cenderung menurun di Kabupaten Jembrana. Sementara itu, pada tahun 2024 mengalami peningkatan.

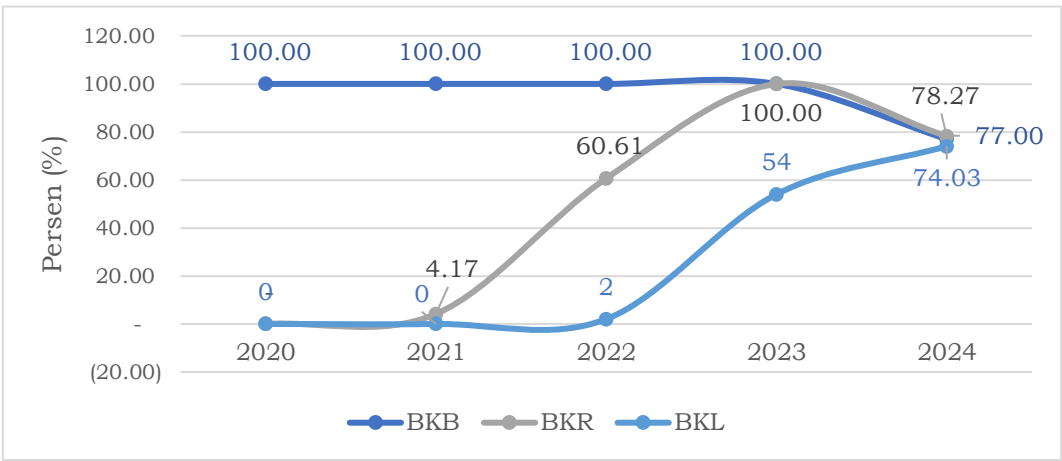


Gambar 2.157 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

15) Cakupan Anggota Bina Keluarga Ber-KB

Cakupan anggota bina keluarga ber-KB meliputi anggota bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL). Cakupan bina keluarga balita memiliki nilai terbesar dengan kecenderungan stagnan dari tahun 2020 hingga 2023 yaitu sebesar 100. Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) dan lansia (BKL) harus menjadi perhatian pemerintah daerah.



Gambar 2.158 Cakupan Anggota Bina Keluarga Ber-KB di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

16) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana cenderung stabil jumlahnya dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu sebanyak 5.

17) Cakupan Remaja dalam Pusat informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa

Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kabupaten Jembrana cenderung sama sejak tahun 2020 hingga 2024, yaitu sudah mencapai angka 100%. Hal ini harus dipertahankan.

18) Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 hingga 2023 cenderung stabil, yaitu berkisar 62,74%. Nilai ini mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 56%. Penurunan ini perlu menjadi perhatian dalam penyediaan PKB/PLKB di Kabupaten Jembrana.

19) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kabupaten Jembrana cenderung stagnan dengan nilai 0 pada tahun 2020 hingga 2022. Terdapat kenaikan pada tahun 2023, yaitu sejumlah 23. Pada tahun 2024, cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS meningkat menjadi 28.

20) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan di Kabupaten Jembrana cenderung memiliki nilai rasio yang sama sejak tahun 2020 hingga 2024, yaitu 1:1.

21) Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung memiliki nilai yang sama sejak tahun 2020 hingga 2024, yaitu sebesar 100%.

22) Persentase Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Standardisasi Pelayanan

Persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standardisasi pelayanan di Kabupaten Jembrana memiliki nilai 100% dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

23) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa di Kabupaten Jembrana memiliki nilai 100% sejak tahun 2020 hingga 2024.

24) Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 hingga 2024 yaitu 0%. Hal tersebut harus dipertahankan.

25) Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

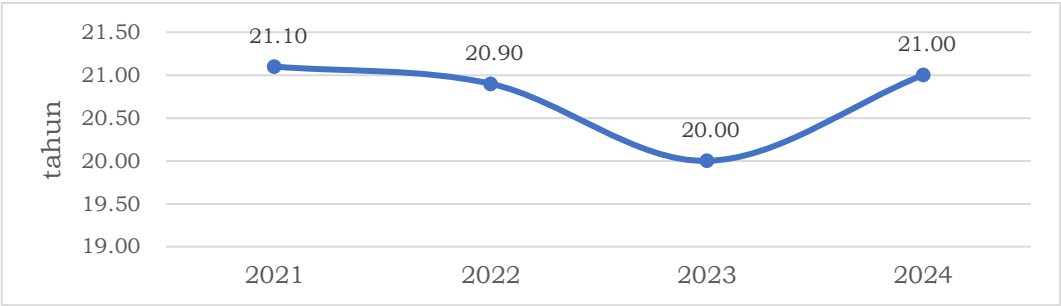
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Jembrana memiliki nilai 100 dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

26) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Jembrana memiliki nilai 100% sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

27) Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Jembrana berkisar di antara 20 sampai 21 tahun, khususnya pada tahun 2021 hingga 2024.

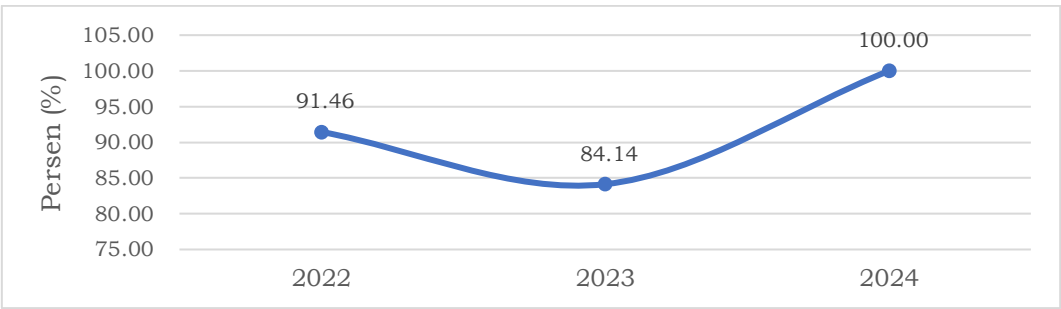


Gambar 2.159 Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

28) Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif, khususnya pada tahun 2021 hingga tahun 2023.



Gambar 2.160 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kabupaten Jembrana Tahun 2022–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (2025)

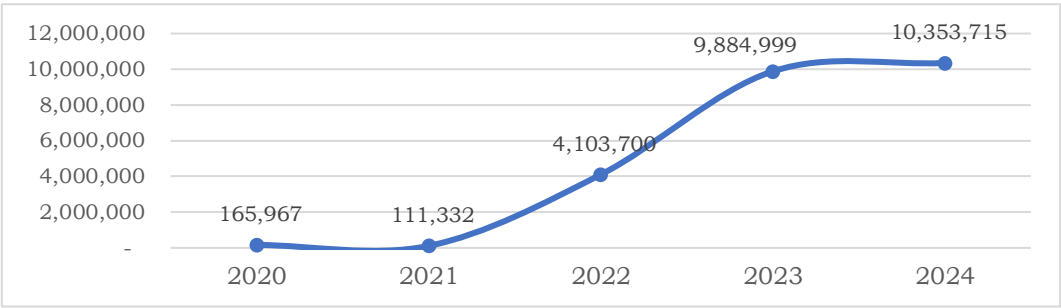
9. Perhubungan

Perhubungan/transportasi termasuk hajat hidup orang banyak. Selain itu, transportasi berperan penting untuk membuka keterisolasian wilayah.

Lebih lanjut, transportasi dapat mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah.

1) Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan meningkatnya minat masyarakat dan wisatawan menggunakan angkutan umum. Meskipun demikian, terdapat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan.

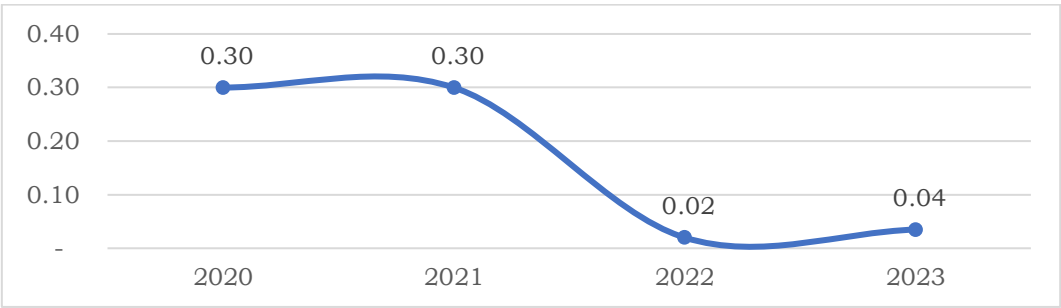


Gambar 2.161 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023)

2) Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan *regrouping* trayek perdesaan dan jumlah angkutan AKDP yang tidak dapat meremajakan kendaraan bergabung ke trayek perdesaan. Meskipun demikian, terdapat kenaikan pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat 35 izin trayek angkutan umum di Kabupaten Jembrana.

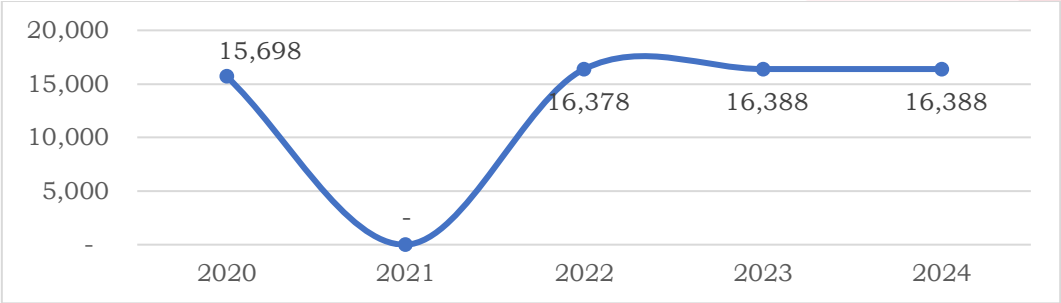


Gambar 2.162 Rasio Izin Trayek di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2024) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023)

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Bahkan, pada tahun 2021, tidak dilakukan uji KIR angkutan umum karena dialihkan menjadi e-BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik).



Gambar 2.163 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

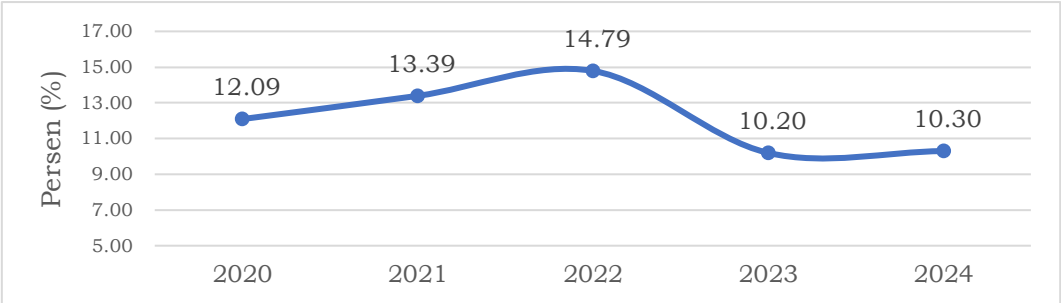
Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pada tahun 2020-2024, Kabupaten Jembrana memiliki dua terminal tipe C, yaitu Terminal Penumpang Negara dan Terminal Penumpang Gilimanuk.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Akan tetapi, terdapat kenaikan pada tahun 2022.

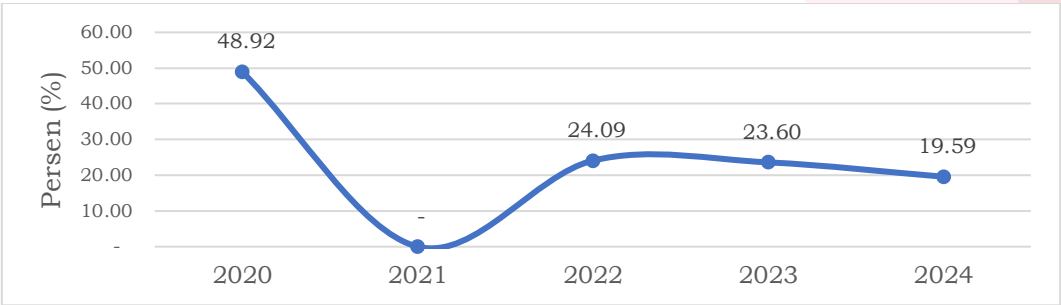


Gambar 2.164 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

6) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Hal ini dikarenakan perubahan layanan menjadi e-BLUE dan penindakan pelanggaran KIR.

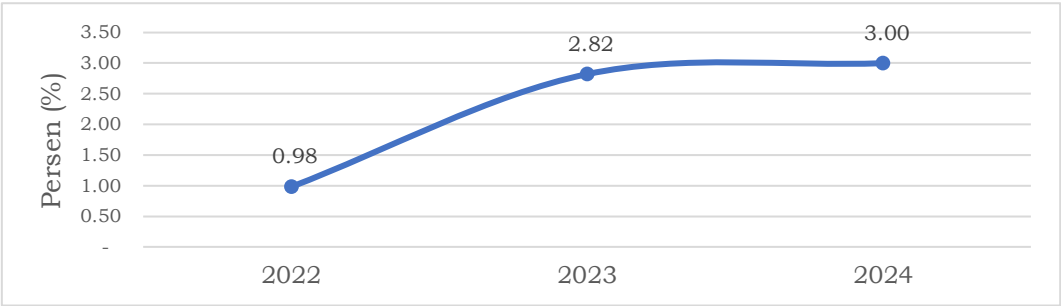


Gambar 2.165 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2023)

7) Pemasangan Rambu-Rambu

Pada tahun 2020, dilakukan pemasangan 125 rambu lalu lintas di Kabupaten Jember. Jumlah ini terus ditingkatkan dengan rasio pemasangan rambu-rambu yang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

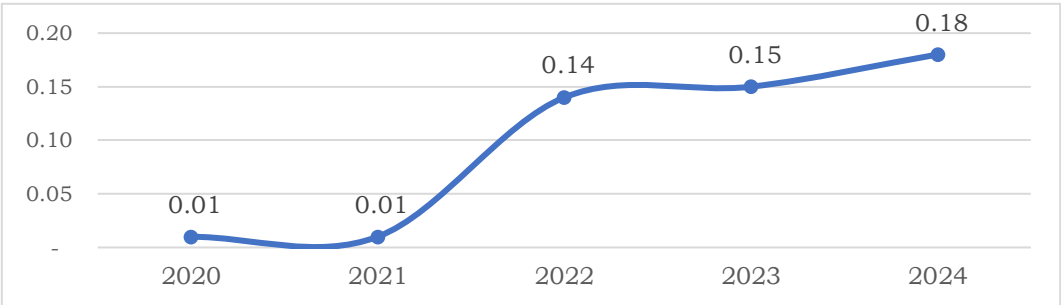


Gambar 2.166 Rasio Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Jember Tahun 2022–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

8) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan. Peningkatan ini terjadi akibat adanya penambahan ruas jalan provinsi dan kabupaten di wilayah ini. Hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk menghindari potensi kemacetan di Kabupaten Jember.

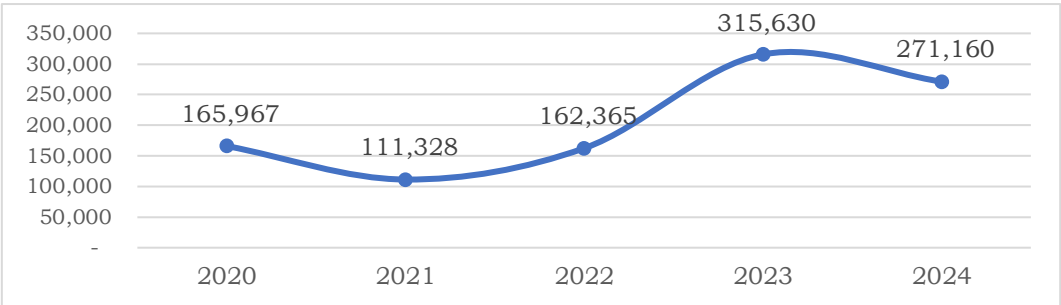


Gambar 2.167 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

9) Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan meski mengalami penurunan pada tahun 2024.

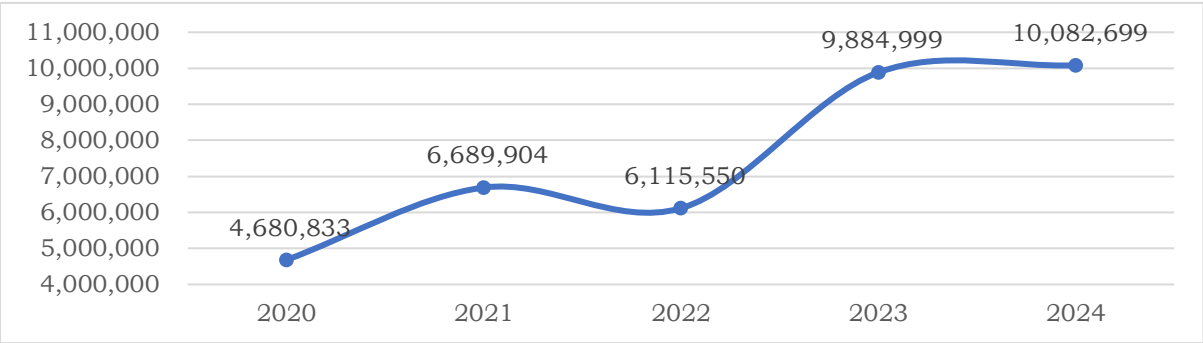


Gambar 2.168 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

10) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Bahkan, jumlahnya mencapai lebih dari 10 juta orang/barang pada tahun 2024.

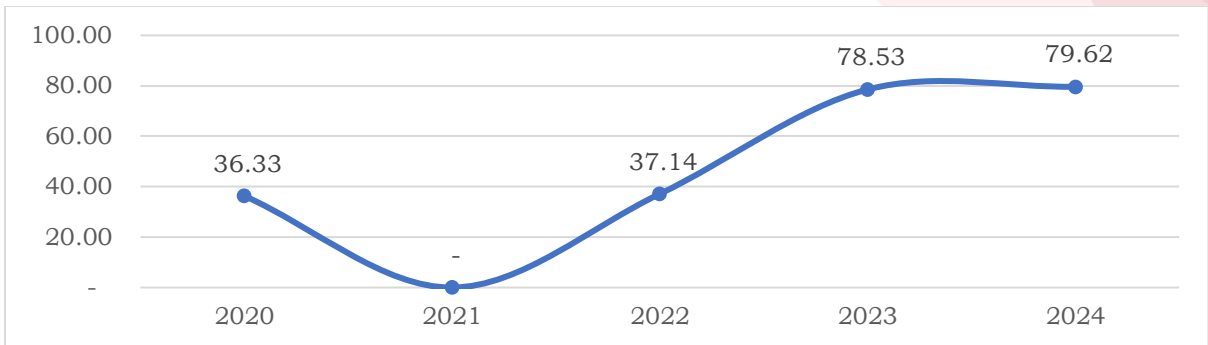


Gambar 2.169 Jumlah Orang/Barang yang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal per Tahun di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

11) Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Berkondisi Baik

Persentase sarana dan prasarana transportasi yang berkondisi baik memiliki tren pertumbuhan. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang berkondisi baik di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.170 Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Berkondisi Baik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

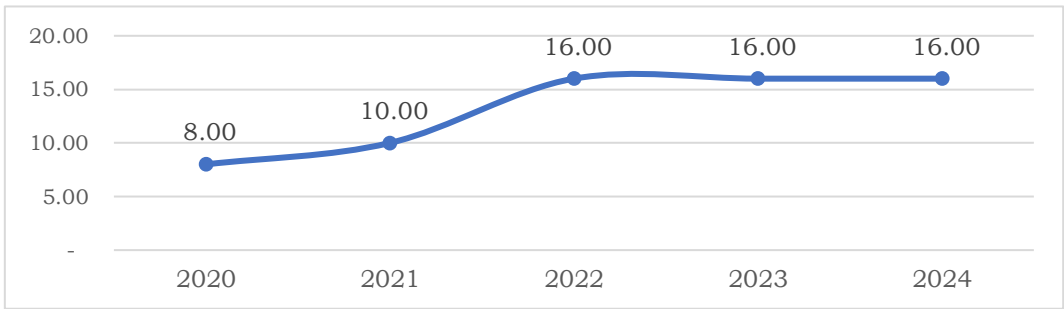
Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

10. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan layanan telekomunikasi perlu menjangkau seluruh pelosok daerah, mengingat kemajuan perkembangan teknologi yang sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan oleh daerah.

1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal tersebut harus terus ditingkatkan supaya cakupan pengembangan dan pemberdayaan informasi masyarakat dapat lebih merata penyebarannya.

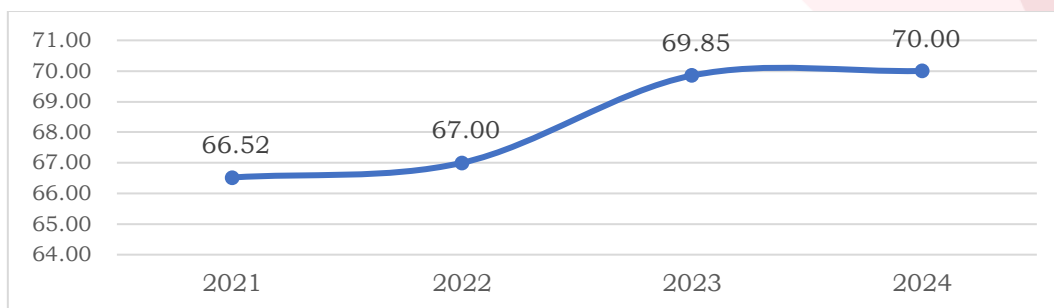


Gambar 2.171 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana (2023) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (2025)

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi dapat diketahui berdasarkan perbandingan antara luas wilayah yang terlayani dengan total luas wilayah secara keseluruhan. Cakupan layanan telekomunikasi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, nilai tersebut menunjukkan belum optimalnya cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Jembrana

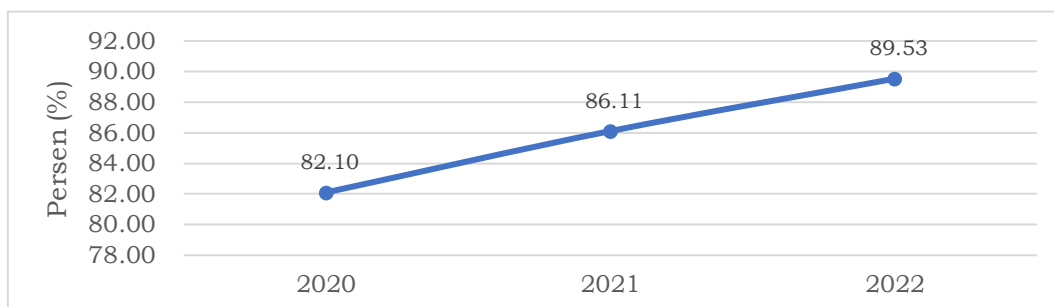


Gambar 2.172 Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana (2025)

3) Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Berdasarkan gambar di bawah, dapat terlihat bahwa persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Meningkatnya penggunaan telepon seluler ini didukung dengan pembangunan beberapa stasiun transmisi di Kabupaten Jembrana.

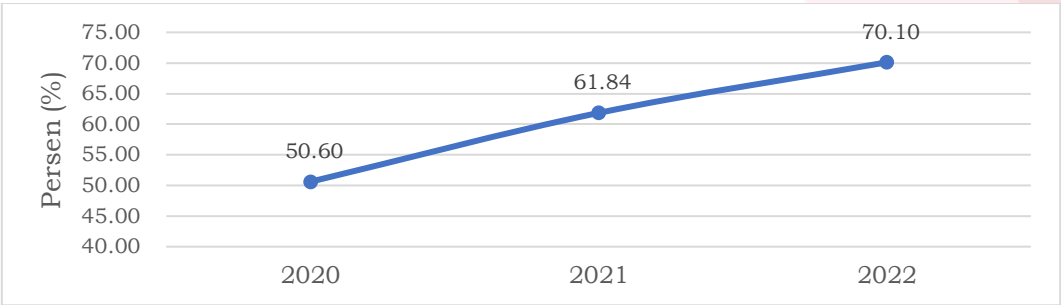


Gambar 2.173 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2022

Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2023

4) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga dengan akses internet diketahui dari perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet dengan total jumlah rumah tangga. Berdasarkan gambar di bawah, dapat terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pemerintah daerah harus terus berupaya memperluas akses internet dengan memperbanyak lokasi Wi-Fi publik gratis di berbagai fasilitas publik untuk mendukung *smart city* di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.174 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kabupaten Jember Tahun 2020-2022

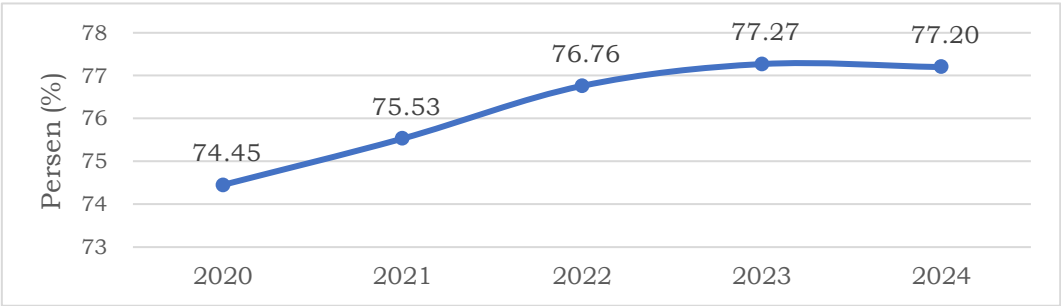
Sumber: Provinsi Bali dalam Angka 2023

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM berperan penting dalam pemerataan ekonomi. Koperasi dan UKM menjangkau hingga lokasi terpencil. Pada masa pandemi Covid-19, pun koperasi dan UKM berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

1) Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif dapat dihitung berdasarkan persentase antara jumlah koperasi aktif dengan jumlah total seluruh koperasi. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Jember cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif, pemerintah daerah perlu berupaya peningkatan pengelolaan koperasi aktif melalui berbagai program yang memfasilitasi terkait pembinaan, pemberian modal, serta peningkatan kualitas sarana prasarana koperasi.

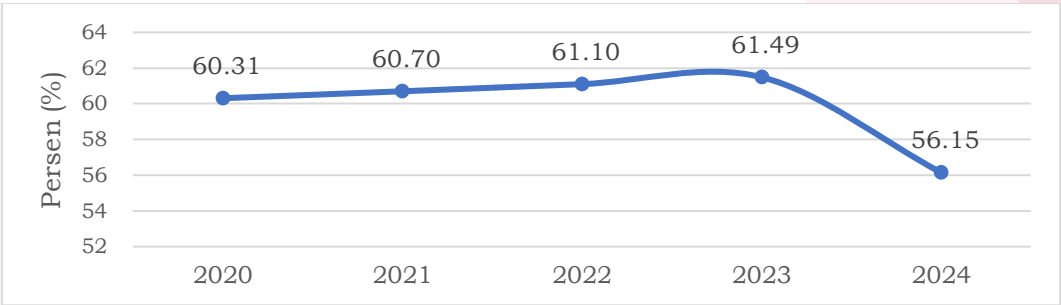


Gambar 2.175 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2023 & 2025) dan Provinsi Bali dalam Angka 2024

2) Persentase UKM non-BPR/LKM Aktif

Persentase UKM non-BPR/LKM Aktif di Kabupaten Jember cenderung meningkat nilai persentasenya dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Akan tetapi, terjadi penurunan persentase UKM non-BPR/LKM aktif pada tahun 2024.

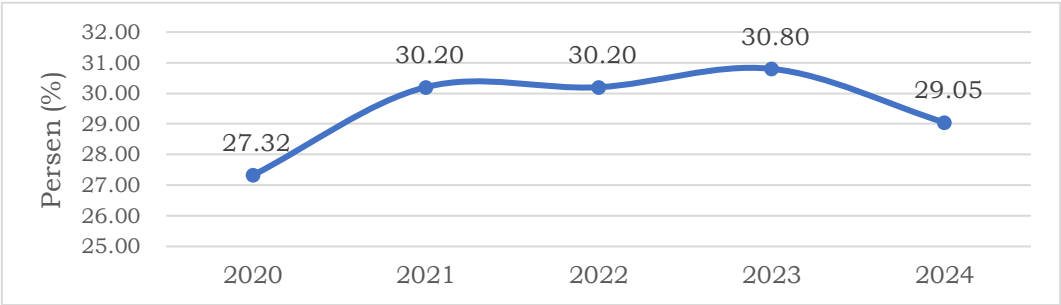


Gambar 2.176 Persentase UKM non-BPR/LKM Aktif di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2025)

3) Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase UKM BPR/ LKM Aktif di Kabupaten Jember cenderung meningkat nilai persentasenya dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Meskipun demikian, terjadi penurunan persentase BPR/LKM aktif pada tahun 2024.

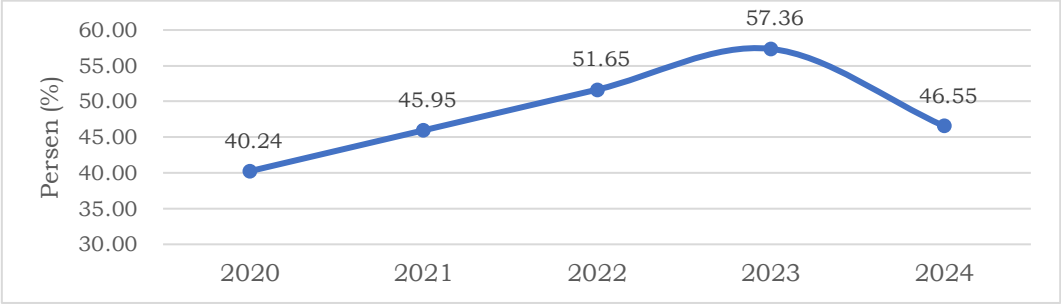


Gambar 2.177 Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2025)

4) Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jember cenderung meningkat nilai persentasenya dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Namun, terjadi penurunan persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2024.



Gambar 2.178 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

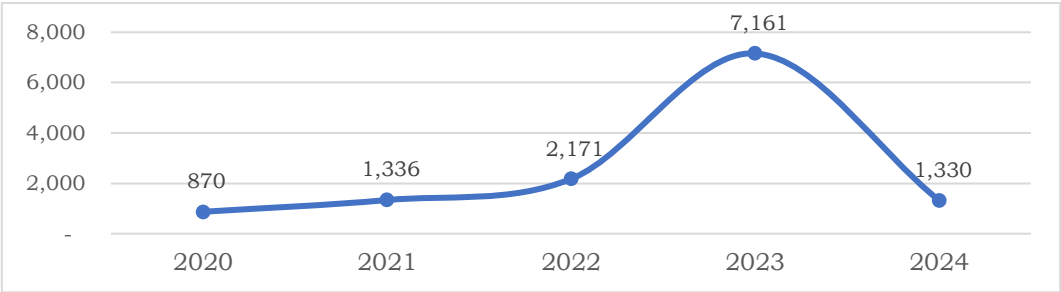
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2025)

12. Penanaman Modal

Meningkatnya penanaman modal tidak hanya berdampak positif terhadap pemerintah, tetapi juga masyarakat. Penanaman modal dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, penanaman modal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Jembrana secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pengurusan perizinan wisatawan menjadi lebih mudah dengan sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) serta adanya pengaruh dari pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengwi. Akan tetapi, jumlah investor di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini dapat terjadi karena ketidakpastian politik dan transisi pemerintahan.



Gambar 2.179 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (2025)

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Berdasarkan tabel berikut, dapat terlihat bahwa jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Nilai investasi pada tahun 2021 dapat mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan efek dari pandemi covid-19. Akan tetapi, nilai investasi mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya karena adanya berbagai rencana investasi di bidang pariwisata, seperti Kerta Bali Sejahtera di Kecamatan Pekutatan. Meskipun demikian jumlah investasi di Kabupaten Jembrana juga mengalami penurunan seiring dengan menurunnya jumlah investor pada tahun 2024.

Tabel 2.25 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7.381.111	448.119	309.029	855.581	400.222

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka (2025)

3) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dapat dilihat dengan persentase antara realisasi PMDN tahun evaluasi dikurangi dengan realisasi PMDN tahun sebelum evaluasi, kemudian dibagi dengan realisasi PMDN sebelum evaluasi. Realisasi PMDN mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penurunan nilai realisasi PMDN paling besar terjadi di tahun 2021 dan diperkirakan terjadi akibat dari pandemi *covid-19*. Namun, nilai realisasi meningkat pada tahun 2022 dan 2023, meskipun kembali menurun pada tahun 2024. Hal tersebut terjadi seiring dengan penurunan jumlah investor di Kabupaten Jembrana.

Tabel 2.26 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	7.097.926	165.014	201.730	643.488	324.038
Persentase Kenaikan/Penurunan (%)	311,52	-97,68	22,25	219	-49,64

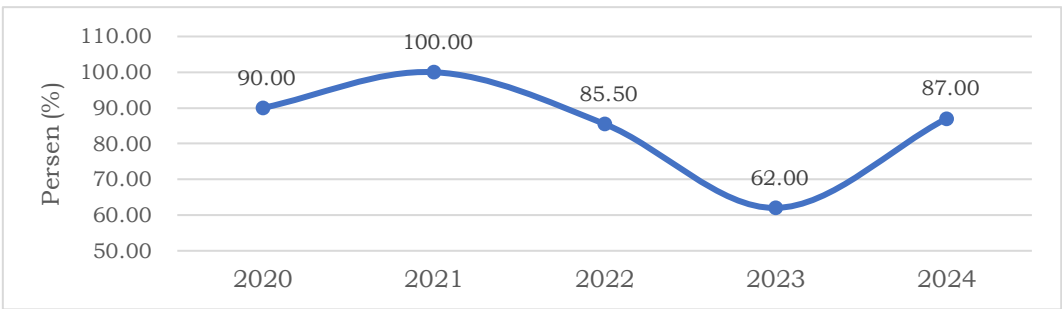
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka (2025)

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan mencakup fasilitasi kegiatan kepemudaan. Pembangunan olahraga merupakan proses meningkatkan kegiatan fisik manusia. Keduanya penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

1) Persentase Keaktifan Organisasi Pemuda

Persentase keaktifan organisasi pemuda di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, jumlah organisasi pemuda yang aktif mencapai 87%. Perlu dilakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap seluruh organisasi pemuda di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.180 Persentase Keaktifan Organisasi Pemuda di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023)

2) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren fluktuasi. Persentase wirausaha muda pada tahun 2020 dan 2021

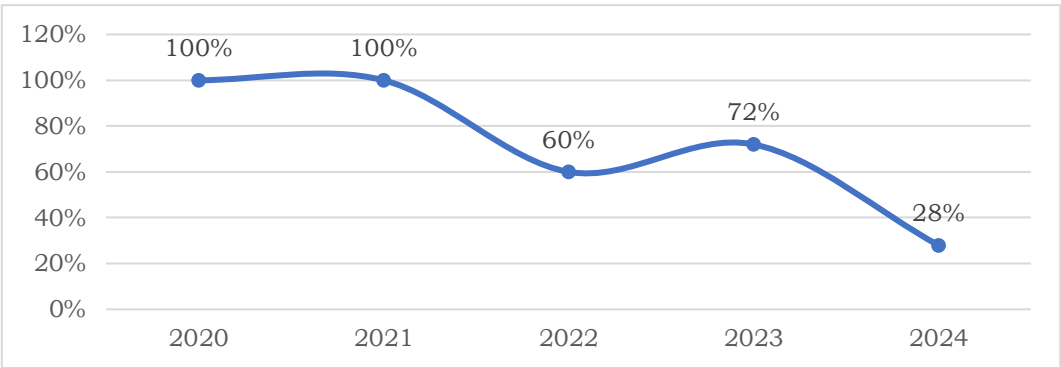
sempat meningkat hingga angka 2,16%. Namun, pada tahun 2022, persentase wirausaha muda di Kabupaten Jembrana mencapai 0,048% yang meningkat menjadi 0,055% pada tahun 2023 dan 0,06% pada tahun 2024. Meskipun demikian, persentase tersebut relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan ke depannya.

3) Jumlah Cabang Olahraga Terbina

Jumlah cabang olahraga terbina di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren fluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah cabang olahraga yang terbina mencapai 18 cabang olahraga mengalami peningkatan menjadi 21 cabang olahraga pada 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat 31 cabang olahraga yang telah terbina. Pada tahun sebelumnya, tidak dilakukan pembinaan karena pandemi Covid-19 dan pada tahun 2024 hanya 20 cabang olahraga yang terbina di Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pembinaan olahraga untuk mengimbangi masa pasif tersebut.

4) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Jembrana mengalami penurunan. Pada tahun 2024, cakupan tersebut relatif rendah (28%). Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sertifikasi pelatih untuk menjaga kualitas atlet di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.181 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (2025); Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2022–2023)

5) Jumlah Atlet Muda Terbina

Jumlah atlet muda terbina di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang berfluktuasi. Jumlah atlet muda terbina pada tahun 2020 dan 2021 mencapai 300 dan 320 atlet. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat masing-masing 400 dan 287 atlet muda yang telah terbina. Jumlah ini menurun menjadi 112 atlet muda pada tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pembinaan atlet untuk mengimbangi masa pasif tersebut.

6) Jumlah Atlet Berprestasi

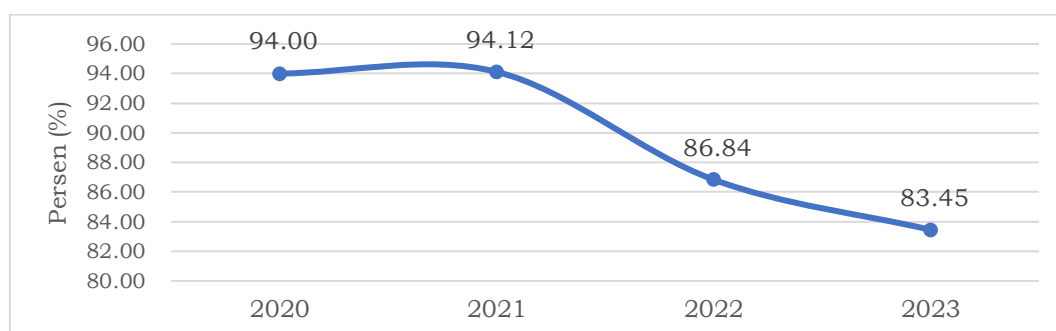
Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, terdapat masing-masing 65, 204, dan 164 atlet yang berprestasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan prestasi atlet di Kabupaten Jembrana melalui program pelatihan dan insentif tambahan untuk memicu semangat berprestasi para atlet.

7) Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan. Sebelumnya, pada tahun 2020 hingga 2022 tidak terdapat prestasi olahraga. Akan tetapi, pada tahun 2023 mencapai 50 prestasi dan meningkat menjadi 84 prestasi pada tahun 2024.

14. Statistik

Statistik terbagi tiga, yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik berkaitan erat dengan keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyediakan sistem informasi perangkat daerah yang terintegrasi meskipun persentasenya terus menurun. Selain itu, melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, telah tersedia publikasi Kabupaten Jembrana dalam Angka dan PDRB sejak tahun 2020. Namun, pada tahun 2024 tidak terdapat upaya integrasi sistem informasi perangkat daerah.



Gambar 2.182 Persentase Integrasi Sistem Informasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2023

15. Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian berkaitan dengan pengamanan dan perlindungan informasi antar dan intra-perangkat daerah. Di Kabupaten Jembrana, urusan pemerintahan bidang persandian dirumpunkan dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta statistik. Pada tahun 2021, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi mencapai 80%.

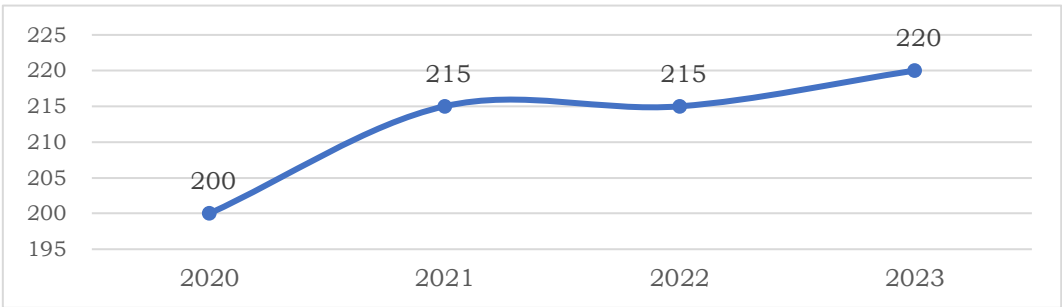
Peningkatan terus terjadi pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 100%. Namun, pada tahun 2020-2021 tidak terdapat perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi

16. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan identitas bangsa. Kebudayaan diwariskan dari leluhur. Kebudayaan harus terus dilestarikan dan mengakar dalam kehidupan.

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Selain itu, festival seni dan budaya juga dapat menjadi ajang pengembangan seni di Kabupaten Jembrana.

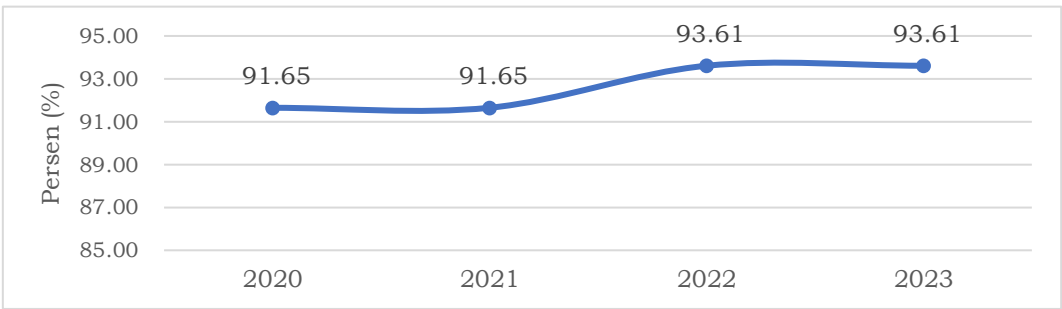


Gambar 2.183 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2023)

2) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan.



Gambar 2.184 Persentase Pelestarian Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2023)

3) Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Jembrana bertambah dari 1.033 (2019) menjadi 1.055 (2022).

4) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu

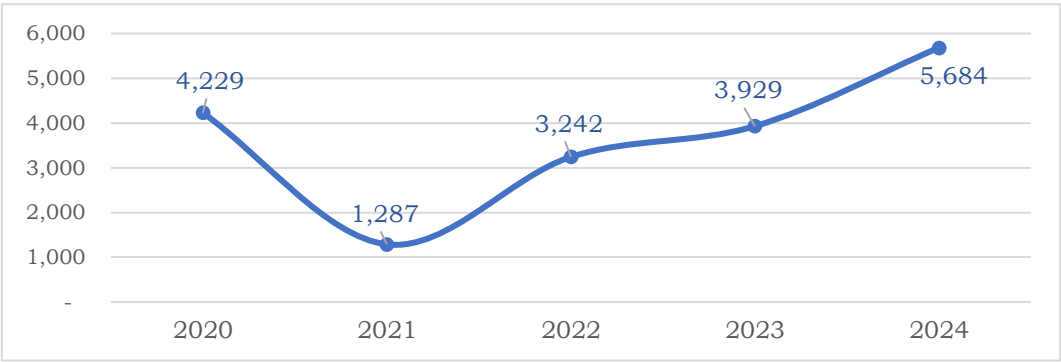
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Jembrana bertambah dari 14 karya (2019) menjadi 17 karya (2023).

17. Perpustakaan

Kualitas perpustakaan berkaitan erat kualitas sumber daya manusia. Perpustakaan menjadi sumber berbagai ilmu pengetahuan untuk pencerdasan bangsa. Selain itu, semakin banyak dan lengkap koleksi perpustakaan, ilmu pengetahuan yang didapat pun semakin luas.

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan sebelum tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan pada masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pengunjung perpustakaan di Kabupaten Jembrana masih relatif rendah.

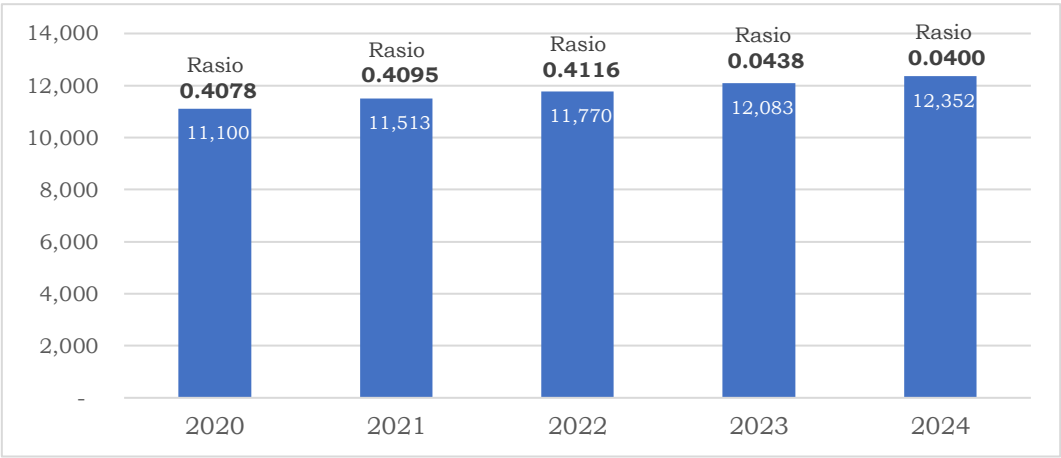


Gambar 2.185 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2024 dan Sekretariat Daerah (2025)

2) Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah

Jumlah judul dan eksemplar buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan. Artinya, terdapat peningkatan kualitas perpustakaan di Kabupaten Jembrana.

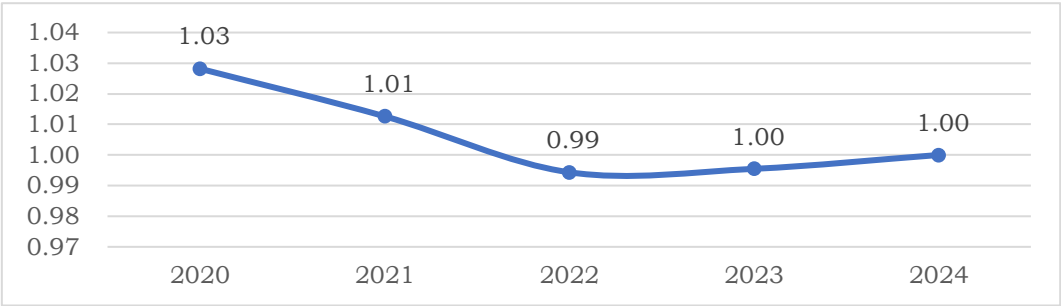


Gambar 2.186 Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2024 dan Sekretariat Daerah (2025)

3) Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Jembrana menunjukkan kecenderungan tetap pada kisaran angka 1. Hal ini dikarenakan tetapnya jumlah perpustakaan seiring bertambahnya jumlah penduduk.

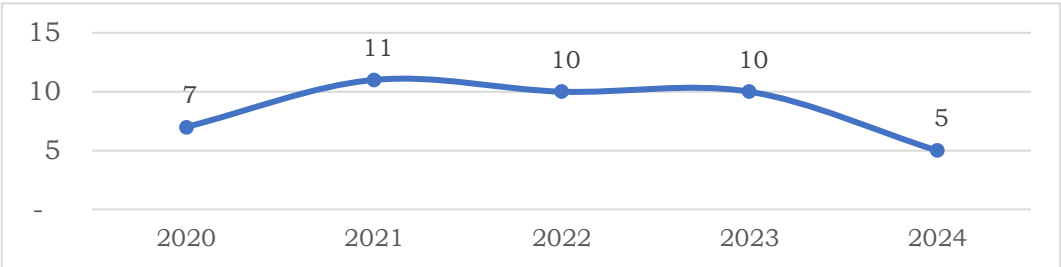


Gambar 2.187 Rasio Perpustakaan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Statistik Sektorial Kabupaten Jembrana dan Sekretariat Daerah (2025)

4) Jumlah Pustakawan

Jumlah pustakawan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren fluktuasi. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memberikan fasilitasi yang baik bagi perpustakaan.



Gambar 2.188 Jumlah Pustakawan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

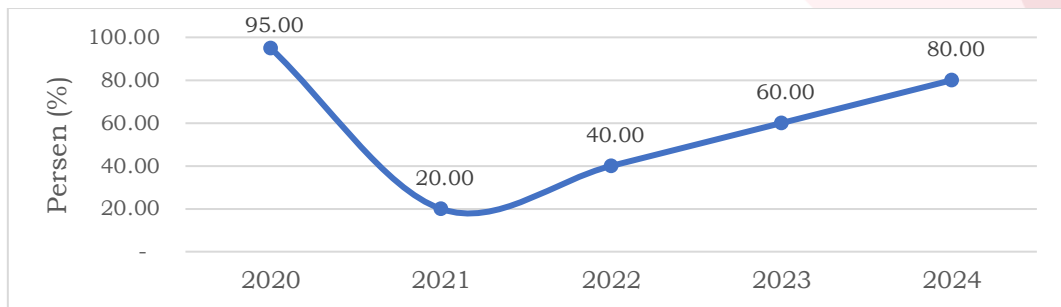
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka 2020–2024 dan Sekretariat Daerah (2025)

18. Kearsipan

Arsip merupakan sumber informasi dan alat pengawasan yang menunjang kegiatan administrasi. Arsip berkedudukan sebagai ingatan organisasi. Dalam memudahkan pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025–2029, kearsipan berperang penting.

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Sejak tahun 2021, tingkat ketersediaan arsip menggantikan indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Sejak tahun 2021, fasilitasi dilakukan terhadap enam perangkat daerah setiap tahunnya.



Gambar 2.189 Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Jember yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2020–2024

Sumber: Sekretariat Daerah (2025)

2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan

Kegiatan peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan di Kabupaten Jember sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mencapai 100% yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan lokakarya dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

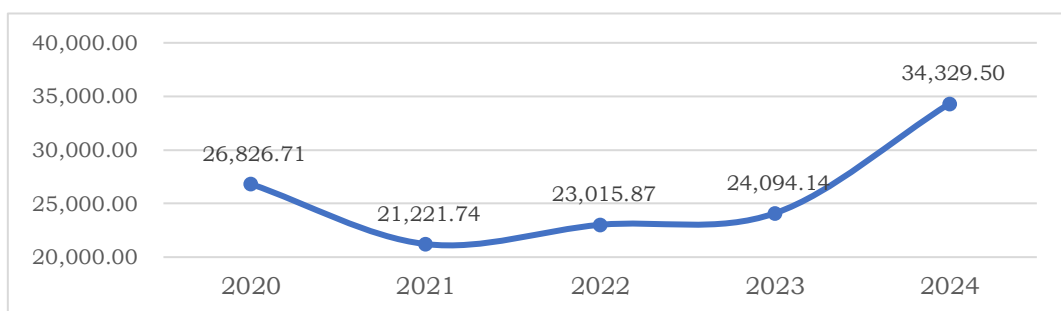
C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai kabupaten dengan garis pantai yang panjang, kawasan pesisir dan laut Kabupaten Jember harus dikelola dengan optimal. Harapannya, kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Jember cenderung fluktuatif. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi alam. Meskipun demikian, terdapat peningkatan produksi perikanan sejak tahun 2021. Ke depannya, hal ini perlu dioptimalkan dengan pemberian bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan, seperti benih dan pakan ikan.



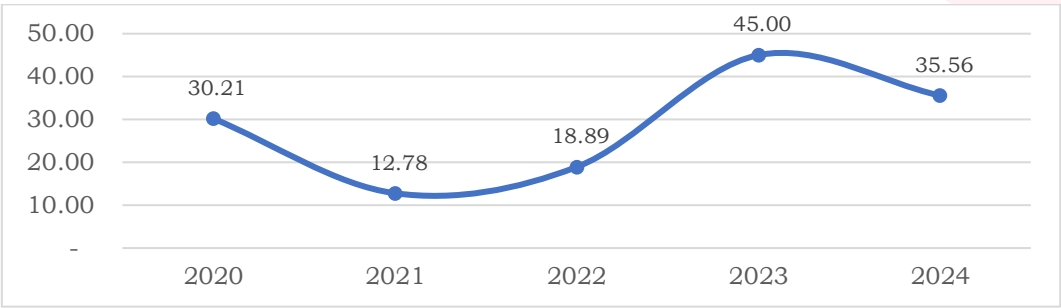
Gambar 2.190 Produksi Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan 2022; Evaluasi RPJMD Kabupaten Jember (2023) dan : Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025)

2) Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Jember menunjukkan tren penurunan meskipun meningkat kembali sejak tahun 2021 (dalam kg/kapita/tahun). Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Jember perlu mendorong konsumsi

ikan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk kelompok pembudidaya dan nelayan serta penyuluhan terkait gizi ikan.

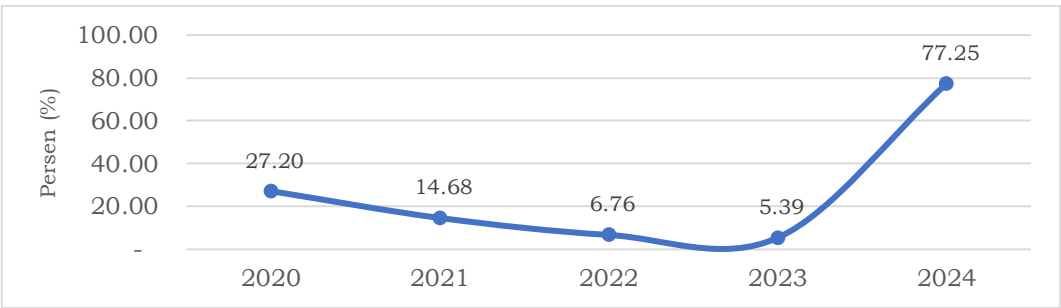


Gambar 2.191 Konsumsi Ikan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2025) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

3) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan. Hal ini perlu dievaluasi agar program bina kelompok nelayan di Kabupaten Jembrana menjadi lebih baik dalam hal kelembagaan, anggaran dasar, pembukuan, dan pembinaan teknis.



Gambar 2.192 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

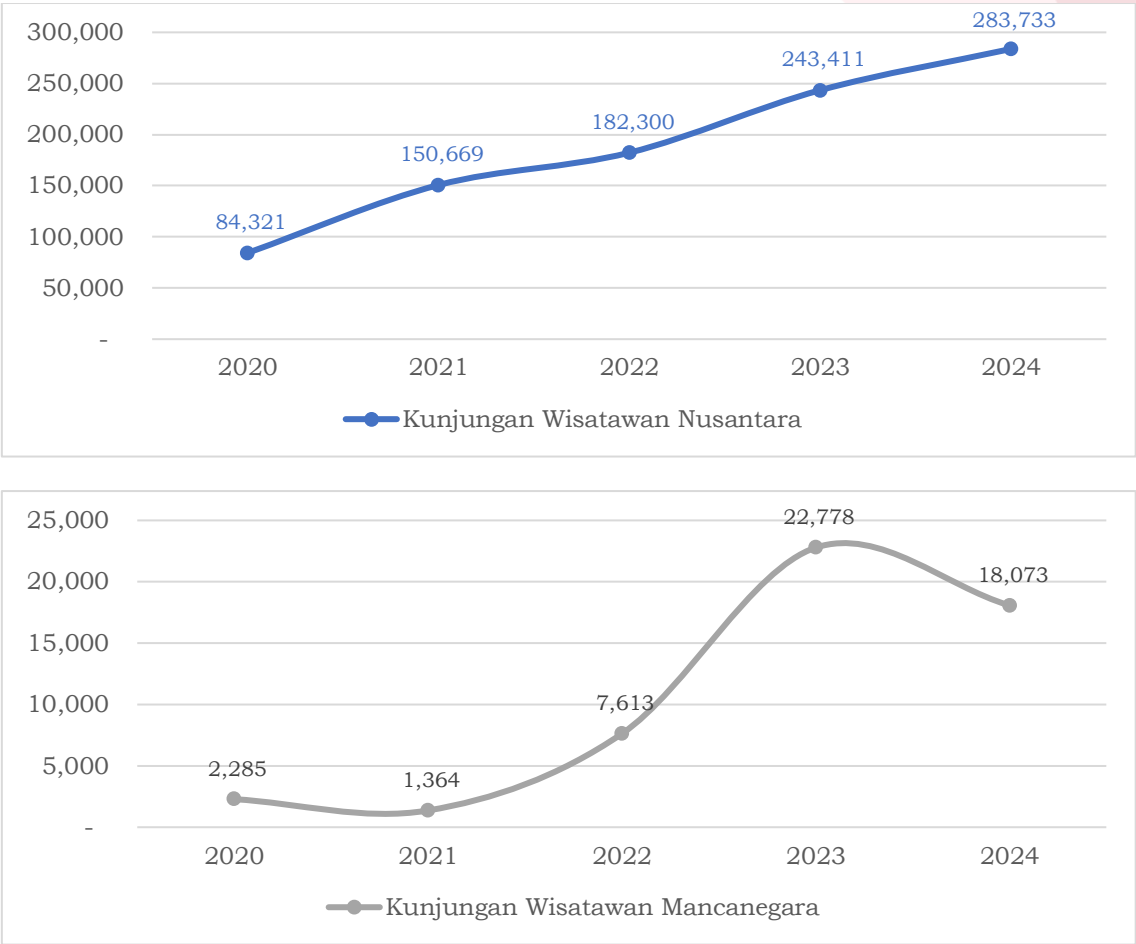
Sumber: Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (2023) dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana (2023)

2. Pariwisata

Pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana. Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sejak tahun 2020, selalu di atas 10%. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pariwisata dalam pembangunan di Kabupaten Jembrana.

1) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata ke Kabupaten Jembrana relatif rendah. Hal ini dipengaruhi letak geografis Kabupaten Jembrana yang jauh dari Kota Denpasar dan pusat kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, Kabupaten Jembrana perlu meningkatkan kualitas dan daya tarik wisatanya.



Gambar 2.193 Kunjungan Wisata ke Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

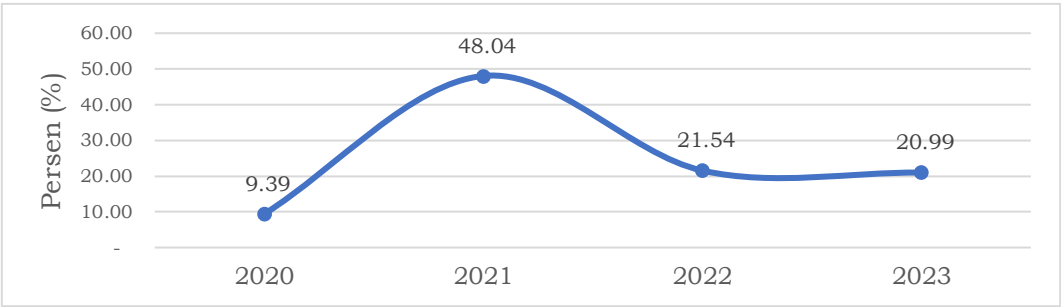
Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2021–2024 dan Dinas Pariwisata dan Budaya (2025)

2) Lama Kunjungan Wisatawan

Lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Jember hanya satu hari sejak tahun 2020 hingga 2024 sehingga perlu ditingkatkan.

3) Proporsi PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Jember cenderung fluktuatif. Hal ini dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 dan kondisi pemulihan setelahnya.



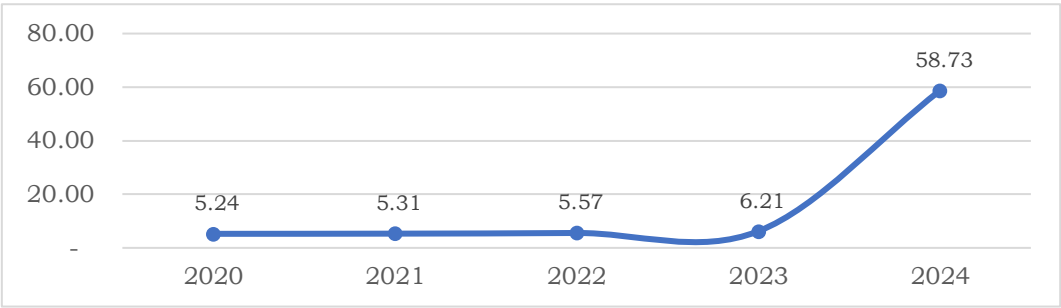
Gambar 2.194 Proporsi PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2020–2023

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2021–2024

3. Pertanian

Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Jembrana. Bahkan, sektor pertanian membentuk lebih dari seperlima PDRB Kabupaten Jembrana selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas bibit dan sumber daya manusia.

Produktivitas padi menjadi salah satu indikator kinerja urusan pemerintahan bidang pertanian. Produktivitas padi menunjukkan produksi padi (ton) setiap hektar lahan panennya.

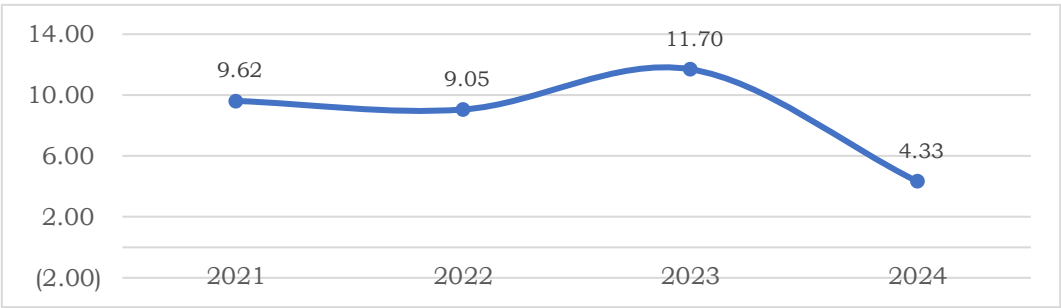


Gambar 2.195 Produktivitas Padi di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana (2024) dan Dinas Pertanian dan Pangan (2025)

Penurunan produktivitas padi di Kabupaten Jembrana dikarenakan pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Peningkatan produktivitas padi pasca-pandemi Covid-19 dikarenakan pemupukan berimbang dan penggunaan pupuk organik, pengendalian OPT, dan penggunaan varietas unggul.

Indikator lainnya adalah cakupan bina kelompok tani. Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren fluktuasi. Meskipun demikian, cakupannya relatif rendah. Hal ini dikarenakan keterbatasan irigasi, kebijakan tata ruang, kompetisi dengan komoditas lainnya, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan.



Gambar 2.196 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Jembrana Tahun 2021–2024

Sumber: LKJIP Dinas Pertanian dan Pangan 2021–2023 dan Dinas Pertanian dan Pangan (2025)

4. Kehutanan

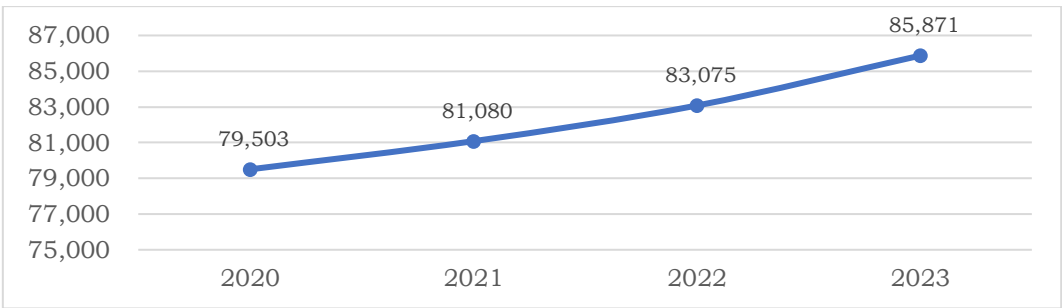
Berdasarkan hasil analisis data dari RTRW Kabupaten Jembrana tahun 2023 hingga 2043, Kabupaten Jembrana memiliki luas hutan kedua terluas di Provinsi Bali setelah Buleleng dengan total luas mencapai 7,5% dari luas Provinsi Bali. Total luas area hutan di Kabupaten Jembrana yaitu 41.307,27 hektar dengan proporsi paling besar yaitu hutan lindung yang mencapai 33.240,27 hektar atau sekitar 80,47% dari total luas hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Jembrana. Sedangkan pada tahun 2024, jumlah luasan hutan di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan menjadi 42.209,73 Ha. Hal ini selaras dengan upaya penghijauan kembali yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan sumber daya mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat ditemui di Kabupaten Jembrana. Hal ini sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jembrana. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, kabupaten/kota hanya dapat mengelola panas bumi yang pemanfaatannya di dalam kabupaten/kota.

1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Karena keterbatasan data, indikator ini dilihat berdasarkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Jembrana yang menjadi pengguna listrik pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Berdasarkan gambar berikut, terlihat bahwa jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Jembrana terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keterjangkauan listrik di Kabupaten Jembrana semakin meningkat setiap tahunnya dan harus dipertahankan untuk mendukung meningkatnya jumlah rumah layak huni di Kabupaten Jembrana.



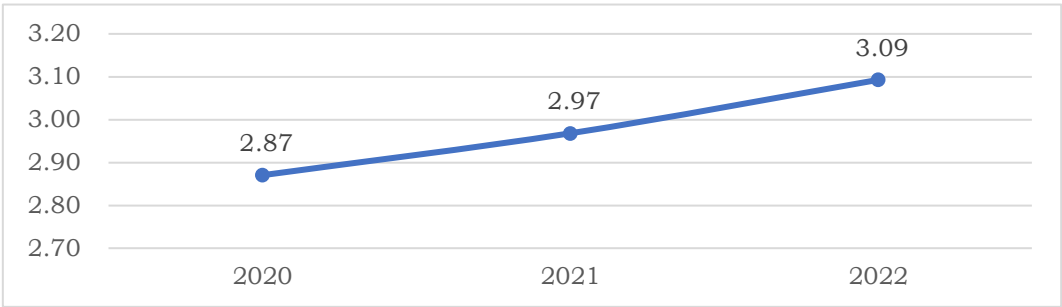
Gambar 2.197 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka (2024)

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Berdasarkan gambar berikut, dapat terlihat bahwa rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dengan nilai rasio terendah pada tahun 2020. Peningkatan nilai rasio terjadi di tahun 2020 hingga 2022 karena jumlah kebutuhan listrik terus meningkat seiring

dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Sejak tahun 2020, rasio ketersediaan listrik Kabupaten Jembrana lebih dari 1,00. Artinya, daya listrik terpasang di Kabupaten Jembrana dapat memenuhi kebutuhannya.



Gambar 2.198 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2022

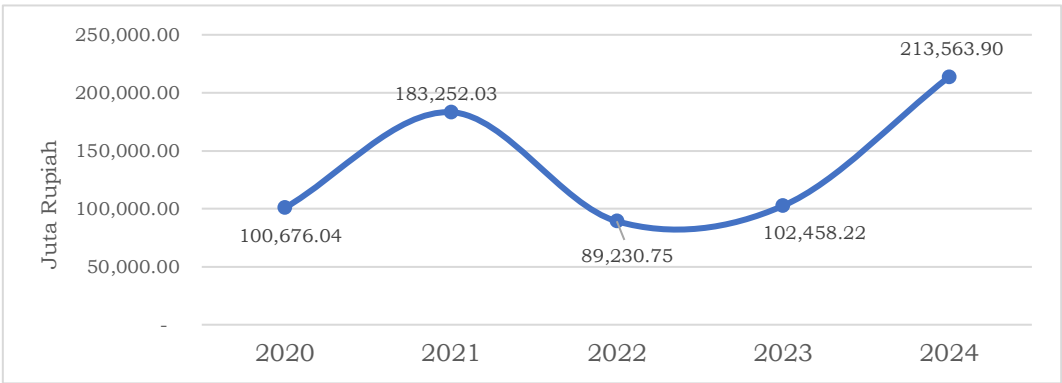
Sumber: Kabupaten Jembrana dalam Angka (2024)

6. Perdagangan

Perdagangan terkait dengan transaksi barang/jasa di dalam negeri dan ke luar negeri dengan tujuan mengalihkan hak barang/jasa untuk memperoleh imbalan. Perdagangan dilakukan untuk tujuan memenuhi kebutuhan. Melalui perdagangan dan spesialisasi ekonomi, perekonomian dapat diefisienkan.

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan menunjukkan selisih nilai ekspor dan impor. Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Jembrana menunjukkan tren fluktuasi.

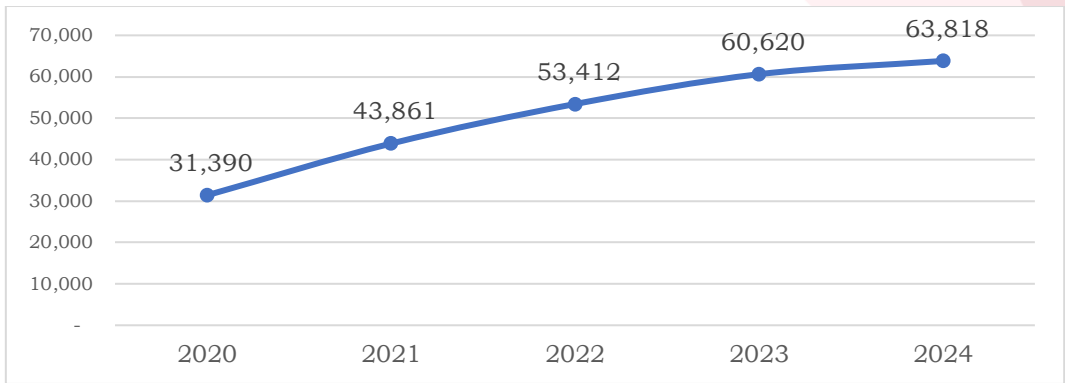


Gambar 2.199 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (2025)

2) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal menunjukkan jumlah kelompok pedagang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren peningkatan. Hal ini perlu dipertahankan pemerintah agar kelompok pedagang/usaha informal tetap sejahtera.

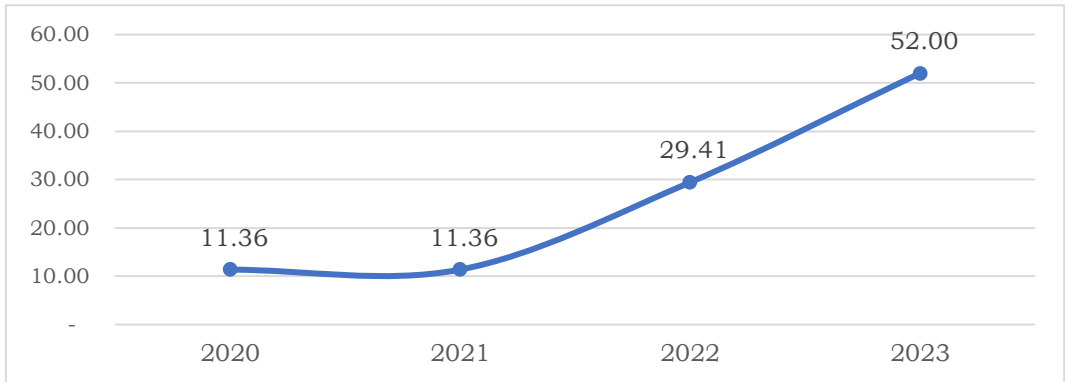


Gambar 2.200 Jumlah Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (2025)

7. Perindustrian

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dinilai berdasarkan cakupan bina kelompok pengrajin. Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Jemberana menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan pasca-pandemi Covid-19 dikarenakan adanya dana alokasi khusus yang diberikan Kementerian Perindustrian.



Gambar 2.201 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2023

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (2023)

8. Transmigrasi

Transmigrasi Kabupaten Jemberana pada tahun 2016 diikuti 15 KK (51 jiwa) dengan tujuan Kecamatan Lasilimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Transmigrasi terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 yang diikuti 5 KK (23 jiwa) dengan tujuan UPT Raimuna, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai pada tahun 2023, Kabupaten Jemberana tidak mendapat jatah transmigrasi.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

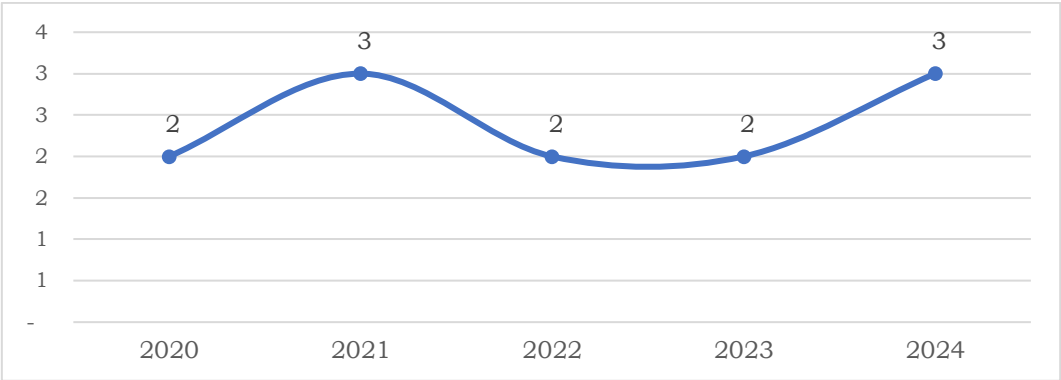
1. Perencanaan

Perencanaan berperan penting dan strategis dalam pembangunan. Melalui perencanaan, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efektif

dan efisien. Akibatnya, cita-cita pembangunan daerah dapat dicapai dengan lebih mudah.

1) Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW)

Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan RPJPD sebagai peraturan daerah pada tahun 2024, RPJMD (perubahan sebelumnya) sebagai peraturan daerah pada tahun 2023, RKPD sebagai peraturan kepala daerah setiap tahunnya, dan RTRW sebagai peraturan daerah pada tahun 2023.



Gambar 2.202 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Bappeda (2025)

2) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, RPJMD perlu dijabarkan dalam RKPD. Dalam hal ini, perlu adanya konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Tabel 2.27 Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	65,6	100	100	100	100

Sumber: LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan 2021

3) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, kerangka pendanaan RKPD perlu dijabarkan dalam APBD. Dalam hal ini, perlu adanya konsistensi program RKPD ke dalam APBD.

Tabel 2.28 Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	91,10	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan 2021

2. Keuangan

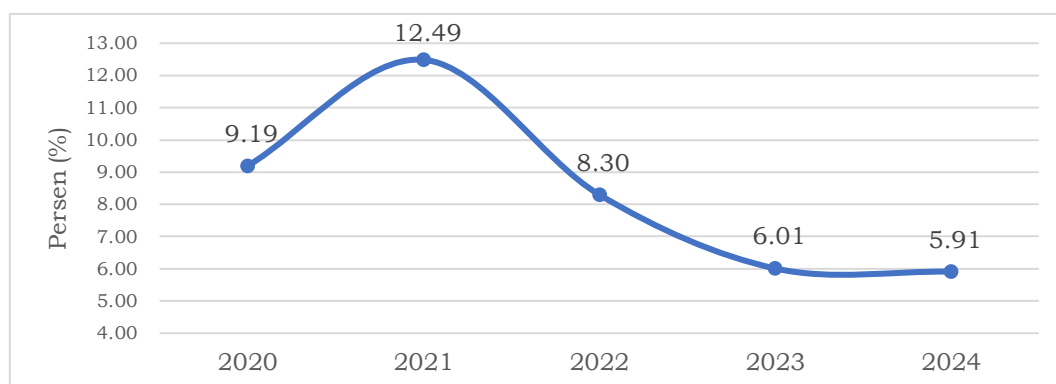
Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik, program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1) Opini Badan Pengawas Keuangan

Opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) berisi kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selama satu dekade terakhir (sejak 2014), Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini berarti tidak terdapat ketidaksesuaian material pada pos laporan keuangan dan tidak memengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.

2) Proporsi SILPA terhadap Total Pengeluaran

SILPA dihitung berdasarkan selisih antara kas dan setara kas neraca daerah dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Proporsi SILPA terhadap pengeluaran daerah Kabupaten Jembrana cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021.

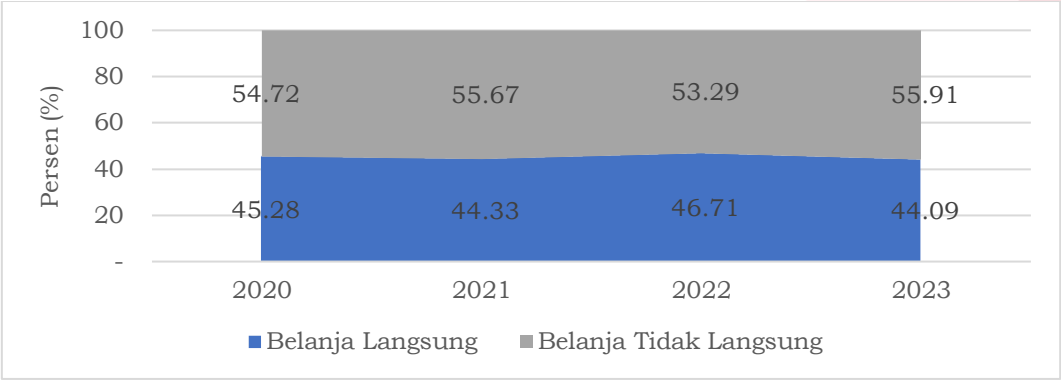


Gambar 2.203 Proporsi SILPA terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2025)

3) Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Belanja langsung merupakan jenis belanja yang terikat dengan program/ kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan jenis belanja yang tidak terikat dengan program/kegiatan. Sejak tahun 2020, proporsi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Jembrana selalu lebih rendah daripada belanja tidak langsungnya.

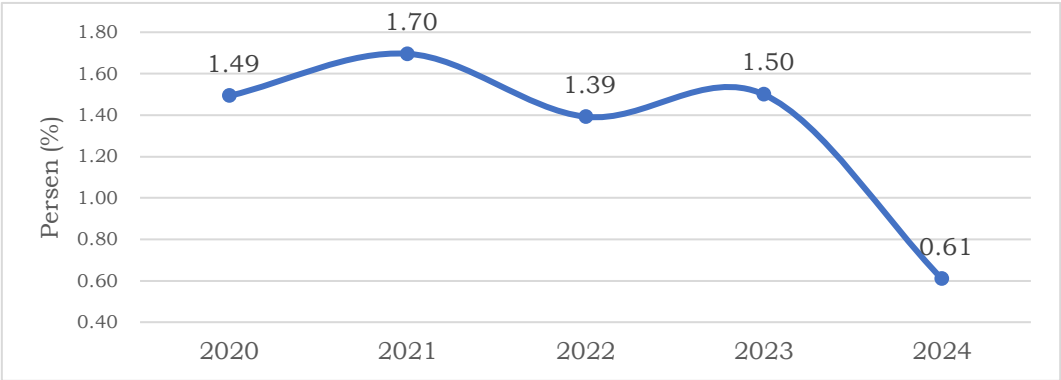


Gambar 2.204 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Kabupaten Jember Tahun 2020–2023

Sumber: Kabupaten Jember dalam Angka 2024

4) Proporsi Belanja Bagi Hasil terhadap Total Pengeluaran

Belanja bagi hasil dalam struktur APBD Kabupaten Jember dikeluarkan untuk desa/kelurahan. Proporsi belanja bagi hasil dalam APBD Kabupaten Jember relatif rendah (kurang dari 2%).



Gambar 2.205 Proporsi Belanja Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2020–2023 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2025)

5) Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Sejak tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Jember selalu mengesahkan APBD sebelum tanggal 30 November tahun sebelum APBD berjalan (tepat waktu).

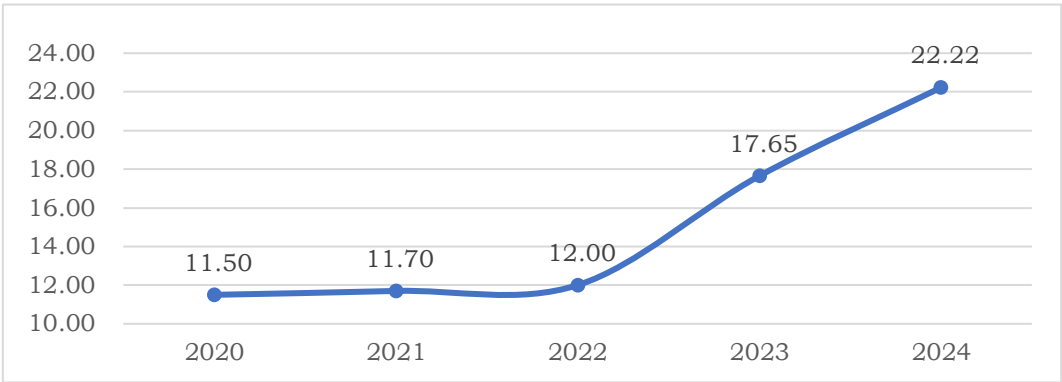
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai termasuk aset pemerintah karena menjadi pelaksana dan penggerak program pembangunan. Meskipun demikian, pegawai tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan kapasitas pegawai.

1) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini sudah baik,

tetapi tetap perlu dioptimalkan. Peningkatan keahlian dan keterampilan pegawai akan menjadi aset berharga untuk Pemerintah Kabupaten Jembrana.

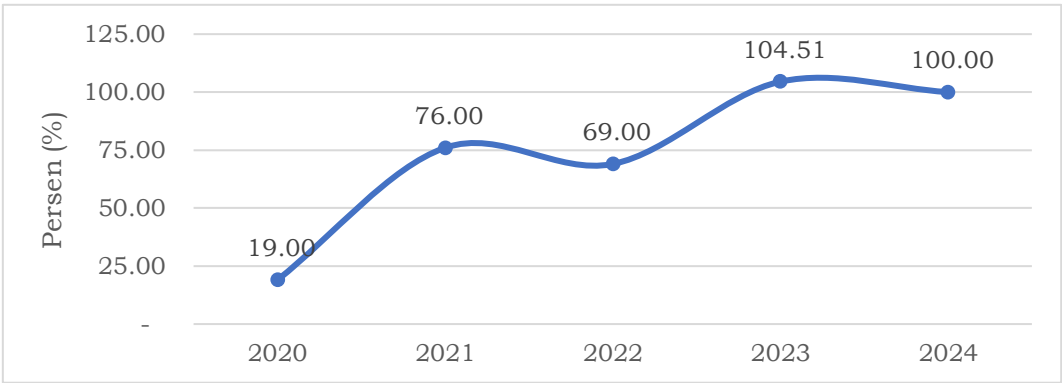


Gambar 2.206 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2025)

2) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Jembrana cenderung meningkat. Meskipun demikian, semua ASN di Kabupaten Jembrana telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Pada tahun 2023, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Jembrana melebihi target. Hal ini karena banyaknya PNS yang berminat meningkatkan kualifikasi pendidikannya.



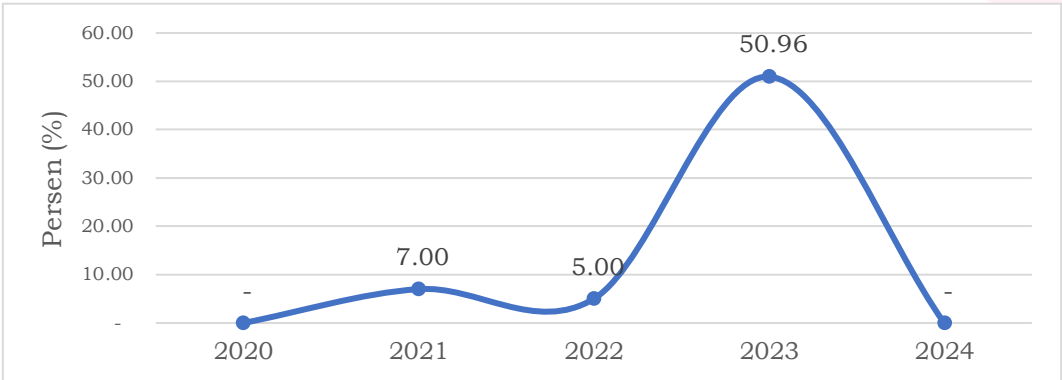
Gambar 2.207 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2025)

3) Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif dan menurun pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dalam memfasilitasi pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Ke

depannya, hal ini perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pejabat ASN.



Gambar 2.208 Persentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

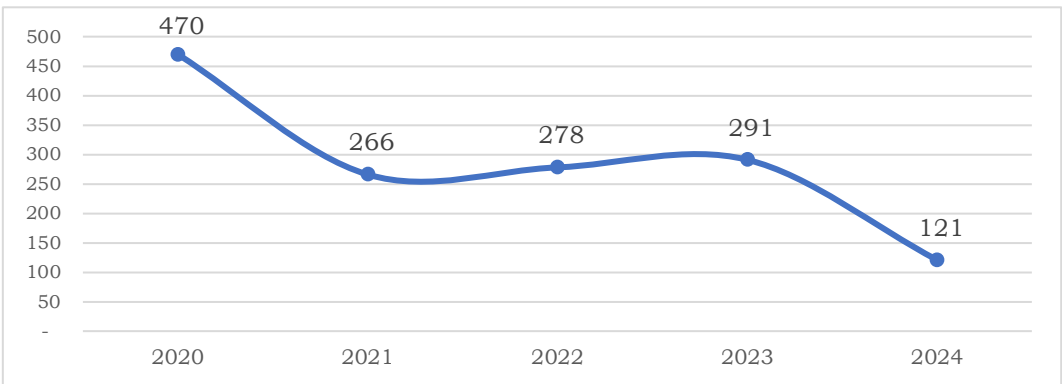
Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2025)

4) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Jember mencapai 27 posisi sejak tahun 2020, kecuali pada tahun 2023 (26 posisi) dan 2024 (31 posisi).

5) Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan tren penurunan. Hal ini terjadi karena arah kebijakan pengadaan ASN, dalam beberapa tahun terakhir, lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional tertentu—baik melalui pengadaan PNS maupun PPPK—dibandingkan dengan jabatan administrasi.

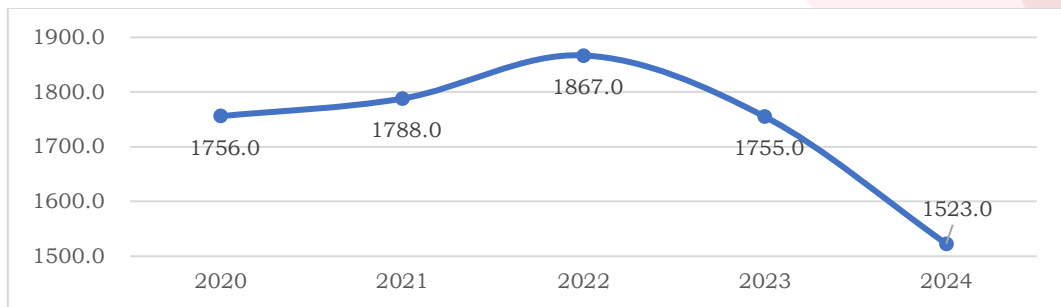


Gambar 2.209 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2025)

6) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Jember cenderung fluktuatif.



Gambar 2.210 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2025)

4. Penelitian dan Pengembangan

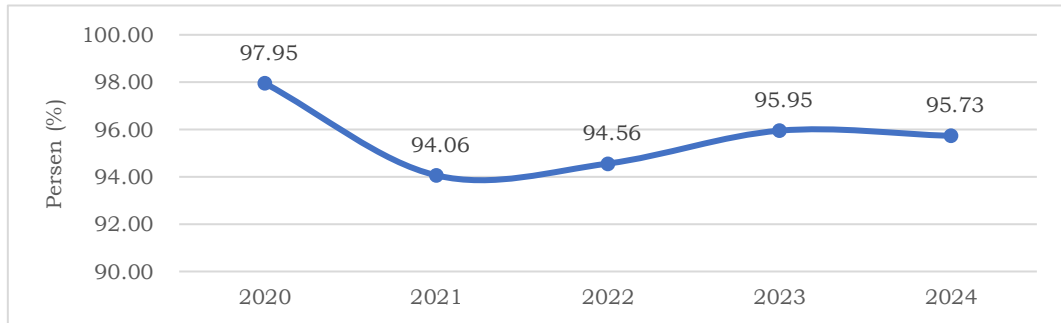
Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses penerapan pengetahuan yang terorganisasi untuk membantu memecahkan sebuah masalah dalam masyarakat. Urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dinilai berdasarkan persentase implementasi rencana kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Jemberana cenderung stagnan sejak tahun 2020 hingga 2023 yaitu sebesar 100%.

5. Pengawasan

Pengawasan penting dilakukan agar seluruh rencana, program, dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan baik. Fungsi pengawasan di Kabupaten Jemberana menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat yang berwenang melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, ulasan, dan lain-lain.

1) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Jemberana cenderung fluktuatif. Naik turunnya nilai persentase ini harus menjadi evaluasi pemerintah agar seluruh temuan yang teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara optimal dan benar-benar selesai.



Gambar 2.211 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Jemberana Tahun 2020–2024

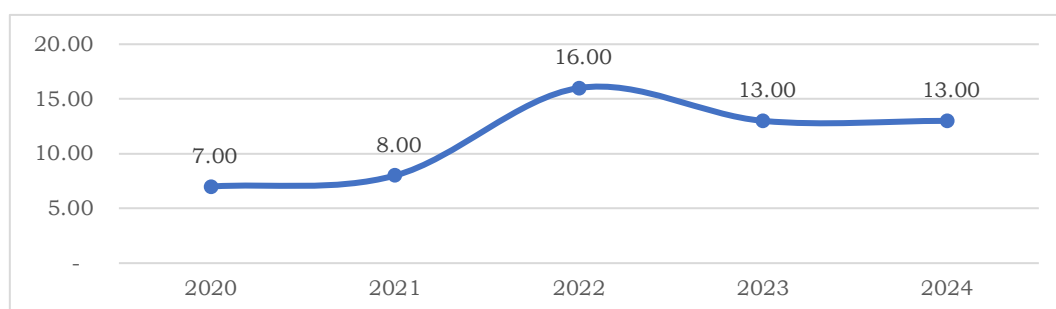
Sumber: LKJIP Inspektorat 2021-2023, dan Inspektorat Kabupaten Jemberana (2025)

2) Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Jembrana sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu tercatat 0% (tidak terjadi kasus pelanggaran pegawai).

3) Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK di Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, sejak tahun 2021, jumlah temuan BPK menunjukkan tren kenaikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu mengevaluasi kinerja pegawai serta memperketat pengawasan dan sanksi untuk menurunkan jumlah temuan BPK di Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.212 Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: LKJIP Inspektorat 2021–2023 dan Inspektorat (2025)

6. Sekretariat DPRD

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD telah tersedia. Selain itu, program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran pada RPJMD dan RKPD pun telah tersusun. Lebih lanjut, program kerja tersebut telah terintegrasi pula dalam dokumen perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD.

2.1.5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi ini bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pelayanan masyarakat dalam berbagai urusan. Adapun urusan yang menjadi fokus pencapaian SPM meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

2.1.5.1. URUSAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Pemenuhan SPM bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berkarakter melalui peningkatan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) maupun pendidikan dasar (SD, SMP, SMA). Berdasarkan indikator kinerja SPM tahun 2020 – 2024, capaian SPM urusan pendidikan Kabupaten Jembrana menunjukkan indikasi tren yang menurun hingga tahun 2023. Meskipun demikian, capaian layanan pendidikan di Kabupaten Jembrana menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2024, dengan pengecualian pada layanan Pendidikan Kesetaraan. Capaian pada layanan Pendidikan Kesetaraan menunjukkan perbedaan akibat perbedaan persepsi terhadap indikator yang digunakan. Pada tahun 2020 hingga 2021, capaian diukur berdasarkan jumlah partisipasi siswa tidak sekolah yang melanjutkan pendidikan kesetaraan. Sementara itu, sejak tahun 2022 hingga 2024, capaian dihitung menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan, yaitu persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, tetapi aktif berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Perbedaan persepsi ini menyebabkan ketidaksesuaian skala data sehingga capaian pada kedua periode tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Tabel 2.29 Capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar)	96,5	84,74	84,24	72,72	87,7
2	Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah)	Jumlah Warga Negara Usia 12 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Menengah Pertama)	80,01	84,46	79,91	66,84	87,72
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	65,56	0,91	0,21	0,18
4	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	36,93	91,64	54,48	48,46	71

Sumber: LPPD Tahun 2020 – 2023; Laporan Penerapan SPM Kabupaten Jembrana Tahun 2024

2.1.5.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah, selain urusan pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan hidup sehat. Pemenuhan SPM bidang kesehatan dilihat dari capaian pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, hingga penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes melitus, tuberkulosis, dan HIV. SPM urusan kesehatan Kabupaten Jembrana menunjukkan capaian yang belum optimal di beberapa indikator, termasuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita. Meskipun demikian, capaian pelayanan kesehatan lainnya menunjukkan tren yang baik dari tahun 2020 – 2024. Terdapat lonjakan capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dan indikator pelayanan kesehatan terduga TB akibat perubahan sasaran estimasi yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.30 Capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,1	94,3	84,6	80,96	51,56
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	102,6	106,6	93,18	91,78	65,44
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	84,5	99,9	98,38	95,56	68,97
4	Pelayanan Kesehatan balita	69,4	77,3	84,49	91,14	61,63
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	15,6	15,6	117,97	99,87	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun) yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	90,5	81,7	116,14	111,22	100,12
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut (60-tahun ke atas)	60,49	61,1	99,99	105,01	94,56
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43,3	61,2	99,74	101,81	100,28
9	Pelayanan Kesehatan penderita DM	97,88	102,6	107,23	114,13	104,56
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	50,66	55,8	69,91	83,63	89,3
11	Pelayanan Kesehatan Terduga TB	30,33	28,3	103,59	120,74	129,01
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	93,1	104,5	108,77	125,37	133,41

Sumber: LPPD Tahun 2020 – 2023; Laporan Penerapan SPM Kabupaten Jembrana Tahun 2024

2.1.5.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Urusan ini terbagi menjadi 2, yakni urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan rakyat. Urusan pekerjaan umum berfokus pada penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data capaian SPM tahun 2020 – 2024,

capaian SPM urusan pekerjaan umum belum optimal dengan kecenderungan fluktuasi pada tiap indikatornya. Sedangkan, urusan perumahan rakyat berfokus pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah daerah. Capaian SPM urusan perumahan rakyat tahun 2020 – 2022 tidak terukur akibat tidak adanya bencana dan program yang merelokasi masyarakat.

Tabel 2.31 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,08	89,45	91,33	92,26	90,54
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	-	-	91,62	96,51
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	63	-

Sumber: LPPD Tahun 2020 – 2023; Laporan Penerapan SPM Kabupaten Jembrana Tahun 2024

2.1.5.4. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu layanan minimum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Urusan ini mencakup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Berdasarkan data capaian SPM tahun 2020 – 2024, secara umum capaian SPM urusan ini sudah menunjukkan nilai optimal di angka 100%. Meskipun dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta korban kebakaran masih belum optimal dalam masing-masing indikator. Selain itu, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana mengalami penurunan drastis di tahun 2024 yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas layanan. Hal ini terjadi akibat peningkatan jumlah warga negara yang berada dalam kawasan rawan bencana dan menurunnya dukungan pihak ketiga dalam pelatihan

pengecahan dan kesiapsiagaan bencana. Penurunan ini juga merupakan dampak dari efisiensi anggaran tahun tersebut.

Tabel 2.32 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100
		Cakupan desa dengan Linmas aktif	31	31	31	32	32,41
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100	100	100
		Persentase penegakan PERDA	100	100	100	100	100
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	6,72
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	100	0	0	94,45
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80	84	84	80	80
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	50,88	50,88	50,88	50,88	50,88
		Tingkat waktu tanggap daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	88,64	88,64	71,43	82	100

Sumber: LPPD Tahun 2020 – 2023; Laporan Penerapan SPM Kabupaten Jembrana Tahun 2024

2.1.5.5. URUSAN SOSIAL

Standar pelayanan minimal urusan sosial berfokus pada pemberdayaan disabilitas terlantar, anak terlantar, masyarakat lanjut usia yang terlantar, gelandangan dan pengemis, serta perlindungan bagi korban bencana. Capaian SPM urusan sosial Kabupaten Jembrana tahun 2020 – 2024 telah mencapai nilai 100% pada tiap-tiap indikator. Hal ini

menunjukkan telah terpenuhinya pelayanan minimum urusan sosial di Kabupaten Jembrana.

Tabel 2.33 Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Tahun 2020 – 2023; Laporan Penerapan SPM Kabupaten Jembrana Tahun 2024

2.1.6.KERJA SAMA DAERAH

Kerja sama daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mendorong percepatan pembangunan daerah. Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan pemerintah pusat, daerah lain, maupun pihak lainnya. Berikut merupakan daftar kerja sama dengan daerah yang telah terjalin pada tahun 2024.

Tabel 2.34 Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Daerah Lain Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng	Pengairan (Penyediaan Air Minum)	Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air	14 Juni 2024	s/d 30 Maret 2025

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Minum (SPAM) Regional Burana		
2	Pemprov Bali dan Pemkab/Kota se-Provinsi Bali	Pendapatan/Keuangan Daerah	Sinergitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15 Oktober 2024	s/d 30 Maret 2025
3	Pemkab Buleleng	Keamanan dan Ketertiban	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Berbatasan	11 Desember 2024	3 (tiga) tahun)
4	Pemkab Buleleng	Perdagangan	Penyelenggaraan Pelayanan Tera-Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal	31 Desember 2024	s/d 31 Desember 2025

Sumber: Data Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Daerah Lain Tahun 2024

Selain menjalin kerja sama dengan daerah lain, Kabupaten Jembrana juga menjalin kerja sama untuk mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut merupakan daftar kerja sama yang terjalin dalam rangka mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024.

Tabel 2.35 Daftar Kerja Sama Sinergi Kabupaten Jembrana Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Kejaksaan Negeri Jembrana	Sosial	Pendampingan Hukum, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Makanan Jadi Bagi Lanjut Usia Miskin Dan/Atau Terlantar di Kabupaten Jembrana	18 Januari 2024	s/d 31 Desember 2024
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	17 September 2024	5 (lima) tahun
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	17 September 2024	5 (lima) tahun
4	Kantor Wilayah Direktorat	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mal	17 September 2024	5 (lima) tahun

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
	Jenderal Pajak Bali		Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana		
5	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Pendidikan	Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	23 Desember 2024	5 (lima) tahun

Sumber: Data Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024

Pemerintahan Kabupaten Jembrana juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak lainnya baik di sektor perdagangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun pelayanan publik. Berikut merupakan daftar kerja sama yang dijalin oleh Kabupaten Jembrana dengan pihak lainnya di tahun 2024.

Tabel 2.36 Daftar Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pihak Ketiga Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	Koperasi Produsen Buana Merta Abadi	Koperasi	Pengelolaan Rumah Produksi Bersama Komoditas Kakao Kabupaten Jembrana	2 Januari 2024	3 (tiga) tahun
2	PT. Wisesa Global Solusindo	Lingkungan Hidup	Penataan dan Pengelolaan Sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peh Kabupaten Jembrana	17 Mei 2024	5 (lima) tahun
3	Koperasi Produsen Buana Merta Abadi	Koperasi	Pemberian dan Pengelolaan Pinjaman Daerah Kepada Koperasi Produsen Buana Merta Abadi Kabupaten Jembrana Tahun 2024	6 Juni 2024	s/d 31 Desember 2024
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Singaraja	Kesehatan	Pelaksanaan Program PESIAR di Kabupaten Jembrana	7 Juni 2024	s/d 31 Desember 2024
5	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Kesehatan	Penerbitan Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	19 Juni 2024	5 (lima) tahun
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Wira Medika Bali	Kesehatan	Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	21 Juni 2024	5 (lima) tahun
7	BPJS Kesehatan Cabang Singaraja	Kesehatan	Adendum Rencana Kerja Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk	23 Juli 2024	s/d 31 Desember 2024

No	Mitra Kerja Sama	Urusan Pemerintah yang Dikerjasamakan	Judul Dokumen Perjanjian	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Pelaksanaan
			Kabupaten Jembrana dalam rangka <i>Universal Health Coverage</i>		
8	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar	Tenaga Kerja	Pekerja Rentan Penerima Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kabupaten Jembrana	12 Agustus 2024	s/d 31 Desember 2024
9	PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	17 September 2024	5 (lima) tahun
10	BPJS Kesehatan Cabang Singaraja	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	18 September 2024	5 (lima) tahun
11	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	19 September 2024	5 (lima) tahun
12	PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana	20 September 2024	5 (lima) tahun
13	BPJS Kesehatan Cabang Singaraja	Kesehatan	Pelaksanaan Program PESIAR di Kabupaten Jembrana	5 November 2024	5 (lima) tahun
14	BPJS Kesehatan Cabang Singaraja	Kesehatan	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Jembrana dalam rangka <i>Universal Health Coverage</i>	20 Desember 2024	s/d 31 Desember 2025

Sumber: Data Kerja Sama Daerah Kabupaten Jembrana dengan Pihak Ketiga Tahun 2024

2.1.7.RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan wilayah. Rencana pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan kebijakan tata ruang wilayah dan prioritas nasional untuk memastikan pembangunan daerah yang tepat sasaran, serta mendukung keberlanjutan dan efisiensi pemanfaatan ruang. Penjelasan mengenai rencana pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW dan RPJMN diuraikan dalam subbab berikut ini.

2.1.7.1. Arah Pembangunan Nasional Kabupaten Jembrana dalam RPJMN 2025 – 2029

Adapun rencana pembangunan infrastruktur Kabupaten Jembrana yang tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029 adalah sebagai berikut.

a. Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambangan

Pembangunan kawasan industri Candikusuma berfokus pada pengembangan sektor industri prioritas meliputi industri makanan dan minuman serta industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengembangan kawasan ini nantinya juga didukung dengan pembangunan SPAM di kawasan Negara-Pengambangan-Candikusuma. Selain itu, terdapat rencana pengembangan SPAL dan TPST untuk mendukung aktivitas industri di wilayah ini. Selain infrastruktur industri, pengembangan kawasan ini juga didukung dengan pembangunan rumah murah bagi pekerja di kawasan ini.

b. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana

Seiring dengan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Jembrana, terdapat rencana pembangunan pelabuhan perikanan PPN Pengambangan yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selain itu, terdapat rencana penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan untuk mendukung pengembangan ekonomi biru. Selain infrastruktur pendukung ekonomi, juga terdapat rencana pengembangan infrastruktur pengaman kawasan pantai dan pesisir untuk meminimalisir risiko bencana di sekitar kawasan tersebut.

c. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida

Kabupaten Jembrana memiliki potensi pertanian dan energi yang baik, sehingga termasuk dalam kawasan swasembada pangan, air, dan energi. Pengembangan kawasan ini didukung melalui pembangunan PLTS Bali Barat di Kabupaten Jembrana. Selain itu, untuk mendukung swasembada pangan juga dilakukan upaya rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Pengembangan kawasan ini juga didukung dengan rencana pengembangan pusat riset pertanian skala lokal untuk meningkatkan kualitas pertanian di wilayah tersebut.

2.1.7.2. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dalam RPJMD Provinsi Bali 2025 – 2029

Pembangunan Bali diarahkan untuk mewujudkan tiga aspek utama: Alam, *Krama*, dan Kebudayaan, sesuai dengan visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”. Visi ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur strategis yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan indikasi rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah di seluruh kabupaten/kota di Bali dengan pembiayaan yang bersumber dari

APBN, APBD Provinsi Bali, APBD Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kabupaten Jembrana, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali, memiliki arah pembangunan infrastruktur strategis pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi
- b. Penataan Kawasan Rambut Siwi
- c. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- d. Hilirisasi Kelapa

Selain itu, direncanakan juga pembangunan infrastruktur umum yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Bali, antara lain:

- a. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas Jalan serta Pemenuhan Faskes dan Alat Kelengkapan Jalan.
- b. Penanganan Sampah.
- c. Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas TPS3R, TPST, dan TPA.
- d. Peningkatan Layanan Air Minum dan Limbah.
- e. Peningkatan Ketangguhan Bencana.
- f. Penanganan Terpadu Bencana Banjir.
- g. Perlindungan Laut, Sungai dan Mata Air.
- h. Penanganan Kualitas Rumah dan Kawasan Kumuh.
- i. Penataan Kawasan, Destinasi/Objek Wisata.

2.1.7.3. Arah Pengembangan Wilayah dalam RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023 – 2043

Tujuan besar penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah mewujudkan pusat pengembangan wilayah bagian barat Bali melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, disusun kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang serta pengembangan kawasan strategis kabupaten. Adapun rencana pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Jembrana Tahun 2023 – 2043 adalah sebagai berikut.

- a. Rencana pembangunan jalan tol di ruas jalan Gilimanuk-Negara Pekutatan-Soka Mengwi dan ruas jalan Gilimanuk Sumberklampok.

Pembangunan jalan tol ruas Gilimanuk–Mengwi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Jembrana. Pembangunan jalan tol ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Jembrana tahun 2023-2043, pembangunan jalan tol ini rencananya dimulai pada tahun 2024 melalui

dana APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. Rencana pembangunan pintu tol di Kecamatan Negara, Kecamatan Pekutatan, dan Kecamatan Melaya.

Selaras dengan pembangunan jalan tol, terdapat rencana pembangunan pintu tol di Kabupaten Jembrana, khususnya di Kecamatan Negara, Kecamatan Pekutatan, dan Kecamatan Melaya. Pembangunan yang didanai dengan menggunakan APBN ini rencananya dimulai pada tahun 2025 dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- c. Rencana Pembangunan kawasan industri Pengambengan di Kecamatan Negara

Kawasan industri Pengambengan merupakan kawasan yang mendukung aktivitas perikanan, terutama dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil tangkapan yang didukung oleh adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara. Rencana pembangunan kawasan industri ini dimulai pada tahun 2025 dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

- d. Rencana Pembangunan kawasan industri Candikusuma di Kecamatan Melaya

Pembangunan kawasan industri Candikusuma di Kecamatan Melaya merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Industri Terpadu Bali. Kawasan industri Candikusuma diarahkan menjadi pusat kegiatan industri hijau yang didukung dengan pengembangan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Rencana pembangunan kawasan industri ini dimulai pada tahun 2025 dengan sumber pendanaan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

2.1.8.BUMD YANG MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH

BUMD berperan dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Keberadaannya tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar dan pengelolaan potensi ekonomi lokal. Kabupaten Jembrana memiliki dua BUMD yang bergerak dalam bidang perdagangan jasa, meliputi:

- 1) PDAM Tirta Amertha Jati

Perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Amertha Jati mulai berdiri dan beroperasi dari tahun 1991 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 1991. Perusahaan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan pemanfaatan umum, pelayanan umum/jasa,

pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan sumber air bersih, dan sebagai penunjang pendapatan daerah. PDAM Tirta Amertha Jati bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih terhadap lima kecamatan di Kabupaten Jembrana, yaitu Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Negara, Kecamatan Melaya, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Jembrana.



Gambar 2.213 PDAM Tirta Amertha Jati

Sumber: PDAM Jembrana, 2025

2) Perumda Tribhuwana

Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana. Pengembangan usaha ini bertujuan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka membangun ekonomi daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha Perumda Tribhuwana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana. Perumda Tribhuwana merupakan perusahaan daerah yang berfokus pada kegiatan usaha industri/perdagangan dan jasa khususnya dalam bidang perdagangan beras konsumsi, sewa kendaraan, perdagangan sembako, parkir fasilitas umum, dan perdagangan produk.



Gambar 2.214 Perumda Tribhuwana

Sumber: Radar Bali, 2023

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berangkat dari hal ini, perlu disajikan gambaran keuangan daerah sebagai penjelasan kapasitas keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencermati keterpaduan dan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sehingga tercipta keberlanjutan fiskal sembari melaksanakan pembangunan daerah.

2.2.1. GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

Analisis kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir perlu dilakukan sebagai langkah awal dalam evaluasi kondisi keuangan daerah. Analisis tersebut dilakukan terhadap APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah) dan neraca daerah (aset dan utang daerah serta ekuitas dana).

2.2.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang harus dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, APBD Kabupaten Jembrana disusun menggunakan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal; memperhatikan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Sejak tahun 2020, rata-rata pertumbuhan realisasi APBD Kabupaten Jembrana tercatat negatif untuk pendapatan dan belanja serta positif untuk pembiayaan. Realisasi pendapatan tumbuh lebih cepat dibanding realisasi belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan tercatat pada angka -1,69% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tercatat pada angka 1,46% per tahun. Berbeda dengan kedua komponen tersebut, rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan bernilai negatif, yaitu -1,76% per tahun. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi pandemi yang menghantam Kabupaten Jembrana sehingga APBD-nya mengalami kontraksi, terutama pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.37 Rata-Rata Pertumbuhan (%) Realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No	Uraian	Tahun					%
		2020	2021	2022	2023	2024	
I	Pendapatan Daerah	1.089.673.620.182,52	1.067.493.613.610,35	1.098.390.446.808,67	1.120.324.778.258,96	1.237.091.971.583,13	3,32
A	Pendapatan Asli Daerah	148.045.102.960,11	185.003.035.370,63	175.993.267.581,67	221.557.656.588,96	184.575.515.567,13	7,32
1	Pajak daerah	34.371.564.433,67	38.129.903.223,37	48.793.825.835,00	90.232.729.487,70	46.211.561.345,00	18,76
2	Retribusi daerah	9.591.528.844,00	8.483.625.074,00	9.204.968.003,50	7.671.553.894,35	122.680.049.864,52	369,86
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.575.921.775,90	9.665.377.069,56	8.303.444.556,24	8.972.857.456,14	10.233.948.174,42	-0,15
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	93.506.087.906,54	128.724.130.003,70	109.691.029.186,93	114.680.515.750,77	5.449.956.183,19	-16,96
B	Pendapatan Transfer	908.105.548.387,41	841.856.179.239,72	922.397.179.227,00	898.767.121.670,00	1.052.516.456.016,00	4,20
1	Transfer pemerintah pusat	780.912.433.157,00	736.019.994.868,00	790.506.824.717,00	737.659.287.227,00	789.027.005.933,00	0,48
2	Transfer antardaerah	127.193.115.230,41	105.836.184.371,72	131.890.354.510,00	161.107.834.443,00	263.489.450.083,00	23,38
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.522.968.835,00	40.634.399.000,00	-	-	-	21,21
1	Pendapatan hibah	33.522.968.835,00	-	-	-	-	-
2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	40.634.399.000,00	-	-	-	-
II	Belanja Daerah	1.067.104.976.160,52	1.035.976.510.061,93	1.131.655.987.519,93	1.143.362.500.913,37	1.232.980.643.518,35	3,80
A	Belanja Operasi	831.300.103.362,92	804.926.303.560,94	877.968.599.857,16	920.845.755.672,24	979.291.842.527,67	4,28
1	Belanja pegawai	438.616.937.644,00	406.489.257.273,11	426.227.679.239,00	433.377.083.938,94	481.872.874.321,27	2,60
2	Belanja barang dan jasa	309.590.469.387,92	374.273.560.100,06	400.252.208.915,58	411.213.373.509,30	445.830.793.846,66	9,75
3	Belanja bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja hibah	77.355.905.428,00	12.924.703.007,00	42.522.016.663,32	71.107.911.588,00	47.132.747.327,00	44,80
6	Belanja bantuan sosial	5.736.790.903,00	11.238.783.180,77	8.966.695.039,26	5.147.386.636,00	4.455.427.032,74	4,91
B	Belanja Modal	83.291.079.924,03	85.002.360.383,99	128.377.652.063,77	92.415.324.527,13	123.915.443.555,69	14,79

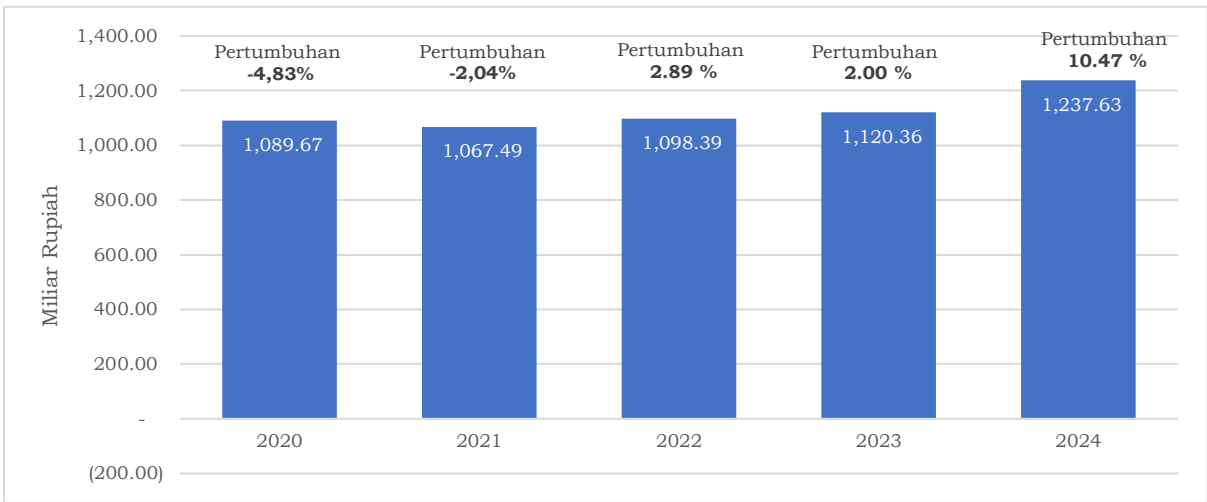
No	Uraian	Tahun					%
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja modal	83.291.079.924,03	85.002.360.383,99	128.377.652.063,77	92.415.324.527,13	123.915.443.555,69	14,79
C	Belanja Tidak Terduga	23.739.414.314,00	12.375.465.423,00	3.495.999.039,00	-	64.225.000,00	-59,81
1	Belanja tidak terduga	23.739.414.314,00	12.375.465.423,00	3.495.999.039,00	-	64.225.000,00	-59,81
D	Belanja Transfer	128.774.378.559,57	133.672.380.694,00	121.813.736.560,00	130.101.420.714,00	129.709.132.435,00	0,36
1	Belanja bagi hasil	15.975.219.308,00	17.643.244.194,00	15.849.047.960,00	17.143.831.514,00	7.468.637.935,00	-12,00
2	Belanja bantuan keuangan	112.799.159.251,57	116.029.136.500,00	105.964.688.600,00	112.957.589.200,00	122.240.494.500,00	2,25
III	Pembiayaan Daerah	75.790.989.520,51	98.359.633.542,51	127.754.747.025,93	91.790.325.144,63	68.742.196.116,58	1,60
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	78.990.989.520,51	102.544.633.542,51	134.476.737.090,93	92.760.325.144,63	68.742.196.116,58	1,01
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	75.790.989.520,51	98.359.633.542,51	129.876.737.090,93	91.790.325.144,63	68.742.196.116,58	1,85
2	Pencairan dana cadangan	3.200.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	4.185.000.000,00	4.600.000.000,00	970.000.000,00	-	-34,50
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.200.000.000,00	4.185.000.000,00	6.721.990.065,00	970.000.000,00	-	1,94
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan modal daerah	-	-	2.121.990.065,00	-	-	-
3	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian pinjaman daerah	3.200.000.000,00	4.185.000.000,00	4.600.000.000,00	970.000.000,00	-	-12,74
5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
IV	Surplus/Defisit	22.568.644.022,00	31.517.103.548,42	-33.265.540.711,26	-23.037.722.654,41	4.111.328.064,78	-78,62
V	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	98.359.633.542,51	129.876.737.090,93	94.489.206.314,67	68.752.602.490,22	72.853.524.181,36	-4,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.1.2. PENDAPATAN DAERAH

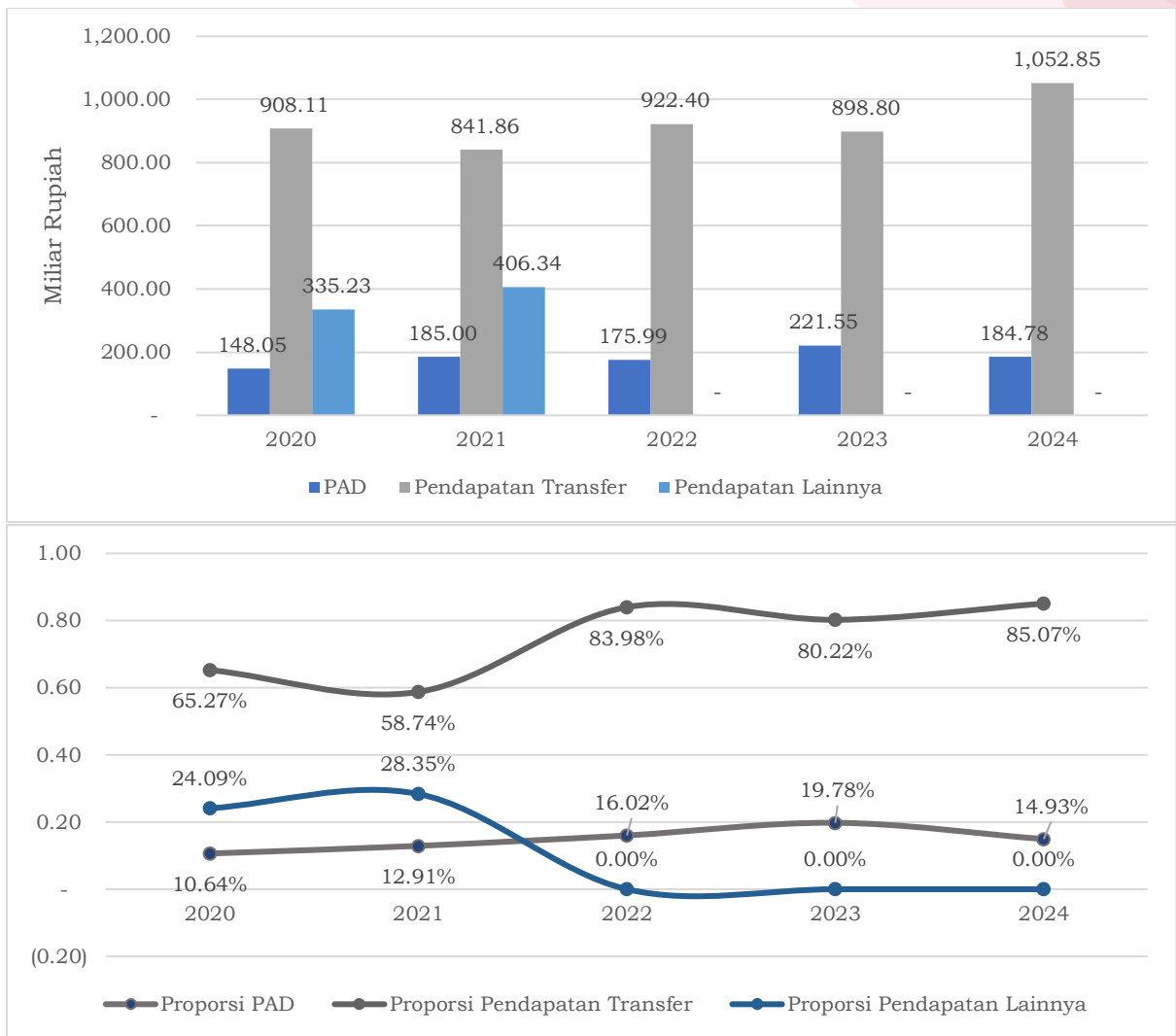
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran berkenaan. Pendapatan tersebut diperoleh dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, pendapatan daerah Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Meskipun demikian, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana mulai naik pada tahun 2021 dan 2022, yaitu setelah kebijakan pencabutan larangan berkegiatan selama masa pandemi Covid-19.

Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Jembrana bersumber dari pendapatan transfer. Bahkan, proporsi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jembrana selalu lebih dari 75%. Artinya, Kabupaten Jembrana belum mampu mandiri secara finansial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah, terutama PAD, pada masa mendatang.



Gambar 2.215 Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

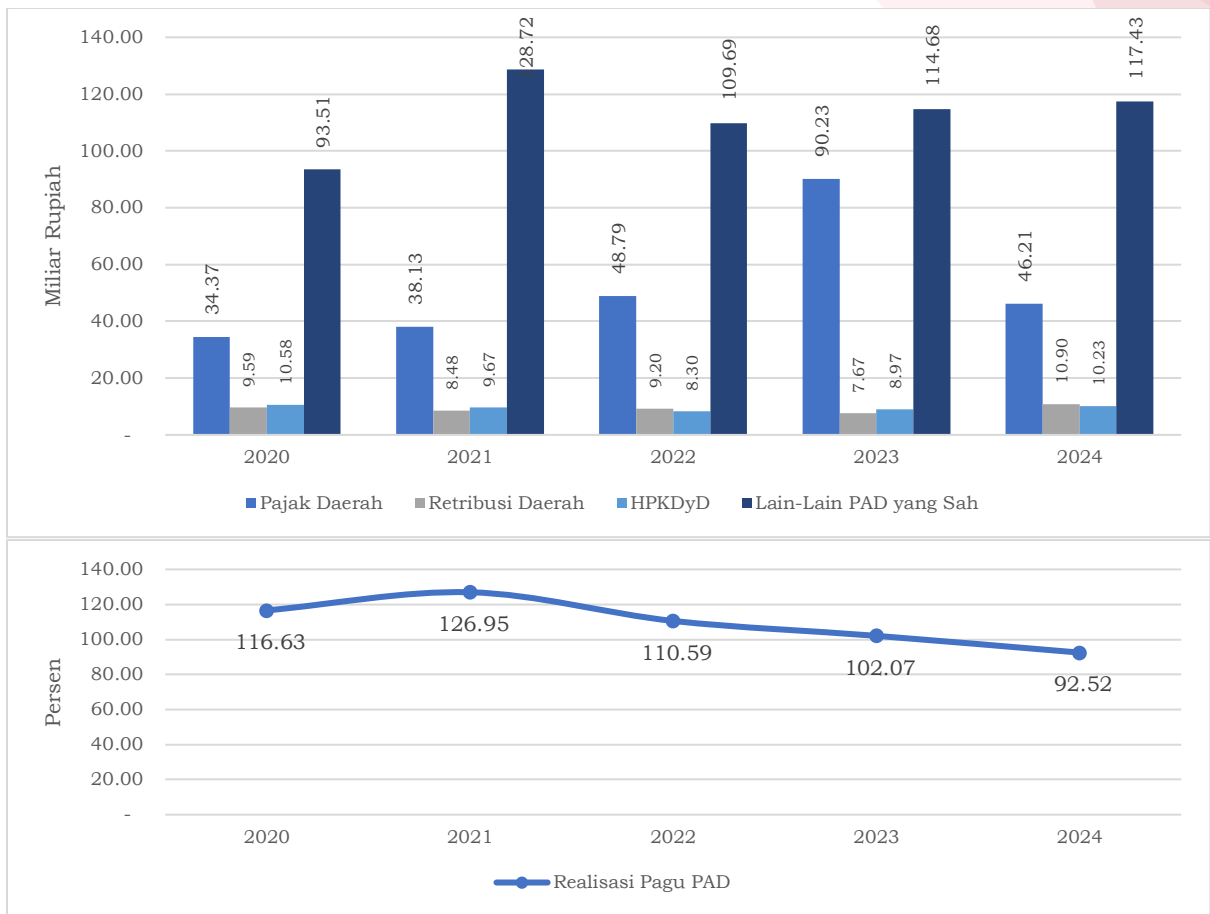


Gambar 2.216 Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

2.2.1.3. PENDAPATAN ASLI DAERAH

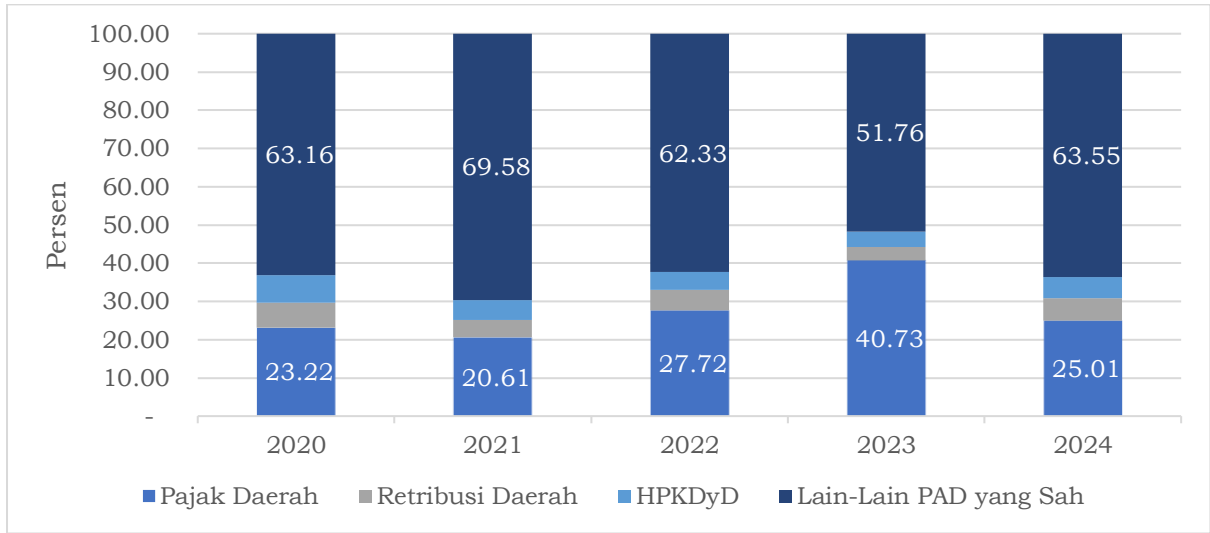
PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPK DyD), dan lain-lain PAD yang sah. PAD Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan, hanya saja pada tahun 2022 mengalami penurunan. Meskipun demikian, persentase realisasi pagu PAD Kabupaten Jember masih di atas 100%. Sementara itu, retribusi daerah mengalami lonjakan sebesar 295,33% disebabkan reklasifikasi realisasi pendapatan lain-lain ke dalam pendapatan retribusi sesuai dengan hasil audit dari BPK. Reklasifikasi dilakukan pada pendapatan BLUD dari jasa layanan ke retribusi pelayanan daerah dan pada hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan menjadi retribusi jasa usaha. Kedua hal tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan retribusi dan penurunan realisasi pada pendapatan lain-lain yang sah.



Gambar 2.217 Realisasi PAD Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Lain-lain PAD yang sah membentuk sebagian besar PAD Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir, bahkan persentasenya selalu di atas 50%. Perkembangan proporsi komponen pembentuk PAD dapat dilihat pada gambar berikut.

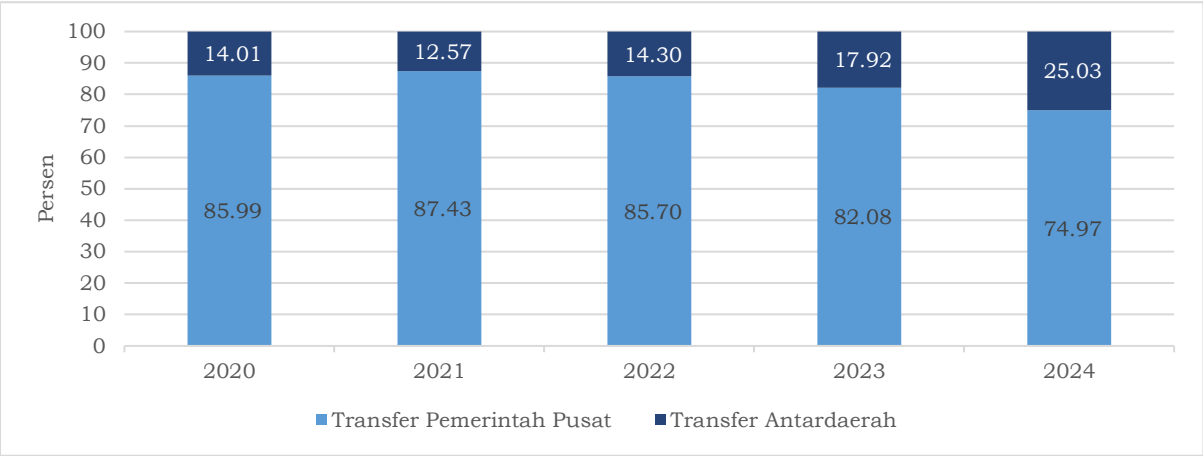


Gambar 2.218 Proporsi Komponen Pembentuk PAD Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

2.2.1.4. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan antardaerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus), dana insentif daerah, dan dana desa. Pendapatan transfer antardaerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan (umum dan khusus). Pendapatan transfer Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, kecuali tahun 2022. Sebagian besar pendapatan transfer Kabupaten Jembrana diperoleh dari pemerintah pusat.



Gambar 2.219 Proporsi Komponen Pembentuk Pendapatan Transfer Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024 (dalam Miliar Rupiah)

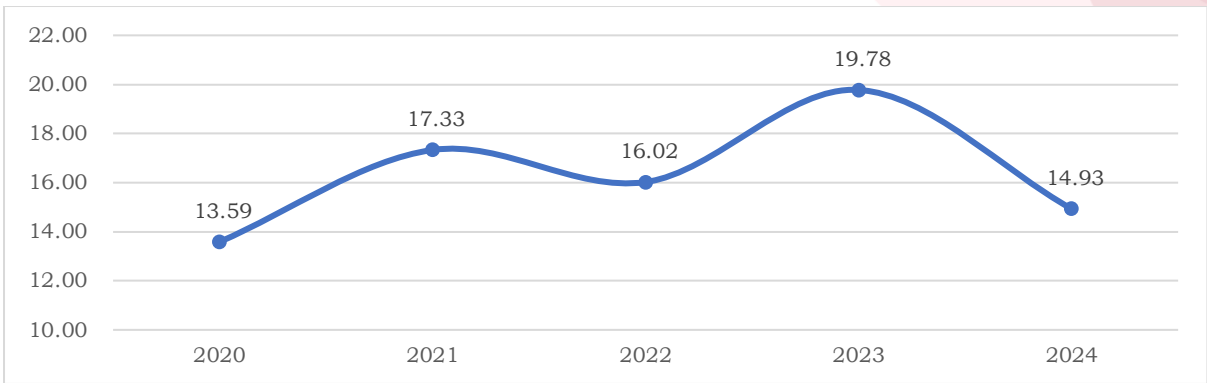
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.1.5. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tabel pada subbab Kinerja Pelaksanaan APBD dan gambar pada subbab Pendapatan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan, kecuali tahun 2022. Hal ini dikarenakan dana bantuan operasional sekolah dikategorikan menjadi dana alokasi khusus nonfisik dari pendapatan hibah.

2.2.1.6. KEMANDIRIAN KEUANGAN

Kemandirian keuangan adalah tidak rentannya kondisi keuangan daerah terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya. Kemandirian keuangan dinilai dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan daerah. PAD Kabupaten Jembrana menunjukkan tren pertumbuhan, kecuali tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana semakin mandiri dalam pengelolaan keuangannya seperti pada Gambar di bawah ini. Meskipun demikian, Kabupaten Jembrana masih memiliki ketergantungan yang tinggi, terutama terhadap pemerintah pusat.



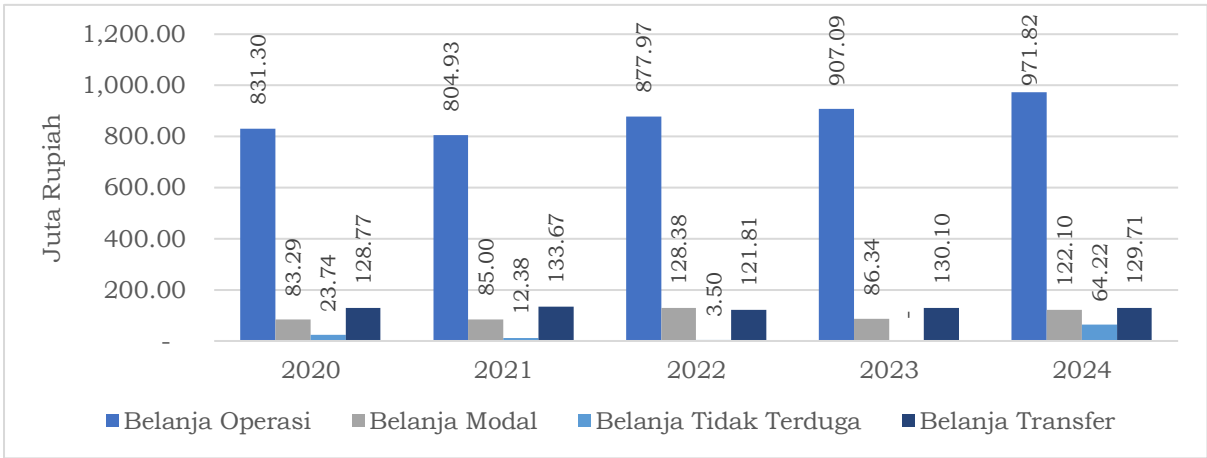
Gambar 2.220 Kemandirian Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.1.7. BELANJA DAERAH

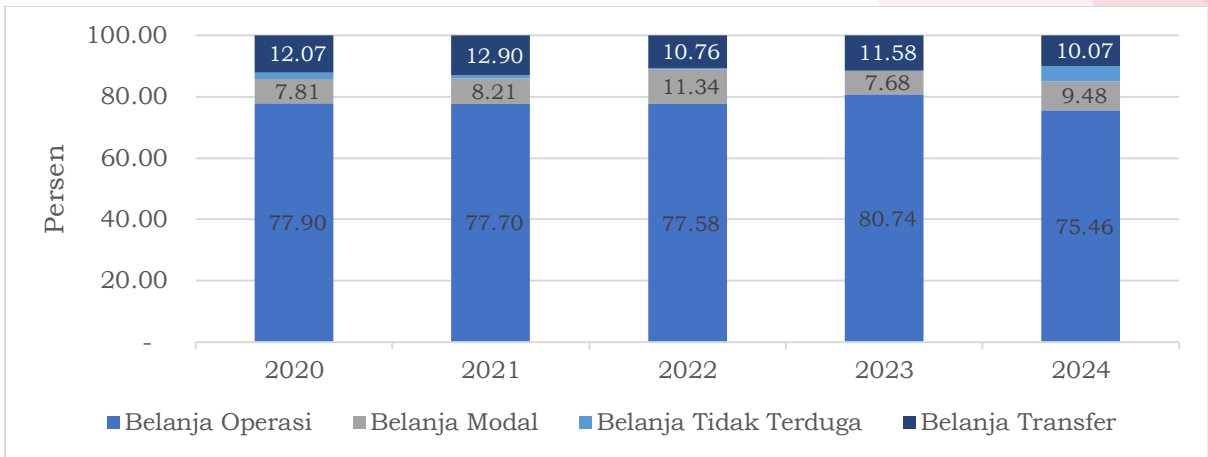
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran daerah dalam bentuk uang dan pengeluaran lainnya yang diakui sebagai pengurang ekuitas sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, belanja daerah Kabupaten Jembrana terus menurun, kecuali tahun 2022.

Sebagian besar belanja daerah Kabupaten Jembrana tergolong belanja operasi. Artinya, sebagian besar APBD Kabupaten Jembrana digunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



Gambar 2.221 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024



Gambar 2.222 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.1.8. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan/pengeluaran daerah yang perlu/akan dibayar/diterima kembali yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Jembrana tumbuh relatif lebih cepat. Meskipun demikian, nilai rupiahnya jauh di bawah penerimaan pembiayaan daerah.

2.2.1.9. NERACA DAERAH

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan (daerah) yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu/periode tertentu. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah sebagai akibat dari peristiwa pada masa lalu dan sumber manfaat ekonomi dan/atau sosial dapat diperoleh (pemerintah dan masyarakat) pada masa mendatang yang diukur secara finansial, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Kewajiban merupakan utang yang timbul sebagai akibat dari peristiwa pada masa lalu yang penyelesaiannya menyebabkan keluarnya sumber daya ekonomi pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah berupa selisih antara aset dengan kewajibannya. Analisis neraca daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.38 Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I.	Aset	2.234.072.217.515,89	2.235.031.343.097,29	2.196.023.465.795,29	2.283.729.609.826,61	2.299.700.993.255,89
A.	Aset Lancar	148.697.614.041,94	214.676.789.312,27	161.266.652.761,38	175.500.131.611,22	174.990.834.460,58
1.	Kas dan setara kas	98.359.663.542,51	129.876.737.090,93	91.790.325.144,63	68.778.007.390,22	72.889.186.081,35
2.	Investasi jangka pendek					
3.	Piutang	64.246.424.101,84	98.092.437.357,23	83.224.555.377,55	119.018.935.807,50	155.981.460.003,44
4.	Penyisihan piutang	-32.338.636.593,92	-35.715.827.912,35	-36.169.985.155,69	-41.230.484.264,79	-44.020.470.373,28
5.	Beban dibayar di muka	177.928.767,12	180.835.950,92	176.853.368,77	181.726.253,18	182.970.896,45
6.	Persediaan	18.252.234.224,39	22.242.606.825,54	21.582.778.826,12	28.751.946.425,11	46.925.055.917,90
7.	Bagian lancar tuntutan ganti rugi			662.125.200,00		-
B.	Investasi Jangka Panjang	68.715.101.077,24	67.320.844.082,98	67.553.731.667,05	68.553.799.952,55	6.887.795.221,05
1.	Investasi nonpermanen	873.164.916,00	876.114.916,00	879.659.916,00	882.409.916,00	884.909.916,00
2.	Investasi permanen	67.841.936.161,24	66.444.729.166,98	66.674.071.751,05	67.671.390.036,55	6.799.288.530.505,00
C.	Aset Tetap	1.939.811.427.353,95	1.881.613.063.301,08	1.894.080.923.775,30	1.919.066.774.497,28	18.995.683.360.541,10
1.	Tanah	498.057.569.419,34	499.553.416.619,34	502.359.441.619,34	510.547.330.616,34	508.957.378.809,34
2.	Peralatan dan mesin	295.050.583.949,81	318.035.378.231,22	363.424.808.711,60	385.461.671.755,09	39.788.195.141,89
3.	Gedung dan bangunan	940.008.926.066,97	969.269.636.624,46	1.006.991.812.802,56	1.068.925.332.970,15	1.111.332.833.463,28
4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.021.519.594.610,51	1.156.410.727.804,76	1.213.654.120.151,76	1.298.856.012.638,43	1.343.314.684.697,02
5.	Aset tetap lainnya	146.331.922.039,91	10.176.091.618,00	10.268.327.837,00	11.255.628.897,00	12.492.079.252,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	8.661.046.740,00	3.069.767.272,50	4.659.265.849,38	7.750.236.239,76	9.495.874.377,65
7.	Akumulasi penyusutan	-969.818.215.472,59	1.074.901.954.869,20	1.207.276.853.196,34	1.363.729.438.639,49	-1.483.906.445.200,05
8.	Properti investasi					
D.	Dana Cadangan					
1.	Dana cadangan					
E.	Aset Lainnya	76.848.075.042,76	71.420.646.400,96	73.122.157.591,56	100.216.165.765,56	141.107.284.253,13
1.	Tagihan penjualan angsuran					
2.	Tuntutan ganti rugi					

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	25.817.017.100,00	39.964.299.000,00	42.873.893.000,00	22.255.050.000,00	22.255.050.000,00
4.	Aset tak berwujud	9.642.237.253,00	18.412.222.503,00	18.556.296.853,00	8.744.198.690,00	10.752.376.695,52
5.	Aset lain-lain	41.312.972.528,76	23.310.491.750,96	22.565.259.108,56	100.791.349.979,76	145.235.971.825,81
6.	Amortisasi aset tak berwujud		-10.266.366.853,00	-10.873.291.370,00	-6.570.807.610,00	-7.466.388.911,00
7.	Kas yang dibatasi penggunaannya	75.848.161,00			-	19.436.025,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				-27.869.306.294,20	-30.044.482.382,30
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				2.865.681.000,00	355.321.000,00
II.	Kewajiban	10.259.300.149,59	21.734.069.950,77	10.765.010.434,50	47.923.643.583,74	36.243.175.478,00
A.	Kewajiban Jangka Pendek	10.259.300.149,59	21.734.069.950,77	10.765.010.434,50	47.923.643.583,74	36.243.175.478,00
1.	Utang perhitungan pihak ketiga					
2.	Utang bunga					
3.	Bagian lancar utang jangka panjang					
4.	Pendapatan diterima di muka	1.062.931.035,79	2.115.080.851,16	787.386.864,33	631.388.468,79	463.985.124,59
5.	Utang belanja	9.120.520.952,80	19.543.140.938,61	9.891.518.409,17	47.249.415.714,95	35.759.754.328,41
6.	Utang jangka pendek lainnya	75.848.161,00	75.848.161,00	86.105.161,00	42.839.400,00	19.436.025,00
B.	Kewajiban Jangka Panjang					
1.	Utang dalam negeri (perbankan)					
2.	Utang dalam negeri (obligasi)					
3.	Premium (diskonto) obligasi					
4.	Utang jangka panjang lainnya					

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
III.	Ekuitas Dana	2.223.812.917.366,30	2.213.297.273.146,52	2.185.258.455.360,79	2.235.805.966.242,69	2.263.457.817.777,89
IV.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	2.234.072.217.515,89	2.235.031.343.097,29	2.196.023.465.795,29	2.283.792.609.826,43	2.299.700.993.255,89

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024



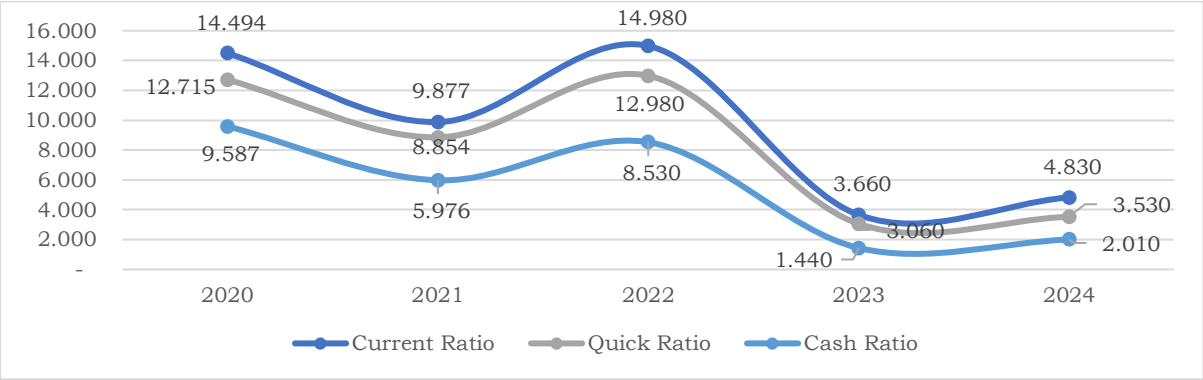
2.2.1.10. RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*. *Current ratio* merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. *Quick ratio* merupakan perbandingan antara selisih aset lancar dan persediaan dengan kewajiban jangka pendek. *Cash ratio* merupakan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 2.39 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Rasio Likuiditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Current ratio (rasio lancar)	14,49	9,88	14,98	3,66	4,83
2.	Quick rasio (rasio cair)	12,71	8,85	12,98	3,06	3,53
3.	Cash ratio (rasio kas)	9,59	5,98	8,53	1,44	2,01

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024



Gambar 2.223 Rasio Likuiditas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Ketiga rasio likuiditas neraca daerah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang sama. Trennya cenderung menurun, kecuali pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki kemampuan yang relatif seimbang dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar, aset lancar tanpa sediaan (*inventory*), dan kas. Kecenderungan penurunan rasio likuiditas disebabkan akibat peningkatan utang jangka pendek di Kabupaten Jembrana.

2.2.1.11. RASIO SOLVABILITAS

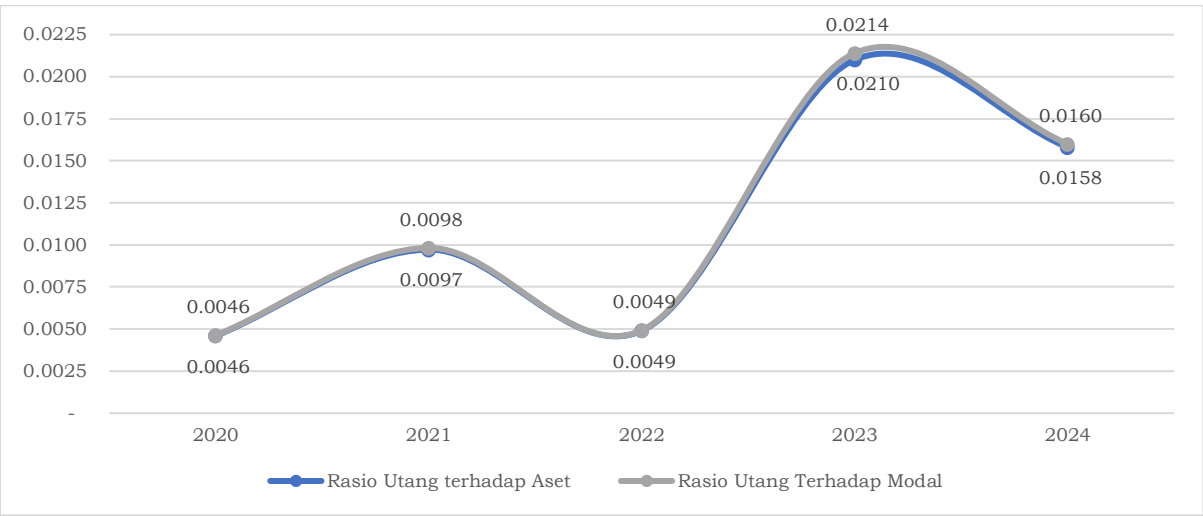
Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang terdiri dari rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap modal (ekuitas). Kedua rasio solvabilitas neraca daerah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren dan nilai yang sama. Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan (kecuali pada tahun 2022), rasio solvabilitas neraca daerah Kabupaten Jembrana masih

menunjukkan nilai yang rendah. Peningkatan rasio solvabilitas pada tahun 2023 terjadi karena terdapat lonjakan ekuitas keuangan di Kabupaten Jembrana.

Tabel 2.40 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Rasio Solvabilitas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio utang terhadap aset	0,0046	0,0097	0,0049	0,021	0,0158
2.	Rasio utang terhadap modal	0,0046	0,0098	0,0049	0,0214	0,016

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024



Gambar 2.224 Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

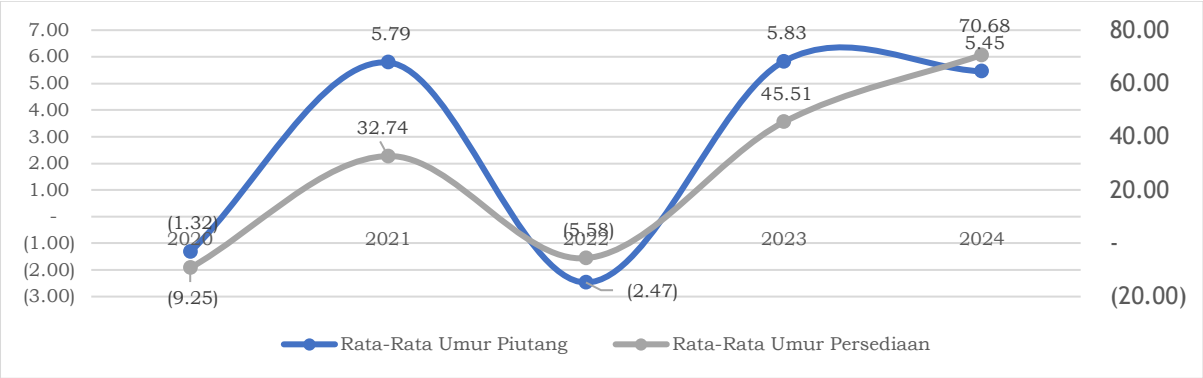
2.2.1.12. RASIO AKTIVITAS

Rasio aktivitas digunakan untuk mengidentifikasi tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah yang terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang mengindikasikan jumlah hari yang dibutuhkan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas), sedangkan rata-rata umur persediaan mengindikasikan jumlah hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Kedua rasio aktivitas neraca daerah Kabupaten Jembrana menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata umur piutang tertinggi tercapai pada tahun 2023 dan rata-rata umur persediaan tertinggi tercapai pada tahun 2024. Fluktuasi rasio aktivitas keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana terjadi karena adanya perubahan kebijakan, efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah, realisasi belanja, dan kondisi eksternal seperti halnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada belanja modal dan pendapatan.

Tabel 2.41 Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Rasio Aktivitas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata umur piutang	-1,32	5,79	-2,47	5,83	5,45
2.	Rata-rata umur persediaan	-9,25	32,74	-5,58	45,51	70,68

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

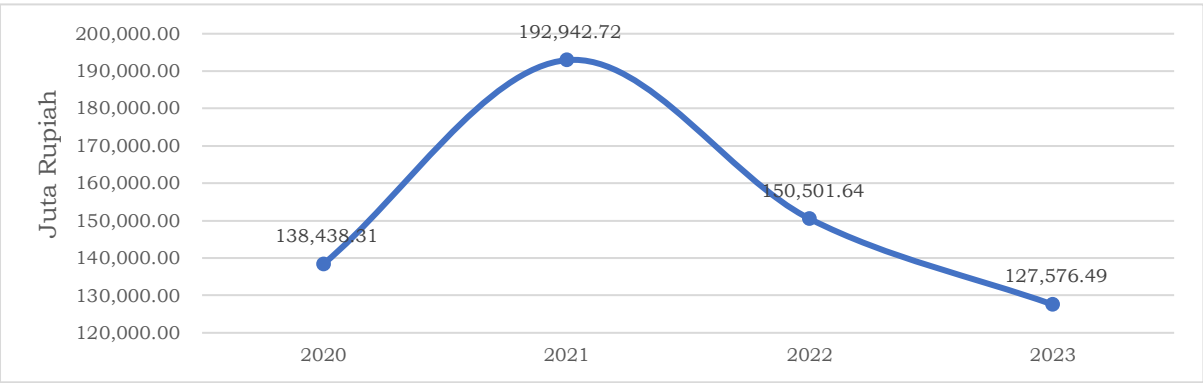


Gambar 2.225 Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.1.13. MODAL KERJA

Modal kerja digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan daerah dalam melaksanakan operasional harian (kewajiban jangka pendek) tanpa menggunakan selain aset lancar. Seperti sebelumnya, modal kerja neraca daerah Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Penjelasan tren modal kerja neraca daerah dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



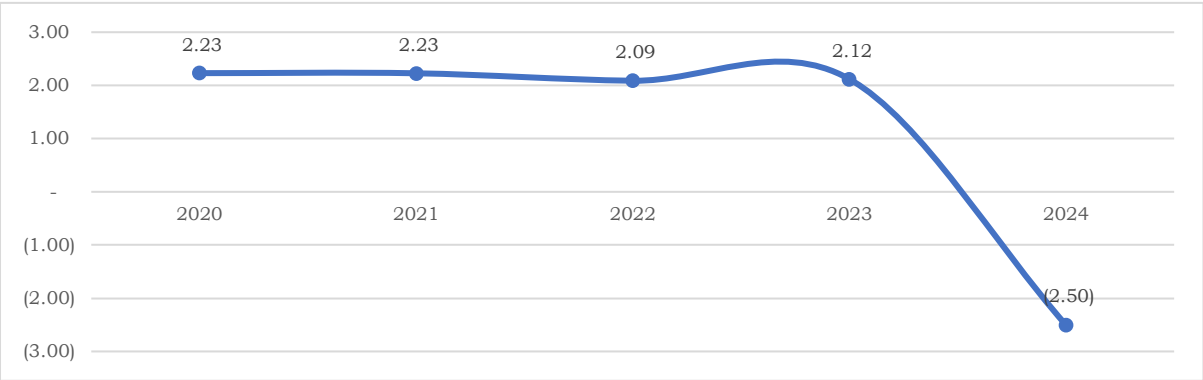
Gambar 2.226 Modal Kerja Neraca Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2023

2.2.1.14. FLEKSIBILITAS KEUANGAN

Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan sumber daya keuangannya dalam menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang. Fleksibilitas keuangan dinilai dengan membandingkan pendapatan selain DAK terhadap kewajiban dan belanja pegawai.

Fleksibilitas keuangan Kabupaten Jembrana cenderung menurun. Meskipun demikian, fleksibilitas keuangan Kabupaten Jembrana kembali meningkat pada tahun 2023. Pada 2024, fleksibilitas keuangan Kabupaten Jembrana mengalami penurunan tajam akibat adanya peningkatan pendapatan transfer. Ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat sangat berpengaruh pada fleksibilitas keuangan Kabupaten Jembrana.



Gambar 2.227 Fleksibilitas Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.2.KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

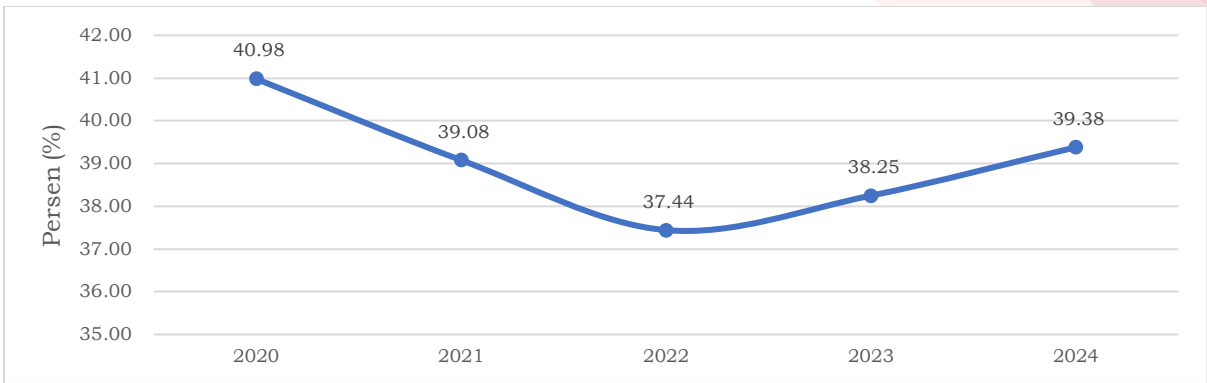
Kebijakan pengelolaan keuangan tercermin dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan menjelaskan perkembangan dan proporsi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, akan tercapai transparansi keuangan, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, dan ketepatan pemanfaatan potensi pembiayaan daerah.

2.2.3.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Proporsi penggunaan anggaran menggambarkan realisasi setiap alokasi belanja daerah. Analisis proporsi penggunaan anggaran terbagi dua, yaitu (a) proporsi belanja pegawai dan (b) belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah pada masa lalu.

2.2.3.2. ANALISIS PROPORSI BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dilihat dari alokasi belanja pegawai Kabupaten Jembrana. Belanja pegawai Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif. Selain itu, proporsinya pun selalu lebih dari 30% seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.228 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jember Tahun 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2020–2023

2.2.3.3. ANALISIS BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Analisis pengeluaran yang wajib dan mengikat dilakukan terhadap pengeluaran yang tidak dapat dihindari dalam satu tahun anggaran, yaitu wajib dibayar setiap tahun dan tidak dapat ditunda. Pengeluaran prioritas utama merupakan pengeluaran terkait keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.42 Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Tidak Langsung	674.223.426.848,57	576.700.589.577,88	603.026.126.540,58	635.412.607.201,94	661.225.029.165,01
1.	Belanja penerimaan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD, dan kepala daerah	438.616.937.644,00	406.489.257.273,11	426.227.679.239,00	430.103.698.938,94	481.872.874.321,27
2.	Belanja hibah	77.355.905.428,00	12.924.703.007,00	42.522.016.663,32	70.060.100.913,00	45.123.370.376,00
3.	Belanja bantuan sosial	5.736.790.903,00	11.238.783.180,77	8.966.695.039,26	5.147.386.636,00	4.455.427.032,74
4.	Belanja tidak terduga	23.739.414.314,00	12.375.465.423,00	3.495.999.039,00	-	64.225.000,00
5.	Belanja bagi hasil	15.975.219.308,00	17.643.244.194,00	15.849.047.960,00	17.143.831.514,00	7.468.637.935,00
6.	Belanja bantuan keuangan	112.799.159.251,57	116.029.136.500,00	105.964.688.600,00	112.957.589.200,00	122.240.494.500,00
	Pengeluaran Pembiayaan	3.200.000.000,00	4.185.000.000,00	6.721.990.065,00	970.000.000,00	0,00
1.	Penyertaan modal daerah	-	-	2.121.990.065,00		0,00
2.	Pemberian pinjaman daerah	3.200.000.000,00	4.185.000.000,00	4.600.000.000,00	970.000.000,00	0,00
	Jumlah	677.423.426.848,57	580.885.589.577,88	609.748.116.605,58	636.382.607.201,94	0,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

Berdasarkan tabel di atas, pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Jembrana cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pengeluaran tertinggi tercapai pada tahun 2020 yang diikuti penurunan sebesar 14,25%. Pada tahun 2022 dan 2023, pengeluarannya tumbuh kembali meskipun belum optimal. Belanja hibah Kabupaten Jembrana mengalami lonjakan pada tahun 2023 karena adanya belanja hibah pembangunan Pura yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, terjadi penyertaan modal daerah pada tahun 2022 dalam rangka pendirian Perumda Tribuwana.

2.2.3.4. ANALISIS PEMBIAYAAN

Analisis pembiayaan menggambarkan pengaruh kebijakan pembiayaan daerah sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hasil analisis pembiayaan mendasari penentuan kebijakan pembiayaan daerah berikutnya untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan terdiri dari analisis sumber penutup defisit riil, realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA).

2.2.3.5. ANALISIS SUMBER PENUTUP DEFISIT RIIL

Analisis sumber penutup defisit riil menggambarkan kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pada masa lalu. APBD Kabupaten Jembrana hanya mengalami defisit pada tahun 2022. Meskipun demikian, defisit yang dialami tidak lebih besar daripada realisasi penerimaan pembiayaan daerah sehingga dapat diatasi.

Tabel 2.43 Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi pendapatan daerah	1.089.673.620.182,52	1.067.493.613.610,35	1.098.390.446.808,67	1.120.357.668.848,96	1.237.629.805.244,51
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja daerah	1.067.104.976.160,52	1.035.976.510.061,93	1.131.655.987.519,93	1.123.536.599.476,66	1.223.688.359.269,91
3.	Pengeluaran pembiayaan daerah	3.200.000.000,00	4.185.000.000,00	6.721.990.065,00	970.000.000,00	0
	Defisit Riil	-22.568.644.022,00	-31.517.103.548,42	33.265.540.711,26	3.178.930.627,70	13.941.445.974,60
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
1.	SiLPA tahun sebelumnya	75.790.989.520,51	98.359.633.542,51	129.876.737.090,93	91.790.325.144,63	13.941.445.974,60
2.	Pencairan dana cadangan	3.200.000.000,00	-	-	-	-
3.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	4.185.000.000,00	4.600.000.000,00	970.000.000,00	0
	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	78.990.989.520,51	102.544.633.542,51	134.476.737.090,93	92.760.325.144,63	68.752.602.490,22
	SILPA	98.359.633.542,51	129.876.737.090,93	94.489.206.314,67	88.611.394.516,93	82.694.048.464,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jembrana Tahun 2020–2024

2.2.3.6. ANALISIS REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Analisis realisasi SiLPA menggambarkan komposisi SiLPA tahun sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar identifikasi kinerja APBD tahun sebelumnya. SiLPA dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sisa penghematan belanja atau akibat lainnya; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan kegiatan lanjutan. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, realisasi SiLPA sejak tahun 2020 seluruhnya bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Realisasi SiLPA Kabupaten Jembrana tumbuh dengan nilai rata-rata sebesar 7,11% per tahun.

2.2.3.7. ANALISIS SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Analisis SILPA menggambarkan SILPA secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis SILPA dihitung berdasarkan selisih antara kas dan setara kas neraca daerah dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Dikarenakan Kabupaten Jembrana tidak memiliki kewajiban dan kegiatan tersebut, SILPA hanya didapat dari kas dan setara kas neraca daerah.

2.2.3. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KE DEPAN

Kerangka pendanaan disusun dengan tujuan mengidentifikasi kapasitas riil keuangan daerah untuk dialokasikan dalam pendanaan program pembangunan selama lima tahun berikutnya. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil proyeksi keuangan daerah dan skenario rasional terhadap beberapa alokasi sesuai kondisi ekonomi terkini dan lima tahun terakhir. Arah kebijakan yang melandasi proyeksi APBD Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut.

- a. PAD Kabupaten Jembrana mengalami tren pertumbuhan sejak lima tahun terakhir. Seiring dengan tumbuhnya ekonomi pasca pandemi Covid-19, PAD Kabupaten Jembrana juga diperkirakan mengalami kenaikan. Hal ini didukung dengan beberapa hal, yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi dan kualitas pelayanan, pengembangan aplikasi dan penerapan transaksi melalui bank atau nontunai (*e-ticketing*) dalam pembayaran retribusi, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, peningkatan tingkat kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah,

dan optimalisasi produktivitas dan pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- b. Dana transfer diasumsikan naik, baik dari pusat maupun provinsi.
- c. Pembagian prioritas belanja daerah menjadi tiga, secara berturut-turut yaitu prioritas I (pengeluaran yang wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal), prioritas II (belanja untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta penurunan ketimpangan), dan prioritas III (belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya).
- d. Penambahan penyertaan modal pada berbagai badan usaha milik daerah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mencatatkan tren yang baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,00% (yoy). Selain itu, tingkat inflasi diperkirakan akan terjaga pada kisaran 2,50% (yoy). Berdasarkan hal ini, dihitunglah kerangka pendanaan Kabupaten Jembrana sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pendapatan asli daerah didorong untuk terus tumbuh dengan pertimbangan:

- a. pertumbuhan pajak daerah diproyeksikan sebesar 19,50% per tahun melalui digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan pajak;
- b. pertumbuhan retribusi daerah didorong menuju 1,50% per tahun melalui pengembangan aplikasi dan transaksi perbankan atau nontunai (*e-ticketing*);
- c. pertumbuhan retribusi daerah perlu difokuskan dan ditata ulang sistemnya karena realisasi yang rendah selama lima tahun terakhir;
- d. peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah juga disebabkan oleh peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan tingkat kepatuhan membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh menurut tren lima tahun terakhir; dan
- f. pertumbuhan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar 3,00% per tahun.

Pendapatan transfer diharapkan terus tumbuh dengan pertimbangan:

- a. transfer pemerintah pusat tumbuh sebesar 1,07% per tahun mengikuti tren pertumbuhan penduduk pasca-sensus; dan

- b. transfer pemerintah daerah tumbuh sebesar 2,50% per tahun memperhatikan proyeksi tahunan laju pertumbuhan ekonomi (5,00%) dan laju inflasi (2,50%).

Belanja daerah diproyeksikan tumbuh sebesar 3,39% per tahun dengan pertimbangan:

- a. belanja pegawai serta barang dan jasa tumbuh sebesar 1,00% per tahun sebagai bentuk efisiensi belanja;
- b. belanja hibah tumbuh sebesar 1,27% per tahun mulai tahun 2026 untuk menjaga besarnya antara 28 hingga 30 miliar rupiah; dan
- c. belanja bantuan sosial terkontraksi sebesar 12,75% per tahun sebagai bentuk efisiensi belanja.

Pembiayaan daerah (netto) diproyeksikan terkontraksi sebesar 192,81% per tahun dengan pertimbangan:

- a. pemberian dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dipertahankan sebesar 5,40 miliar rupiah per tahun;
- b. SILPA didorong menuju Rp0,00;
- c. SILPA negatif (2024–2028) diatasi dengan pinjaman daerah yang dibayar pada tahun berikutnya dengan pembayaran terakhir pada tahun 2029; dan
- d. SILPA positif (2029) diatasi dengan penyertaan modal daerah.

Tabel 2.44 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026–2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1	PENDAPATAN	1.237.091.971.583,00	1.184.844.650.251,00	1.165.784.337.876,42	1.280.260.404.833,00	1.316.300.009.080,00	1.371.806.098.752,00	1.429.675.136.476,00
	A. Pendapatan Asli Daerah	184.575.515.567,00	246.514.465.431,00	243.114.297.566,00	271.818.029.388,00	285.408.930.857,00	299.679.377.400,00	314.663.346.270,00
	B. Pendapatan Transfer	1.052.516.456.016,00	938.330.184.820,00	922.670.040.310,42	1.008.442.375.445,00	1.030.891.078.223,00	1.072.126.721.352,00	1.115.011.790.206,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.237.091.971.583,00	1.184.844.650.251,00	1.165.784.337.876,42	1.280.260.404.833,00	1.316.300.009.080,00	1.371.806.098.752,00	1.429.675.136.476,00
2	BELANJA	1.232.980.643.519,00	1.257.698.174.432,00	1.223.870.761.180,50	1.331.510.936.763,00	1.367.111.571.397,00	1.404.535.875.869,00	1.437.168.918.777,00
	A. Belanja Operasi	979.291.842.528,00	1.013.252.461.765,00	968.311.988.697,50	1.074.398.429.363,00	1.103.124.641.728,00	1.133.322.376.372,00	1.159.654.033.949,00
	B. Belanja Modal	123.915.443.556,00	94.322.574.837,00	110.795.569.676,00	100.453.233.987,00	103.285.886.096,00	106.263.642.985,00	108.860.171.355,00
	C. Belanja Tak Terduga	64.225.000,00	7.331.910.616,00	6.129.975.593,00	5.491.710.616,00	5.491.710.616,00	5.491.710.616,00	5.491.710.616,00
	D. Belanja Transfer	129.709.132.435,00	142.791.227.214,00	138.633.227.214,00	151.167.562.797,00	155.209.332.957,00	159.458.145.896,00	163.163.002.857,00
	JUMLAH BELANJA	1.232.980.643.519,00	1.257.698.174.432,00	1.223.870.761.180,50	1.331.510.936.763,00	1.367.111.571.397,00	1.404.535.875.869,00	1.437.168.918.777,00
	SURPLUS/DEFISIT	4.111.328.064,00	(72.853.524.181,00)	(58.086.423.304,08)	(51.250.531.930,00)	(50.811.562.317,00)	(32.729.777.117,00)	(7.493.782.301,00)
3	PEMBIAYAAN	68.742.196.117,00	83.653.524.181,00	68.886.423.304,08	62.050.531.931,00	61.611.562.318,00	43.529.777.117,00	18.293.782.302,00
	A. Penerimaan	68.742.196.117,00	78.253.524.181,00	63.486.423.304,08	56.650.531.931,00	56.211.562.318,00	38.129.777.117,00	12.893.782.302,00
	B. Pengeluaran	-	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00	5.400.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	68.742.196.117,00	83.653.524.181,00	68.886.423.304,08	62.050.531.931,00	61.611.562.318,00	43.529.777.117,00	18.293.782.302,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.742.196.117,00	72.853.524.181,00	58.086.423.304,08	51.250.531.931,00	50.811.562.318,00	32.729.777.117,00	7.493.782.302,00

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu strategis termasuk bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan permasalahan dan isu strategis mendasari penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Melalui hal ini, tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan pelaksanaan program pembangunan.

2.3.1. PERMASALAHAN

Permasalahan dirumuskan berdasarkan uraian masalah dalam KLHS dan data di Bab II. Permasalahan tersebut berupa pernyataan kesenjangan antara capaian dengan harapan. Kemudian, permasalahan tersebut diuraikan menurut aspek/fokus/bidang urusan sebagai dasar penyusunan isu strategis.

2.3.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi tidak hanya menjadi peluang pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjadi masalah dan hambatan pembangunan. Oleh karena itu, aspek geografi dan demografi perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

A. Geografi

Pada dasarnya, Kabupaten Jembrana memiliki peran dan posisi yang strategis sebagai gerbang Pulau Bali. Meskipun demikian, hal ini kurang diperhatikan, terbukti dari perilaku orang/barang yang hanya lewat di Kabupaten Jembrana. Dengan luasnya lahan kosong (semak belukar) di Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan studi kelayakan pembangunan agar Kabupaten Jembrana tidak lagi sekadar dilewati.

Dari sisi penggunaan lahan dan rencana tata ruang, Kabupaten Jembrana menghadapi masalah lain. Hampir setengah wilayahnya (47,58%) berupa kawasan lindung dan lebih dari setengahnya (56,77%) memiliki kemiringan lebih dari 15%. Selain itu, terdapat alih fungsi lahan sawah yang dapat mengancam ketahanan pangan. Dari sisi risiko bencana, terdapat enam jenis potensi bencana di Kabupaten Jembrana, yaitu banjir, tanah longsor, abrasi dan erosi pantai, air pasang, angin kencang, dan tsunami dengan tingkat kapasitas pada kategori sedang. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertimbangkan dalam pembangunan.

B. Demografi

Kabupaten Jembrana menghadapi perlambatan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan, pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Jembrana berkurang. Kecenderungan serupa juga teridentifikasi pada arus migrasi, yaitu besarnya arus migrasi keluar dibanding masuk karena faktor ekonomi.

Hal ini perlu diselesaikan melalui pembukaan peluang kerja baru yang lebih beragam dengan insentif yang bersaing. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dari komposisi penduduk menurut pendidikan, 38% penduduk Kabupaten Jembrana belum menamatkan pendidikan dasar. Hal ini menjadi masalah karena setiap jenis pekerjaan membutuhkan kualifikasi pengetahuan dan keterampilan tertentu.

2.3.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat sudah tentu menjadi tujuan setiap daerah. Kesejahteraan tersebut terbagi menjadi kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, PDRB Kabupaten Jembrana mencatatkan laju pertumbuhan yang tinggi pascapandemi Covid-19. Meskipun demikian, pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Jembrana berada di posisi ketiga terbawah di Provinsi Bali. Hal ini berlaku sama dengan PDRB per kapitanya yang berada di posisi keempat dan lebih rendah dibanding Provinsi Bali.

Dari sisi sosial budaya, indeks pembangunan manusia dan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Jembrana berada di bawah Provinsi Bali meskipun cenderung naik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya persentase balita gizi buruk dan menurunnya indeks pemberdayaan gender Kabupaten Jembrana. Penjelasan lebih lanjut terkait kesejahteraan sosial budaya, tercantum di bagian masing-masing urusan.

2.3.1.3. ASPEK DAYA SAING

Daya saing menunjukkan kemampuan Kabupaten Jembrana untuk bersaing dengan daerah lainnya. Dari sisi ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Jembrana berada di peringkat ketiga terbawah dan lebih rendah dibanding Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jembrana lebih rendah dibanding enam kabupaten/kota dan rata-rata Provinsi Bali. Selain itu, nilai tukar petani dan rasio kewirausahaan Kabupaten Jembrana pun masih di bawah kondisi ideal.

Dari sisi iklim investasi, Kabupaten Jembrana menghadapi masalah keamanan. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks kriminalitas Kabupaten Jembrana. Penyelesaian masalah ini perlu diprioritaskan mengingat keamanan termasuk kebutuhan dasar manusia.

2.3.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Permasalahan pelayanan umum terkait dengan kondisi tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan. Penjelasan permasalahan pelayanan umum diuraikan menurut bidang urusan pemerintahan pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Permasalahan Pelayanan Umum Kabupaten Jembrana

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan	Persentase murid TK/RA di bawah 50%	Kurangnya partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah	Kurangnya pemahaman orang tua untuk menyekolahkan anaknya di TK/RA; cenderung ingin langsung masuk SD/MI
		APK SMP dan SMA atau sederajat di bawah 100%		• Perpindahan murid ke luar daerah • Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi • Kecenderungan orang tua mengarahkan anaknya untuk bekerja • Kecenderungan orang tua mengarahkan anaknya hanya bersekolah di sekolah “unggul”
		APM setiap jenjang sekolah di bawah 100%		
		Angka putus sekolah SD dan SMA pada tahun 2023 masing-masing sebesar 0,01 dan 0,03		• Pencatatan murid meninggal sebagai putus sekolah • Adanya murid yang sakit dan tidak dapat melanjutkan pendidikan
		SD/MI dan SMP/MTs berkondisi baik pada tahun 2023 di bawah 100%	Kurangnya kualitas bangunan sekolah	Terbatasnya anggaran (bergantung pada dana alokasi khusus)
		Angka melek huruf penduduk usia 15–24 tahun di bawah 100% dan tidak ada pendaftar yang mendaftar Paket A	Belum optimalnya capaian angka melek huruf	Kurangnya sosialisasi kepada penduduk usia 15–24 tahun untuk mengikuti pendidikan nonformal
		Terdapat sekolah yang kekurangan guru	Belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan	• Kecenderungan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengajar/bekerja di kawasan perkotaan • Kecenderungan penurunan jumlah guru karena pensiun
2.	Kesehatan	Angka kematian bayi di atas target	Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	Adanya kelainan kongenital, infeksi, berat badan lahir rendah, dan gangguan pernafasan
		Angka kematian balita di atas target		Adanya kasus infeksi
		Angka kematian neonatal di atas target		Adanya kelainan kongenital, infeksi, berat badan lahir rendah, dan asfeksia
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di bawah 100%		Pencapaian 2023 menjadi 91,78% (3.819) karena sasarannya adalah estimasi (4.161)

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Cakupan bayi yang diimunisasi campak di bawah 100%		Sasarannya adalah estimasi; secara riil capaian sudah 100%
		<i>Nonpolio AFP rate</i> cenderung naik dan di atas 2,00		Peningkatan kinerja surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
		Cakupan kunjungan balita, ibu hamil, dan nifas di bawah 100%		- Pencapaian 2023 menjadi 80,96% (3.529) karena sasarannya adalah estimasi (4.359) untuk ibu hamil - Pencapaian 2023 menjadi 89,43% (3.721) karena sasarannya adalah estimasi (4.161) untuk nifas
		Cakupan penanganan komplikasi neonatal di bawah 100%		Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan lanjutan
		Prevalensi <i>stunting</i> meningkat dari 18,60% (2021) menjadi 20,60% (2023)		Adanya perbedaan persepsi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat terkait gizi - Status 2021: 14,3% (survei status gizi) - Status 2022: 14,2% (survei status gizi) - Status 2023: 8,7% (survei kesehatan)
		Rasio posyandu, puskesmas, poliklinik, pustu, dan rumah sakit cenderung turun		Beberapa fasilitas kesehatan sudah tidak layak atau mengalami kerusakan sehingga pelayanan dilakukan di balai desa
		Cakupan pustu tetap, yaitu 78,43%	Kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan	Puskesmas induk berada di desa/kelurahan tersebut (Melaya, Baluk, Banyubiru, Kaliakah, Pengambangan, Tegal Badeng Timur, Yeh Kuning, Budeng, Pekutatan, Gumbrih, dan Gilimanuk)
		Rasio tenaga medis dan kesehatan cenderung turun	Kurangnya ketersediaan tenaga medis dan kesehatan	- Terbatasnya kemampuan daerah dalam rekrutmen tenaga medis dan kesehatan - Belum optimalnya distribusi tenaga medis
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita tuberkulosis di bawah 100%	Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular	Sasarannya adalah estimasi sehingga berkemungkinan lebih banyak
		Prevalensi tuberkulosis cenderung naik		

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Cakupan penanganan penderita diare di bawah 100%		- Adanya fasilitas kesehatan yang tidak memberikan terapi sesuai standar - Belum optimalnya pemberdayaan kesehatan dan perilaku masyarakat - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat - Rendahnya kualitas air minum dan sarana sanitasi lingkungan - Belum adanya peraturan daerah yang mengatur perizinan dan pengawasan tempat umum dan makanan
		Terdapat 1 orang penderita malaria pada tahun 2024		Termasuk kasus impor, bukan <i>indigenous</i>
		Prevalensi HIV/AIDS cenderung naik		Banyaknya pekerja migran dan aplikasi kencan yang memicu penyebaran HIV
		Keikutsertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri relatif rendah	Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program Jaminan Kesehatan Nasional
3.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Lebih dari 20% jalan berkondisi tidak baik (rusak) pada tahun 2023	Rendahnya kualitas jaringan jalan	- Terbatasnya personel - Kurangnya sarana pendukung, seperti alat tulis dan komputer guna menunjang pekerjaan
		Persentase jalan kabupaten berkondisi baik hanya 67,18% pada tahun 2023		
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air hanya 2,89% pada tahun 2023	Belum meratanya pembangunan trotoar dan jaringan drainase	
		Persentase drainase berkondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat hanya 65,60% pada tahun 2023	Rendahnya kualitas jaringan drainase	
		Persentase irigasi kabupaten berkondisi baik hanya 63,09% pada tahun 2023 (di bawah target, yaitu 66,27%)	Belum meratanya pembangunan saluran irigasi pendukung kegiatan pertanian	

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Persentase penduduk berakses air minum belum 100%, hanya mencapai 92,26% pada tahun 2023 (di bawah target, yaitu 96,83%)	Belum meratanya pengelolaan air bersih yang diterima masyarakat, terutama sambungan rumah	
		Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan pada tahun 2023 hanya 92,26% (di bawah target, yaitu 96,83%)	Kurang meratanya pembangunan dan kualitas infrastruktur dasar	
		Persentase bangunan berizin hanya 10,17% pada tahun 2023 (di bawah target, yaitu 10,62%)	Belum optimalnya pengawasan izin mendirikan bangunan	
		Persentase ketaatan terhadap RTRW di bawah 100%	Tidak sesuai pemanfaatan lahan dengan peruntukan dalam RTRW	
		Terjadi pencemaran air yang terus meningkat akibat limbah domestik	Tingginya pencemaran air	Belum optimalnya pengolahan limbah domestik dan pengelolaan air bersih
4.	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni di bawah 100%	Rendahnya kualitas kawasan permukiman	- Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah sangat terbatas - Belum optimalnya penataan bangunan permukiman sesuai dengan ketentuan dan syarat kepadatan bangunan
		Persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 13%		
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum hanya 65,61% pada tahun 2023 (di bawah target, yaitu 83%)		
5.	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di bawah 100%	Belum semua wilayah terlayani penanggulangan bencana kebakaran	- Kurangnya personel - Kurangnya pelatihan pemadaman api - Pesatnya perkembangan permukiman - Kurang meratanya kualitas jalan sehingga sulit ditembus mobil pemadam kebakaran - Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana, seperti alat pelindung diri

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Indeks risiko bencana relatif tinggi	Masih terbatasnya mitigasi risiko bencana	• Tingginya intensitas kejadian bencana • Beragamnya jenis bencana (terdapat 13 dari 14 jenis bencana di Indonesia) • Tidak adanya dokumen penanggulangan bencana (KRB, RPB, rehab-rekon, renop, dan SKPBD) • Kurangnya kualitas sumber daya manusia penanggulangan bencana • Terbatasnya prasarana dan sarana • Belum optimalnya peran masyarakat, pengusaha, akademisi, dan media dalam penanggulangan bencana, terutama pada tahap prabencana
		Indeks kriminalitas cenderung meningkat	Rendahnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum	• Kurangnya pemahaman dan pembinaan personel perlindungan masyarakat • Kurangnya patroli dan deteksi dini • Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana, seperti alat pelindung diri • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
		Penerapan sanksi administratif dan pidana belum optimal	Belum maksimalnya penerapan sanksi administratif dan pidana	Terbatasnya anggota yang memiliki sertifikat dan kartu tanda anggota penyidik pegawai negeri sipil
6.	Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di bawah 100%	Masih terbatasnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, serta upaya perlindungan, jaminan sosial, dan pemberdayaan	• Terbatasnya prasarana dan sarana rehabilitasi serta pemberdayaan sosial • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan • Terbatasnya kesadaran masyarakat untuk mengurus kelengkapan administrasi permohonan bantuan • Terbatasnya kelengkapan fasilitas penanganan korban bencana • Terbatasnya prasarana dan sarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas
		Persentase PMKS yang tertangani di bawah 100%		
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di bawah 100%		
		Rendahnya persentase WKSBM yang menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial (sejak tahun 2016 hingga 2023 nilainya stagnan 41,17%)	Rendahnya jumlah WKSBM yang mampu menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial	Terbatasnya anggaran

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	
Fokus Layanan Urusan Wajib Nondasar				
1.	Tenaga kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di bawah 100%	Rendahnya jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	• Belum optimalnya pembinaan aturan ketenagakerjaan • Belum optimalnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan • Kurangnya pemahaman badan usaha terkait aturan ketenagakerjaan dan jaminan sosial
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan di bawah 100%	Rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	• Kurangnya personel • Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan, baik untuk usaha mandiri maupun menjadi pekerja migran
		Perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia belum optimal	Rendahnya perlindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia	Belum optimalnya laporan keberangkatan ke luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (pada tahun 2023 memiliki rasio sebesar 0,01)	Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga	• Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak serta kurangnya edukasi tentang pentingnya menghormati dan memperlakukan dengan baik perempuan dan anak • Terbatasnya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (tidak ada lembaga perlindungan non pemerintah di Kabupaten Jember) • Belum optimalnya implementasi pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (khususnya terkait masa hukuman)
		Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 74,67 pada tahun 2023 (di bawah target, yaitu 77,00)	Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	Budaya patriarki yang masih mengakar sehingga terjadi ketimpangan pendidikan dan kompetensi perempuan, kesenjangan upah, dan diskriminasi gender dari latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan
		Peran perempuan dalam pengambilan keputusan belum optimal	Belum optimalnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan	

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
3.	Pangan	Produksi padi cenderung menurun	Menurunnya ketersediaan pangan utama	- Berkurangnya luas tanam padi - Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, terutama generasi muda - Menurunnya daya dukung sumber daya alam, terutama irigasi - Dampak fenomena iklim ekstrem, seperti El Nino dan La Nina yang memengaruhi jadwal dan pola tanam - Mahalnya biaya usaha tani akibat kenaikan harga sarana produksi - Serangan hama penyakit tanaman
		Ketersediaan dan pemanfaatan pangan memiliki nilai lebih rendah dibanding keterjangkauan pangan	Tidak seimbangnya komponen indeks ketahanan pangan	- Banyaknya jalan yang rusak dan sulitnya distribusi bahan pangan ke kawasan terpencil - Menurunnya produksi padi
4.	Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat di bawah 100%	Belum optimalnya sertifikasi lahan	
5.	Lingkungan hidup	Indeks kualitas air relatif rendah	Rendahnya kualitas air	- Adanya titik pencemaran sungai - Belum optimalnya pengelolaan instalasi pengolahan air limbah domestik - Penyesuaian titik dan metode pengambilan sampel
		Indeks kualitas tutupan lahan cenderung menurun	Menurunnya kualitas tutupan lahan	- Alih fungsi lahan dan kerusakan tutupan lahan hutan - Perbedaan data luas wilayah antara pusat dengan daerah
		Persentase penanganan timbunan sampah di bawah 100%	Belum optimalnya pengelolaan dan pengurangan sampah	- Kurangnya ketersediaan infrastruktur - Kurangnya personel - Kurangnya partisipasi masyarakat - Belum adanya peraturan retribusi - Kurang memadainya kapasitas kelembagaan - Terbatasnya kapasitas tempat pemrosesan akhir sampah
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga di bawah target		
		Persentase pengelolaan limbah B3 oleh swasta di bawah 100%	Belum optimalnya pengawasan lingkungan hidup	
6.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan KTP-el di bawah 100%	Belum optimalnya cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Banyaknya masyarakat di luar negeri yang belum melakukan perekaman - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KTP-el - Kurangnya SDM (kualitas & kuantitas)
		Cakupan penerbitan akta kelahiran di bawah 100%		Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Rasio pasangan berakta nikah di bawah 100%		- Tidak adanya kewajiban pasangan nonmuslim untuk memiliki akta nikah - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta nikah - Akta nikah tidak lagi menjadi syarat pembuatan akta kelahiran
7.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Sejak tahun 2020 hingga 2023, tingkat keaktifan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Jembrana hanya 9,80%	Rendahnya tingkat keaktifan lembaga swadaya masyarakat	Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) belum optimal
		Personel yang berkompeten relatif sedikit	Kurangnya personel yang berkompeten	Kurangnya anggaran untuk pelatihan serta pengadaan prasarana dan sarana
		Pemanfaatan potensi perekonomian desa belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa	- Kurangnya pelatihan pengembangan teknologi tepat guna - Kurangnya personel yang berkompeten - Peran KPM dan KPMD belum optimal - Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal - Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat
8.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pasangan usia subur (PUS) tidak ingin anak lagi dan PUS ingin anak tapi ditunda/PUS yang tidak terlayani KB di tahun 2023 (<i>unmet need</i>), yaitu 9,90%	Tingginya persentase PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	- Belum ditemukannya alat kontrasepsi yang cocok oleh PUS - Adanya rasa enggan pasangan usia subur untuk menggunakan KB metode kontrasepsi jangka panjang - Adanya anggapan ber-KB menyalahi perintah agama - Kurangnya partisipasi laki-laki ber-KB - Belum optimalnya inovasi dan keaktifan kelompok UPPKA dalam peningkatan pendapatan keluarga - Rendahnya cakupan rumah dataku
		Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang belum mencapai 100%	Rendahnya persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang	
		Rasio akseptor KB hanya mencapai 71,04 di tahun 2023	Rendahnya rasio akseptor KB	
		Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB belum mencapai 100%	Rendahnya cakupan anggota bina keluarga lansia	Adanya anggapan ber-KB menyalahi perintah agama
		Angka kelahiran remaja per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun masih cukup tinggi, yaitu 25,30 pada tahun 2023	Tingginya jumlah kasus pernikahan usia dini	- Masih adanya perempuan dengan latar belakang keluarga yang tidak sejahtera sehingga berkenan untuk dikawinkan - Belum optimalnya pengembangan layanan peningkatan kualitas keluarga

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun masih cukup tinggi, yaitu 6,61% pada tahun 2023		dan pemenuhan hak-hak anak; lembaga yang baru ada, yaitu P2TP2A • Belum optimalnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan
9.	Perhubungan	Jumlah penumpang angkutan umum cenderung menurun	Belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum	• Banyaknya kepemilikan kendaraan • Banyaknya transfer yang tidak efisien • Persaingan dengan ojek <i>online</i> • Kurang partisipasi agen travel/wisata
		Persentase layanan angkutan umum relatif rendah		Kurangnya investasi
		Persentase kepemilikan kir angkutan umum relatif rendah		• Belum tersedianya alat kelengkapan uji dan sistem BLU-e • Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan kir • Kurang optimalnya pengawasan kir
		Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	• Kurangnya peran serta masyarakat dalam penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas • Belum tersedianya pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi • Rendahnya rasio ketercukupan kelengkapan jalan
		Penyelenggaraan parkir belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan parkir	• Belum optimalnya pengelolaan parkir • Kurangnya alat parkir berbasis elektronik
10.	Komunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi di bawah 100%	Kurang meratanya layanan telekomunikasi	Topografi wilayah sulit dijangkau dan persebaran penduduk tidak merata mengakibatkan investor kurang berminat untuk menanamkan investasi di bidang telekomunikasi
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet di bawah 100% (masih di bawah Provinsi Bali)	Kurang meratanya akses internet	Mahalnya biaya layanan internet dan sedikitnya pilihan layanan internet <i>broadband</i> di dataran tinggi
		Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	• Kurangnya penyebaran informasi dan kerja sama dengan media massa • Rendahnya kapasitas kelembagaan • Kurang memadainya aplikasi, perangkat keras, dan keahlian; ketertinggalan teknologi
		Penyelenggaraan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Ketersediaan data statistik belum optimal	Belum optimalnya penyediaan data statistik dalam perencanaan dan pembangunan daerah	• Belum tersedianya standar data untuk produsen data sektoral • Belum tersedianya meta data pada setiap data sektoral • Belum tersedianya aplikasi <i>single entry</i> untuk produsen data unit terkecil • Kurangnya kesadaran pengumpulan data tepat waktu dari produsen data
11.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Persentase koperasi aktif di bawah target, yaitu 77,78% pada tahun 2023	Rendahnya jumlah koperasi aktif	• Adanya koperasi yang menghentikan usaha dan belum membuat laporan pertanggungjawaban • Ketidadaan pengurus dan regenerasi pengurus
		Persentase UKM non-BPR/LKM aktif di bawah 100%	Rendahnya jumlah UKM non-BPR/LKM aktif	
		Persentase BPR/LKM aktif di bawah 100%	Rendahnya jumlah BPR/LKM aktif	
		Kualitas dan daya saing koperasi relatif rendah	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi	• Minimnya pengetahuan pengelola koperasi tentang perkoperasian: tata kelola, manajemen, dan hukum • Sistem yang digunakan masih tradisional dan minimnya pengetahuan personel koperasi tentang digitalisasi • Kurangnya jumlah pendamping koperasi
		Kualitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) relatif rendah	Rendahnya kualitas dan daya saing UMKM	• Rendahnya kualitas pelaku UMKM • Kurangnya kualitas pelaku UMKM dalam menganalisis dan mengakses informasi pasar serta penggunaan teknologi digital • Rendahnya kualitas produk pedagang pasar rakyat dibanding toko modern • Ketidaksiapan pelaku UMKM menerima pendampingan • Variatifnya harga antar pedagang dengan produk yang sama
12.	Penanaman modal	Nilai serapan investasi masih rendah dan Kurang pemahaman pelaku usaha dalam tata cara pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Rendahnya serapan investasi dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penyusunan LKPM	• Kewenangan perizinan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten, tetapi ada kewenangan provinsi dan kewenangan pusat • Kurangnya pendampingan dalam peng-<i>input</i>-an pelaporan LKPM
		Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Jembrana	Rendahnya daya tarik investor	• Belum memadainya peraturan tata ruang • Sulitnya akses • Kurangnya peraturan yang mendukung percepatan investasi

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Masih Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi perizinan berbasis <i>online</i>	Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap proses perizinan berbasis <i>online</i>	Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi, khususnya terkait perizinan berbasis <i>online</i>
		Kurang tersedianya data peluang investasi Penanaman Modal	Minimnya ketersediaan data peluang investasi penanaman modal	
		Proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang belum berbasis elektronik	Proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kurang efektif dan efisien	
		Belum optimalnya pelaksanaan mal pelayanan publik	Belum optimalnya pelaksanaan mal pelayanan publik	- Kurangnya pegawai yang memberikan layanan sesuai dengan kompetensi - Kurangnya ketersediaan anggaran untuk memenuhi pegawai sebagai penyelenggara layanan
13.	Kepemudaan dan olahraga	Persentase keaktifan organisasi pemuda cenderung turun	Kurangnya keaktifan organisasi pemuda	- Kurangnya sosialisasi pentingnya dan peran serta pemuda dalam berorganisasi - Kurangnya pembinaan pemuda untuk meningkatkan pemuda pelopor
		Persentase wirausaha muda di bawah target	Kurangnya minat generasi muda untuk berwirausaha	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap wirausaha muda
		Cakupan pelatih yang bersertifikasi di bawah 100%	Belum semua pelatih tersertifikasi	Keterbatasan pendanaan
		Kurangnya pelaksanaan acara olahraga daerah	Kurangnya pelaksanaan acara olahraga daerah	
14.	Statistik	Persentase integrasi sistem informasi perangkat daerah di bawah 100%	Tidak optimalnya integrasi sistem informasi perangkat daerah	- Aplikasi umum berbagi pakai milik Pusat belum menyediakan layanan penghubung (API) yang bisa digunakan oleh daerah - Kurangnya personel
15.	Persandian	Terbatasnya prasarana dan sarana	Terbatasnya prasarana dan sarana	Kurangnya anggaran
16.	Kebudayaan	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di bawah target	Belum optimalnya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	- Belum ada tim ahli cagar budaya, meskipun terdapat progres Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya dari Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan pada tanggal 2-5 Juli 2024 - Minimnya ketersediaan data, dokumentasi, dan kajian akademis terkait pelestarian budaya
17.	Perpustakaan	Jumlah dan rasio pengunjung perpustakaan relatif rendah	Belum optimalnya layanan perpustakaan	Kompetensi tenaga perpustakaan masih kurang

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Rasio perpustakaan cenderung menurun		Minat baca masyarakat masih rendah
18.	Kearsipan	Adanya perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku	Belum optimalnya pengelolaan arsip oleh perangkat daerah	- Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah karena tidak ada unit khusus pengelola arsip - Kurangnya personel
Fokus Layanan Urusan Pilihan				
1.	Kelautan dan perikanan	Konsumsi ikan di bawah standar	Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat - Naiknya harga ikan karena kenaikan harga pakan
		Cakupan bina kelompok nelayan di bawah target	Belum optimalnya pembinaan kelompok nelayan	Kurangnya personel
2.	Pariwisata	Lama menginap wisatawan hanya satu hari	Sebentarnya lama menginap wisatawan	- Aksesibilitas belum memadai - Amenitas belum merata - Fasilitas penunjang wisata belum memiliki <i>money changer</i> - Aktivitas wisata kurang variatif dan inovatif - Terbatasnya pilihan paket tur - Lemahnya peraturan dan sinergi antar pemangku kepentingan - Belum optimalnya promosi wisata
3.	Pertanian	Cakupan bina kelompok tani di bawah target	Belum optimalnya pembinaan kelompok tani	
4.	Perdagangan	Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun 2023	Menurunnya nilai ekspor bersih perdagangan	- Berkurangnya permintaan terhadap ikan kaleng dari luar negeri - Bahan baku sarden, seperti ikan lemuru sulit didapatkan karena faktor cuaca dan iklim yang tidak menentu
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Jembrana menunjukkan tren penurunan yang signifikan	Menurunnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kesulitan modal usaha
5.	Perindustrian	Daya saing industri relatif rendah	Rendahnya daya saing industri	- Kurangnya kualitas sumber daya industri - Kurangnya ketersediaan data dan informasi - Peraturan sering berubah - Pemahaman peraturan relatif kurang
Fokus Pendukung Urusan				
1.	Sekretariat Daerah		Kurangnya kualitas layanan dan kapasitas personel	Belum optimalnya kompetensi personil dalam pelayanan publik
2.	Sekretariat DPRD	Pelaksanaan Tri Fungsi Dewan belum optimal	Belum optimalnya layanan terhadap DPRD	Rendahnya pemahaman anggota DPRD

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Belum optimalnya personel dalam fasilitasi kegiatan DPRD		Kurangnya kualitas personel yang tidak mengikuti perkembangan zaman
		Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas		Menurunnya kualitas prasarana dan sarana
Fokus Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan	Belum semua capaian indikator program, kegiatan, dan subkegiatan mencapai 100%	Belum optimalnya pencapaian target indikator, kegiatan, dan subkegiatan	- Belum maksimalnya penyusunan indikator kinerja utama dan daerah (belum optimalnya perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja yang <i>spesific, measurable, achievable, relevant, and time-bound</i>) - Belum optimalnya ketersediaan data
2.	Keuangan	Persentase SILPA relatif tinggi	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	- Sebagian besar anggaran kas posisinya berada di triwulan IV - Tingginya SILPA tahun sebelumnya
3.	Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Belum semua pegawai dan pejabat aparatur sipil negara mengikuti pendidikan dan pelatihan	Belum optimalnya perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan sistem kebutuhan informasi ASN terintegrasi	
4.	Penelitian dan pengembangan	Kerja sama sumber daya riset dan inovasi dengan semua pemangku kepentingan belum optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	- Belum maksimalnya koordinasi - Belum maksimalnya fasilitasi hak kekayaan intelektual
		Penggunaan hasil riset untuk pembangunan belum optimal		- Belum optimalnya data hasil riset - Perubahan peraturan dan kebijakan dalam perencanaan riset dan inovasi
		Kurangnya pendanaan		Bergantung pada dana alokasi umum
Fokus Pengawas Urusan				
1.	Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan BPK masih belum mencapai 100%	Belum optimalnya proses tindak lanjut BPK	Terdapat temuan BPK dari tahun tahun sebelumnya yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
		Masih ditemukan kasus temuan BPK	Terdapat kasus penemuan BPK	- Masih minimnya tenaga fungsional pengawas sehingga pengawasan terhadap perangkat daerah belum maksimal di samping banyaknya penugasan <i>mandatory</i> dari KPK dan BPKP - Kurangnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Masih banyak perangkat daerah yang belum mendapat jadwal pengawasan	Minimnya jumlah pejabat fungsional (auditor dan pengawas pemerintahan)	Belum adanya formasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Fokus Kewilayahan				
1.	Kecamatan Melaya	Administrasi kependudukan kurang tertib	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Melaya	Banyaknya pendatang yang administrasi kependudukannya tidak lengkap dilaporkan
		Ketersediaan infrastruktur relatif kurang		Kurangnya anggaran
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan hasil musyawarah pembangunan belum selaras		Usulan masyarakat lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur
		Penegakan peraturan belum optimal		Kurangnya personel
		Penerima beras cadangan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi riil		Kurangnya <i>update</i> data dari Pusat
2.	Kecamatan Negara	Pelaksanaan lomba terkait hari besar nasional belum optimal	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Negara	
		Penyediaan infrastruktur tidak sesuai dengan perencanaan		
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan hasil musyawarah pembangunan belum selaras		Usulan masyarakat lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur
		Penegakan peraturan belum optimal		Kurangnya personel
		Penerima beras cadangan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi riil		Kurangnya <i>update</i> data dari Pusat
		Administrasi kependudukan kurang tertib		Banyaknya pendatang yang administrasi kependudukannya tidak lengkap dilaporkan
3.	Kecamatan Mendoyo	Administrasi kependudukan kurang tertib	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Mendoyo	Banyaknya pendatang yang administrasi kependudukannya tidak lengkap dilaporkan
		Masyarakat kurang tanggap bencana		Kurangnya pengetahuan masyarakat

No.	Bidang Urusan	Indikasi Masalah	Masalah	Sebab Masalah
		Minat baca masyarakat terkait keragaman budaya relatif rendah		Banyaknya budaya baru yang hadir
		Penegakan peraturan belum optimal		Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
		Komunikasi yang tidak optimal		Kurangnya informasi, baik pemberi maupun penerima layanan
4.	Kecamatan Jembrana	Penertiban umum belum optimal	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Jembrana	Kurangnya personel
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan hasil musyawarah pembangunan belum selaras		
		Administrasi kependudukan kurang tertib		Banyaknya pendatang yang administrasi kependudukannya tidak lengkap dilaporkan
		Komunikasi yang tidak optimal		Kurangnya informasi, baik pemberi maupun penerima layanan
5.	Kecamatan Pekutatan	Jumlah personel relatif sedikit	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan Pekutatan	Kurangnya personel
		Komunikasi yang tidak optimal		Ribetnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan
		Kendala dalam proses perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan pembangunan	Kurangnya personel
		Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi rencana serta partisipasi publik		
Fokus Urusan Pemerintahan Umum				
1.	Kesatuan bangsa dan politik	Partisipasi pemilih mencapai 81,35%	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Kurangnya personel
		Jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar relatif sedikit	Belum optimalnya pendaftaran ormas	Kurangnya kesadaran ormas untuk mendaftarkan organisasinya

Sumber: RPJMD Kabupaten Jembrana, 2024

2.3.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis daerah diidentifikasi berdasarkan permasalahan di bagian sebelumnya. Selain itu, isu strategis daerah perlu memperhatikan isu strategis pada konteks yang lebih luas (global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis selanjutnya mendasari penyusunan program prioritas.

2.3.2.1. ISU GLOBAL

A. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengancam kestabilan ekosistem. Selain itu, perubahan iklim pun turut berdampak pada kehidupan manusia. Kelangkaan dan persaingan terhadap kebutuhan dasar (pangan, air, dan energi) menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perubahan iklim meningkatkan potensi kejadian bencana, cuaca ekstrem, dan *biodiversity loss*.

Hingga tahun 2030, Indonesia dalam Perjanjian Paris telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% (mandiri) dan 41% (didukung negara lain). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan potensi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030. Sejalan dengan hal ini, Provinsi Bali menargetkan pencapaian emisi nol bersih lebih cepat selama 15 tahun dibanding target Indonesia pada dokumen *Bali Net Zero Emission*.

B. Demografi Global dan Bonus Demografi

Dinamika demografi global membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi serta persaingan dan perebutan sumber daya alam, terutama dengan meningkatnya kebutuhan dan standar hidup manusia. Di tingkat nasional, dinamika demografi membawa ke arah bonus demografi. Artinya, ke depan (hingga tahun 2035), Indonesia akan memiliki persentase angkatan kerja yang lebih tinggi. Seiring dengan itu, persentase penduduk tidak produktif (lanjut usia) turut bertambah. Hal ini berpengaruh terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, Kabupaten Jembrana perlu mengoptimalkan pembukaan lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset, dan pemberdayaan masyarakat.

C. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi

Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan masih tetap kuat pada kisaran 3,00% per tahun. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja perekonomian dunia, pemulihan ekonomi pascapandemi, permintaan domestik yang kuat, dan peningkatan aktivitas bisnis. Sejalan dengan itu, inflasi global diproyeksikan menurun berangsur-angsur akibat pengetatan kebijakan moneter, pelonggaran pasar tenaga kerja, dan penurunan harga

energi. Meskipun demikian, konfrontasi geoekonomi, krisis utang, dan gelembung aset (*asset bubble burst*) perlu diwaspadai. Selain itu, menurunnya ketidakpastian iklim global berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.

Sejalan dengan kondisi global, ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan kecepatan stabil dan inflasi terkendali. Hal ini ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan daya beli masyarakat, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, percepatan digitalisasi, hilirisasi berbagai produk/komoditas, peningkatan standar kualitas produk, dan keberlanjutan proyek strategis nasional. Meskipun demikian, perlu mewaspadai ketidakpastian beberapa aspek ekonomi global.

D. Perkembangan Teknologi

Dua dekade terakhir ditandai dengan percepatan perkembangan teknologi. Berbagai inovasi muncul mewarnai kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi tersebut, pada dasarnya, membawa hal baik, yaitu memudahkan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pembangunan. Meskipun menjadi peluang pembangunan, perkembangan teknologi juga dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila sumber daya manusia yang dimiliki belum mampu mengoperasikan dan beradaptasi dengan perangkat dan teknologi tersebut. Selain itu, ancaman terhadap keamanan data dan risiko kegagalan keamanan siber perlu diwaspadai.

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat komitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Percepatan transisi EBT didukung dengan iklim riset dan perkembangan teknologi yang baik dan cepat. Selain itu, transisi EBT diiringi dengan pemerataan distribusi energi melalui *national grid*.

E. Isu Strategis Kewilayahan untuk Provinsi Bali

Isu strategis kewilayahan untuk Provinsi Bali berdasarkan RPJMN Tahun 2025–2029, yaitu:

- a. tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena sebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara barat dan timur Pulau Bali;
- b. tingginya kerentanan dan potensi bencana;
- c. degradasi lingkungan, seperti penurunan muka tanah daerah aliran sungai dan polusi udara akibat aktivitas industri;
- d. belum optimalnya pemanfaatan teknologi di sektor pertanian;
- e. belum optimalnya pengurangan pengangguran karena *mismatch* antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pemberi kerja; dan

- f. belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong kemiskinan dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

F. Isu Strategis Transformasi Pembangunan

Isu strategis transformasi pembangunan dijabarkan dalam lima aspek. Kelima aspek tersebut, yaitu sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.46 Isu Strategis Transformasi Pembangunan

Transformasi Sosial		
Kesehatan untuk Semua	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Angka kematian ibu masih tinggi (189/100.000)	Layanan pendidikan belum merata	Akurasi program bantuan sosial relatif rendah
<i>Stunting</i> masih tinggi (21,60%)	Kualitas pendidikan relatif rendah	Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
Prevalensi obesitas (21,80%)	Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru relatif terbatas	Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
Kasus baru tuberkulosis peringkat kedua di dunia	Kualifikasi pendidikan angkatan kerja relatif rendah	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan relatif rendah
Kasus kusta peringkat ketiga di dunia	Kualitas lulusan masih rendah sehingga produktivitas dan daya saingnya relatif rendah	Integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan belum optimal
51,14% puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Daya saing perguruan tinggi di tingkat global relatif rendah	Program Jaminan Sosial belum optimal
24,70% RSUD Kelas C belum memiliki tujuh dokter spesialis dasar dan penunjang		
36,50% rumah sakit terakreditasi paripurna 56,40% fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi		

Transformasi Ekonomi		
Industri	Pariwisata	Ekonomi Kreatif
Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan proporsi produk domestik bruto sektor industri pengolahan dari 32,00% (2022) menjadi 18,30% (2023)	Destinasi pariwisata menghadapi masalah degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat <i>overtourism</i> dan akulturasi budaya dari wisatawan	Ekosistem kekayaan intelektual belum optimal: - indeks kekayaan intelektual Indonesia berada di peringkat 50/55 dan di bawah rata-rata Asia (2023); dan - pilar komersialisasi kekayaan intelektual menempati skor terendah, yaitu 2,50/100,00
Produktivitas tenaga kerja relatif rendah; produktivitas tenaga kerja Indonesia pada tahun 2020 setara dengan produktivitas tenaga kerja Jepang pada tahun 1960-an	Amenitas, aksesibilitas, dan atraksi pelaksana kaidah pariwisata berkelanjutan relatif terbatas	Ketersediaan data ekonomi kreatif yang sangat terbatas, sedangkan peranan data sangat penting untuk menyusun kebijakan
Kompleksitas dan daya saing produk; produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk <i>knowledge intensive</i>	Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata yang tidak berfokus pada kepuasan pengalaman	Kelembagaan ekonomi kreatif belum optimal, terutama untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual
Adopsi teknologi kian masif, sedangkan tenaga kerja di industri pengolahan masih didominasi oleh <i>unskilled labour</i> (89,30% pada tahun 2022) dan hanya 18,60% lulusan pendidikan tinggi yang berasal dari program sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika	Pengeluaran wisatawan relatif rendah karena rendahnya investasi dan pilihan kegiatan wisata	Daya saing sumber daya manusia ekonomi kreatif relatif rendah, terutama terkait komersialisasi kekayaan intelektual
<i>Mismatch</i> antara produksi dengan permintaan global, contohnya Indonesia mengekspor produk HS-85 yang permintaannya melambat sejak 5 tahun terakhir	Keterampilan sumber daya manusia pariwisata dan pemanfaatan ekonomi pariwisata oleh masyarakat lokal relatif rendah	Rantai pasok ekonomi kreatif belum optimal, terutama di daerah
Kemampuan inovasi relatif rendah; Indonesia berada di peringkat 75/132 negara dalam Global Innovation Indeks pada tahun 2022	Ekonomi Biru	Pengelolaan Hutan Lestari
Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60%	Produktivitas ekonomi di sektor perairan relatif rendah; produk domestik bruto sektor maritim hanya 7,60% pada tahun 2021	Kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto relatif rendah
Ekonomi Sirkular Industri	Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi sehingga peringkat nilai <i>open hydrogen initiative</i> Indonesia adalah 127/221	Produktivitas hasil hutan kayu dan nonkayu relatif rendah
Pemanfaatan limbah hasil sisa pembakaran di pembangkit listrik tenaga uap belum optimal	Prevalensi kemiskinan masyarakat pesisir yang tinggi, yaitu 4,19% pada tahun 2021 (persentase nasional adalah 4,00%)	Bioekonomi sektor kehutanan belum berkembang

Transformasi Ekonomi		
Industri	Pariwisata	Ekonomi Kreatif
Kapasitas pengolahan limbah domestik relatif rendah	Tuntutan pembangunan berkelanjutan yang melihat kemajuan secara holistik dari tiga sisi	Tata batas kawasan hutan belum tuntas
Tingkat pengumpulan sisa material untuk suplai industri daur ulang relatif rendah	Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat melalui perhutanan sosial belum ideal
Ketergantungan terhadap bahan baku kritis industri	Keterkaitan usaha mikro, kecil, dan menengah pada rantai nilai produksi serta penggunaan teknologi dan inovasi usaha relatif rendah, sejalan dengan jumlah koperasi yang beroperasi di sektor riil	Kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan relatif terbatas
Pemanfaatan limbah B3 untuk bahan bakar dan bahan baku industri relatif terbatas	Ketenagakerjaan	Perizinan dan persetujuan bisnis belum efektif
Industri yang menerapkan standar industri hijau relatif terbatas	Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (di bawah rata-rata Asia Tenggara)	Keterlibatan multisektor belum optimal
Desain produk dan kemasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri daur ulang	Badan Usaha Milik Negara	Percepatan Transisi Energi
Kesadaran industri pariwisata terhadap penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasionalnya relatif rendah	Kinerja relatif rendah: <i>return on asset</i> pada tahun 2022 adalah 3,05% dengan kontribusi Rp573,6 triliun terhadap penerimaan negara pada tahun 2021	Ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terus menurun
Fasilitas pengumpulan sisa produk dan material tekstil dan elektronik relatif kurang	Daya saing relatif rendah: kurang dari sepuluh perusahaan yang masuk peringkat global dan rendahnya total aset <i>turnover</i> (0,30%; 2022)	Emisi gas rumah kaca sektor energi yang tinggi, terutama pembangkit dan transportasi
Standar operasional pengelolaan limbah sisa konstruksi belum ada	Peran dalam pembangunan: rasio belanja modal hanya 1,30% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2022 dan rendahnya rasio tujuan sosial dan lingkungan (1,50% pada tahun 2022)	Potensi energi terbarukan yang sangat besar, sedangkan pemanfaatannya kecil
Rantai pasok bahan baku sirkular yang terintegrasi belum ada	Tenaga Kerja Hijau	Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
Beberapa material membutuhkan teknologi tinggi untuk didaur ulang	Pemahaman mengenai pekerjaan hijau (<i>green jobs</i>) relatif rendah	Dukungan pendanaan transisi energi relatif terbatas
Tata kelola terkait ekonomi sirkular belum optimal	Data dan informasi mengenai pasar kerja hijau relatif terbatas	Pemanfaatan energi baru belum berkembang
Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kebijakan dan peraturan terkait pekerjaan hijau belum terintegrasi	Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil dan keterbatasan sistem penyaluran

Transformasi Ekonomi		
Industri	Pariwisata	Ekonomi Kreatif
Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal - Pembangunan wilayah tidak merata - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan	Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau belum memadai	Ketimpangan dan rendahnya kualitas pelayanan ketenagalistrikan
Pemenuhan layanan perkotaan yang belum memadai dan inklusif - Hanya daerah perkotaan di 14 provinsi memiliki akses kurang dari 500 meter terhadap <i>shelter</i> angkutan umum - Rumah tangga perkotaan mendiami rumah layak huni hanya sebesar 63,45% dan dengan akses air minum sebesar 41,95%	Akses pendanaan dan insentif dalam pengembangan pekerjaan hijau belum memadai	Ketergantungan pada produksi impor
Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif - Peran pemerintah provinsi dalam mendorong kerja sama pengelolaan kawasan metropolitan masih rendah - Dari 2.000 RDTR di 514 kabupaten/kota, baru tercapai 357 RDTR, dengan 40 RDTR merupakan RDTR kota otonom	Panduan dan model pengembangan pekerjaan hijau relatif terbatas, baik di tingkat nasional maupun daerah	Tata kelola ketenagalistrikan, belum optimal termasuk tarif dan harga
Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan - Angka indeks gini perkotaan adalah 0,409; lebih tinggi dibandingkan perdesaan - Terdapat 47,62% lapangan kerja informal di perkotaan - Tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 7,29%	Peran dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pengembangan pekerjaan hijau relatif lemah	Rantai nilai domestik penduduk transisi energi relatif terbatas
Pola pembangunan perkotaan yang menyerak - Sumber utama urbanisasi adalah reklasifikasi desa menjadi kota sebesar 43% pada tahun 2000–2010 - Pertumbuhan kawasan terbangun pinggiran kota berciri perdesaan sebesar 62,9% karena tumbuh industri dan aglomerasi penduduk baru	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Adopsi dan adaptasi perkembangan teknologi serta digitalisasi relatif terbatas

Transformasi Ekonomi		
Industri	Pariwisata	Ekonomi Kreatif
Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana 75% kawasan perkotaan Indonesia berada di daerah pesisir, rentan banjir, dan kenaikan muka air - Kecenderungan keberhasilan pengurangan risiko bencana lebih besar terjadi di kota besar dibandingkan kota kecil	Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas - Pusat pertumbuhan masih berfokus di Jawa - Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum terintegrasi - Kinerja sistem logistik nasional belum optimal - Pembangunan wilayah tidak merata - Ketimpangan pembangunan antardaerah dan kebutuhan pendekatan	Digital
	Perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global belum optimal <i>Supply side:</i> - Keterkaitan rantai nilai antarwilayah masih rendah serta ekspor serta terpusat di Pulau Jawa <i>Awareness</i> daerah untuk diversifikasi ekspor relatif rendah - Daya saing ekspor domestik relatif rendah - Pembiayaan ekspor masih terhambat - Fasilitasi dan informasi terkait perdagangan belum terintegrasi - Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan jasa - Sektor jasa memiliki regulasi yang saling tumpang tindih - Standarisasi produk ekspor belum optimal - Ekosistem persaingan usaha belum optimal <i>Demand side:</i> - Daya saing produk sektor jasa relatif rendah - Minat pelaku industri sektor jasa yang masih rendah untuk masuk ke dalam pasar global. - Adanya kebijakan dekarbonisasi di beberapa negara - Peningkatan kebijakan proteksionisme serta <i>trade barriers</i> yang tinggi (bea masuk, NTMs) di beberapa negara	Kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional belum optimal 78% ekonomi nasional terpusat di Jawa dan Sumatera - Setiap 1% peningkatan proporsi penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 1996–2016 hanya mampu mendorong peningkatan produk domestik bruto per kapita sebesar 1,4% dibanding Tiongkok (3%)

Transformasi Ekonomi		
Industri	Pariwisata	Ekonomi Kreatif
	Penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global belum optimal • Infrastruktur yang belum memadai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. • Kekurangan pembiayaan, terutama di daerah dengan sumber daya keuangan terbatas • Perlunya pasar yang kuat untuk mendukung investasi • Biaya tinggi dan hambatan dalam menarik investasi	Digitalisasi sektor strategis • Terdapat layanan pendidikan dan kesehatan belum berinternet • Penguatan pemerintah digital (sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia) • Adopsi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih rendah (<i>e-commerce</i>) • Inovasi dan pengembangan keuangan digital (<i>fintech</i>) • Pengelolaan destinasi wisata, pertanian, perikanan, logistik dan industri berbasis teknologi
	Daya dukung tercapainya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global perlu diperkuat • Masih terdapat regulasi yang menghambat perbaikan iklim berusaha • Investasi produktif dan berkualitas yang mendukung upaya transformasi ekonomi relatif terbatas • Tumpang tindih peraturan dan birokrasi yang menghambat pembangunan infrastruktur • Koordinasi cermat diperlukan dalam integrasi moda transportasi	Aspek pendukung dan akselerator transformasi digital • Keamanan siber nasional • Perlindungan data pribadi dan privasi • Literasi digital masyarakat belum merata • Penyediaan sumber daya manusia dan talenta digital berkualitas untuk menguasai dan menerapkan adopsi teknologi • Pemanfaatan <i>artificial intelligence</i>, <i>big data analytics</i>, dan <i>blockchain</i>

Transformasi Tata Kelola		
Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Sistem Penggajian Tunggal	Manajemen Talenta
Akses pelayanan publik bagi masyarakat belum merata	Kesejahteraan aparatur sipil negara yang adil, layak, dan kompetitif belum terwujud	Hiperregulasi; kewenangan regulasi yang tersebar, belum memadai sumber daya manusia regulasi, dan partisipasi yang belum optimal
Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan	Kualitas Regulasi	Integrasi Proses Bisnis
Sistem penilaian kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas belum ada	Manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (isu transformasi manajemen aparatur sipil negara) belum ada	Proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi belum terintegrasi

Transformasi Tata Kelola
Integritas Partai Politik
Integritas partai politik (parpol) belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal)

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia		
Stabilitas Makro	Politik Luar Negeri	Keamanan
Risiko <i>climate action</i> ; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang, konfrontasi geoekonomi; <i>asset bubble burst</i> ; inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga <i>higher for longer</i> ; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi	Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren global <i>economic decoupling</i> ; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.	Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan infrastruktur informasi vital nasional dari serangan siber
Pertahanan	Hukum	Demokrasi
Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata <i>chemical, biological, radioactive, nuclear and high yield explosive</i> , termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya	Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan hak asasi manusia; rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; dan kelembagaan penegak hukum yang belum profesional	Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) permasalahan politik elektoral seperti, politik uang, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan; (5) fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; dan (6) nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang belum terinternalisasi

Ketahanan Sosial, Budaya, Dan Ekologi		
Isu Agama	Isu Budaya	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global	Peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda belum optimal

Ketahanan Sosial, Budaya, Dan Ekologi		
Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2023 sebesar 76,02	Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal
Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan	Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2022 sebesar 55,13	Ketimpangan gender relatif tinggi
		Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud
Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Energi	Pangan
Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun; indeks kesehatan laut (<i>open hydrogen initiative</i>) Indonesia masih rendah (63) atau berada di peringkat 152/220 sehingga biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan tinggi	Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah	Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan
Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal	Pangsa pemanfaatan energi baru-terbarukan dalam bauran energi nasional yang masih kecil	Peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi
Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status tempat pemrosesan akhir sampahnya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku	Efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik	Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
Laju kepunahan spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir; saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.	Kurangnya eksplorasi	Tingginya fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antarwilayah
	Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam permasalahan pengelolaan energi	Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025–2029

2.3.2.2. ISU NASIONAL

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sehingga terdapat keterpaduan antara kebijakan nasional, regional, dan daerah.

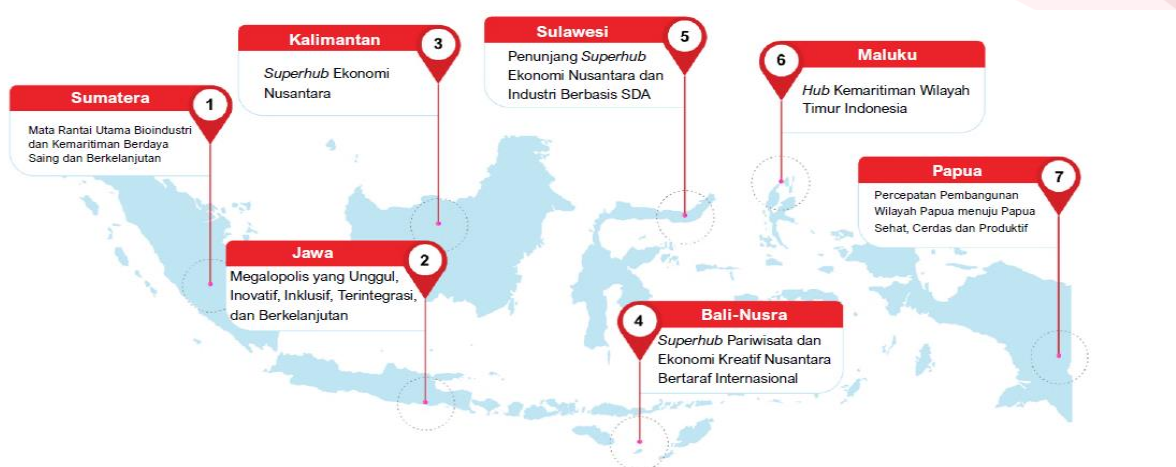
RPJMN 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan, mencakup berbagai isu strategis yang berskala nasional dan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam konteks Kabupaten Jembrana, kebijakan pembangunan tidak hanya mempertimbangkan arah pembangunan nasional, tetapi juga memperhatikan strategi pembangunan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Bali sebagai bagian dari kebijakan regional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Jembrana 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan sinergi kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah guna memastikan pencapaian pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Melalui dokumen ini, berbagai program dan strategi pembangunan yang diusulkan akan berfokus pada upaya pencapaian visi daerah dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Jembrana dapat berjalan secara efektif, efisien, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah secara simultan. Arah kebijakan yang dimaksud dijelaskan dalam penjabaran di bawah ini.

A. Arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2025-2029

Pembangunan wilayah dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan wilayah dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, baik di tingkat nasional maupun regional. Dalam konteks ini, intervensi pembangunan dilakukan melalui pendekatan kewilayahan yang mencakup penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar, serta pengelolaan pusat pertumbuhan guna mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam mengatasi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta memperkuat sinergi antara pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan pusat pertumbuhan dalam mendukung target pembangunan nasional.

1) *Highlight* Intervensi Pembangunan Kewilayahan pada Sasaran, Tema, dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah



Gambar 2.229 Pemetaan Intervensi Pembangunan Kewilayahan

Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

Pembangunan wilayah memiliki peran sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengurangan kemiskinan menuju 0 persen, dan peningkatan kualitas SDM menuju unggul. Dalam mendukung pencapaian target pembangunan tersebut, dilakukan pembangunan melalui pendekatan kewilayahan di mana terdapat wilayah afirmasi dan perdesaan serta pusat pertumbuhan. Sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan, berbagai kebijakan kewilayahan tersebut juga berperan dalam upaya mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia–Kawasan Timur Indonesia.



Gambar 2.230 Pemetaan Perspektif Pembangunan Kewilayahan

Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan highlight intervensi umum dan khusus pembangunan wilayah tahun 2025–2029 berikut ini.

a) Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah

- Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- Penataan otonomi daerah yang mewujudkan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, kebijakan kerja sama antar multiaktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah).

- Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial.
- Penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah.
- Percepatan pelaksanaan reforma agraria, sertifikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah publikasi/stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

Infrastruktur dan Layanan Dasar

- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA) dan akses SMP/MTs/ sederajat, atau SMA/MA/ sederajat bagi provinsi dengan capaian PAUD yang cukup tinggi.
- Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim melalui penyediaan dan optimalisasi infrastruktur, penataan tata kelola, serta promosi dan edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
- Pengembangan konektivitas pendukung layanan dasar serta pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi termasuk peningkatan SDM Transportasi.
- Pemantapan fondasi keberlanjutan dan produktivitas sumber daya air.
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular.
- Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna melalui sarana dan prasarana publik berketahanan bencana.

b) Pendekatan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan. Untuk itu, didorong

pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi wilayah serta pembangunan di daerah afirmasi. Selain itu terdapat wilayah otonomi khusus yang menggambarkan kebijakan kewilayahan asimetris.

Prioritas intervensi Kebijakan pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan. Selain itu, Peningkatan Pengelolaan Urbanisasi, Perkotaan, dan Pusat Pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, percepatan pembangunan Papua juga menjadi perhatian khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pembangunan Daerah Afirmasi dan Perdesaan

- Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas.
- Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil, dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama.
- Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan
- Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

- Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Wilayah Papua:
 - Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat
 - Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama
 - Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing

Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

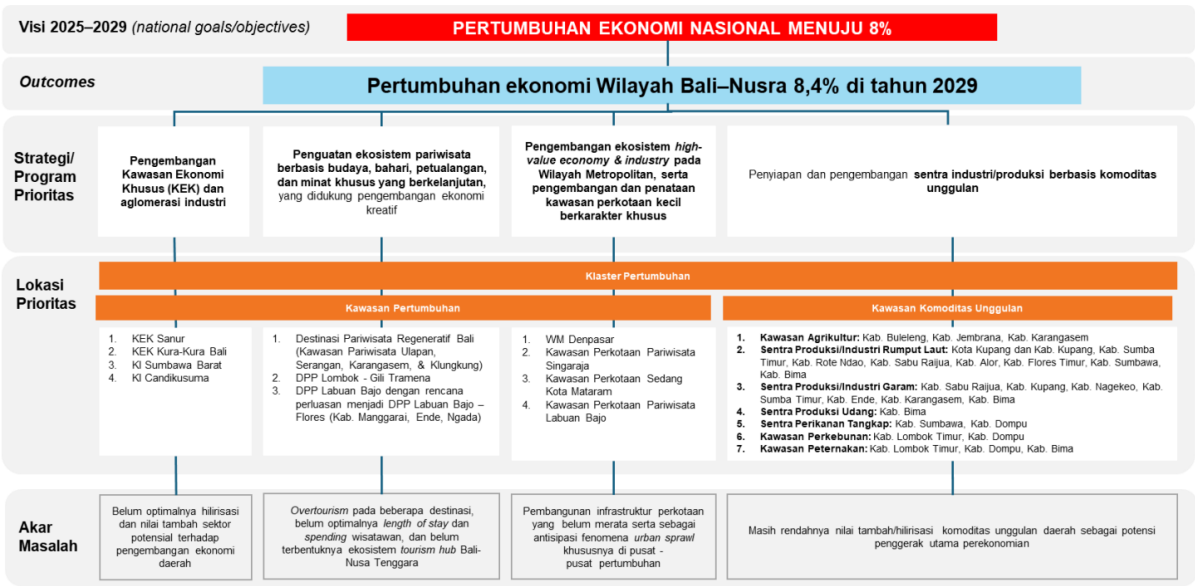
- Pengelolaan urbanisasi melalui penataan wilayah metropolitan, pembangunan kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan utamanya melalui percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial, penyediaan konektivitas transportasi dan komunikasi yang memadai, serta pembentukan kelembagaan yang adaptif.
- Pengembangan pusat pertumbuhan baru dilakukan dengan fokus pada pengembangan pusat pertumbuhan baru serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting melalui pengembangan potensi keunggulan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, penyediaan SDM berkualitas, serta penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan
- Penuntasan dan pemanfaatan PSN melalui percepatan pelaksanaan PSN, evaluasi dan penyiapan *carry over* PSN selanjutnya serta penguatan kerja sama pengelolaan PSN.

B. Arah Kebijakan Nasional Untuk Provinsi Bali dalam RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan nasional untuk Provinsi Bali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mencapai visi pembangunan nasional. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,4 persen pada tahun 2029, strategi pembangunan di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup pengembangan kawasan ekonomi khusus, penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan sektor industri berbasis komoditas unggulan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan

Indeks Modal Manusia (IMM) juga menjadi prioritas melalui pembangunan kawasan afirmasi, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan gizi. Penjabaran mengenai arah pembangunan wilayah yang berkaitan dengan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

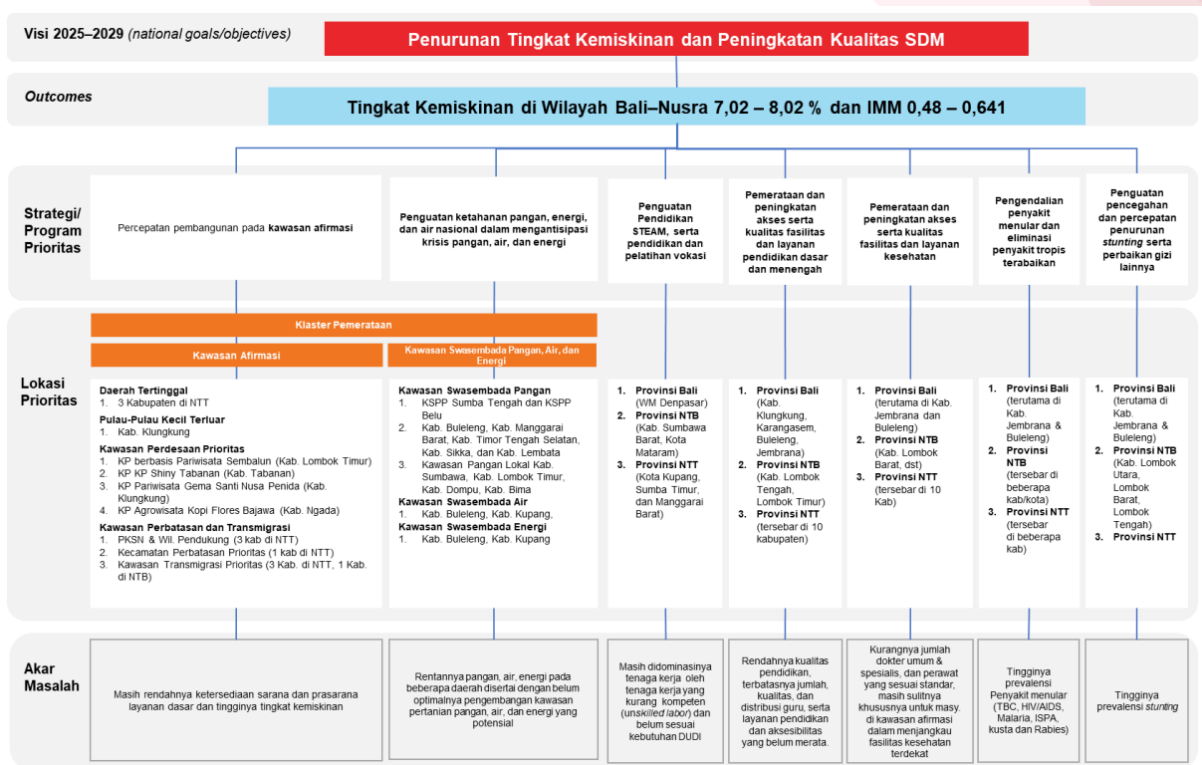
1) Arah Pembangunan Wilayah Bali-Nusra



Gambar 2.231 Alur Kerja Pembangunan Wilayah Bali-Nusra dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen

Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

Target pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara diproyeksikan mencapai angka 8,4 persen pada tahun 2029. Strategi untuk mencapai target tersebut yaitu: (1) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus serta aglomerasi industri; (2) penguatan ekosistem pariwisata berbasis budaya, bahari, petualangan, dan minat khusus yang berkelanjutan yang didukung pengembangan ekonomi kreatif; (3) pengembangan ekosistem *high-value economy and industry* pada Wilayah Metropolitan, serta pengembangan dan penataan kawasan perkotaan kecil berkarakter khusus; serta (4) penyiapan dan pengembangan sentra industri/produksi berbasis komoditas unggulan.



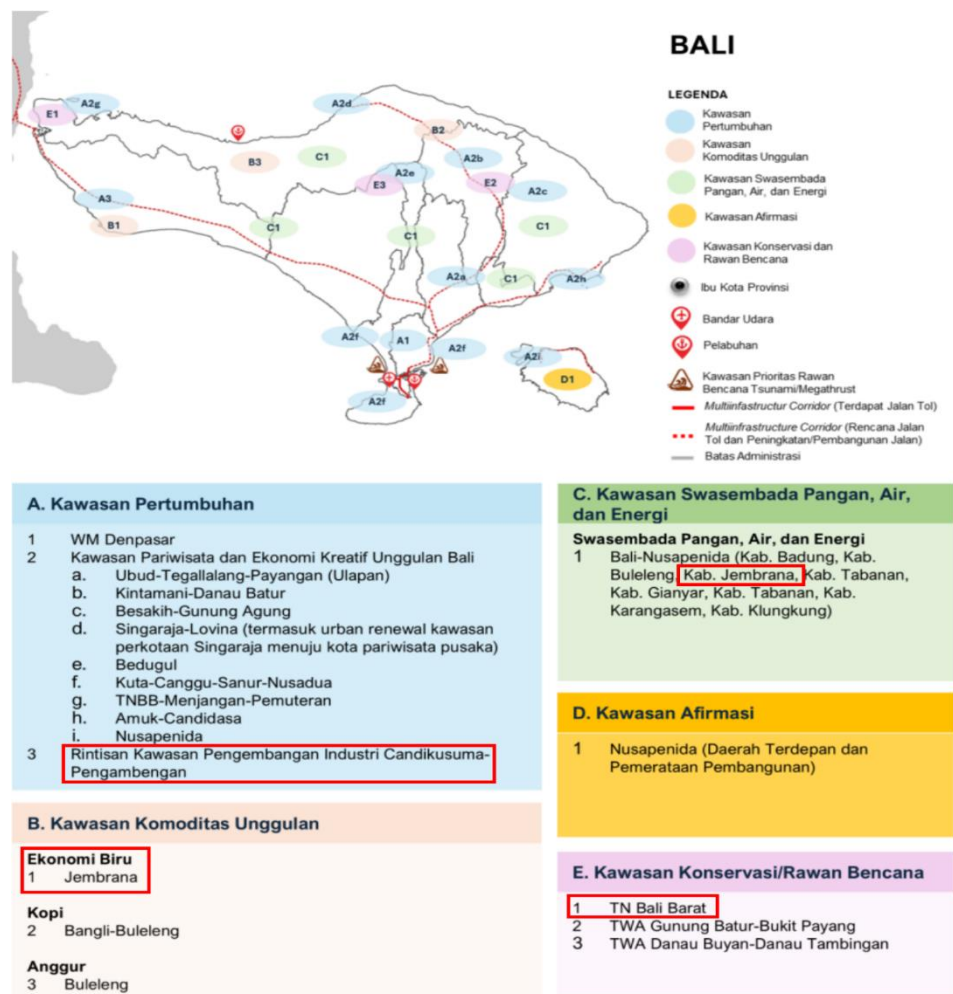
Gambar 2.232 Alur Kerja Pembangunan Wilayah Bali-Nusra dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM

Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

Kemudian, target penurunan kemiskinan dalam periode 2025-2029 di Wilayah Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,02 – 8,02 persen dan Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,48 - 0,641. Target tersebut akan dicapai dengan strategi: (i) percepatan pembangunan pada kawasan afirmasi seperti daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, kawasan perdesaan prioritas, dan kawasan perbatasan termasuk kawasan transmigrasi; (ii) penguatan ketahanan pangan, energi, dan air nasional dalam mengantisipasi krisis pangan, air, dan energi; (iii) penguatan pendidikan STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi; (iv) pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan pendidikan dasar dan menengah; (v) pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan kesehatan ; (vi) pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan; serta (vii) penguatan, pencegahan, dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya.

2) Arah Pembangunan Wilayah Bali

Pembangunan wilayah Bali diarahkan pada lima bidang utama, yaitu pengembangan kawasan pertumbuhan, pengembangan kawasan komoditas unggulan, penguatan swasembada pangan, air, dan energi, pengembangan kawasan afirmasi, serta pengembangan kawasan konservasi/rawan bencana. Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki peran dan fokus pengembangan yang berbeda, sesuai dengan potensi dan masalah yang dimiliki untuk mendukung terwujudnya wilayah Bali sebagai *Superhub* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bertaraf Internasional.



Gambar 2.233 Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Jembrana
Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

C. Arah Kebijakan Nasional Untuk Kabupaten Jembrana dalam RPJMN 2025-2029

Arah kebijakan nasional untuk Kabupaten Jembrana dalam RPJMN 2025-2029 berfokus pada empat bidang utama, yaitu pengembangan kawasan pertumbuhan, penguatan swasembada pangan, air, dan energi, serta pengembangan komoditas unggulan (ekonomi biru), dan pengembangan kawasan konservasi. Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi, Jembrana ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Industri (KI) Candikusuma serta lokasi penunjang kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Bali melalui pembangunan jalan tol Gilimanuk–

Mengwi. Selain itu, Jembrana juga termasuk dalam kawasan potensial swasembada pangan, air, dan energi dengan prioritas pada penguatan produksi pangan lokal dan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan serta energi. Di samping itu, pengembangan wilayah Jembrana juga diarahkan menuju ekonomi biru melalui pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengembangan untuk mendorong industri dan investasi komoditas unggulan. Dari sisi lingkungan hidup, adanya Taman Nasional Bali Barat di sebagian wilayah Jembrana juga menjadi fokus dalam mewujudkan kawasan konservasi guna meningkatkan perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan ekosistem bernilai keanekaragaman hayati tinggi. Penjelasan mengenai arahan ini dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.47 Daftar Arah Kebijakan Nasional Untuk Kabupaten Jembrana

No	Kawasan	Penjelasan
1	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali): Kota Denpasar Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Buleleng Kabupaten Gianyar Kabupaten Bangli Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem	- Peningkatan 6A Pariwisata pada <i>hotspot</i> pariwisata Bali, antara lain: - Ubud–Tegallalang–Payangan (Ulapan) - Kintamani–Danau Batur - Besakih–Gunung Agung - Singaraja–Lovina (termasuk urban renewal kawasan perkotaan - Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) - Bedugul–Kuta–Canggu–Sanur–Nusadua - TNBB–Menjangan–Pemuteran - Amuk–Candidasa - Nusapenida - Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi - Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu–Ubud–Gianyar–Bangli–Kintamani–Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara–Singaraja
2	Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma- Pengembangan Kabupaten Jembrana	- Pengembangan KI Candikusuma (sektor industri prioritas: industri makanan dan minuman dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) - Pengembangan SPAM pada kawasan Negara–Pengembangan–Candikusuma - Pengembangan SPAL dan TPST pendukung aktivitas industri - Penyiapan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja (PHTC) - Penguatan dan integrasi pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan industri pada SMKN 2 Negara dan BLK Jembrana
3	Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali- Nusapenida: Kabupaten Badung Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan	- Rehabilitasi dan Peningkatan D.I. Tukad Ayung, D.I. Tukad Penet, D.I. Tukad Unda, D.I. Tukad Saba, D.I. Tukad Oos, D.I. Tukad Pekerisan, D.I. Tukad Petanu, D.I. Tukad Yeh Hoo - Rehabilitas dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah

No	Kawasan	Penjelasan
	Kabupaten Gianyar Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung	• Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan • Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada <i>catchment area</i>, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pekerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur • Pembangunan infrastruktur PLTP Bedugul • Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur • Pembangunan PLTS Nusapenida dan BESS (<i>Battery Energy Storage System</i>) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV <i>Java-Bali Interconnection</i> • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan <i>Broadstock center</i> udang di Kab. Karangasem • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
4	Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambangan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Jembrana • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya

No	Kawasan	Penjelasan
		• Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
5	Kawasan Konservasi TN Bali Barat: Kabupaten Jembrana Kabupaten Buleleng	• Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan

Sumber: RPJMN Indonesia 2025-2029

2.3.2.3. ISU REGIONAL

Isu regional disusun berdasarkan isu strategis Provinsi Bali. Terdapat tujuh isu strategis dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025–2045. Ketujuh isu tersebut sebagai berikut.

A. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bali dikarenakan kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, kondisi geografis, sebaran sekolah yang belum merata, dan jarak sekolah yang relatif jauh turut memengaruhi hal ini. Akibatnya, akselerasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun terhambat. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat partisipasi kerja dan peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi kesehatan.

B. Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali

Rendahnya ketahanan perekonomian Provinsi Bali berkaitan erat dengan kesejahteraan dan daya saing ekonomi. Aspek kesejahteraan memiliki tiga isu utama. Ketiga isu tersebut dan penjelasannya, yaitu

pemerataan pembangunan ekonomi (belum optimalnya tata kelola pengembangan pariwisata dan kesenjangan pembangunan antarwilayah), diversifikasi ekonomi (belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, terbatasnya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, dan investasi swasta yang masih rendah), dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (belum optimalnya perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif).

Aspek daya saing ekonomi memiliki lima isu utama. Kelima isu tersebut dan penjelasannya, yaitu infrastruktur (infrastruktur kurang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi yang efisien), stabilitas ekonomi makro (kepercayaan investor lokal dan mancanegara yang dapat ditingkatkan dan sistem keuangan yang belum kuat), pasar kerja (rendahnya pasar tenaga kerja), modernisasi pertanian (minimnya penggunaan teknologi, mekanisasi, dan infrastruktur sektor pertanian), dan diversifikasi ekonomi (belum terkaitnya rantai pasok dan hilirisasi produk yang berdampak pada rendahnya nilai tambah, tidak kompetitifnya produk pertanian, rendahnya produktivitas di sektor pengolahan, dan belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi).

C. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Terdapat tiga isu utama terkait belum optimalnya tata kelola pemerintahan . Ketiga isu tersebut, yaitu belum optimalnya reformasi birokrasi, rendahnya kerja sama antardaerah dan internasional, serta lemahnya sinergi dan koordinasi *stakeholders* di pusat dan daerah. Ke depan, hal ini harus menjadi perhatian utama karena pemerintah berperan sebagai penggerak pelaksanaan program.

D. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjadi karena berbagai indikasi masalah di Provinsi Bali, seperti banyaknya terjadi pelanggaran hukum, masih rendahnya pendataan dan pengendalian penduduk mendatang, masih adanya praktik bisnis ilegal, dan ancaman nonmiliter (siber, ujaran kebencian, berita bohong, kejahatan melalui media *online*, narkoba dan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan kasus HIV/AIDS).

E. Tergerusnya Tradisi, Seni, Adat, dan Budaya

Permasalahan dan tantangan terkait isu tradisi, seni, adat, dan budaya di Provinsi Bali tidak terlepas dari menurunnya budaya sebagai sumber nilai kehidupan. Terdapat delapan isu terkait hal ini. Kedelapan isu tersebut, yaitu menurunnya penduduk dan produk budaya lokal, belum optimalnya

pengembangan kekayaan manuskrip kearifan lokal, menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya, rentannya akulturasi budaya yang mengancam eksistensinya, penurunan ragam budaya agraris dan bahari tradisional, menurunnya kelembagaan subak, tidak optimalnya keberadaan pura, serta ancaman terhadap kuliner tradisional dan kekhasan arsitektur Bali.

F. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Provinsi Bali sangat berkaitan dengan berbagai permasalahan terkait penurunan luas lahan pertanian, sawah, dan hutan, termasuk potensi berkurangnya sumber air aktif dan potensi kerusakan ekosistem air. Selain itu, terdapat ancaman terhadap ketersediaan udara, air, dan tanah berkualitas; peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam; dan ketersediaan energi berbasis fosil yang harus diperhatikan untuk mendukung upaya keberlanjutan. Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan) merupakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang.

G. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur berkaitan dengan permasalahan di berbagai aspek lainnya. Permasalahan tersebut, meliputi belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan (kemacetan, terbatasnya lahan parkir, belum optimalnya penanganan banjir, sarana persampahan, dan pengolahan limbah, belum optimalnya penyediaan air bersih, serta penyediaan perumahan, permukiman, dan sarana sosial ekonomi sesuai kewenangan), infrastruktur konektivitas (khususnya konektivitas darat dan laut yang berada di Nusa Tenggara), dan infrastruktur logistik (ketersediaan infrastruktur penunjang logistik yang belum memadai). Selain itu, terdapat permasalahan di berbagai aspek lainnya mencakup aspek penunjang infrastruktur (ketersediaan lahan pembangunan infrastruktur yang masih terbatas) dan infrastruktur digital (infrastruktur dan layanan digital belum optimal, seperti jaringan internet di Provinsi Bali yang belum mencakup 100% dan kualitas koneksi jaringan internet yang masih rendah).

2.3.2.4. ISU LOKAL

A. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Jembrana

Isu strategis jangka panjang dirumuskan berdasarkan kondisi internal, pengaruh eksternal, serta kebijakan nasional dan regional pada dekade terakhir. Darinya, dirumuskan lima isu strategis jangka panjang. Berikut penjelasannya.

1. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari kualitas pendidikan, budaya literasi, derajat kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan jaminan sosial, pemuda dan olahraga, dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing, kesejahteraan lebih mudah tercapai.

2. Produktivitas dan Pembangunan Ekonomi

Isu strategis yang mendominasi produktivitas dan pembangunan ekonomi adalah tingkat produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan. Perekonomian yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagian dari transformasi ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui pertumbuhan sektor unggulan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (pengelolaan sumber daya lokal), tenaga kerja yang berdaya saing, investasi yang prospektif, dan ketahanan pangan daerah.

3. Pemenuhan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastruktur menjadi dasar perkembangan kegiatan dalam ruang. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan layanan infrastruktur yang dimaksud, yaitu kelayak-hunian kawasan permukiman, layanan dan integrasi transportasi, layanan komunikasi dan informasi, dan fungsi infrastruktur lingkungan perkotaan.

4. Ketahanan dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup merupakan fondasi pembangunan wilayah. Kabupaten Jember telah memegang prinsip keberlanjutan lingkungan hidup, yaitu *Tri Hita Karana* sebagai pedoman dalam pembangunan. Meskipun demikian, prinsip keberlanjutan belum terlaksana. Terdapat beberapa aspek yang harus difokuskan dalam mendukung ketahanan dan keberlanjutan lingkungan hidup, mencakup aspek risiko bencana, kualitas lingkungan hidup, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Penyelenggaraan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Birokrasi dan tata kelola pemerintah berperan penting dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Birokrasi dan tata kelola pemerintah yang akuntabel tercermin dari kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan dan ketertiban, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan.

B. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Jembrana

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2025-2029, terdapat 5 prioritas utama isu pembangunan berkelanjutan yang disusun berdasar urutan penilaian tertinggi. Berikut merupakan isu paling strategis Kabupaten Jembrana:

1. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Ekosistem

Penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem merupakan kondisi yang tercermin dari akumulasi berbagai isu yang memperparah degradasi lingkungan hidup. Isu ini berkaitan dengan tingginya risiko bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta alih fungsi lahan. Isu alih fungsi lahan seperti konversi hutan dan perbukitan untuk kepentingan lain menyebabkan hilangnya habitat, memperburuk ekosistem, dan mempercepat kehilangan spesies lokal. Produksi sampah yang tinggi dan pengelolaan sampah yang tidak optimal memperbesar risiko pencemaran lingkungan dan meningkatkan polutan yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan dan kelangsungan hidup biota. Memburuknya kondisi ekosistem yang ditunjukkan dari menurunnya keanekaragaman hayati berdampak pada melemahnya fungsi ekologis lingkungan. Menurunnya luas kawasan hutan dan kualitas tutupan vegetasi akan mempercepat kerusakan ekosistem karena hilangnya fungsi perlindungan tanah dan pengaturan siklus air. Di sisi lain, tidak adanya rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati di daratan menunjukkan masih lemahnya pengelolaan berkelanjutan yang berisiko besar pada kerusakan lebih lanjut.

2. Alih Fungsi Lahan dan Tekanan Tata Guna Lahan

Tekanan pembangunan yang semakin besar, terutama di wilayah-wilayah strategis, menyebabkan pergeseran fungsi lahan dari fungsi konservasi dan produksi menjadi fungsi permukiman dan infrastruktur. Alih fungsi lahan telah diidentifikasi sebagai isu utama dalam KLHS RTRW Kabupaten Jembrana, karena berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan ekologis, serta potensi peningkatan risiko bencana. Alih fungsi lahan menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya vegetasi alami, dan penurunan daya dukung ekosistem, serta meningkatkan risiko bencana dan iklim. Di samping itu, alih fungsi lahan secara tidak langsung dapat memperparah ketimpangan wilayah dan aksesibilitas karena pembangunan yang tidak merata. Selain itu, fenomena ini memperburuk kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial karena masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian kehilangan sumber pendapatannya akibat konversi lahan. Pada akhirnya, alih fungsi lahan dapat menghambat pengembangan

ketahanan pangan dan gizi karena luas lahan produktif untuk pangan lokal semakin berkurang.

3. Tingginya Risiko Bencana dan Iklim

Tingginya risiko bencana dan iklim disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah faktor geofisik. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada sumber daya air permukaan yang rentan pencemaran, sedimentasi, dan fluktuasi iklim. Perbedaan pengembangan di masing-masing wilayah juga menyebabkan perbedaan tantangan. Pembangunan intensif dan alih fungsi lahan di wilayah selatan meningkatkan potensi banjir bandang wilayah ini. Sementara itu, tingginya erosi di perbukitan memperparah sedimentasi di DAS. Tingginya risiko perubahan iklim yang ditunjukkan oleh tingginya jejak karbon daerah terjadi akibat rendahnya pemanfaatan energi bersih dan bauran EBT yang meningkatkan ketergantungan terhadap energi fosil. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya strategi adaptasi perubahan iklim khususnya dari sisi ekologi, ekonomi, dan sosial. Tingginya risiko bencana dan iklim tidak ditanggapi oleh kapasitas kesiapsiagaan daerah yang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya kapasitas mitigasi Kabupaten Jembrana dan keterbatasan sistem peringatan dini.

4. Kemiskinan dan Kerentanan Sosial

Tingginya jumlah penduduk miskin menunjukkan tingginya ketimpangan distribusi kesejahteraan di Jembrana. Sementara itu, tingginya kerentanan sosial dipengaruhi oleh tingginya indeks risiko bencana dan korban bencana yang belum tertangani secara sistematis akibat belum adanya dokumen pengurangan risiko bencana. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan mitigasi bencana yang berdampak pada kelompok miskin. Selain itu, jangkauan sistem perlindungan sosial ditunjukkan dengan belum tercapainya proporsi belanja bantuan sosial dan terbatasnya akses penduduk terhadap bantuan bersyarat. Kondisi ini juga diperparah dengan tingginya jumlah pengangguran semakin meningkatkan keterbatasan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik

Terbatasnya infrastruktur dasar dan layanan publik menjadi isu strategis karena berkaitan erat dengan indikasi ketimpangan dalam penyediaan layanan dasar. Hal ini ditunjukkan melalui tantangan distribusi jaringan air bersih dan irigasi yang belum merata. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan armada persampahan terbatas memperparah

permasalahan lingkungan. Di sisi lain, belum seluruh fasilitas telah memenuhi standar pelayanan minimal yang mengindikasikan rendahnya kapasitas institusional dalam pemenuhan hak dasar warga. Di samping itu, terdapat keterbatasan akses transportasi dan fasilitas umum menyebabkan kesenjangan spasial dan menghambat konektivitas di Kabupaten Jemberana.

2.3.2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN JEMBERANA 2025-2029

Analisis isu strategis Kabupaten Jemberana disusun dengan pendekatan berjenjang, dimulai dari identifikasi permasalahan daerah yang selanjutnya dikaitkan dengan isu lingkungan hidup strategis (KLHS). Isu-isu ini kemudian disesuaikan dengan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional untuk memahami tantangan serta peluang yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang relevan dengan arah pembangunan Kabupaten Jemberana. Pendekatan ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih komprehensif, selaras dengan agenda pembangunan nasional serta tren global yang berpengaruh terhadap kondisi lokal. Rumusan ini dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.48 Tabel Rumusan Potensi dan Permasalahan dengan Isu Dinamis dalam RPJMD Kabupaten Jember 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tren lulusan pendidikan menengah ke tinggi terus berkembang	Belum optimalnya layanan pendidikan	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Akses terbatas ke pendidikan berkualitas pada negara berkembang	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika, dan sains)	Kurangnya kualitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Adanya fasilitas perpustakaan untuk masyarakat	Belum optimalnya layanan perpustakaan	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Akses terbatas ke pendidikan berkualitas pada negara berkembang	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika, dan sains)	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan pertumbuhan	Belum optimalnya pelayanan kesehatan	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Tingginya angka kematian ibu dan bayi dan terbatasnya akses ke layanan kesehatan memadai	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi kesehatan	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Peningkatan pendidikan dan ekonomi untuk perempuan meningkat	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Kesenjangan partisipasi ekonomi pada peluang kerja	Kualitas sumber daya manusia yang jauh tertinggal, terlebih pada perempuan	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
banyak kegiatan pembinaan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan	Peningkatan jumlah penduduk miskin	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Pertumbuhan penduduk yang stabil	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi kependudukan serta pengendalian penduduk	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Sistem pencatatan sipil yang lemah pada negara berkembang	Pengembangan ekonomi digital	Masih rendahnya pendataan dan pengendalian penduduk mendatang	Daya Saing Sumber Daya Manusia
sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor utama daerah	Belum optimalnya pengembangan perikanan dan pertanian	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Eksplorasi berlebihan pada penangkapan ikan dan ketahanan pangan yang kurang berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan	Belum optimalnya sektor pertanian dalam rangka mendukung upaya diversifikasi dan transformasi ekonomi	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Peningkatan pendidikan dan peluang kerja dapat berkontribusi pada pembangunan pemuda	Rendahnya daya saing pemuda dan olahraga	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Pengangguran pada pemuda yang tinggi	Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada semua aspek (membaca, matematika, dan sains)	Menurunnya budaya sebagai sumber nilai kehidupan	Daya Saing Sumber Daya Manusia

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penurunan jumlah pengangguran	Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Bonus demografi global	Produktivitas tenaga kerja Indonesia tahun relatif rendah	Penurunan tingkat partisipasi kerja dan peningkatan jumlah pengangguran terbuka	Daya Saing Sumber Daya Manusia
Terdapat upaya perbaikan lingkungan	Belum optimalnya perlindungan lingkungan hidup	Penurunan Kualitas Lingkungan dan Ekosistem	Tingginya tingkat kematian 10 tahun terakhir dan ancaman kepunahan hewan dan tumbuhan	Tingginya lokasi tambang ilegal yang merusak lingkungan	Penurunan luas lahan pertanian, sawah, dan hutan	Keamanan dan Ketahanan Daerah serta Perlindungan Lingkungan Hidup
Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dan lingkungan	Belum terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Alih Fungsi Lahan dan Tekanan Tata Guna Lahan	Hilangnya keanekaragaman hayati serta polusi dan kerusakan lingkungan	Sumber air minum tercemar, tingginya timbunan sampah	Keterbatasan dan persaingan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya alam (energi, air, dan pangan)	Keamanan dan Ketahanan Daerah serta Perlindungan Lingkungan Hidup
-	Tingginya indeks risiko bencana	Tingginya Risiko Bencana dan Iklim	Krisis lingkungan pada perubahan iklim	Perubahan iklim dan polusi udara	Terdapat ancaman terhadap ketersediaan udara, air, dan tanah berkualitas; peningkatan suhu, kekeringan, bencana alam	Keamanan dan Ketahanan Daerah serta Perlindungan Lingkungan Hidup
Peningkatan pendapatan asli daerah	Rendahnya kapasitas fiskal dari sumber-sumber lokal	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Rendahnya rasio pajak terhadap pendapatan daerah	Keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya lokal	Infrastruktur kurang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi yang efisien	Peningkatan Kapasitas Fiskal dari Sumber-Sumber Lokal

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan jalan nasional lintas selatan Pulau Bali	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Peluang industri 5.0 (efisiensi manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan)	Krisis lingkungan yang mempengaruhi pembangunan	Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pembangunan	Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang
Jembrana sebagai jalur penghubung antara Bali dan Jawa	Rendahnya kualitas layanan transportasi	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Peluang industri 5.0 (efisiensi manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan)	Krisis lingkungan yang mempengaruhi pembangunan	Kemacetan, terbatasnya lahan parkir	Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang
Potensi sumber daya pada pertanian, perikanan (adanya pelabuhan), dan perkebunan unggul kakao dan kelapa	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Persaingan global yang semakin meningkat	Tingkat produktivitas masih rendah	Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Posisi strategis Jembrana dengan pariwisata sebagai sektor potensial	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal Bali	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Ketimpangan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan	Kualitas sumber daya manusia pada aspek budaya	Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tingginya peluang investasi pada sektor industri pengolahan dan pariwisata	Belum optimalnya percepatan realisasi investasi	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial	Banyak negara yang membatasi regulasi investasi sehingga menghambat modal masuk	Peningkatan arah investasi untuk sumber daya manusia dan pijakan ekonomi	Investasi swasta yang masih rendah),	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Jembrana mendapatkan nilai opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama 10 tahun (pengelolaan keuangan daerah yang baik)	Belum optimalnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Tingginya tingkat kejahatan dan konflik sosial	Pemberantasan korupsi dan tata kelola data pemerintahan	Ancaman stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi	Terbatasnya Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik	Praktik korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak praktis	Pemberantasan korupsi dan tata kelola data pemerintahan	Belum optimalnya reformasi birokrasi dan lemahnya sinergi dan koordinasi <i>stakeholders</i> di pusat dan daerah	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
<i>Sumber: Data pada Bab 2</i>	<i>Sumber: Data pada Bab 2</i>	<i>Sumber: Isu pada dokumen KLHS RPJMD 2025-2029</i>	<i>Sumber: Isu Global pada RPJMN, sumber lain dari PBB, UNICEF, dan Bank Dunia</i>	<i>Sumber: RPJMN 2025-2029</i>	<i>Sumber: RPJPD Kabupaten Jembrana 2025-2045</i>	

Sumber: Analisis Penyusun RPJMD Kabupaten Jembrana 2025-2030

Berdasarkan uraian permasalahan, isu strategis (global, nasional, dan regional), dan potensi daerah, rumusan isu strategis jangka menengah Kabupaten Jembrana sebagai berikut.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berdaya saing menjadi modal dasar pembangunan. Hal ini dikarenakan peran ganda penduduk, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Daya saing sumber daya manusia digambarkan menurut kualitas layanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, serta profil demografi. Selain itu, peningkatan daya saing sumber daya manusia didukung dengan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan perlu dibantu. Berikut uraiannya.

1) Kualitas Layanan Pendidikan

Pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi masa depan. Melalui penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, dihasilkan masyarakat yang mampu bersaing dengan daerah lain, terutama pada era pasar bebas sebagaimana sekarang. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dilakukan melalui peningkatan partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah, percepatan pengentasan buta huruf, peningkatan minat baca, serta pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2) Kualitas Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan dilakukan melalui pengoptimalan layanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan kesehatan, pengoptimalan sosialisasi dan pendampingan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, pengaturan perizinan dan pengawasan tempat umum dan makanan-minuman, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam jaminan kesehatan.

3) Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Peningkatan daya saing pemuda memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, seperti membuka inovasi dan lapangan kerja baru. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pendampingan dan pengoptimalan organisasi pemuda. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan pelatih dan atlet serta penyelenggaraan pekan olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga.

4) Profil Demografi

Bonus demografi telah berada di depan mata. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, lapangan kerja baru terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan Jembrana Emas terwujud. Meskipun demikian, kontrol populasi tetap perlu dilakukan.

5) Pemberdayaan Sosial

Pembangunan selayaknya dinikmati seluruh masyarakat (*no one left behind*). Pemberdayaan sosial dilakukan melalui pengoptimalan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan berbagai lembaga swadaya masyarakat, petani, nelayan, dan pelaku usaha; peningkatan perlindungan dan jaminan sosial; serta peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Ekonomi ke depan diproyeksikan tumbuh stabil dengan tingkat inflasi yang terkontrol. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan baik sembari meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Harapannya, perekonomian Kabupaten Jembrana semakin kuat dalam lima tahun mendatang.

1) Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Kualitas dan daya saing tenaga kerja berhubungan erat dengan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, aspek ketenagakerjaan berhubungan pula dengan jaminan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Apabila seluruhnya optimal, harapannya pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

2) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal

Masih banyak potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ke depannya, perlu dilakukan pengoptimalan pemanfaatan potensi tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan terwujud. Hal ini dapat dicapai melalui pengoptimalan pendampingan terhadap pelaku usaha, percepatan hilirisasi bahan baku, pemberian bantuan modal, percepatan digitalisasi usaha, dan pemberian bantuan akses ke pasar yang lebih luas.

3) Percepatan Realisasi Investasi

Percepatan realisasi investasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan “tebar jaring” dan “jemput bola” terhadap investor potensial. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan kemudahan akses, penciptaan iklim investasi yang baik melalui kebijakan pro-investasi, penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan, serta pendampingan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan investor.

4) Pengembangan Pariwisata Daerah

Pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana. Bahkan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sejak tahun 2020, selalu di atas 10% dan terus merangkak naik. Meskipun demikian, lama menginap wisatawan relatif singkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan infrastruktur dan kemudahan akses, pemerataan fasilitas

pendukung pariwisata, penyusunan paket wisata yang variatif dan inovatif, penguatan kerja sama dan kerangka regulasi, dan pengoptimalan promosi wisata.

C. Penyediaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastruktur berkualitas menjadi dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penyediaan infrastruktur termasuk fokus pembangunan pada periode pertama perencanaan jangka panjang Kabupaten Jembrana. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan.

- 1) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pendukungnya

Peningkatan kualitas infrastruktur berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu pula memastikan sebaran infrastruktur tersebut, meliputi rumah dan kawasan permukiman, jalan dan trotoar, drainase, irigasi, air bersih, sanitasi, serta komunikasi dan layanan internet, terutama di kawasan perdesaan. Selain itu, penyediaannya harus didasarkan pada rencana tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

- 2) Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi

Peningkatan kualitas layanan transportasi akan mendukung aksesibilitas dan konektivitas. Melalui peningkatan peran serta masyarakat serta pengoptimalan layanan transportasi dan parkir melalui digitalisasi, diharapkan sektor ekonomi vital berkembang, mobilitas termudahkan, dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Pada gilirannya, percepatan pertumbuhan ekonomi pun terwujud.

D. Keamanan dan Ketahanan Daerah serta Perlindungan Lingkungan Hidup

Keamanan dan ketahanan daerah tercermin dari kualitas layanan penanggulangan bencana dan kebakaran; stabilitas ketertiban, ketenteraman, dan keindahan; dan ketahanan pangan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas personel, penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, dan perbaikan infrastruktur. Harapannya, tercipta ketahanan daerah.

Berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup berperan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, perlu dilakukan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas air dan tutupan lahan, pengoptimalan layanan persampahan dan pengolahan limbah, serta

pengoptimalan pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, peran serta masyarakat pun perlu ditingkatkan.

E. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan memainkan aspek penting dalam pembangunan. Hal ini karena pemerintah merupakan aktor pembangunan. Peningkatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi dan kebijakan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, peningkatan integritas dan komitmen aparatur sipil negara, pengoptimalan penggunaan anggaran, dan penciptaan iklim riset yang baik.

F. Peningkatan Kapasitas Fiskal dari Sumber-Sumber Lokal

Sebagian besar permasalahan pembangunan disebabkan oleh belum optimalnya kapasitas fiskal. Akibatnya, perlu dilakukan peningkatan kapasitas fiskal, terutama dari sumber-sumber lokal. Hal ini dilakukan melalui perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, pengoptimalan pengumpulan pajak dan retribusi, peningkatan integritas dan komitmen pengelola keuangan, dan penghematan anggaran pada pos yang tidak prioritas.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah misi yang berisi berbagai upaya strategis yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan ditetapkan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Guna mengukur pencapaian tujuan, dirumuskan sasaran yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah atau perangkat daerah, yang diperoleh dari hasil program perangkat daerah.

3.1.1 VISI DAN MISI

A. Visi

Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Visi ini tidak hanya mencerminkan komitmen kepemimpinan daerah, tetapi juga menggambarkan arah pembangunan serta kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam periode pemerintahan selama lima tahun. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, visi tersebut disusun selaras dengan misi yang diemban oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misi ini mencerminkan strategi dan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan fokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain itu, visi pembangunan daerah Kabupaten Jembrana periode 2025-2029 juga berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045. Dengan demikian, visi ini menjadi bagian dari kesinambungan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menyesuaikan dengan tantangan dan peluang yang berkembang di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Jembrana tahun 2025-2029 adalah:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA”

Kata **Maju** menggambarkan suatu kondisi fisik dan non fisik Jembrana dengan tingkat perkembangan yang tinggi unggul dan berdaya saing di berbagai aspek kehidupan, utamanya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli (ekonomi). Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan segenap potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan pentingnya kerjasama yang sinergis dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Hal ini diukur dengan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Secara filosofis **Harmoni** dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang menggambarkan Tatahan Kehidupan masyarakat Jembrana yang selaras, serasi, guyub, rukun, gotong royong, dan toleran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan konsep filosofis Tri Hita Karana: keserasian hubungan antara manusia dengan alam. Kondisi tersebut diukur dengan Indeks Lingkungan Hidup dan Kerukunan Umat Beragama.

Secara harfiah, kata **Bermartabat** bermakna mempunyai martabat, kehormatan, atau derajat kemanusiaan, dan harga diri yang tinggi. Merujuk pada makna harfiah tersebut, Jembrana sebagai sebuah daerah diharapkan memiliki harga diri, kehormatan, dan dihargai oleh berbagai pihak/daerah lainnya, dengan masyarakat yang dapat menjalankan hidup biologisnya secara mandiri (sehat) dapat menjalankan kehidupan sosial budaya secara harmoni, berkarakter dan mulia serta dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dan maju untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Kondisi tersebut diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Gini Rasio, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran.

Visi pembangunan Kabupaten Jembrana periode 2025-2029 disusun selaras dengan visi pembangunan nasional, baik dalam RPJMN 2025-2029 maupun Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" yang menekankan percepatan pembangunan di berbagai sektor guna mewujudkan negara yang berdaya saing dan sejahtera. Sementara itu, RPJPN Indonesia Emas 2045 menetapkan visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan", yang menegaskan pentingnya kedaulatan nasional, kemajuan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan sebagai landasan utama menuju Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, visi RPJPD Kabupaten Jembrana 2025-2029 dirumuskan dengan orientasi jangka panjang untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkesinambungan. Visi yang diusung adalah "Terwujudnya Jembrana Emas: Maju, Bahagia, dan Berkelanjutan Berlandaskan Tri Hita Karana". Konsep ini tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, tetapi juga menekankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam filosofi Tri Hita Karana. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Jembrana tidak hanya selaras dengan visi pembangunan nasional, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai lokal yang menjadi identitas dan kekuatan utama daerah. Penyelarasan ini dijelaskan dalam gambar di bawah.

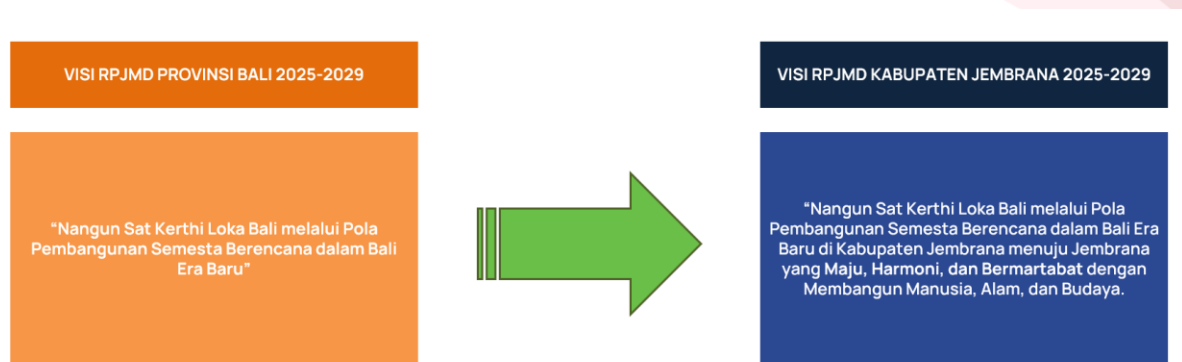


Gambar 3.1 Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Jembrana

Sumber: Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

Selain selaras dengan visi pembangunan nasional, visi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 juga sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2029, yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru." Visi ini menekankan pembangunan holistik yang mencakup keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. Sejalan dengan filosofi tersebut, visi pembangunan Kabupaten Jembrana mengadopsi nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara lebih spesifik, yakni "Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana Menuju Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya." Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Jembrana tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga

harmoni dengan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan Bali yang berkelanjutan.



Gambar 3.2 Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Jembrana dengan Provinsi Bali

Sumber: Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jembrana, diperlukan perumusan misi yang menetapkan ruang lingkup prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Misi ini berfungsi sebagai pedoman strategis yang memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, misi juga berperan dalam menciptakan *enabling conditions*, yaitu kondisi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan program pembangunan di berbagai sektor. Dengan mengacu pada prinsip tersebut, misi pembangunan Kabupaten Jembrana tercantum dalam 4 (empat) misi yang dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri

Misi ini dijelaskan dengan memastikan setiap individu dalam masyarakat Jembrana mendapatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang memadai, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat struktur sosial. Mewujudkan manusia yang berdaya saing dan mandiri diwujudkan dengan memperhatikan pada komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, serta ekonomi dan daya beli masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dan merata di semua jenjang akan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang unggul, berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang optimal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, produktif, dan berdaya saing. Pelayanan sosial yang komprehensif juga

dikembangkan agar kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah, tetap mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan demikian, diharapkan terjadi penguatan struktur sosial yang solid dan mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing di berbagai sektor.

Misi 2: Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat Jembrana

Misi ini memiliki pengertian, yaitu melindungi dan mempertahankan ekosistem lokal, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian agar tetap sehat dan produktif, mengelola limbah dengan bijaksana, dan upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Di samping itu, juga dilakukan upaya penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam. Selain upaya konservasi yang dilakukan melalui program reboisasi dan pengelolaan kawasan lindung, pendekatan berbasis teknologi juga diterapkan dalam pemantauan dan pemulihan lingkungan. Pengembangan energi terbarukan dan sistem pertanian berkelanjutan menjadi bagian dari strategi besar dalam menjaga keseimbangan ekologi. Edukasi lingkungan bagi masyarakat juga terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Selain itu, juga dilakukan upaya penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah yang mendukung pelestarian alam, seperti pengembangan ruang terbuka hijau, sistem drainase ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi pencemaran serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

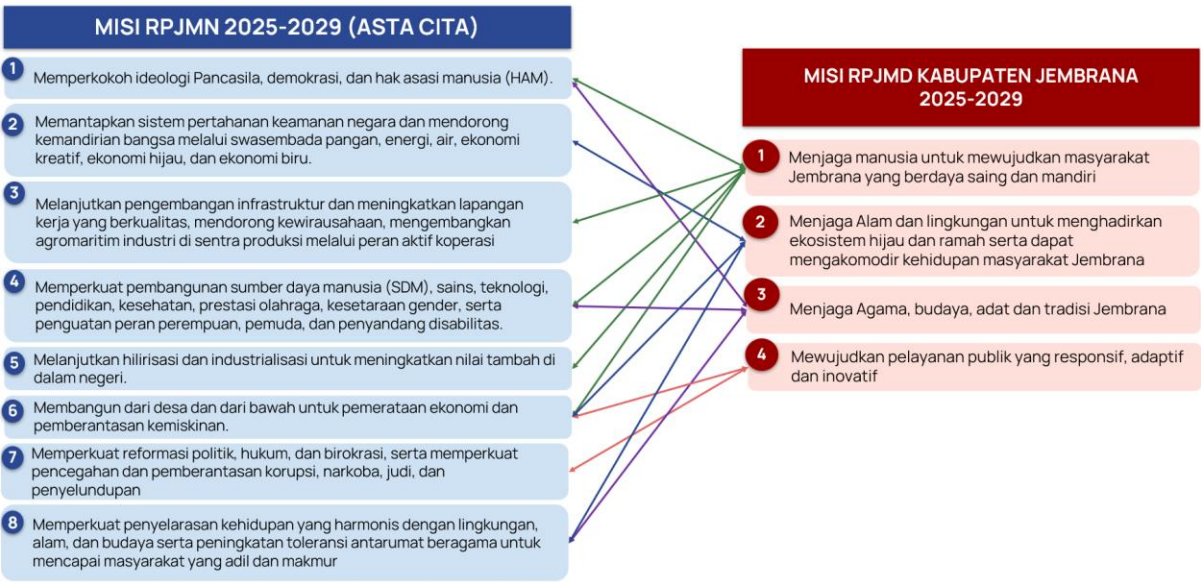
Misi 3: Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jembrana

Misi ketiga dijelaskan sebagai melestarikan tradisi, adat istiadat, dan seni budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Jembrana melalui penyelenggaraan festival, upacara, dan praktik budaya lainnya sambil merangkul aspek-aspek baru dari dunia global. Penguatan peran lembaga adat dan komunitas budaya dilakukan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembangunan pusat kebudayaan serta revitalisasi kawasan bersejarah menjadi prioritas guna memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal juga terus dikembangkan agar generasi muda tetap memahami dan menghormati tradisi serta adat istiadat yang telah diwariskan. Interaksi antara kebudayaan lokal dan pengaruh global akan diarahkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan esensi jati diri Jembrana.

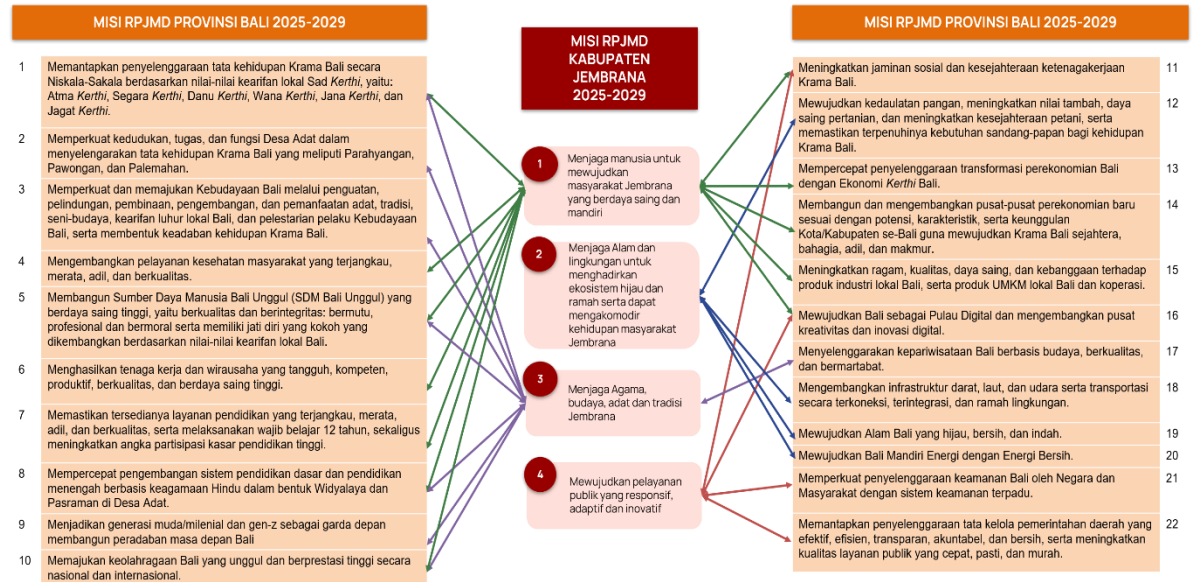
Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif

Misi ini memiliki pengertian sebagai pelayanan publik ditingkatkan melalui digitalisasi, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memastikan akses yang merata, mendukung kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan Jembrana. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan diperluas guna menghadirkan layanan yang lebih efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Reformasi birokrasi juga diarahkan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dilakukan secara berkala agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan pelayanan yang inovatif. Dengan adanya integrasi sistem pelayanan berbasis teknologi dan tata kelola yang lebih fleksibel, diharapkan pemerintah dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 dirancang agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan regional dengan menyandingkan serta mengharmonisasikan tujuan pembangunan daerah dengan 8 (delapan) misi Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029 serta 22 (dua puluh dua) misi pembangunan Provinsi Bali. Keselarasan ini diwujudkan dalam empat misi utama Kabupaten Jembrana yang mencakup aspek sumber daya manusia, lingkungan, kebudayaan, dan pelayanan publik. Melalui pendekatan ini, setiap kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Jembrana diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian visi daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan regional secara terpadu dan berkelanjutan. Penyelarasan ini dijelaskan dalam kedua gambar di bawah ini.



Gambar 3.3 Penyeragaman Misi RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jemberana Tahun 2025-2029
Sumber: Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jemberana Tahun 2025-2029



Gambar 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jemberana Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029; Draf Ranwal RPJMD Provinsi Bali Tahun 2025-2029, diolah 2025

3.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dalam perumusan sasaran strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dirancang dengan merujuk pada visi dan misi serta mempertimbangkan analisis isu-isu strategis yang berkembang. Dalam hal ini, tujuan menjadi bentuk konkret dari implementasi misi yang telah

ditetapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Oleh karena itu, keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran harus dijaga agar dapat mencerminkan kesinambungan arah pembangunan daerah. Penjelasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jembrana dijelaskan sebagai berikut.

Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter
- Sasaran : 1A. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat
1B. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1C. Meningkatnya daya saing pemuda
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat
- Sasaran : 2A. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat
2B. Meningkatnya kesempatan dan daya saing tenaga kerja
- Tujuan 3 : Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah berbasis potensi unggulan
- Sasaran : 3A. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
3B. Meningkatnya daya saing daerah

Misi 2: Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat Jembrana

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur
- Sasaran : 1A. Meningkatnya infrastruktur sarana prasarana yang terintegrasi
1B. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Sasaran : 2A. Meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan
2B. Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan
2C. Meningkatnya resiliensi daerah dan menurunkan kerentanan bencana

Misi 3: Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jembrana

Tujuan 1 : Meningkatkan upaya pelestarian nilai agama, budaya, dan kearifan lokal

Sasaran : 1A. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan budaya

1B. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif

Sasaran : 1A. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

1B. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

1C. Meningkatnya kualitas manajemen ASN

1D. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum

Selanjutnya, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang lebih luas serta ditentukan indikator kinerja sasaran yang terukur. Penetapan indikator ini dilakukan dengan menetapkan *baseline* tahun 2024 sebagai titik awal pengukuran, sehingga perkembangan capaian dapat dievaluasi secara objektif. Setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan memiliki target yang jelas untuk setiap tahun dari 2025 hingga 2030, guna memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA”

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri	T1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	75,32	75,79	76,26	76,73	77,2	77,67	78,14	78,14
	1A. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	1.Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,7	8,86	8,97	9,09	9,2	9,31	9,42	9,42
		2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,05	13,19	13,29	13,39	13,5	13,6	13,7	13,7
		3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,54	59,08	60,62	62,62	66,12	68,12	70,12	70,12
	1B. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,07	75,35	75,63	75,91	76,19	76,47	76,75	76,75
	1C. Meningkatnya daya saing pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	N/A	67,14	71,07	75,23	79,64	82,3	84,3	84,3
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	4,51	3,51 - 3,87	2,95 - 3,44	2,46 - 2,95	1,97 - 2,46	1,76 - 2,75	1,48 - 2,46	1,48 - 2,46
	2A. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	1. Indeks Kesejahteraan Sosial	57,45	57,72	57,99	58,26	58,53	58,80	59,07	59,07
		2. Indeks Ketimpangan Gender	0,21	0,18	0,15	0,13	0,1	0,09	0,08	0,08
		3. Indeks Gini	0,288	0,288	0,287	0,287	0,286	0,286	0,285	0,285

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2B. Meningkatkan kesempatan dan daya saing tenaga kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,53	1,48-1,51	1,42-1,45	1,38-1,40	1,35-1,37	1,31-1,33	1,27-1,29	1,27-1,29
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,1	80,49	80,71	80,93	81,15	81,37	81,59	81,59
	3. Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah berbasis potensi unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,98	5,2	5,52-6,02	5,90-6,40	6,30-6,80	6,80-7,30	6,90-7,40	6,90-7,40
	3A. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	1. Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	22,65	22,88	23,17	23,47	23,76	24,05	24,34	24,34
		2. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,27	5,49	5,7	5,92	6,13	6,35	6,57	6,57
		4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	12,54	12,82	12,98	13,11	13,71	13,93	14,15	14,15
		5. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	10,16	10,47	10,54	10,61	10,68	10,75	10,82	10,82
	3B. Meningkatkan daya saing daerah	1. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Rasio Kewirausahaan	3,84	3,91	3,97	4,04	4,10	4,17	4,24	4,24
		3. Indeks Desa Membangun	0,8784	0,8798	0,8810	0,8883	0,8965	0,9548	0,9628	0,9628
Misi 2: Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan	1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	70	71,5	73	74,5	76	77,5	77,5
	1A. Meningkatkan infrastruktur sarana prasarana yang terintegrasi	1. Persentase Zona Rawan Banjir dan Genangan yang tertangani	68,19	69,69	71,19	72,69	74,19	75,69	77,19	77,19

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ekosistem Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat Jembrana		2. Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Berkondisi Baik	66,58	68,67	70,27	71,86	73,46	75,06	76,66	76,66
		3. Persentase Rumah Layak Huni	97,28	97,5	97,75	98	98,25	98,5	98,75	98,75
	1B. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang	Ketaatan terhadap RTRW	80	84	86	88	90	92	94	94
	2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-23,72	8,55	8,85	9,16	9,47	9,78	10,10	10,10
		Indeks Risiko Bencana	133,06	129,07	125,2	121,44	117,8	115,26	114,26	114,26
	2A. Meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara, Air, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,33	78,72	78,89	79,06	79,23	79,40	79,60	79,60
	2B. Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan	1. Persentase Rumah Tangga Menggunakan Penerangan Listrik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Layanan Air Minum Rumah Tangga (%)	95,14	96,6	97,59	98,57	99,56	100	100	100
		3. Indeks Ketahanan Pangan	87,64	87,91	88,18	88,45	88,72	89	89,28	89,28
	2C. Meningkatnya resiliensi daerah dan menurunnya kerentanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70	0,70
Misi 3: Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jembrana	1. Meningkatkan upaya pelestarian nilai agama, budaya, dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	71,36	71,8	72,3	72,8	73,3	73,8	74,3	74,3
		Indeks Harmoni Indonesia	6,9	6,9	7	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3
	1A. Meningkatnya pengembangan dan	1. Cakupan budaya tak benda lestari (%)	44,44	50	60	70	80	85	90	90

MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pemanfaatan objek pemajuan budaya	2. Cakupan budaya benda lestari (%)	93,61	93,7	93,8	93,9	94	94,1	94,2	94,2
	1B. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Penyelesaian konflik antar umat beragama (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	79,09	79,64	80,19	80,75	81,3	81,85	82,4	82,4
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	60,01	64	68	72	76	80	80
	1A. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	96,43	96,43	96,43	96,44	96,44	96,45	96,45	96,45
	1B. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	68,96	70,02	70,7	71,39	72,09	72,79	73,49	73,49
		2. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3. Nilai Maturitas SPIP	3,05	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
		4. Indeks SPBE	3,77	3,77	3,77	3,79	3,82	3,92	4	4
		5. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,06	94,06	94,24	94,43	94,62	94,81	95	95
	1C. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	77,07	77,08	77,09	77,1	77,12	77,13	77,14	77,14
		2. Indeks Sistem Merit	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,80
	1D. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum	1. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk (%)	N/A	68,93	70,04	71,18	72,33	73,5	74,67	74,67

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sebagai panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi ini dirancang guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar lebih terarah dan berkelanjutan. Program prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan ini mencerminkan sektor-sektor utama yang mendapat perhatian lebih dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Strategi merupakan langkah konkret yang mencakup program-program prioritas sebagai instrumen utama dalam menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi daerah. Perumusan strategi dilakukan secara sistematis dan berbasis pada analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Jembrana dalam periode 2025-2029.

Sebagai bagian dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, strategi pembangunan daerah ini telah diselaraskan dengan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan adanya kesinambungan antara perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, setiap strategi yang dirumuskan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan pencapaian target yang telah ditetapkan secara optimal.

Pada tabel berikut, disajikan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri			
1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter	1A. Meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Penerapan SPM
		Optimalisasi kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	Optimalisasi penggunaan anggaran sarana dan prasarana pendidikan
			Meningkatkan sosialisasi pemuda mengenai pentingnya pendidikan nonformal
			Mendorong peningkatan kualitas pendidikan bagi setiap warga secara merata
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Mendorong penyebaran tenaga pendidikan secara merata
			Optimalisasi penyediaan insentif bagi guru di daerah kurang berkembang
	1B. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat	Menyusun pendidikan pendidikan jarak jauh dalam mengurangi buta huruf
			Meningkatkan akses fasilitas perpustakaan
		Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, lansia, dan status gizi masyarakat	Penguatan Promotif dan Preventif serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit serta puskesmas dengan fasilitas dan peralatan medis
		Meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat	Mengintegrasikan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kebiasaan hidup sehat
		Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak	Penanganan kelainan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
			Meningkatkan kinerja surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
			Optimalisasi program edukasi kesehatan

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan pencegahan infeksi pada ibu hamil dan bayi
		Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak	Peningkatan fasilitas dan nakes di puskesmas dan rumah sakit daerah
			Menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan
		Menyediakan dan meningkatkan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau	Meningkatkan kualitas dan jumlah fasilitas kesehatan
			Menyediakan insentif dan program beasiswa bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah kekurangan tenaga medis
			Memperkuat pelatihan dan perekrutan tenaga medis
		Memperkuat pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit menular dan tidak menular
			Mengembangkan edukasi pola hidup sehat dan menanggulangi penyakit dengan pemberdayaan masyarakat
			Optimalisasi kualitas air minum dan sarana prasarana sanitasi dalam mencegah penyebaran penyakit
			Memperkuat pengawasan keamanan kesehatan makanan dan minuman
			Meningkatkan pengawasan pekerja migran dan aplikasi kencan yang berpotensi menyebarkan penyakit menular
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional secara mandiri	Optimalisasi edukasi pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
	1C. Meningkatnya daya saing pemuda	Mendorong daya saing pemuda dengan penguatan partisipasi dalam organisasi, kewirausahaan, dan olahraga	Meningkatkan pembinaan pemuda untuk menjadi pelopor dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat	2A. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Mengembangkan minat generasi muda untuk berwirausaha dengan pembinaan dan sosialisasi kewirausahaan	Mengembangkan kewirausahaan untuk generasi muda
			Meningkatkan kualitas sarana dan pelatihan olahraga bersertifikat
			Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi wirausaha muda yang berpotensi
			Mengembangkan jaringan dan kemitraan antara wirausaha muda dan pengusaha mapan atau mentor wirausaha
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan	Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial terutama bagi penyandang PPKS dan disabilitas
		Meningkatkan penguatan pengarusutamaan gender	Memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai bersyarat
		Memperkuat kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi, keluarga, dan perlindungan anak	Mendorong penggunaan sarana dan prasarana yang inklusif bagi seluruh warga
			Meningkatkan pemberdayaan keluarga
			Meningkatkan efektivitas lembaga yang mendukung peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan hak-hak anak
			Mendorong edukasi masyarakat tentang pentingnya pernikahan di usia yang tepat untuk mencegah pernikahan usia dini
			Meningkatkan sarana untuk pemenuhan metode kontrasepsi yang efektif dan sesuai untuk pasangan usia subur (PUS)
			Mendorong edukasi keluarga berencana tentang peran laki-laki maupun perempuan dalam program KB secara merata
			Memperluas cakupan layanan keluarga lansia di seluruh daerah

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan prasarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat
			Mendorong pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur bantuan sosial
			Menguatkan fasilitas penanganan korban bencana yang terintegrasi
			Meningkatkan persentase belanja bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran
			Mendorong kebijakan responsif untuk penanganan kekerasan, kriminalitas, dan penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat
			Penyediaan layanan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar
		Memperkuat kualitas, keaktifan lembaga swadaya masyarakat	Meningkatkan keaktifan lembaga swadaya masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian insentif yang berkompeten
			Mengembangkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat
			Menguatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat
		Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan pemberdayaan masyarakat	Optimalisasi keterbaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
		Meningkatkan perlindungan dan pemahaman hak-hak perempuan dan anak, serta pengelolaan penanganan kekerasan dalam rumah tangga	Menguatkan penghormatan terhadap hak perempuan dan anak
			Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlakuan yang baik terhadap perempuan dan anak berbasis kesetaraan
			Memperkuat lembaga perlindungan perempuan dan anak di seluruh daerah
		Memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatkan edukasi mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan pekerjaan

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2B. Meningkatnya kesempatan dan daya saing tenaga kerja		Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan (DPR/DPRD/eselon I/II)
		Meningkatkan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja	Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja
		Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan	Mendorong peningkatan keterampilan angkatan kerja perempuan
		Meningkatkan partisipasi pekerja/buruh dalam program BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatkan sosialisasi kepada pekerja dan badan usaha mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat jaminan sosial bagi kesejahteraan pekerja
			Mengoptimalkan pendataan pekerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
			Mengembangkan insentif bagi badan usaha untuk mendorong pendaftaran seluruh pekerja dalam menerima program jaminan sosial
			Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja
			Meningkatkan cakupan jaminan sosial pekerja formal dan informal, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas
			Mendorong partisipasi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan, peningkatan daya saing, dan perlindungan terhadap pekerja migran	Meningkatkan akses pelatihan bagi tenaga kerja
			Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja global dan lokal
			Optimalisasi pengembangan usaha mandiri dan persiapan menjadi pekerja migran
			Perluasan kerja formal di sektor strategis dan pengurangan setengah pengangguran

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3. Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah berbasis potensi unggulan	3A. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatkan nilai ekspor perdagangan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku	Meningkatkan diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk
			Meningkatkan efektivitas sistem ekspor dalam memenuhi permintaan produk ekspor
			Meningkatkan ketahanan pasokan bahan baku dan pengelolaan sumber daya alam untuk kebutuhan ekspor
			Meningkatkan kerja sama dengan sektor perikanan dan badan usaha dalam ekspansi produk ekspor
			Meningkatkan riset dan pengembangan untuk menciptakan alternatif bahan baku produk ekspor
		Memperkuat pembinaan dan dukungan untuk kelompok pedagang/usaha informal	Meningkatkan akses modal usaha bagi pedagang maupun usaha informal secara merata
			Mengembangkan pelatihan dan pendampingan manajerial dan operasional untuk usaha informal
		Meningkatkan kualitas dan variasi fasilitas wisata	Meningkatkan integrasi infrastruktur transportasi dalam meningkatkan konektivitas antar lokasi wisata
			Meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata dengan menyusun strategi kolaboratif
			Meningkatkan promosi destinasi wisata melalui platform digital
			Meningkatkan pemerataan amenities dan fasilitas penunjang wisata di seluruh lokasi
			Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan penyediaan fasilitas wisata ramah lingkungan

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3B. Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan penguatan koperasi serta UKM di daerah	Meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap koperasi dan UKM untuk memperbaiki manajemen dan operasional yang lebih berkelanjutan
			Mendorong regenerasi pengurus koperasi dan menguatkan keberlanjutan usaha koperasi
			Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan BPR/LKM
		Meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Mengembangkan pembinaan yang intensif kepada koperasi dan UMKM
			Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar
			Mendorong UMKM dalam peningkatan dan pengembangan kualitas produk
			Mengembangkan sistem harga yang transparan dan berkeadilan dalam pasar UMKM
			Penguatan kapasitas manajerial dan inovasi UMKM melalui inkubator bisnis
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan koordinasi hak kekayaan intelektual	Meningkatkan koordinasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri dalam pengembangan teknologi yang aplikatif
			Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan DAU
			Meningkatkan edukasi masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual
		Meningkatkan pemenuhan pemanfaatan potensi perekonomian desa dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya lokal	Mendorong pelatihan pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa
			Meningkatkan kompetensi personel dalam pengelolaan potensi desa

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan
			Pengembangan kelembagaan petani dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan (Bumdes/Bumdesma)
		Meningkatkan serapan investasi dengan pemahaman pelaku usaha	Memperbaiki akses perizinan dengan menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif
		Meningkatkan akses terhadap informasi peluang investasi dan pengetahuan perizinan	Mengoptimalkan tata ruang yang berpotensi menarik investasi dan pembangunan yang berkelanjutan
			Meningkatkan sosialisasi dan promosi mengenai proses perizinan berbasis online
			Mengembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi untuk menyediakan data peluang investasi
		Meningkatkan pelaksanaan mal pelayanan publik	Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk kemudahan layanan publik di mal pelayanan publik
			Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik yang terpadu
Misi 2: Menjaga Alam dan lingkungan untuk menghadirkan ekosistem hijau dan ramah serta dapat mengakomodir kehidupan masyarakat Jembrana			
1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur	1A. Meningkatnya infrastruktur sarana prasarana yang terintegrasi	Optimalisasi kualitas jaringan jalan mobilitas dan aksesibilitas yang lebih baik	Optimalisasi perbaikan jalan yang rusak dan meningkatkan kualitas jalan kabupaten
			Mengembangkan sistem pemeliharaan jalan berbasis teknologi untuk memantau kondisi jalan secara real-time dan merencanakan perbaikan secara lebih terarah

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pengelolaan dan kualitas layanan transportasi dan lalu lintas	Meningkatkan efisiensi layanan angkutan umum
			Mendorong penyediaan alat kelengkapan uji dan sistem BLU-e untuk pengawasan dan evaluasi yang lebih baik
			Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan transportasi umum
			Mengoptimalkan pengelolaan parkir dengan menggunakan alat parkir berbasis elektronik
		Meningkatkan kualitas pembangunan trotoar dan jaringan drainase	Memperluas prioritas pada kawasan padat penduduk dan jalur utama transportasi
			Memperluas dan meningkatkan jaringan drainase
		Meningkatkan pembangunan dan kualitas saluran irigasi pada ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang merata di seluruh daerah pertanian
		Memperluas dan mengoptimalkan pengelolaan air bersih yang merata	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman
			Optimalisasi penyediaan air bersih dan perluasan sambungan rumah
			Mendorong inovasi kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor
			Menyediakan insentif untuk penghematan air sektor pertanian dan industri
		Mendorong akses dan kualitas layanan telekomunikasi serta investasi di daerah dengan topografi berbukit	Meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan internet broadband pada daerah yang kurang terlayani
			Mengembangkan infrastruktur yang lebih efisien dan memperluas pilihan penyedia layanan
		Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan pemanfaatan lahan	Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan memastikan kepatuhan terhadap RTRW
			Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi pelaksanaan sertifikasi dan legalisasi lahan
			Mendorong kepemilikan rumah layak dan terjangkau oleh rumah tangga miskin dan rentan
			Rehabilitasi infrastruktur rumah tangga dan perumahan kumuh
	1B. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang	Meningkatkan efektivitas proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Meningkatkan integrasi antara RDTR online dan online single submission untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan dan pemanfaatan ruang
			Mengembangkan sistem digital perizinan dan pemanfaatan ruang yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi
			Mendorong penegakan tata ruang melalui evaluasi dan pemetaan komprehensif terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)
			Penyusunan regulasi zonasi berbasis fungsi kawasan dan potensi wilayah
			Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk perlindungan ruang dan pemanfaatannya secara berimbang
		Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan fungsi lahan	Optimalisasi penyesuaian dan harmonisasi data fungsi lahan
			Menguatkan pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai
			Mengintensifkan pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan (alih fungsi lahan produktif dan kawasan lindung)
			Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan lahan

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	2A. Meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup dan perlindungan keberlanjutan ekosistem	Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup
			Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung
			Rehabilitasi kawasan kritis dan ekosistem esensial
			Perencanaan dan investasi infrastruktur hijau untuk adaptasi
			Penyusunan dan implementasi dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
			Penyediaan ruang terbuka hijau dan drainase perkotaan
		Mengoptimalkan pengelolaan dan pengurangan sampah untuk keberlanjutan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pengelolaan sampah di seluruh wilayah
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan dan pengurangan sampah
			Optimalisasi pengaturan retribusi untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pengelolaan sampah
			Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan industri
			Penguatan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan ISO 14001
			Mendorong pengembangan dan pendaftaran produk ramah lingkungan lokal
	2B. Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan	Menguatkan ketahanan pangan daerah	Mendorong ketersediaan tenaga kerja di sektor pertanian
			Memperbaiki dan mengoptimalkan sistem irigasi untuk meningkatkan daya dukung pertanian

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mengembangkan sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan serangan hama
			Mendukung akster sarana produksi tani yang terjangkau
			Penetapan dan perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di wilayah strategis pertanian
			Diversifikasi pangan lokal dan edukasi konsumsi bergizi
		Meningkatkan kualitas air bersih	Optimalisasi pengelolaan instalasi pengolahan air limbah domestik
			Peningkatan pengawasan terhadap titik-titik pencemaran sungai
			Meningkatkan pengelolaan dan pemantauan kualitas air bersih
		Meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat melalui edukasi dan pengendalian harga ikan	Mendorong pengenalan produk olahan ikan yang lebih terjangkau
			Mengembangkan edukasi masyarakat mengenai manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan dan menjelaskan pentingnya ikan sebagai sumber gizi
			Meningkatkan efisiensi distribusi ikan dalam mengontrol stabilitas harga ikan
			Dukungan akses terhadap pangan sehat dan peningkatan produksi ikan
		Mengembangkan pembinaan dan kapasitas kelompok nelayan dan kelompok tani	Meningkatkan cakupan pembinaan kelompok nelayan dan kelompok tani
			Meningkatkan akses ke modal dan teknologi untuk kelompok nelayan dan tani guna meningkatkan hasil produksi
			Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			untuk memperkuat kapasitas kelompok nelayan dan tani
		Meningkatkan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Mengembangkan pembangunan infrastruktur pembangkit energi terbarukan
			Meningkatkan investasi dalam teknologi penyimpanan energi
			Mendukung peningkatan investasi, penelitian, dan pengembangan di bidang energi terbarukan
			Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan listrik sektor produktif
	2C. Meningkatkan resiliensi daerah dan menurunnya kerentanan bencana	Meningkatkan penguatan kelembagaan bencana dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	Mendorong penyuluhan dan pelatihan kebencanaan dengan partisipasi masyarakat
			Meningkatkan penyebaran informasi penanggulangan bencana secara mitigasi dan evakuasi secara luas
			Peningkatan literasi kebencanaan di sekolah, desa, dan komunitas
		Menguatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana	Optimalisasi pengelolaan kesiapsiagaan, penanggulangan, dan penanganan bencana
			Pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana yang terintegrasi
			Integrasi analisis risiko bencana dan iklim dalam RTRW dan RDTR
			Program desa tangguh bencana & simulasi berkala
Misi 3: Menjaga Agama, budaya, adat dan tradisi Jembrana			
1. Meningkatkan upaya pelestarian nilai agama, budaya dan kearifan lokal	1A. Meningkatkan pengembangan dan	Meningkatkan pengelolaan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya melalui sosialisasi dan edukasi

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pemanfaatan objek pemajuan budaya		Mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk pelestarian situs dan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi
		Mengembangkan potensi objek budaya sebagai daya tarik wisata dan pelestarian budaya lokal	Mendorong pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi objek budaya melalui berbagai platform dan event budaya
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya	Mendorong pembentukan komunitas atau kelompok yang fokus pada pelestarian adat dan tradisi lokal
			Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan untuk menyelenggarakan festival budaya
		Memperkuat peran lembaga budaya dalam pelestarian adat dan tradisi	Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kebudayaan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya
		Mendorong penggunaan teknologi untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan warisan budaya	Mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait budaya dan tradisi lokal
			Mendorong digitalisasi objek-objek budaya sebagai sarana pelestarian dan promosi
		Mengoptimalkan pengembangan pendidikan formal dan nonformal keagamaan serta budaya	Memfasilitasi kegiatan komunitas masyarakat yang memiliki minat di bidang otomotif, seni, dan hobi
			Mengembangkan pendidikan lembaga pendidikan formal untuk berbagai agama
			Mendukung pendirian perguruan tinggi keagamaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1B. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama melalui pendidikan dan dialog	Mengembangkan dialog antar agama secara rutin untuk memperkuat toleransi
			Meningkatkan peran tokoh agama dalam membangun kesadaran tentang pentingnya kerukunan dalam masyarakat
		Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan lintas agama	Mengembangkan forum lintas agama dalam suasana damai
			Mendorong kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan semua umat beragama
Misi 4: Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif			
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif	1A. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Memperkuat formasi pelayanan publik	Mengoptimalkan pelayanan publik di seluruh daerah
			Menyediakan informasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat
		Optimalisasi integrasi sistem informasi dan kualitas layanan perangkat daerah	Meningkatkan integrasi sistem informasi perangkat daerah dengan menyediakan layanan penghubung (API)
			Mengoptimalkan penyelenggaraan SPBE dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan
			Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan persandian
			Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan persandian, dan sistem informasi yang lebih efisien
		Optimalisasi cakupan dan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan fasilitas dan akses layanan administrasi kependudukan di seluruh daerah
			Optimalisasi edukasi masyarakat tentang pentingnya KTP-el
			Meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pembuatan akta nikah di seluruh daerah

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	1B. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Menguatkan efisiensi SDM layanan administrasi kependudukan
			Mendorong pencatatan statistik dan vital register (kelahiran dan kematian)
		Optimalisasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas data dan dokumen perencanaan serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
		Optimalisasi penyusunan dan pencapaian indikator kinerja	Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART)
		Optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatkan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah
			Mendorong investasi di sektor swasta untuk pembangunan daerah
			Mendorong pengembangan diversifikasi sumber pendapatan daerah pada sektor industri kreatif, pertanian, dan perikanan
			Penguatan sistem perpajakan dan retribusi daerah melalui digitalisasi layanan
		Optimalisasi pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD	Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia, tata kelola operasional, dan evaluasi pengawasan kinerja BUMD
		Meningkatkan profesionalitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang kompeten
			Mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang transparan
		Optimalisasi pengelolaan arsip	Optimalisasi kompetensi personel pengelolaan arsip

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendorong pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan arsip yang lebih efisien
		Meningkatkan kualitas layanan terhadap DPRD	Meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab anggota DPRD
			Meningkatkan kualitas personel pendukung DPRD
		Meningkatkan penguatan tindak lanjut terhadap temuan BPK dan pengawasan di perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga
			Meningkatkan pelatihan dan kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan tindak lanjut yang tepat terhadap temuan BPK
			Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK
			Penjaminan kualitas laporan keuangan (WTP)
		Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah
			Mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah
	1C. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Meningkatkan pengelolaan efisiensi anggaran dan pengelolaan kebutuhan informasi melalui sistem yang terintegrasi	Membangun sistem terintegrasi yang mempermudah perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan informasi kebutuhan ASN
			Mendukung pengelolaan berbasis data dan efisiensi
	1D. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum	Meningkatkan upaya-upaya penegakan Perda	Pengembangan pelaksanaan pengawasan pemerintah yang melibatkan masyarakat
			Menguatkan sanksi terhadap pelanggaran Perda
			Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan perda

MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Memperkuat penerapan sanksi, ketertiban umum, dan keterbukaan informasi pada perencanaan dan pembangunan daerah	Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
			Memperkuat patroli dan deteksi dini untuk mencegah gangguan ketertiban
			Mengembangkan kerja sama dengan media massa untuk penyebaran informasi publik
		Mendorong dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Mendorong penyediaan platform yang inklusif dengan aksesibilitas yang tinggi
		Meningkatkan pengembangan dan perluasan kemudahan proses pendaftaran ormas	Menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran ormas dengan memanfaatkan teknologi
			Mengembangkan sistem pendaftaran ormas yang lebih transparan dan mudah diakses
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum	Optimalisasi jumlah dan kompetensi personel yang menangani ketertiban umum
			Meningkatkan pelatihan pemadaman api bagi petugas
			Peningkatan sarana prasarana pemadam kebakaran di seluruh daerah

Sumber: Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan langkah operasional yang menjadi penjabaran dari strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029. Sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan berfungsi untuk memberikan panduan yang lebih spesifik dan terstruktur bagi perangkat daerah dalam merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Penyusunan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tantangan pembangunan yang dihadapi, sumber daya yang tersedia, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Jembrana. Arah kebijakan juga dirancang agar memiliki kejelasan dalam aspek waktu pelaksanaannya, sehingga implementasinya dapat berjalan secara terukur dan efektif dalam setiap tahap pembangunan. Tabel di atas merupakan arah kebijakan Kabupaten Jembrana untuk periode 2025-2029, yang telah disesuaikan dengan strategi pembangunan. Penjabaran arah kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Jembrana berlangsung secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan pada lima tahun pertama (periode 2025-2029) di Kabupaten Jembrana difokuskan pada Penguatan Modal Dasar Pembangunan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (2) Peningkatan sektor ekonomi lokal unggulan; (3) Peningkatan kualitas aparatur dan penghayatan kewarganegaraan masyarakat; (4) Memperkuat keamanan daerah dan peningkatan kerjasama daerah serta stabilitas ekonomi makro daerah; (5) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim; (6) Peningkatan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) Peningkatan layanan infrastruktur rumah tangga dan infrastruktur perkotaan; serta (8) Pengoptimalan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam.

Arah kebijakan dalam RPJMD tidak hanya dirancang sebagai pedoman jangka menengah selama lima tahun, tetapi juga diimplementasikan secara bertahap dalam satuan waktu tahunan dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap strategi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan pada masing-masing tahun. Dengan adanya tema tahunan, pelaksanaan arah kebijakan menjadi lebih fokus dan adaptif terhadap dinamika pembangunan serta tantangan yang dihadapi setiap periode. Selain itu, pembagian tahunan ini juga memudahkan evaluasi capaian

pembangunan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi guna memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Berikut merupakan fokus arah kebijakan setiap tahun untuk Kabupaten Jembrana:

1. Tahun 2026 – Penyiapan Fondasi Pelayanan Publik, Infrastruktur Dasar, dan Pelestarian Budaya
2. Tahun 2027 – Pengembangan Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan Infrastruktur
3. Tahun 2028 – Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan
4. Tahun 2029 – Penguatan Riset, Inovasi, Daya Saing Daerah dan Pemajuan Kebudayaan dalam Era Digital
5. Tahun 2030 – Terwujudnya Kabupaten Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat

Tabel 3.3 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2026–2030

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Jembrana Periode 1 (Tahun 2026-2030) "Penguatan Modal Dasar Pembangunan"					
Arah Kebijakan Tahun 2026		Arah Kebijakan Tahun 2027		Arah Kebijakan Tahun 2028	
Arah Kebijakan Tahun 2029		Arah Kebijakan Tahun 2030			
Penyiapan Fondasi Pelayanan Publik, Infrastruktur Dasar, dan Pelestarian Budaya		Pengembangan Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan Infrastruktur		Optimalisasi Sektor Industri, Perdagangan, dan Ketahanan Pangan Berbasis Keberlanjutan	
Penguatan Riset, Inovasi, Daya Saing Daerah dan Pemajuan Kebudayaan dalam Era Digital		Terwujudnya Kabupaten Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat			
Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri	Penguatan kualitas dan akses pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat sebagai fondasi mempersiapkan masyarakat yang berdaya saing dan mandiri	Mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat	Penguatan kerjasama lintas sektor dalam rangka penciptaan lapangan kerja khususnya di bidang industri dan perdagangan	Pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan peluang investasi	Mewujudkan masyarakat Jembrana yang unggul, inovatif, adaptif, dan produktif
	Penguatan kualitas infrastruktur wilayah dan kebencanaan serta optimalisasi pemanfaatan ruang	Optimalisasi pengelolaan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan	Peningkatan konsumsi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan kapasitas kelompok nelayan serta petani	Mendorong riset dan inovasi berbasis teknologi dalam mengembangkan ekosistem hijau dan meningkatkan akses ketahanan pangan	Mewujudkan alam Jembrana yang tangguh dan berkelanjutan didukung dengan infrastruktur ramah lingkungan
	Mendorong upaya pelestarian budaya, adat, dan tradisi melalui kegiatan pendidikan formal dan nonformal	Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan dan pihak terkait untuk memperkuat pengelolaan kearifan lokal	Mendorong kolaborasi dan partisipasi lembaga kebudayaan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal	Mendorong digitalisasi dalam proses pengelolaan dan pelestarian budaya, adat, dan tradisi	Mewujudkan keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal dan menciptakan suasana damai antar elemen masyarakat di lingkungan Kabupaten Jembrana
	Penguatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	Mendorong peningkatan kapasitas ASN dalam mengelola penyelenggaraan daerah yang akuntabel	Penguatan kualitas produk hukum daerah dan penegakan hukum yang transparan	Penguatan infrastruktur SPBE dan pengembangan sistem layanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi yang efisien dan adaptif

Sumber: Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 2025-2029

3.2.2. PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Perumusan program pembangunan daerah dilakukan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan untuk menentukan program prioritas yang selaras dengan sasaran pembangunan. Penyusunan program ini mempertimbangkan keterpaduan antara strategi yang dipilih dengan target pembangunan serta merujuk pada nomenklatur program dari Kementerian Dalam Negeri.

Program pembangunan daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada indikator kinerja program dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang berlandaskan pada visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati. Dalam dokumen ini dijabarkan program pembangunan daerah prioritas yang terdiri dari 58 (lima puluh delapan) program prioritas RPJMD yang berasal dari 8 (delapan) bidang prioritas di antaranya, yaitu:

1. Bidang Prioritas Pendidikan
2. Bidang Prioritas Kesehatan
3. Bidang Prioritas Perekonomian/Daya Beli Masyarakat
4. Bidang Prioritas Agama, Budaya, Adat, Tradisi dan Olahraga
5. Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
6. Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan
7. Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial
8. Bidang Prioritas Pelayanan Publik

Sementara itu, 58 (lima puluh delapan) program prioritas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bidang Prioritas Pendidikan

1. Satu Keluarga Miskin, Satu Pendidikan Tinggi
2. Meningkatkan nilai beasiswa bagi mahasiswa asal Jembrana yang berprestasi menjadi Rp.4.500.000 per semester
3. Mendorong pengembangan perguruan tinggi negeri untuk membuka akses pendidikan tinggi yang lebih mudah bagi masyarakat Jembrana
4. Subsidi biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta
5. Angkutan siswa gratis bagi siswa di wilayah-wilayah yang aksesnya jauh dari sekolah
6. Pemberian tes psikologi gratis untuk semua siswa guna mengarahkan pengembangan talenta generasi muda Jembrana

Bidang Prioritas Kesehatan

7. Penyediaan layanan mobil antar jemput pasien rawat jalan ke luar Jembrana di Provinsi Bali
8. Penyediaan rumah singgah di Denpasar sekaligus menjadi showcase produk UMKM Jembrana dan meeting point warga Jembrana

9. Peningkatan akses, kualitas layanan dan sarana prasarana POLINDES/PUSTU, PUSKESMAS dan RSUD Negara
10. Layanan pusat pendampingan mental health (kesehatan jiwa)

Bidang Prioritas Perekonomian/Daya Beli Masyarakat

11. Pengembangan Jembrana CREATIVE HUB sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan laboratorium inovasi dan kreasi bagi masyarakat Jembrana, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z untuk menghadapi persaingan kompetitif ke depan
12. Fasilitasi permodalan bagi calon pekerja migran (PMI) asal Jembrana
13. Pengembangan Program *One Village One Product* di setiap desa sesuai dengan potensi yang dimiliki
14. Fasilitasi penciptaan produk dan brand lokal Jembrana sebagai *local pride* daerah serta menumbuhkan kecintaan kolektif untuk memanfaatkannya
15. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan kewirausahaan produktif dan kekinian bagi pemuda/pemudi Jembrana (pelatihan makanan dan minuman kekinian, barista, barber, usaha *e-commerce*/digital, keterampilan sebagai *content creator*)
16. Program BEDAH WARUNG di kawasan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat lokal
17. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor untuk berusaha di Jembrana tanpa mematikan potensi usaha lokal
18. Fasilitasi dan optimalisasi peran pengusaha muda Jembrana
19. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) sesuai dengan potensi wilayah dan masyarakat lokal serta pariwisata berbasis pertanian (*agrotourism*)

Bidang Prioritas Agama, Budaya, Adat, Tradisi dan Olahraga

20. Penyediaan kendaraan roda empat (pick up) untuk mendukung pelaksanaan agama budaya, adat, tradisi dan kegiatan sosial lainnya di masing-masing desa/kelurahan
21. Ngaben masal dan Metatah masal secara gratis
22. Bantuan untuk tempat/rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama untuk masing-masing agama secara proporsional
23. Peningkatan bantuan untuk organisasi keagamaan
24. Peningkatan insentif untuk tokoh masyarakat/tokoh agama (sulinggih, pemangku, bendesa, kelian tempek, guru ngaji, juru arah, kelian subak, takmir masjid/petugas ditempat/rumah ibadah)
25. Santri Harmoni: fasilitasi kedatangan dan kepulangan santri, bantuan keuangan untuk santri berprestasi, dan pelatihan ketrampilan digital dan *entrepreneurship* bagi santri

26. Mendorong dan memfasilitasi pendirian satuan pendidikan formal keagamaan
27. Penyelenggaraan pentas seni dan kejuaraan olahraga untuk mengembangkan minat dan bakat Masyarakat, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z
 - Penyelenggaraan Festival Semarak Jembrana dirangkaikan dengan perayaan HUT Kota setiap tahun (Festival Kesenian, Festival Makanan, Parade Kesenian Budaya (PKB) dan Festival Pakaian Adat Nusantara Nasional)
 - Penyelenggaraan Festival Jegog secara rutin
 - Penyelenggaraan Festival Seni Pelajar Jembrana setiap tahun
 - Penyelenggaraan Festival Makepung di luar kejuaraan rutin
 - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah (sepakbola, *volley*, *e-sport* dan olahraga lainnya) secara rutin
 - Penyelenggaraan JEMBRANA CREATIVE FESTIVAL setiap tahun secara rutin (pentas musik, kesenian, kuliner, fashion, produk UMKM)
28. Revitalisasi lapangan olahraga di desa/kelurahan
29. Fasilitasi kegiatan komunitas masyarakat (otomotif/motor, kesenian, dan penghobi)

Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

30. Pengembangan produk pertanian unggulan daerah utamanya kakao, kelapa dan pisang dari hulu ke hilir, sehingga menjadikan Jembrana sebagai pusat kakao dan pusat komoditas upakara di Bali
31. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, pompanisasi dan pipanisasi)
32. Pemberian dana talangan untuk menjaga stabilitas harga padi/gabah petani
33. Penguatan kelembagaan subak dengan meningkatkan bantuan keuangan untuk subak
34. Pengembangan peternakan kambing, sapi dan babi melalui pemberdayaan kelompok-kelompok ternak
35. Subsidi gagal panen petani
36. Optimalisasi produktivitas pertanian hortikultura
37. Mendorong terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sentra kawasan nelayan
38. Mempermudah dan memperluas akses rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan

Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan

39. Penataan Kawasan Loloan sebagai destinasi wisata religi
40. Pemeliharaan Infrastruktur jalan, drainase dan infrastruktur pendukung lainnya secara proporsional dan merata di seluruh wilayah

41. Penataan Kawasan *Civic Center*, Pura Jagatnatha dan Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno sebagai kawasan terintegrasi: pusat pemerintahan, rekreasi dan hiburan, edukasi, serta olahraga dan seni
42. Pengolahan sampah plastik daur ulang produktif
43. Mendorong dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Taman Kerthi Bali Semesta di Kecamatan Pekutatan (*Theme Park*), Penataan Pelabuhan Gilimanuk, dan Penataan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan

Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial

44. Bedah rumah untuk keluarga miskin
45. Santunan kematian
46. Bantuan penunggu pasien
47. Menciptakan Jembrana yang inklusif dan ramah disabilitas

Bidang Prioritas Pelayanan Publik

48. Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 setel per tahun
49. Mendorong proses penataan Tenaga Non-ASN (peningkatan menjadi ASN) secara adil dan transparan
50. Penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat (*right man on the right place*) secara transparan
51. Pengembangan layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sampai ke desa/ kelurahan (untuk mendapatkan layanan dari instansi pada MPP, masyarakat bisa datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan)
52. BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah
53. Memastikan Aparatur Sipil Negara (tenaga Kesehatan, guru/tenaga pendidik, dan tenaga administrasi) mendapat hak-haknya (Tunjangan Hari Raya, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan Profesi Guru) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
54. Akselerasi transformasi birokrasi daerah untuk menciptakan budaya kerja yang dialogis, koordinatif, adaptif, *agile* (lincah) dan *fluid* (cair)
55. Pengembangan kompetensi ASN (tenaga kesehatan, guru/tenaga pendidik, dan tenaga administrasi) secara berkelanjutan baik melalui pelatihan klasikal maupun pelatihan non klasikal
56. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
57. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

58. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari politik aktif

Dari 58 (lima puluh delapan) program prioritas tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) yang menjadi Program Unggulan. Program ini disusun guna menyelesaikan permasalahan dan merespon berbagai isu strategis untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Jembrana. Program Unggulan tersebut sebagai berikut:

Bidang Prioritas Pendidikan

1. Satu keluarga miskin, Satu pendidikan tinggi
2. Meningkatkan nilai beasiswa bagi mahasiswa asal Jembrana yang berprestasi menjadi Rp 4.500.000 per semester
3. Pemberian test psikologi gratis untuk semua siswa guna mengarahkan pengembangan talenta generasi muda Jembrana

Bidang Prioritas Kesehatan

4. Penyediaan Rumah Singgah di Denpasar sekaligus menjadi *showcase* produk UMKM Jembrana dan *meeting point* warga Jembrana.
5. Penyediaan layanan mobil antar jemput pasien rawat jalan keluar Jembrana di Provinsi Bali
6. Layanan pusat pendampingan *mental health* (kesehatan jiwa)

Bidang Prioritas Perekonomian/Daya Beli Masyarakat

7. Pengembangan Jembrana CREATIVE HUB sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan laboratorium inovasi dan kreasi bagi masyarakat Jembrana, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z untuk menghadapi persaingan kompetitif ke depan
8. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan kewirausahaan produktif dan kekinian bagi pemuda/pemudi Jembrana (pelatihan makanan dan minuman kekinian, barista, barber, usaha *e-commerce/digital*, keterampilan sebagai *content creator*)
9. Program BEDAH WARUNG di kawasan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat lokal

Bidang Prioritas Agama, Budaya, Adat, Tradisi dan Olahraga

10. Penyediaan kendaraan roda empat (*pick up*) untuk mendukung pelaksanaan agama, budaya, adat, tradisi dan kegiatan sosial lainnya di masing-masing desa/kelurahan
11. Ngaben masal dan Metatah massal secara gratis
12. Santri Harmoni: fasilitasi kedatangan dan kepulangan santri, bantuan keuangan untuk santri berprestasi dan pelatihan ketrampilan digital dan *entrepreneurship* bagi santri
13. Penyelenggaraan Festival Semarak Jembrana di rangkaian dengan perayaan HUT Kota setiap tahun (Festival Kesenian, Festival Makanan,

Parade Kesenian Budaya (PKB) dan Festival Pakaian Adat Nusantara Nasional)

14. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah (sepak bola, *volley*, *e-sport* dan olahraga lainnya) secara rutin
15. Penyelenggaraan JEMBRANA CREATIVE FESTIVAL setiap tahun secara rutin (pentas musik, kesenian, kuliner, fashion, produk UMKM)

Bidang Prioritas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

16. Penguatan kelembagaan subak dengan meningkatkan bantuan keuangan untuk subak
17. Pengembangan peternakan kambing, sapi dan babi melalui pemberdayaan kelompok-kelompok ternak

Bidang Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan

18. Penataan Kawasan Loloan sebagai destinasi wisata religi
19. Pemeliharaan Infrastruktur jalan, drainase dan infrastruktur pendukung lainnya secara proporsional dan merata di seluruh wilayah
20. Pengolahan sampah plastik daur ulang produktif
21. Mendorong dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk -Megwi, Taman Kerthi Bali Semesta di Kecamatan Pekutatan (*Theme Park*), Penataan Pelabuhan Gilimanuk, dan Penataan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambangan

Bidang Prioritas Kesejahteraan Sosial

22. Menciptakan Jembrana yang inklusi dan ramah disabilitas

Bidang Prioritas Pelayanan Publik

23. Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 setel per tahun
24. BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah

Tabel 3.4 Perumusan Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN JEMBRANA MENUJU JEMBRANA YANG MAJU, HARMONI DAN BERMARTABAT DENGAN MEMBANGUN MANUSIA, ALAM, DAN BUDAYA”	Misi 1: Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri	T1. Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berkarakter			Indeks Pembangunan Manusia		
			1A. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bidang Pendidikan: 1. Satu Keluarga Miskin, Satu Pendidikan Tinggi 2. Meningkatkan nilai beasiswa bagi mahasiswa asal Jembrana yang berprestasi menjadi Rp.4.500.000 per semester 3. Mendorong pengembangan perguruan tinggi negeri untuk membuka akses pendidikan tinggi yang lebih mudah bagi masyarakat Jembrana 4. Program subsidi biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta 5. Angkutan siswa gratis bagi siswa di wilayah-wilayah yang aksesnya jauh dari sekolah 6. Pemberian tes psikologi gratis untuk semua siswa guna mengarahkan pengembangan talenta generasi muda Jembrana



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD; 2). Persentase anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah dasar; 3). Persentase anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bidang Pendidikan Keagamaan: 1. Mendorong dan memfasilitasi pendirian satuan pendidikan formal keagamaan
			1B. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bidang Kesehatan: 1. Penyediaan layanan mobil antar jemput pasien rawat jalan ke luar Jembrana di Provinsi Bali 2. Layanan pusat pendampingan <i>mental health</i> (kesehatan jiwa) 3. Peningkatan akses, kualitas layanan dan sarana prasarana POLINDES/PUSTU, PUSKESMAS, dan RSUD Negara

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Layanan di Fasilitas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			1C. Meningkatnya daya saing pemuda	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Bidang Kepemudaan: 1. Penyelenggaraan pentas seni dan kejuaraan olahraga untuk mengembangkan minat dan bakat Masyarakat, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z: - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah (sepak bola, <i>volley</i> , <i>e-sport</i> dan olahraga lainnya) secara rutin - Penyelenggaraan JEMBRANA CREATIVE FESTIVAL setiap tahun secara rutin (pentas musik, kesenian, kuliner, fashion, produk UMKM) 2. Revitalisasi lapangan olahraga di desa/kelurahan
		2. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan sosial masyarakat		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			2A. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Penduduk Miskin	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kesejahteraan Sosial: 1. Santunan kematian 2. Bantuan penunggu pasien

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3. Menciptakan Jembrana yang inklusif dan ramah disabilitas
				Meningkatnya Efektivitas Kerja sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Perekonomian Daya Beli Masyarakat: 1. Pengembangan program <i>one village one product</i> di setiap desa sesuai dengan potensi yang dimiliki
				Meningkatnya Daya saing UMKM	Proposi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2. Penyediaan rumah singgah di Denpasar sekaligus menjadi showcase produk UMKM Jembrana dan <i>meeting point</i> warga Jembrana
			2B. Meningkatkan kesempatan dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Perekonomian Daya Beli Masyarakat: 1. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan kewirausahaan produktif dan kekinian bagi pemuda/pemudi Jembrana (pelatihan makanan dan minuman kekinian, barista, barber, usaha <i>e-commerce</i> /digital, keterampilan sebagai content creator)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
		3. Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah berbasis potensi unggulan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
			3A. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Meningkatnya jaringan dan bangunan irigasi berkondisi baik daerah	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase peningkatan jaringan dan bangunan irigasi berkondisi baik	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan: 1. Pengembangan produk pertanian unggulan daerah utamanya kakao, kelapa dan pisang dari hulu ke hilir, sehingga menjadikan Jembrana sebagai pusat kakao dan pusat komoditas upakara di Bali 2. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, pompanisasi dan pipanisasi) 3. Pemberian dana talangan untuk menjaga stabilitas harga padi/gabah petani 4. Penguatan kelembagaan subak dengan meningkatkan bantuan keuangan untuk subak 5. Pengembangan peternakan kambing, sapi dan babi melalui pemberdayaan kelompok-kelompok ternak 6. Subsidi gagal panen petani 7. Optimalisasi produktivitas pertanian hortikultura 8. Mendorong terbangunnya

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
							Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sentra kawasan nelayan 9. Mempermudah dan memperluas akses rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan
				Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Prosentase Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bidang Perekonomian dan Peningkatan Daya Beli Masyarakat: 1. Pengembangan Jembrana CREATIVE HUB sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan laboratorium inovasi dan kreasi bagi masyarakat Jembrana, khususnya Generasi Milenial dan Gen Z untuk menghadapi persaingan kompetitif ke depan 2. Fasilitasi permodalan bagi calon pekerja migran (PMI) asal Jembrana 3. Pengembangan Program One Village One Product di setiap desa sesuai dengan potensi yang dimiliki 4. Fasilitasi penciptaan produk dan brand lokal Jembrana sebagai <i>local pride</i> daerah serta menumbuhkan kecintaan kolektif untuk memanfaatkannya
				Meningkatnya Penempatan dan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya Efektivitas Kerja sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	5. Program BEDAH WARUNG di kawasan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat lokal
				Meningkatnya Daya saing UMKM	Proposi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan barang efesien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			3B. Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat investor untuk berusaha di Jembrana tanpa mematikan potensi usaha lokal
				Meningkatnya Prooduktivitas Tenaga Kerja	Rasio Wirausaha Muda	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan kewirausahaan produktif dan kekinian bagi pemuda/pemudi Jembrana (pelatihan makanan dan minuman kekinian, barista, barber, usaha e-commerce/digital, keterampilan sebagai content creator)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya Daya saing UMKM	Proposi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2. Fasilitasi dan optimalisasi peran pengusaha muda Jembrana
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) sesuai dengan potensi wilayah dan masyarakat lokal serta pariwisata berbasis pertanian (agrotourism)
	Misi 2: Menjaga Alam dan Lingkungan untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Masyarakat Jembrana	1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		
			1A. Meningkatnya infrastruktur sarana prasarana yang terintegrasi	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: 1. Penataan Kawasan Loloan sebagai destinasi wisata religi 2. Pemeliharaan infrastruktur jalan, drainase dan infrastruktur pendukung lainnya secara proporsional dan merata di seluruh wilayah 3. Penataan Kawasan Civic Center, Pura Jagatnatha dan Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno sebagai kawasan terintegrasi: pusat pemerintahan, rekreasi dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	hiburan, edukasi, serta olahraga dan seni 4. Pengolahan sampah plastik daur ulang produktif 5. Mendorong dan memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Taman Kerthi Bali Semesta di Kecamatan Pekutatan (Theme Park), Penataan Pelabuhan Gilimanuk, dan Penataan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pengambengan
				Meningkatnya Tata kelola Persampahan		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pemeliharaan infrastruktur jalan, drainase dan infrastruktur pendukung lainnya secara proporsional dan merata di seluruh wilayah
				Meningkatnya kualitas hunian dan pengurangan kawasan permukiman kumuh	Persentase jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Bedah rumah untuk keluarga miskin
			1B. Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang		Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Penataan Kawasan Civic Center, Pura Jagatnatha dan Gedung Kesenian Dr. Ir. Soekarno sebagai kawasan terintegrasi:

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
							pusat pemerintahan, rekreasi dan hiburan, edukasi, serta olahraga dan seni
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan			Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		
					Indeks Risiko Bencana		
			2A. Meningkatnya nilai Indeks Kualitas Udara, Air, dan Tutupan Lahan	Meningkatnya Tata kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Program pengolahan sampah plastik daur ulang produktif
			2B. Meningkatnya ketahanan energi, air, dan pangan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: 1. Pengembangan peternakan kambing, sapi dan babi melalui pemberdayaan kelompok-kelompok ternak 2. Optimalisasi produktivitas pertanian hortikultura
				Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan: 1. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, pompanisasi dan pipanisasi)
				Meningkatnya pengendalian dan	Persentase penanganan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan:

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				penanggulangan bencana pertanian		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Program subsidi gagal panen petani
			2C. Meningkatnya resiliensi daerah dan menurunnya kerentanan bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Indeks Ketahanan Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Misi 3: Menjaga Agama, Budaya, Adat, dan Tradisi Jembrana	1. Meningkatkan upaya pelestarian nilai agama, budaya, dan kearifan lokal			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
					Indeks Harmoni Indonesia		
			1A. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan budaya	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Agama, Budaya, Adat, Tradisi: 1. Penyediaan kendaraan roda empat (pick up) untuk mendukung pelaksanaan agama, budaya, adat, tradisi dan kegiatan sosial lainnya di masing-masing desa/kelurahan.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
							2. Fasilitasi kegiatan komunitas masyarakat (otomotif/motor, kesenian, dan penghobi) 3. Penyelenggaraan Festival Semarak Jembrana dirangkaikan dengan perayaan HUT Kota setiap tahun (Festival Kesenian, Festival Makanan, Parade Kesenian Budaya (PKB) dan Festival Pakaian Adat Nusantara Nasional) - Penyelenggaraan Festival Jegog secara rutin - Penyelenggaraan Festival Seni Pelajar Jembrana setiap tahun - Penyelenggaraan Festival Makepung di luar kejuaraan rutin
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1. Ngaben masal dan Metatah secara gratis
			1B. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Bantuan untuk tempat/rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama untuk masing-masing agama secara proporsional 2. Peningkatan bantuan untuk organisasi keagamaan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
					Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)		3. Peningkatan insentif untuk tokoh masyarakat/tokoh agama (sulinggih, pemangku, bendesa, kelian tempek, guru ngaji, juru arah, kelian subak, takmir masjid/petugas ditempat/rumah ibadah) 4. Santri harmoni: fasilitasi kedatangan dan kepulangan santri, bantuan keuangan untuk santri berprestasi dan pelatihan keterampilan digital dan enterpreneurship bagi santri
	Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif			Indeks Reformasi Birokrasi		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		
			1A. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Meningkatnya jangkauan dan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN	1. Pengembangan layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) sampai ke desa/ kelurahan (untuk mendapatkan layanan dari instansi pada MPP, masyarakat bisa datang ke kantor desa dengan membawa persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan) 2. BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintahan Daerah (Survei)	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah 3. Memastikan Aparatur Sipil Negara (tenaga Kesehatan, guru/tenaga pendidik, dan tenaga administrasi) mendapat hak-haknya (Tunjangan Hari Raya, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan Profesi Guru) sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Akselerasi transformasi birokrasi daerah untuk menciptakan budaya kerja yang dialogis, koordinatif, adaptif, agile (lincah) dan fluid (cair)
			1B. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
			1C. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1.Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	1. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 setel per tahun

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
				2.Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN 3.Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN 4.Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	formasi; 2. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya; 3. Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya; 4. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		2. Mendorong proses penataan Tenaga Non-ASN (peningkatan menjadi ASN) secara adil dan transparan 3. Penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat (<i>right man on the right place</i>) secara transparan 4. Pengembangan kompetensi ASN (tenaga kesehatan, guru/tenaga pendidik, dan tenaga administrasi) secara berkelanjutan baik melalui pelatihan klasikal maupun pelatihan non klasikal
			1D. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari politik aktif

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 2025-2029



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana menetapkan berbagai program perangkat daerah yang disusun berdasarkan Urusan Konkuren, yang mencakup Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Selain bertujuan untuk memenuhi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, program-program tersebut juga dirancang agar selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Penentuan target dan anggaran program pembangunan Kabupaten Jembrana memperhatikan proyeksi kemampuan kapasitas riil fiskal selama periode perencanaan. Program-program tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target pagu indikatif, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab atas implementasinya.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					290.373.705.191		323.947.485.673		325.578.376.190		327.237.133.958		341.326.311.574	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					224.622.007.556		255.701.126.662		255.772.056.239		255.794.404.402		255.874.187.362	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	83.7	83.9	84.1	224.622.007.556	84.3	255.701.126.662	84.5	255.772.056.239	84.7	255.794.404.402	84.9	255.874.187.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					62.477.532.685		64.884.497.049		66.377.220.750		67.945.048.371		81.709.605.343	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 13- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (%)	73.92	75.39	76.90	62.477.532.685	78.43	64.884.497.049	79.96	66.377.220.750	81.55	67.945.048.371	83.18	81.709.605.343	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (%)	56.12	57.24	58.38		59.54		60.73		61.94		63.17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah dasar (%)	87.99	89.74	91.53		93.36		95.22		97.12		99.06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					152.999.950		156.060.000		159.181.200		162.364.824		173.730.362	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	90.77	92.58	94.43	152.999.950	96.31	156.060.000	98.23	159.181.200	99.21	162.364.824	100	173.730.362	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					3.121.165.000		3.205.801.962		3.269.918.001		3.335.316.361		3.568.788.507	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0.61	0.66	0.71	3.121.165.000	0.76	3.205.801.962	0.81	3.269.918.001	0.86	3.335.316.361	0.91	3.568.788.507	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	87	89	92		95		97		99		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					261.767.418.466		299.687.467.391		304.436.441.292		308.226.775.494		313.926.033.688	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					196.659.906.000		231.222.249.855		234.778.432.951		236.660.596.276		238.841.258.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	81.5	82	82.5	122.042.041.582	82.5	127.027.795.617	83	128.984.182.553	84	129.085.832.547	84	129.485.887.310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	79.80	80	80.50	74.617.864.418	81	104.194.454.238	81.50	105.794.250.398	82	107.574.763.729	82.50	109.355.371.590	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					64.003.733.166		66.805.270.300		68.241.985.704		69.704.425.148		73.194.133.855	
Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Cakupan Pelayanan di Fasilitas Kesehatan (%)	80	80	85	62.915.608.348	85	65.585.770.234	90	66.897.485.638	90	68.235.435.351	90	69.600.144.058	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Capaian SPM dan Akreditasi RS (*)	95	95	95	1.088.124.818	95	1.219.500.066	95	1.344.500.066	95	1.468.989.797	95	3.593.989.797	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					423.438.450		971.926.483		714.241.469		1.145.937.279		1.160.507.805	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Capaian SPM dan Akreditasi RS (*)	95	95	-	-	95	427.749.749	-	-	95	417.410.981	95	417.410.981	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	80	85	423.438.450	90	544.176.734	95	714.241.469	100	728.526.298	100	743.096.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					200.861.000		199.282.653		203.268.306		207.333.672		211.480.346	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sedian farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	80	85	200.861.000	85	199.282.653	90	203.268.306	90	207.333.672	95	211.480.346	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					479.479.850		488.738.100		498.512.862		508.483.119		518.652.782	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	80	85	86	479.479.850	87	488.738.100	88	498.512.862	89	508.483.119	90	518.652.782	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					109.009.407.784		125.877.250.420		127.860.019.644		134.956.651.789		150.967.377.382	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					16.768.991.338		18.721.235.030		18.899.003.683		19.081.707.069		19.264.749.635	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80.5	81	16.768.991.338	81.5	18.721.235.030	82	18.899.003.683	82.5	19.081.707.069	83	19.264.749.635	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8.196.880.750		10.096.905.551		10.966.408.006		11.624.965.142		11.624.965.142	
Meningkatnya jaringan dan bangunan irigasi berkondisi baik daerah	Persentase peningkatan jaringan dan bangunan irigasi berkondisi baik (%)	65.06	66	67	8.196.880.750	68	10.096.905.551	69	10.966.408.006	70	11.624.965.142	70	11.624.965.142	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					4.500.453.599		9.127.071.202		9.133.043.766		8.915.661.970		8.915.661.970	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	90.54	93	95	4.500.453.599	97	9.127.071.202	99	9.133.043.766	100	8.915.661.970	100	8.915.661.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.774.507.300		28.540.839.411		25.757.172.535		25.181.264.497		25.181.264.497	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	96.51	96.80	97.20	3.774.507.300	97.50	28.540.839.411	97.80	25.757.172.535	98.30	25.181.264.497	98.30	25.181.264.497	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.480.292.000		7.734.381.485		8.037.528.880		7.949.994.864		7.949.994.864	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	26.77	28	30	5.480.292.000	32	7.734.381.485	34	8.037.528.880	36	7.949.994.864	38	7.949.994.864	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.836.568.000		4.263.475.306		4.218.426.625		4.076.455.890		4.076.455.890	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis (%)	10.38	10.74	10.80	5.836.568.000	10.86	4.263.475.306	10.92	4.218.426.625	11	4.076.455.890	11	4.076.455.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					30.637.860.372		11.176.037.848		11.263.834.096		10.726.966.059		19.565.926.622	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	80	82	85	30.637.860.372	88	11.176.037.848	91	11.263.834.096	94	10.726.966.059	94	19.565.926.622	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					32.554.225.925		34.733.135.388		37.490.400.934		45.932.112.178		52.920.834.642	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	78.66	79	79.5	32.554.225.925	80	34.733.135.388	80.5	37.490.400.934	81	45.932.112.178	81	52.920.834.642	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					99.287.300		94.895.729		97.579.264		97.834.941		97.834.941	
Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi terampil	Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi terampil (%)	0	70	75	99.287.300	80	94.895.729	85	97.579.264	90	97.834.941	95	97.834.941	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.160.341.200		1.389.273.470		1.996.621.855		1.369.689.179		1.369.689.179	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di daerah (%)	71	75	80	1.160.341.200	85	1.389.273.470	90	1.996.621.855	95	1.369.689.179	100	1.369.689.179	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.514.703.000		4.460.099.256		4.478.888.198		4.391.701.811		4.391.701.811	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.766.598.000		3.158.129.856		3.176.580.334		3.112.600.541		3.112.600.541	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase jumlah rumah korban bencana rusak berat (total loss) yang ditangani (%)	66.70	70	75	2.766.598.000	80	3.158.129.856	85	3.176.580.334	90	3.112.600.541	95	3.112.600.541	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					435.275.300		307.462.162		303.996.937		293.504.824		293.504.824	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 HA yang ditangani (%)	10	10	20	435.275.300	35	307.462.162	55	303.996.937	70	293.504.824	80	293.504.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.312.829.700		994.507.238		998.310.927		985.596.446		985.596.446	
Meningkatnya kualitas hunian dan pengurangan kawasan permukiman kumuh	Persentase jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani (%)	26	30	34	1.312.829.700	44	994.507.238	54	998.310.927	64	985.596.446	74	985.596.446	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					20.739.902.280		21.768.681.090		22.340.844.891		22.977.950.956		23.223.376.094	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.090.595.260		17.744.932.449		18.067.474.177		18.357.822.777		18.568.247.915	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	78	78	85.25	12.373.398.468	85.50	12.679.747.400	85.75	12.931.988.270	85.90	13.162.137.797	85.91	13.313.121.469	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	79.60	79.60	79.70	4.717.196.792	79.75	5.065.185.049	79.80	5.135.485.907	79.85	5.195.684.980	79.90	5.255.126.446	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.409.012.650		2.411.862.006		2.617.891.110		2.776.569.210		2.811.569.210	
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	81	81	85	16.496.900	90	16.497.150	95	66.497.150	98	116.497.150	100	116.497.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	81	81	85	2.265.720.500	90	2.265.720.500	95	2.371.749.604	98	2.430.427.705	100	2.465.427.705	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	81	81	85	34.323.250	90	34.644.356	95	84.644.356	98	134.644.355	100	134.644.355	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	N/A	N/A	80	92.472.000	84	95.000.000	88	95.000.000	92	95.000.000	100	95.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					892.985.370		1.264.512.393		1.277.674.493		1.442.316.818		1.442.316.818	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	100	100	100	764.455.370	100	1.090.543.593	100	1.086.308.813	100	1.250.951.138	100	1.250.951.138	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	80	80	80	750.000	80	15.000.000	80	16.500.000	80	16.500.000	80	16.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	95.45	95.45	95.55	127.780.000	95.60	158.968.800	95.65	174.865.680	95.70	174.865.680	95.75	174.865.680	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					347.309.000		347.374.242		377.805.111		401.242.151		401.242.151	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	80	80	81	15.079.000	82	15.080.828	83	30.080.828	84	40.080.828	85	40.080.828	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	80	80	81	332.230.000	82	332.293.414	83	347.724.283	84	361.161.323	85	361.161.323	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.828.561.010		8.383.554.244		8.784.683.132		8.870.717.438		8.887.443.854	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1.186.226.900		1.220.486.291		1.279.747.734		1.349.747.734		1.349.747.734	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	1.186.226.900	100	1.220.486.291	100	1.279.747.734	100	1.349.747.734	100	1.349.747.734	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					6.558.450.810		6.516.712.485		6.796.978.493		6.831.583.939		6.866.881.495	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	87	87	90	6.558.450.810	92	6.516.712.485	94	6.796.978.493	95	6.831.583.939	95	6.866.881.495	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	87	87	90		92		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	87	87	90		92		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	87	87	90		92		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	87	87	90		92		94		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					139.999.850		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	76.18	76.18	80	139.999.850	81	140.000.000	82	140.000.000	83	140.000.000	85	140.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					301.363.550		275.820.134		298.276.018		288.671.635		279.067.252	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	47	47	80	301.363.550	81	275.820.134	82	298.276.018	83	288.671.635	85	279.067.252	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					642.519.900		230.535.334		269.680.887		260.714.130		251.747.373	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan baik (%)	100	100	100	642.519.900	100	230.535.334	100	269.680.887	100	260.714.130	100	251.747.373	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					11.208.570.849		11.496.914.963		11.623.857.783		11.551.540.225		11.571.964.563	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.314.771.499		6.574.318.997		6.698.651.778		6.697.394.567		6.772.135.577	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP Perangkat Daerah (Nilai)	75.12	75.12	75.50	6.314.771.499	75.76	6.574.318.997	76	6.698.651.778	76.12	6.697.394.567	76.50	6.772.135.577	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					5.250.000		68.655.598		69.342.154		70.035.576		18.295.293	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	90	90.5	91	5.250.000	91.5	68.655.598	92	69.342.154	92.5	70.035.576	93	18.295.293	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					954.190.450		961.776.105		962.314.257		891.891.426		890.687.008	
Meningkatnya Prooduktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	60	61	62	954.190.450	63	961.776.105	64	962.314.257	65	891.891.426	66	890.687.008	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					3.343.346.400		3.319.203.451		3.318.427.734		3.318.898.627		3.319.374.230	
Meningkatnya Penempatan dan Kesempatan Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja (%)	4.32	4.40	4.45	3.343.346.400	4.50	3.319.203.451	4.55	3.318.427.734	4.60	3.318.898.627	4.65	3.319.374.230	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					591.012.500		572.960.812		575.121.860		573.320.029		571.472.455	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	0,35	-	120	591.012.500	140	572.960.812	160	575.121.860	180	573.320.029	200	571.472.455	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					11.418.846.595		11.734.513.994		11.946.080.241		12.050.280.107		12.250.571.481	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.961.070.595		11.310.058.994		11.466.197.241		11.619.825.107		11.779.461.481	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	82.10	82.10	82.15	10.961.070.595	82.15	11.310.058.994	82.20	11.466.197.241	82.20	11.619.825.107	82.25	11.779.461.481	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					42.256.000		50.100.000		146.183.000		56.100.000		56.100.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	73,49	73,49	73.55	42.256.000	73.65	50.100.000	73.75	146.183.000	73.85	56.100.000	74	56.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					200.330.000		159.675.000		159.675.000		200.330.000		200.330.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	200.330.000	100	159.675.000	100	159.675.000	100	200.330.000	100	200.330.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.250.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga yang mendapat pembelajaran keluarga (Puspaga) perspektif gender dan hak anak sesuai standar (%)	90	90	90	1.250.000	90	1.260.000	90	1.260.000	90	1.260.000	90	1.260.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	48.39	48.39	48.39	600.000	48.39	600.000	48.39	600.000	48.39	600.000	48.39	600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					13.010.000		12.490.000		12.490.000		12.490.000		12.490.000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Jumlah desa/kelurahan layak anak (Desa/Kelurahan)	51	51	51	13.010.000	51	12.490.000	51	12.490.000	51	12.490.000	51	12.490.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					200.330.000		200.330.000		159.675.000		159.675.000		200.330.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	200.330.000	100	200.330.000	100	159.675.000	100	159.675.000	100	200.330.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					428.068.899		490.000.000		524.000.000		560.000.000		560.000.000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					66.982.400		70.000.000		72.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	31.25	50	66.982.400	75	70.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					166.561.500		200.000.000		225.000.000		240.000.000		240.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	93	93	93.5	166.561.500	93.75	200.000.000	94	225.000.000	94	240.000.000	94	240.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					149.999.999		165.000.000		167.000.000		175.000.000		175.000.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	17	17	5	149.999.999	4	165.000.000	2	167.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					44.525.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	92	92	95	44.525.000	96	55.000.000	97	60.000.000	98	70.000.000	98	70.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					253.664.500		204.974.775		213.923.769		217.410.981		217.410.982	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					51.395.000		41.754.121		45.036.583		47.105.713		47.105.713	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	100	100	100	51.395.000	100	41.754.121	100	45.036.583	100	47.105.713	100	47.105.713	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					50.763.000		41.754.121		45.036.583		47.105.713		47.105.713	
Meningkatnya pengelolaan izin pemanfaatan tanah sesuai ketentuan	Persentase izin pemanfaatan tanah yang diterbitkan sesuai regulasi (%) (%)	73.77	100	100	50.763.000	100	41.754.121	100	45.036.583	100	47.105.713	100	47.105.713	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					151.506.500		121.466.533		123.850.603		123.199.555		123.199.556	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase kawasan yang ditata sesuai rencana tata ruang (%)	100%	100%	100%	151.506.500	100%	121.466.533	100%	123.850.603	100%	123.199.555	100%	123.199.556	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					24.743.316.173		24.849.966.290		25.148.322.856		24.963.936.573		25.121.967.247	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.473.110.634		17.160.196.781		17.313.591.111		17.349.386.142		17.507.416.816	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	84	84	85	17.473.110.634	85	17.160.196.781	85	17.313.591.111	85	17.349.386.142	85	17.507.416.816	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					114.883.400		118.683.406		118.683.406		114.587.182		114.587.182	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	114.883.400	100	118.683.406	100	118.683.406	100	114.587.182	100	114.587.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					258.462.500		282.299.914		327.583.995		327.583.995		327.583.995	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	76.90	76.90	77.10	258.462.500	77.30	282.299.914	77.50	327.583.995	77.70	327.583.995	77.90	327.583.995	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	76.11	76.11	76.38		76.45		76.52		76.59		76.66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	81.71	81.71	81.91		82.11		82.31		82.51		82.71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.354.978.320		4.785.216.279		4.882.216.279		4.719.456.101		4.719.456.101	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Presentase RTH Publik yang dikelola (%)	76	76	76	2.354.978.320	77	4.785.216.279	78	4.882.216.279	78	4.719.456.101	80	4.719.456.101	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					7.245.900		7.247.034		7.247.034		7.247.034		7.247.034	
Meningkatnya kegiatan pembinaan/ pengawasan usaha pengelola B3/ Limbah B3	Persentase limbah B3 yang dikelola sesuai prosedur (%)	75	75	75	7.245.900	77	7.247.034	80	7.247.034	82	7.247.034	85	7.247.034	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					63.086.000		63.086.045		63.086.045		60.908.701		60.908.701	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	Prsentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	26	26	27	63.086.000	28	63.086.045	29	63.086.045	30	60.908.701	30	60.908.701	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
lingkungan yang diterbitkan	lingkungan yang diterbitkan (%)													
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase masyarakat/lembaga/kelompok peduli lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	40	40	-	-	60	10.000.000	70	10.000.000	80	10.000.000	90	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					18.890.000		30.571.304		33.249.459		32.101.891		32.101.891	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	25	25	33	18.890.000	41	30.571.304	49	33.249.459	57	32.101.891	65	32.101.891	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4.452.659.419		2.392.665.527		2.392.665.527		2.342.665.527		2.342.665.527	
Meningkatnya Tata kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	70	70	70	4.452.659.419	70	2.392.665.527	70	2.392.665.527	70	2.342.665.527	70	2.342.665.527	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.975.120.449		9.895.143.459		9.998.858.461		10.003.633.622		10.249.252.600	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.081.166.749		6.478.505.059		6.432.195.061		6.492.695.222		6.591.284.200	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	82	82	82.75	6.081.166.749	83	6.478.505.059	83.25	6.432.195.061	83.50	6.492.695.222	83.65	6.591.284.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.224.313.600		1.016.009.000		1.024.674.000		1.009.108.000		1.029.290.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran penduduk (%)	92	92	93	1.224.313.600	94	1.016.009.000	95	1.024.674.000	96	1.009.108.000	97	1.029.290.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					2.598.557.100		2.301.460.600		2.441.973.600		2.403.320.600		2.528.301.600	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Penerbitan akta-akta Pencatatan Sipil yang dilaporkan (%)	100	100	100	2.598.557.100	100	2.301.460.600	100	2.441.973.600	100	2.403.320.600	100	2.528.301.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					70.258.000		98.233.800		99.080.800		97.574.800		99.526.800	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	70.258.000	100	98.233.800	100	99.080.800	100	97.574.800	100	99.526.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					825.000		935.000		935.000		935.000		850.000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil Kependudukan (Angka)	100	100	100	825.000	100	935.000	100	935.000	100	935.000	100	850.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.681.898.369		2.650.052.217		4.630.050.709		2.500.008.083		4.251.723.067	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.118.600.000		72.576.253		1.518.183.219		71.383.272		1.598.500.000	
Meningkatnya Kualitas penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	-	60	80	1.118.600.000	100	72.576.253	100	1.518.183.219	100	71.383.272	100	1.598.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					23.500.000		110.016.794		112.148.598		111.858.674		120.351.000	
Meningkatnya Efektivitas Kerja sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	15	15	35	23.500.000	55	110.016.794	75	112.148.598	95	111.858.674	100	120.351.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.172.738.164		1.167.417.562		1.749.003.353		1.132.835.925		1.262.035.324	
Meningkatnya administrasi pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel serta menerapkan sistem administrasi digital	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	30	30	60	1.172.738.164	70	1.167.417.562	90	1.749.003.353	100	1.132.835.925	100	1.262.035.324	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN					1.367.060.205		1.300.041.608		1.250.715.539		1.183.930.212		1.270.836.743	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya Kapasitas lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	41	83.47	86.44	1.367.060.205	88.77	1.300.041.608	92.80	1.250.715.539	95.55	1.183.930.212	98.52	1.270.836.743	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.376.700.000		3.454.394.000		1.587.914.000		1.631.250.000		3.446.073.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					242.414.000		242.414.000		64.550.000		64.550.000		242.414.000	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2.1	2.1	2.1	242.414.000	2.1	242.414.000	2.1	64.550.000	2.1	64.550.000	2.1	242.414.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.150.286.000		1.227.980.000		741.764.000		785.100.000		1.219.659.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	70.2	70.2	70.2	1.150.286.000	70.5	1.227.980.000	71	741.764.000	72	785.100.000	73	1.219.659.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.984.000.000		1.984.000.000		781.600.000		781.600.000		1.984.000.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	70%	70%	70%	1.984.000.000	70%	1.984.000.000	70%	781.600.000	70%	781.600.000	70%	1.984.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					15.432.661.700		15.129.314.118		14.989.140.172		14.832.866.217		14.741.610.941	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					15.432.661.700		15.129.314.118		14.989.140.172		14.832.866.217		14.741.610.941	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (%)	0,68%	0,68%	0,72%	15.432.661.700	0,74%	15.129.314.118	0,76%	14.989.140.172	0,78%	14.832.866.217	0,80%	14.741.610.941	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN					11.358.517.190		11.463.048.292		11.487.997.845		11.613.769.391		11.690.829.760	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.109.068.490		6.970.289.192		7.045.088.745		7.121.010.291		7.198.070.660	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	84.10	80	81	7.109.068.490	82	6.970.289.192	83	7.045.088.745	84	7.121.010.291	84.50	7.198.070.660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					439.602.000		657.124.000		657.124.000		657.124.000		657.124.000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	88.35	88.35	88.40	439.602.000	88.40	657.124.000	88.45	657.124.000	88.45	657.124.000	88.50	657.124.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.809.846.700		3.835.635.100		3.785.785.100		3.835.635.100		3.835.635.100	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE perangkat daerah (Indeks)	3.77	3.78	3.79	3.809.846.700	3.80	3.835.635.100	3.81	3.785.785.100	3.82	3.835.635.100	3.83	3.835.635.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.486.170.136		7.037.109.825		7.230.372.624		7.459.327.158		7.596.457.430	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.052.014.738		6.159.288.289		6.288.873.729		6.455.151.699		6.545.988.615	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	76 Nilai	76 Nilai	76,50 Nilai	6.052.014.738	76,75 Nilai	6.159.288.289	77 Nilai	6.288.873.729	77,25 Nilai	6.455.151.699	77,50 Nilai	6.545.988.615	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					125.327.800		117.298.817		119.028.698		132.931.567		149.224.723	
Meningkatkan Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	3%	3%	3%	125.327.800	3%	117.298.817	3%	119.028.698	4%	132.931.567	5%	149.224.723	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					33.708.899		20.580.986		22.383.932		23.772.514		43.772.514	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	3%	3%	3%	33.708.899	3%	20.580.986	3%	22.383.932	3.5%	23.772.514	4%	43.772.514	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					47.154.400		39.969.018		43.470.406		46.167.081		46.167.081	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	3%	3%	3%	47.154.400	3%	39.969.018	3%	43.470.406	3%	46.167.081	3%	46.167.081	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					196.815.000		176.420.422		191.875.300		203.778.234		203.778.234	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Presentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	3%	3%	100%	196.815.000	100%	176.420.422	100%	191.875.300	100%	203.778.234	100%	203.778.234	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					15.247.000		12.501.563		13.596.732		14.440.202		14.440.202	
Meningkatnya Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas (Aktif) (%)	3%	3%	3%	15.247.000	3%	12.501.563	3%	13.596.732	3%	14.440.202	3%	14.440.202	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					729.282.500		357.387.007		375.258.516		390.086.077		390.086.077	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	3	3	5	729.282.500	5	357.387.007	6	375.258.516	6	390.086.077	7	390.086.077	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					286.619.799		153.663.723		175.885.311		192.999.784		202.999.984	
Meningkatnya Daya saing UMKM	Proposi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	5%	5%	5%	286.619.799	5%	153.663.723	5%	175.885.311	5.5%	192.999.784	6%	202.999.984	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.454.028.612		7.079.782.669		7.224.485.707		7.354.771.064		7.586.493.435	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.253.210.112		6.749.623.669		6.894.326.707		7.024.612.064		7.256.334.435	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80.55	80.60	80.65	6.253.210.112	80.70	6.749.623.669	80.75	6.894.326.707	80.80	7.024.612.064	80.85	7.256.334.435	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					13.647.000		13.889.000		13.889.000		13.889.000		13.889.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	85	85	87	13.647.000	89	13.889.000	91	13.889.000	93	13.889.000	95	13.889.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					25.220.000		25.262.000		25.262.000		25.262.000		25.262.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	5	5	5.5	25.220.000	6	25.262.000	6.5	25.262.000	7	25.262.000	8	25.262.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					121.222.500		250.264.000		250.264.000		250.264.000		250.264.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	121.222.500	100	250.264.000	100	250.264.000	100	250.264.000	100	250.264.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					16.979.000		16.994.000		16.994.000		16.994.000		16.994.000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	-	100	100	16.979.000	100	16.994.000	100	16.994.000	100	16.994.000	100	16.994.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000		23.750.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	23.750.000	100	23.750.000	100	23.750.000	100	23.750.000	100	23.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					14.307.264.700		15.798.799.925		16.860.628.724		21.018.279.379		18.717.075.674	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					7.950.673.000		9.128.840.201		9.641.441.806		10.063.084.705		10.264.346.400	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda (%)	0,06%	0,06%	0,08%	7.950.673.000	0,09%	9.128.840.201	0,10%	9.641.441.806	0,12%	10.063.084.705	0,13%	10.264.346.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5.952.683.600		6.252.000.852		6.728.464.869		10.397.481.185		7.883.861.515	
Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0,27	0.39	0.51	5.952.683.600	0,54	6.252.000.852	0.66	6.728.464.869	0.78	10.397.481.185	0.82	7.883.861.515	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					403.908.100		417.958.872		490.722.049		557.713.489		568.867.759	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	90	91.80	93.63	403.908.100	95.50	417.958.872	97.41	490.722.049	99.35	557.713.489	100	568.867.759	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					60.047.500		62.876.000		62.876.000		62.876.000		62.876.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					60.047.500		62.876.000		62.876.000		62.876.000		62.876.000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.36	2.6	2.63	60.047.500	2.65	62.876.000	2.7	62.876.000	2.75	62.876.000	2.75	62.876.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					156.587.500		8.195.400		8.195.400		8.195.400		8.195.400	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					156.587.500		8.195.400		8.195.400		8.195.400		8.195.400	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	90	90	90	156.587.500	90	8.195.400	90	8.195.400	90	8.195.400	90	8.195.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					13.053.558.757		9.423.884.247		9.576.266.741		9.523.562.775		10.014.845.006	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					11.717.590.349		8.451.295.539		8.555.048.597		8.451.283.725		8.942.565.956	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan (%)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	15%	15%	20%	9.772.747.349	20%	6.438.052.390	20%	6.441.143.291	20%	6.231.683.154	20%	6.580.675.806	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	44%	44%	56%	1.944.843.000	61%	2.013.243.149	67%	2.113.905.306	72%	2.219.600.571	78%	2.361.890.150	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					438.804.750		30.566.550		32.094.878		33.699.621		33.699.621	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	15%	15%	20%	438.804.750	20%	30.566.550	20%	32.094.878	20%	33.699.621	20%	33.699.621	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					94.157.760		98.865.648		103.808.930		108.999.377		108.999.377	
Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Terlestarikannya cagar budaya (%)	88%	88%	88%	94.157.760	88%	98.865.648	88%	103.808.930	88%	108.999.377	89%	108.999.377	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					803.005.898		843.156.510		885.314.336		929.580.052		929.580.052	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	95%	100%	100%	803.005.898	100%	843.156.510	100%	885.314.336	100%	929.580.052	100%	929.580.052	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					473.645.000		473.709.853		515.208.044		547.168.837		547.168.837	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					210.184.000		207.094.510		225.236.517		239.209.004		239.209.004	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	76.67	76.67	76.75	210.184.000	76.80	207.094.510	76.85	225.236.517	76.90	239.209.004	76.95	239.209.004	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					263.461.000		266.615.343		289.971.527		307.959.833		307.959.833	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	10	10	10	263.461.000	10	266.615.343	10	289.971.527	10	307.959.833	10	307.959.833	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					110.356.400		110.369.577		120.039.692		127.486.327		127.486.327	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					100.503.400		100.516.699		109.322.214		116.103.993		116.103.993	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	20	20	20	100.503.400	20	100.516.699	20	109.322.214	20	116.103.993	20	116.103.993	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					9.853.000		9.852.878		10.717.478		11.382.334		11.382.334	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	20	20	20	9.853.000	20	9.852.878	20	10.717.478	20	11.382.334	20	11.382.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.433.741.000		1.319.846.735		1.344.287.727		1.369.950.768		1.396.896.961	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.093.055.200		690.646.850		690.646.850		690.646.850		690.646.850	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26533,69	26533,69	26550	1.093.055.200	26600	690.646.850	26650	690.646.850	26700	690.646.850	26750	690.646.850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					70.404.500		435.285.585		457.049.864		479.902.357		503.897.475	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	7795.81	7795.81	7800	70.404.500	7830	435.285.585	7900	457.049.864	7930	479.902.357	7950	503.897.475	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					50.985.900		53.534.250		56.210.963		59.021.511		61.972.586	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	10 Ha	10 Ha	12 Ha	50.985.900	13 Ha	53.534.250	14 Ha	56.210.963	15 Ha	59.021.511	16 Ha	61.972.586	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					219.295.400		140.380.050		140.380.050		140.380.050		140.380.050	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/ KAP/TH)	45 kg/kapita/ta hun	45 kg/kapi ta/ tahu n	50 kg/kapita /tahun	219.295.400	55 kg/kapita /tahun	140.380.050	60 kg/kapita/ tahun	140.380.050	65 kg/kapita/ tahun	140.380.050	70 kg/kapita/ tahun	140.380.050	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					9.548.019.955		10.983.142.420		11.499.093.681		11.849.389.540		11.855.958.671	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.265.905.255		7.436.920.042		7.775.560.184		7.939.679.368		7.824.973.499	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	84.15	84.15	86	6.265.905.255	87	7.436.920.042	88	7.775.560.184	89	7.939.679.368	90	7.824.973.499	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.192.497.700		2.402.123.688		2.522.229.872		2.648.341.366		2.769.616.366	
Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	20%	20%	20%	2.192.497.700	20%	2.402.123.688	20%	2.522.229.872	20%	2.648.341.366	20%	2.769.616.366	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					973.979.600		1.022.679.210		1.073.813.171		1.127.503.829		1.127.503.829	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	1	2	4	973.979.600	6	1.022.679.210	8	1.073.813.171	10	1.127.503.829	12	1.127.503.829	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					16.200.000		17.010.000		17.860.500		18.753.525		18.753.525	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang	1	2	4	16.200.000	6	17.010.000	8	17.860.500	10	18.753.525	12	18.753.525	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)													
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					99.437.400		104.409.480		109.629.954		115.111.452		115.111.452	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3%	20%	20%	99.437.400	20%	104.409.480	20%	109.629.954	20%	115.111.452	20%	115.111.452	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					20.830.531.194		24.259.640.930		25.249.770.891		26.408.093.512		26.935.127.885	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.915.552.745		19.529.722.180		19.902.048.324		20.277.575.266		20.763.850.902	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	76.85	77	77.15	16.915.552.745	77.30	19.529.722.180	77.45	19.902.048.324	77.60	20.277.575.266	77.75	20.763.850.902	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.110.912.200		3.022.461.540		3.546.783.267		4.071.311.428		4.082.050.153	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Ton)	151,81 ton	151,81 ton	160,55	2.110.912.200	165,6	3.022.461.540	170,65	3.546.783.267	175,7	4.071.311.428	180,75	4.082.050.153	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi komoditas peternakan (Ekor)	372 ekor	372 ekor	372		886		1240		1.674		1.674		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton)	56464,74 ton	56464,74 ton	58.636		59.756		60.876		61.980		62.995		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					910.000.000		753.000.000		796.060.000		839.181.200		852.364.824	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	5968 Ha	5968	5968	910.000.000	5968	753.000.000	5968	796.060.000	5968	839.181.200	5968	852.364.824	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					599.796.100		624.972.100		640.148.100		655.324.100		670.500.100	
Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	5	5	5	599.796.100	5	624.972.100	5	640.148.100	5	655.324.100	5	670.500.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN					20.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	20	30	40	20.000.000	50	30.000.000	60	35.000.000	70	40.000.000	80	40.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					40.000.000		44.000.000		47.999.999		51.692.306		51.692.306	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	36.48	36.48	36.49	40.000.000	36.5	44.000.000	36.5	47.999.999	36.5	51.692.306	36.5	51.692.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					234.270.149		255.485.110		281.731.201		473.009.212		474.669.600	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	234.270.149	100	255.485.110	100	281.731.201	100	473.009.212	100	474.669.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.929.619.410		4.853.820.761		5.007.786.312		5.168.704.741		6.038.087.120	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					8.847.500		8.093.163		8.802.145		9.348.184		9.348.184	
Meningkatnya kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	8.847.500	100	8.093.163	100	8.802.145	100	9.348.184	100	9.348.184	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					3.267.148.400		4.187.395.737		4.275.504.444		4.365.811.404		5.162.224.420	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan barang efesien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	3.267.148.400	100	4.187.395.737	100	4.275.504.444	100	4.365.811.404	100	5.162.224.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					52.915.000		48.200.198		52.422.658		55.674.684		55.674.684	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitasi harga barang pokok dan barang penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya (%)	100	100	100	52.915.000	100	48.200.198	100	52.422.658	100	55.674.684	100	55.674.684	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					7.760.000		7.079.070		7.699.214		8.176.833		8.176.833	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor (%)	100	100	100	7.760.000	100	7.079.070	100	7.699.214	100	8.176.833	100	8.176.833	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					225.849.500		231.497.937		254.647.730		280.112.503		308.123.753	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	75%	75%	75%	225.849.500	75%	231.497.937	75%	254.647.730	75%	280.112.503	75%	308.123.753	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					367.099.010		371.554.656		408.710.121		449.581.133		494.539.246	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan (%)	100%	100%	100%	367.099.010	100%	371.554.656	100%	408.710.121	100%	449.581.133	100%	494.539.246	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					897.191.600		777.498.141		784.212.225		973.701.112		974.029.806	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					737.370.600		662.560.715		668.375.510		858.467.795		858.393.129	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	5	5	5.5	737.370.600	6	662.560.715	6.5	668.375.510	7	858.467.795	7.5	858.393.129	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					39.116.000		39.541.258		39.936.670		40.336.037		40.739.397	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3	3	3.5	39.116.000	4	39.541.258	4.5	39.936.670	5	40.336.037	5.5	40.739.397	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					120.705.000		75.396.168		75.900.045		74.897.280		74.897.280	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini (%)	3	3	3.5	120.705.000	4	75.396.168	4.5	75.900.045	5	74.897.280	5.5	74.897.280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					5.570.600		12.696.912		12.823.881		12.952.120		13.081.641	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					5.570.600		12.696.912		12.823.881		12.952.120		13.081.641	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	5	5.5	6	5.570.600	6.5	12.696.912	7	12.823.881	7.5	12.952.120	8	13.081.641	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					58.224.880.366		60.783.473.198		63.205.198.732		65.061.489.217		72.245.013.750	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					49.659.038.816		52.716.396.825		54.343.823.368		55.588.366.030		62.771.890.563	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	81.3	82	83	49.659.038.816	84	52.716.396.825	85	54.343.823.368	86	55.588.366.030	87	62.771.890.563	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					7.851.716.550		7.352.857.525		8.084.589.124		8.648.149.218		8.648.149.218	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	80	80	80	7.851.716.550	80	7.352.857.525	80	8.084.589.124	80	8.648.149.218	80	8.648.149.218	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					714.125.000		714.218.848		776.786.240		824.973.969		824.973.969	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	714.125.000	100	714.218.848	100	776.786.240	100	824.973.969	100	824.973.969	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					59.000.000.000		60.097.157.060		61.216.257.261		63.857.739.466		69.526.345.409	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.695.755.800		37.073.429.163		37.177.516.681		39.388.280.647		43.385.323.140	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	83,3	83,3	84	36.695.755.800	84,5	37.073.429.163	85	37.177.516.681	85,5	39.388.280.647	86	43.385.323.140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					22.304.244.200		23.023.727.897		24.038.740.580		24.469.458.819		26.141.022.269	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan	Persentase Ketepatan Penetapan Perda APBD (%)	100	100	100	454.499.750	100	480.165.000	100	489.768.300	100	506.063.666	100	509.554.939	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD		
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	21.849.744.450	100	22.543.562.897	100	23.548.972.280	100	23.963.395.153	100	25.631.467.330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.196.357.011		7.085.069.277		7.204.088.448		7.326.389.023		7.451.273.300	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.107.949.311		5.790.449.982		5.909.469.153		6.031.769.728		6.156.654.005	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	82.52	82.52	83.53	5.107.949.311	84.03	5.790.449.982	84.53	5.909.469.153	85.03	6.031.769.728	85.53	6.156.654.005	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pelaporan kinerja Perangkat Daerah														
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					755.746.700		961.781.257		961.781.257		961.781.257		961.781.257	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	755.746.700	100	961.781.257	100	961.781.257	100	961.781.257	100	961.781.257	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100				100				100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					332.661.000		332.838.038		332.838.038		332.838.038		332.838.038	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	107.708.000	100	107.838.038	100	107.838.038	100	107.838.038	100	107.838.038	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	119.000.000	100	119.000.000	100	119.000.000	100	119.000.000	100	119.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	105.953.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	100	106.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					159.962.791.281		166.800.093.432		169.959.350.695		173.181.104.980		176.466.595.906	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.068.531.424		11.469.152.707		11.631.625.369		11.796.659.360		11.964.295.585	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80	80.5	81	11.068.531.424	81.5	11.469.152.707	82	11.631.625.369	82.5	11.796.659.360	83	11.964.295.585	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					145.944.620.507		152.322.315.702		155.258.927.803		158.254.272.147		161.309.523.378	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	29.47	29.47	32.50	861.060.600	40	878.281.812	40	895.847.448	40	913.764.397	40	932.039.685	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	40.20	40.20	38.50		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	45	45	40	144.908.177.407	35	151.286.571.186	30	154.202.468.397	25	157.176.683.553	25	160.210.383.012	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	92	92	93		94		95		97		97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	175.382.500	100	157.462.704	100	160.611.958	100	163.824.197	100	167.100.681	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					871.593.500		889.025.370		906.805.877		924.941.995		943.440.835	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	1.34	1.34	2	871.593.500	2	889.025.370	2	906.805.877	2	924.941.995	2	943.440.835	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.078.045.850		2.119.599.653		2.161.991.646		2.205.231.478		2.249.336.108	
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	85	85	90	1.559.976.550	90	1.591.162.949	95	1.622.986.210	95	1.655.445.933	95	1.688.554.852	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	15	15	15	273.566.100	15	279.038.748	15	284.619.522	15	290.311.913	15	296.118.151	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	15	15	17	244.503.200	19	249.397.956	20	254.385.914	25	259.473.632	25	264.663.105	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.672.290.567		11.479.053.903		11.502.737.314		11.690.618.199		11.811.536.264	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.275.614.017		10.064.369.025		10.058.350.515		10.250.147.613		10.371.065.678	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	87.25	87.25	87.3	7.275.614.017	87.35	10.064.369.025	87.4	10.058.350.515	87.5	10.250.147.613	87.5	10.371.065.678	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.396.676.550		1.414.684.878		1.444.386.799		1.440.470.586		1.440.470.586	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	720.547.700	100	664.160.066	100	696.528.145	100	690.984.192	100	690.984.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	93.3	93.3	94	265.339.550	95	313.078.544	95.5	339.318.134	96	349.739.238	96	349.739.238	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	64	64	64.5	276.786.300	65	259.460.464	65.5	215.253.581	66	201.190.970	66	201.190.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	95	95	95.5	134.003.000	95.6	177.985.804	95.7	193.286.939	95.8	198.556.186	95.9	198.556.186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.425.760.900		911.851.327		939.858.801		961.431.301		1.185.956.608	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.425.760.900		911.851.327		939.858.801		961.431.301		1.185.956.608	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	94	94	94.5	285.685.000	95	257.742.353	95.5	273.734.625	96	279.209.318	96	303.734.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsiona	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	94	94	94.5	1.140.075.900	95	654.108.974	95.5	666.124.176	96	682.221.983	96	882.221.983	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4.785.415.563		5.049.336.905		5.526.863.827		5.607.364.761		5.959.828.943	
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.341.512.563		3.635.346.434		3.540.753.432		3.666.699.186		3.782.586.974	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	78.2	78.2	79,0	3.341.512.563	79,5	3.635.346.434	80	3.540.753.432	80,5	3.666.699.186	81,0	3.782.586.974	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.326.088.000		1.293.901.431		1.864.326.165		1.816.838.541		2.028.339.969	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	-	100	852.388.000	100	780.584.431	100	1.118.963.165	100	1.184.379.541	100	1.278.733.969	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	-	-	-	100	115.000.000	100	230.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	-	100	267.516.000	100	190.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000	100	420.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	0	0	100	206.184.000	100	208.317.000	100	210.363.000	100	212.459.000	100	214.606.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					117.815.000		120.089.040		121.784.230		123.827.034		148.902.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase inovasi daerah yang dimanfaatkan (%)	0	0	100	4.265.000	100	4.923.360	100	4.931.230	100	4.954.034	100	5.132.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	0	100	113.550.000	100	115.165.680	100	116.853.000	100	118.873.000	100	143.770.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.151.810.467		12.313.868.350		11.770.939.794		11.955.646.242		12.083.057.860	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.004.346.317		12.163.454.917		11.617.483.336		11.787.024.648		11.906.005.185	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,4	86,4	87,4	12.004.346.317	87,8	12.163.454.917	88,8	11.617.483.336	89	11.787.024.648	90	11.906.005.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.125.550		4.208.061		4.326.979		4.579.167		4.808.126	
Menurunnya penyelewengan anggaran dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggran N (%)	99,53	99,53	99,55	4.125.550	99,6	4.208.061	99,62	4.326.979	99,63	4.579.167	96,64	4.808.126	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					143.338.600		146.205.372		149.129.479		164.042.427		172.244.549	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Angka)	level 3	level 3	level 3	143.338.600	level 3	146.205.372	level 4	149.129.479	level 4	164.042.427	level 4	172.244.549	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					38.867.396.794		41.071.023.216		41.384.390.766		42.311.521.677		43.207.373.952	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.300.212.780		32.406.051.195		32.205.390.735		32.991.864.775		33.313.759.932	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Kecamatan Negara	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80.80	80.80	80.81	8.099.106.009	80.82	8.390.726.062	80.83	8.247.633.638	80.84	8.493.717.715	80.85	8.593.570.035	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Kecamatan Mendoyo	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80.30	80.30	80.50	4.527.247.645	80.60	4.792.463.029	80.65	4.917.686.729	80.70	4.975.467.354	80.75	5.034.119.890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Kecamatan Melaya	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	79.15	79.15	79.15	5.013.466.181	79.15	5.409.332.340	79.15	5.678.832.380	79.15	5.962.773.998	79.15	5.962.773.998	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Kecamatan Pekutatan	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	79.15	79.15	79.20	3.731.801.176	79.25	4.868.105.907	79.30	4.307.360.953	79.35	4.402.390.053	79.35	4.454.205.224	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Kecamatan Jembrana	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	80.30	80.30	80.31	8.928.591.769	80.32	8.945.423.857	80.33	9.053.877.035	80.34	9.157.515.655	80.35	9.269.090.785	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.598.114.714		7.836.483.756		8.368.553.495		8.500.799.524		8.966.910.757	
Meningkatnya kapasitas desa dan kelurahan dalam penyelenggaraa n program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Melaya	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan (%)	95	95	95	975.018.288	95	1.202.842.806	95	1.688.088.792	95	1.772.493.231	95	2.226.739.148	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kapasitas desa dan kelurahan dalam penyelenggaraa n program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jembrana	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	95	95	95.1	2.784.662.016	95.2	2.640.480.108	95.3	2.610.720.812	95.4	2.620.614.718	95.5	2.620.614.718	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kapasitas desa dan kelurahan dalam penyelenggaraa n program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mendoyo	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan (%)	95	95	95	1.084.469.888	95	1.106.096.820	95	1.167.179.869	95	1.190.127.553	95	1.201.992.869	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kapasitas desa dan kelurahan dalam penyelenggaraa n program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Negara	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat desa/kelurahan dalam membangun (%)	95	95	95.1	2.605.340.722	95.2	2.731.814.022	95.3	2.731.814.022	95.4	2.731.814.022	95.5	2.731.814.022	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas desa dan kelurahan dalam penyelenggara n program pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pekutatan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan (%)	95	95	95	148.623.800	95	155.250.000	95	170.750.000	95	185.750.000	95	185.750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					75.671.900		69.108.054		72.616.775		76.100.886		81.942.371	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Negara	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (%)	95	95	95.1	1.435.100	95.2	1.435.100	95.3	1.435.100	95.4	1.435.100	95.5	1.435.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Melaya	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (%)	90	90	90	58.125.000	90	51.691.700	90	54.276.285	90	56.990.099	90	62.831.584	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mendoyo	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (%)	100	100	100	2.825.450	100	2.755.351	100	2.724.297	100	2.630.271	100	2.630.271	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pekutatan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (%)	95	95	95	8.205.600	95	9.250.000	95	10.250.000	95	11.250.000	95	11.250.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jembrana	Persentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban (%)	95	95	95.1	5.080.750	95.2	3.975.903	95.3	3.931.093	95.4	3.795.416	95.5	3.795.416	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					868.647.300		735.381.944		711.892.085		714.589.773		816.139.135	
Meningkatnya Penyelenggaraa n pemerintahan umum Kecamatan Negara	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	95	95	95.1	158.910.000	95.2	139.157.000	95.3	139.157.000	95.4	139.157.000	95.5	139.157.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pekutatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (%)	95	95	95	241.660.800	95	246.494.016	95	251.423.896	95	256.452.374	95	261.581.422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum Kecamatan Jembrana	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	95	95	95.1	212.634.000	95.2	164.580.092	95.3	162.725.207	95.4	157.108.929	95.5	157.108.929	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Melaya	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	95	95	95	129.375.000	95	66.163.100	95	29.215.725	95	30.675.511	95	125.233.608	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum Kecamatan Mendoyo	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Umum (%)	95	95	95	126.067.500	95	118.987.736	95	129.370.257	95	131.195.959	95	133.058.176	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					24.750.100		23.998.267		25.937.676		28.166.719		28.621.757	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Negara	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	95	95	95.1	1.595.300	95.2	1.595.300	95.3	1.595.300	95.4	1.595.300	95.5	1.595.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Melaya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (%)	95	95	95	5.700.000	95	4.026.900	95	4.026.900	95	4.439.400	95	4.894.438	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mendoyo	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.742.500	100	2.691.353	100	2.661.020	100	2.569.178	100	2.569.178	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Pekutatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	95	95	95	10.244.200	95	13.000.000	95	15.000.000	95	17.000.000	95	17.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Jembrana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa (%)	95	95	95.1	4.468.100	95.2	2.684.714	95.3	2.654.456	95.4	2.562.841	95.5	2.562.841	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.726.663.413		8.225.776.521		23.276.438.927		34.112.484.622		8.534.508.548	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.353.763.713		4.436.370.236		4.513.016.533		4.592.591.081		4.650.421.437	
Meningkatnya efektivitas manajemen dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,9	79,9	80	4.353.763.713	81	4.436.370.236	82	4.513.016.533	83	4.592.591.081	84	4.650.421.437	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.620.599.700		1.017.548.106		1.038.026.070		1.058.926.293		1.080.066.401	
Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	85	85	87	1.620.599.700	89	1.017.548.106	91	1.038.026.070	93	1.058.926.293	95	1.080.066.401	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.095.102.500		1.131.401.810		16.074.806.844		26.799.749.252		1.134.214.304	
Meningkatnya Peran Parpol dalam Pengembangan Pendidikan, Etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%) (%)	85	85	86	1.095.102.500	87	1.131.401.810	88	16.074.806.844	88	26.799.749.252	95	1.134.214.304	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					119.525.500		33.045.769		34.060.633		35.131.209		35.726.763	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif (%) (%)	80	80	85	119.525.500	87	33.045.769	89	34.060.633	91	35.131.209	93	35.726.763	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.210.420.500		1.257.991.511		1.258.879.137		1.259.918.488		1.260.963.738	
Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%) (%)	80	80	85	1.210.420.500	88	1.257.991.511	90	1.258.879.137	93	1.259.918.488	95	1.260.963.738	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					327.251.500		349.419.089		357.649.710		366.168.299		373.115.905	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase meningkatnya konflik sosial yang diselesaikan (%) (%)	10	10	12	327.251.500	14	349.419.089	16	357.649.710	18	366.168.299	20	373.115.905	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.223.870.761.181		1.331.510.936.766		1.367.111.571.397		1.404.535.874.866		1.437.168.918.777	

Sumber: Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 2025-2029

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jembrana berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana selama periode 2025-2029. IKU ini menjadi dasar dalam menilai pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta mengarahkan implementasi kebijakan strategis sesuai dengan RPJMD. Setiap indikator dalam IKU dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan daerah yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	BASELINE (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KONDISI AKHIR
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,32	75,79	76,26	76,73	77,20	77,67	78,14	78,14
2	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,07	75,35	75,63	75,91	76,19	76,47	76,75	76,75
3	Persentase Penduduk Miskin	4,51	3,51 - 3,87	2,95 - 3,44	2,46 - 2,95	1,97 - 2,46	1,76 - 2,75	1,48 - 2,46	1,48 - 2,46
4	Indeks Gini	0,288	0,288	0,287	0,287	0,286	0,286	0,285	0,285
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,53	1,48- 1,51	1,42- 1,45	1,38- 1,40	1,35- 1,37	1,31- 1,33	1,27- 1,29	1,27-1,29
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,98	5,2	5,52- 6,02	5,90- 6,40	6,30- 6,80	6,80- 7,30	6,90- 7,40	6,90-7,40
7	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	70	71,5	73	74,5	76	77,5	77,5
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-23,72	8,55	8,85	9,16	9,47	9,78	10,10	10,10
9	Indeks Risiko Bencana	133,06	129,07	125,2	121,44	117,8	115,26	114,26	114,26
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	71,36	71,8	72,3	72,8	73,3	73,8	74,3	74,3
11	Indeks Harmoni Indonesia	6,90	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20	7,30	7,30
12	Indeks Reformasi Birokrasi	79,64	79,64	80,19	80,75	81,3	81,85	82,4	82,4
13	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	60,01	64	68	72	76	80	80
14	Nilai SAKIP	68,96	70,02	70,7	71,39	72,09	72,79	73,49	73,49

Sumber: Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana 2025-2029



4.2.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Jembrana bertujuan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama periode 2025-2029. Indikator ini mencerminkan akumulasi pencapaian program pembangunan daerah setiap tahun atau capaian mandiri tahunan, sehingga target kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat terealisasi. *Outcome* dari setiap program pembangunan menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan. Rincian capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,64	87,91	88,18	88,45	88,72	89	89,28	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	76,33	78,72	78,89	79,06	79,23	79,40	79,60	
3	Indeks Kualitas Air	Angka	66,67	76,90	77,10	77,30	77,50	77,70	77,90	
4	Indeks Kualitas Udara	Angka	92,73*	81,71	81,91	82,11	82,31	82,51	82,71	
5	Indeks Kualitas Lahan	Angka	62,6	76,31	76,38	76,45	76,52	76,59	76,66	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen (%)	-23,72	8,55	8,85	9,16	9,47	9,78	10,10	
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	133,06	129,07	125,2	121,44	117,8	114,26	114,26	
8	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,62	0,63	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70	
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	N/A	0,3	0,31	0,32	0,32	0,33	0,34	
10	Jumlah Penduduk	ribu jiwa	330,22	330,68	331,13	331,59	333,38	335,08	336,68	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen (%)	2,09	0,14	0,14	0,14	0,54	0,51	0,48	
12	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	389	389	390	391	393	395	396	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	4,98	5,2	5,52-6,02	5,90-6,40	6,30-6,80	6,80-7,30	6,90-7,40	
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen (%)	4,51	3,51 - 3,87	2,95 - 3,44	2,46 - 2,95	1,97 - 2,46	1,76 - 2,75	1,48 - 2,46	
3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	51,73	53,98	56,23	58,48	60,73	62,98	65,23	
4	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen (%)	22,65	22,88	23,17	23,47	23,76	24,05	24,34	
5	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen (%)	10,16	10,47	10,54	10,61	10,68	10,75	10,82	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen (%)	1,53	1,48-1,51	1,42-1,45	1,38-1,40	1,35-1,37	1,31-1,33	1,27-1,29	
7	Indeks Gini	Indeks	0,288	0,288	0,287	0,287	0,286	0,286	0,285	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,32	75,79	76,26	76,73	77,2	77,67	78,14	
9	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,07	75,35	75,63	75,91	76,19	76,47	76,75	
10	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Orang	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Persen (%)	88,98	86,4	79,41	72,99	67,09	61,66	56,68	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Jumlah kematian ibu	Orang	3	3	2	2	1	1	1	
13	Jumlah kematian balita	Orang	37	35	33	31	29	27	25	
14	Prevalensi Stunting	Persen (%)	7,5	7	6,88	6,77	6,66	6,54	6,44	
15	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen (%)	N/A	93,2	93,4	93,6	93,8	93,9	94	
16	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen (%)	81,9	95,7	95,9	96,1	96,3	96,6	97	
17	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen (%)	62,88	63,23	63,58	63,93	64,28	64,63	64,98	
18	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen (%)	92,72	92,93	93,14	93,35	93,56	93,77	93,98	
19	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen (%)	83,7	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	
20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen (%)	100,22	100	100	100	100	100	100	
21	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen (%)	N/A	65	66,1	67,9	69,7	80	80	
22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat	Persen (%)	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	100	100	
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Sederajat	Persen (%)	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	99,65	
24	Angka Putus Sekolah	Persen (%)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Literasi Membaca (%)									
	SD	Persen (%)	78,7	81,24 - 84,62	81,95-85,33	82,66-86,05	83,38-86,77	84,1-87,49	84,83-88,23	
	SMP	Persen (%)	84,21	86,56 - 88,91	87,06-89,43	87,56-89,96	88,07-90,49	88,57-91,02	89,08-91,56	
28	Numerasi (%)									
	SD	Persen (%)	69,43	73,24 - 82,24	74,31-82,24	75,4-82,24	76,5-82,24	77,62-82,24	78,75-82,24	
	SMP	Persen (%)	79,53	82,89 - 86,25	83,61-86,89	84,34-87,54	85,08-88,19	85,82-88,84	86,57-89,5	
29	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,7	8,86	8,97	9,09	9,2	9,31	9,42	
30	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,05	13,19	13,29	13,39	13,5	13,6	13,7	
31	APK Pendidikan Tinggi	Persen (%)	25,12	24,86	25,98	27,15	28,37	29,65	30,99	
32	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi	Persen (%)	N/A	51,79	52,76	53,74	54,75	55,77	56,81	
33	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	57,54	59,08	60,62	62,62	66,12	68,12	70,12	
34	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen (%)	65,63	65,63	66	66,5	67	67,5	68	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35	Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen (%)	N/A	0,001	0,151	0,301	0,451	0,601	0,751	
36	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,90	6,90	7,00	7,10	7,20	7,20	7,30	
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	71,36	71,80	72,30	72,80	73,30	73,80	74,30	
38	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,21	0,18	0,15	0,13	0,1	0,09	0,08	
39	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	67,65	67,65	67,67	68	68,2	68,3	68,5	
40	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,45	57,72	57,99	58,26	58,53	58,80	59,07	
41	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen (%)	N/A	67,14	71,07	75,23	79,64	82,3	84,3	
42	Sekee/kelompok kesenian yang aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
43	Cakupan budaya tak benda lestari	Persen (%)	44,44	50	60	70	80	85	90	
44	Cakupan budaya benda lestari	Persen (%)	93,61	93,7	93,8	93,9	94	94,1	94,2	
45	Penyelesaian konflik antar umat beragama	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen (%)	5,27	5,49	5,7	5,92	6,13	6,35	6,57	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen (%)	12,54	12,82	12,98	13,11	13,71	13,93	14,15	
3	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	Persen (%)	N/A	4,43	4,37	4,32	4,26	4,21	4,16	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen (%)	24,31	24,97	25,01	25,04	25,08	25,11	25,15	
5	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen (%)	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	
6	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB	Persen (%)	N/A	7,54	7,6	7,66	7,72	7,78	7,84	
7	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah	400.222	855.581	862.279,53	869.030,50	875.834,33	882.691,42	889.602,20	
8	Tingkat Inklusi Keuangan per Kabupaten	Persen (%)	N/A	91	91,34	91,68	92,02	92,36	92,7	
9	Persentase kerja sama daerah yang ditinjau lanjuti	Persen (%)	80	80	80,9	81,81	82,72	83,65	84,59	
10	Rasio Kewirausahaan	Persen (%)	3,84	3,91	3,97	4,04	4,10	4,17	4,24	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen (%)	80,1	80,49	80,71	80,93	81,15	81,37	81,59	
12	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	70	71,5	73	74,5	76	77,5	
13	Persentase Desa Mandiri	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
14	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8784	0,8798	0,881	0,8883	0,8965	0,9548	0,9628	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen (%)	N/A	2,19	2,38	2,58	2,81	3,05	3,31	
16	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Persen (%)	N/A	100	99,9	99,8	99,7	99,6	99,5	
17	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	Persen (%)	N/A	0,07	0,071	0,073	0,074	0,075	0,077	
18	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen (%)	N/A	100	100	100	100	100	100	
19	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,39	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	
20	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,93	60,1	61	62,5	63	64,5	65,1	
21	Persentase Rumah Layak Huni	Persen (%)	97,28	97,5	97,75	98	98,25	98,5	98,75	
22	Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita	kWh	N/A	2598,42	2655,08	2712,97	2772,12	2832,56	2894,32	
23	Rasio Elektrifikasi	Persen (%)	N/A	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase Layanan Air Minum Rumah Tangga	Persen (%)	95,14	96,98	97,13	97,28	97,43	97,58	97,74	
25	Ketaatan terhadap RTRW	Persen (%)	80	84	86	88	90	92	94	
26	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen (%)	1,8	1,75	1,7	1,65	1,6	1,55	1,5	
27	Persentase drainase baik (%)	Persen (%)	67,33	70	71	72	73	74	74	
28	Persentase RTH kawasan perkotaan (%)	Persen (%)	N/A	14,27	14,81	15,37	15,95	16,56	17,18	
29	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	Persen (%)	66,58	79	79,5	80	80,5	81	81	
30	Cakupan layanan transportasi (%)	Persen (%)	N/A	33,04	35,71	38,39	41,07	43,75	47,5	
31	Persentase Layanan Sanitasi RT (%)	Persen (%)	98,36	99,18	99,34	99,51	99,67	99,84	100	
32	Persentase Timbunan Sampah yang Terkelola (%)	Persen (%)	N/A	79,79	80,7	81,61	82,54	83,48	84,42	
33	Proporsi Limbah B3 yang Dikelola (%)	Persen (%)	83,3	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase Zona Rawan Banjir dan Genangan yang tertangani	Persen (%)	68,19	69,69	71,19	72,69	74,19	75,69	77,19	
35	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Berkondisi Baik	Persen (%)	66,58	68,67	70,27	71,86	73,46	75,06	76,66	
36	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Penerangan Listrik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum (indeks)	Angka	98,20	98,21	98,22	98,23	98,24	98,25	98,26	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,77	3,77	3,77	3,79	3,82	3,92	4	
3	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	94,06	94,06	94,24	94,43	94,62	94,81	95	
4	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	Angka	3,65	4,18	4,22	4,26	4,29	4,33	4,37	
5	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) (indeks)	Angka	96,43	96,43	96,43	96,44	96,44	96,45	96,45	
6	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	77,07	77,08	77,09	77,1	77,12	77,13	77,14	
7	Indeks Sistem Merit (indeks)	Angka	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	
8	Nilai SAKIP (%)	Persen (%)	68,96	70,02	70,7	71,39	72,09	72,79	73,49	
9	Nilai Maturitas SPIP (Level)	Angka	3,05	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	
10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
11	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	Angka	79,09	79,64	80,19	80,75	81,3	81,85	82,4	
12	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk* (%)	Persen (%)	N/A	68,93	70,04	71,18	72,33	73,5	74,69	
13	Clearance Rate (Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan) (%)	Persen (%)	N/A	77,69	78,68	79,68	80,69	81,71	82,75	
14	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
15	Indeks Demokrasi Daerah (indeks)	Angka	N/A	60	61,05	62,13	63,22	64,33	65,46	
16	Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) (Skala 5)	Angka	2,9	3	3,04	3,09	3,13	3,18	3,22	
17	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	N/A	60,01	64	68	72	76	80	

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029



BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan hasil rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029, serta arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2023-2043.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka perlu diperhatikan mekanisme dan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan RPJMD, meliputi:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja program yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan RPJMD;
- b. Mekanisme *monitoring*, yaitu bagaimana data dan informasi pelaksanaan pembangunan dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala melalui sistem pelaporan internal, forum koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Mekanisme evaluasi, yaitu bagaimana evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari program dan kegiatan pembangunan;
- d. Tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi, yaitu tentang bagaimana hasil *monitoring* dan evaluasi akan digunakan untuk melakukan koreksi, penyesuaian, dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang; serta
- e. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan RPJMD kepada DPRD dan masyarakat.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran periode tahun berikutnya.

5.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
6. Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan *monitoring* secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun dokumen perencanaan periode berikutnya. Pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2021-2026 ke RPJMD Tahun 2025-2029, untuk program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan

pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar menyukseskan, dan mengawal terwujudnya Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya.



Pemerintah Daerah
Kabupaten Jembrana



Rancangan Akhir

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Semesta Berencana

Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

Metadata dan Definsi Operasional Indikator RPJMD Kabupaten Jembrana

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) merupakan indikator ekonomi makro yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dan kemampuan ekonomi daerah dalam periode waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dihitung berdasarkan dari laju perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Metadata PDRB per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. PDRB per Kapita (ADHB)

PDRB per kapita merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu wilayah dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. PDRB Perkapita menunjukkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Metadata PDRB per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

$$PDRB \text{ Per Kapita} = \frac{\text{Nilai tambah PDRB ADHB (rupiah)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$$

3. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari 16 sub-sektor lapangan usaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Nilai tambah Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

4. Persentase Penduduk Miskin (%)

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Rumus perhitungan indikator tersebut adalah:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

5. Rasio Gini (Indeks)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, nilai 1 pada rasio gini menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Rasio gini dihitung melalui rumus berikut:

GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]

Keterangan:

f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

6. Indeks Inovasi Daerah (Indeks)

Indeks Inovasi Daerah bertujuan mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Meta data didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke\ i$
 $Skor\ Jumlah\ Inovasi = jumlah\ Inovasi \times 0,38$
 $SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i) \times Inovasi\ ke\ j}{n} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$
 $Skor\ Total = SPD + SID$

Keterangan:
n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

b) Penghitungan Indeks Inovasi Daerah

$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$

Keterangan:
- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor Total Maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

7. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau e0. UHH merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Idealnya Umur Harapan Hidup (UHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka UHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack. Sumber data UHH berasal dari Sensus Penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai *proxy*/pendekatan.

Berikutnya, dua indikator dimensi pengetahuan yaitu: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini ingin merepresentasikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan formal. Harapan lama sekolah adalah simbol kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah.

Penghitungan kedua indikator dimensi pengetahuan atau pendidikan ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu: i) data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS; ii) data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama; dan iii) hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota.

Dimensi yang terakhir, standar hidup yang layak, tidak dapat menggunakan indikator yang sama sesuai dengan standar UNDP yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (US\$ PPP). Data tersebut tidak tersedia pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga perlu menggunakan indikator lain yang sama-sama mencerminkan standar hidup layak masyarakat dan tersedia lintas wilayah dan waktu. Setelah melalui kajian yang panjang, dipilihlah indikator pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan sebagai indikator yang mewakili dimensi standar hidup yang layak. Indikator ini terpilih karena mampu mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dihitung menggunakan sejumlah data survey dari BPS, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus di setiap dimensi/komponen adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Kesehatan: } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan: } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran: } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Kemudian IPM dihitung melalui rata-rata geometrik dari ketiga dimensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Meta data didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup.

9. Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Rumus perhitungan Umur Harapan Hidup secara ideal dihitung menurut Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack.

Semakin tinggi angka usia harapan hidup di suatu wilayah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Metadata Umur Harapan Hidup diperoleh dari proyeksi SUPAS (Survey Penduduk Antar Sensus) dan SP (Sensus Penduduk) sebagai proksi/pendekatan dengan frekuensi masing-masing 10 tahunan.

10. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas; serta memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. AKI yang rendah mencerminkan beberapa poin krusial, yaitu:

- **Kualitas Pelayanan Kesehatan.** AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan.
- **Akses Pelayanan Kesehatan.** AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
- **Pendidikan Kesehatan.** AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
- **Status Gizi.** AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu.
- **Kesadaran Masyarakat.** AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.

Perhitungan dilakukan dengan rumus jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. Sumber metadata AKI adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk antar Sensus dengan frekuensi masing-masing 10 tahunan.

$$\text{Angka Kematian Ibu} = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$$

Keterangan:

AKI : Angka Kematian Ibu

JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu

JLH : Jumlah kelahiran hidup

11. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010.

- Sangat pendek: Zscore < -3,0
- Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Sumber data prevalensi stunting pada balita diperoleh dari SSGI (tahunan) dan Survei Kesehatan Indonesia (5 tahunan) yang perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan. Wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan adanya masalah serius, termasuk:

- Kekurangan Gizi. Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan 54 bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
- Akses Pelayanan Kesehatan. Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
- Kemiskinan. Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
- Pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
- Faktor Lingkungan. Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Terdapat 3 cara untuk melakukan perhitungan terhadap prevalensi stunting, yakni:

- Cara perhitungan 1

Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting)
JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek(stunting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

- Cara perhitungan 2

Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAB(5)SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)

JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek(stunting) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

- Cara perhitungan 3

Prevalensi stunting = $\frac{PAB(5) P + PAB(5) SP}{JAB(5)}$

12. Penanganan Tuberkulosis

A. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Indikator ini memiliki definisi persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan, yang terdiri dari dua aspek penting:

- Penemuan Kasus yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
- Pengobatan Kasus yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Rumus yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu. Sumber data indikator *treatment coverage* berasal dari data program Kementerian Kesehatan

13. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis merupakan persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini berperan penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Cara yang digunakan untuk menghitung indikator adalah jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Sumber data *treatment success rate* berasal dari data program Kementerian Kesehatan.

14. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)

Indikator cakupan kepesertaan JKN menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan untuk menghitung indikator adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Sumber data indikator berasal dari BPJS dan DJSN.

Cakupan kepesertaan JKN yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa poin:

- Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.
- Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
- Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian
- *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Sederajat (%)

Didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah dasar/MI/ sederajat yang bersekolah dibandingkan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menjadi ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Metode perhitungan APS SD/MI/ Sederajat adalah sebagai berikut:

$$APS\ SD/MI/ sederajat\ (\%) = \frac{Siswa\ usia\ SD}{Penduduk\ usia\ sekolah} \times 100\%$$

16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Sederajat (%)

Didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah menengah pertama/MTs/ sederajat yang bersekolah dibandingkan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Metode perhitungan APS SMP/MTs/ sederajat adalah sebagai berikut:

$$APS\ SMP/MTs/ sederajat\ (\%) = \frac{Siswa\ usia\ SMP}{Penduduk\ usia\ sekolah} \times 100\%$$

17. Angka Putus Sekolah (%)

Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan dalam perhitungan Angka Putus Sekolah adalah sebagai berikut:

$$Angka\ Putus\ Sekolah\ (\%) = \frac{Jumlah\ murid\ putus\ sekolah\ di\ tingkat\ pendidikan\ tertentu}{Jumlah\ siswa\ di\ tingkat\ pendidikan\ tertentu} \times 100\%$$

18. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi

Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di

provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

- Perlu intervensi khusus
- Dasar
- Cakap
- Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Sumber metadata indikator berasal dari Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Metode perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$$

Keterangan:

Satdik min. SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi

n = Jumlah satuan pendidikan

19. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)

Angka Rata-rata lama sekolah adalah Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;
- b. SD = 6 tahun;
- c. SMP = 9 tahun;
- d. SMA = 12 tahun;
- e. D1/D2 = 14 tahun;
- f. D3 = 15 tahun;
- g. D4 = 16 tahun;
- h. S1 = 17 tahun;
- i. S2 = 19 tahun;
- j. S3 = 22 tahun.

Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:

- a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;
- b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;

- c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;
- d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;
- e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1

Rumus perhitungan indikator RLS adalah sebagai berikut:

$$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$$

Keterangan:

P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

Xi = Lama sekolah penduduk ke- i

20. Harapan Lama Sekolah

Definisi harapan lama sekolah adalah Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Rumus perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$Harapan Lama Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

FK = Faktor koreksi pesantren

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia (7, 8, ..., n)

21. Angka Partisipasi Kerja Pendidikan Tinggi (%)

Indikator ini memiliki peran untuk untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Angka tertinggi untuk indikator mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi), dengan cakupan jenjang perguruan tinggi termasuk Diploma-IV, S1, S2, S2 terapan, dan S3.

Rumus perhitungan APK Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

$$APK Pendidikan Tinggi (\%) = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$$

22. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi
- Tidak/belum tamat SD - SD/MI/SDLB/ Paket A - SMP/MTs/SMPLB/Paket B	- SMA/MA/SMLB/Paket C - SMK - MAK	- Diploma I/II/III - Diploma IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan

kemampuan mental tinggi. Sementara itu, bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Rumus Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang sedang bekerja}} \times 100\%$$

23. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Semakin tinggi angka Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Cakupan kepesertaan Jamsostek dihitung melalui:

$$\text{Cakupan kepesertaan JAMSOSTEK (\%)} = \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk bekerja yang berusia 15 – 65 tahun}} \times 100\%$$

24. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Rumus perhitungan Persentase indikator tersebut dihitung melalui:

$$\% PD_{\text{formal}} = \frac{\sum PD_{\text{formal}}}{\sum AKPD} \times 100\%$$

Keterangan:

PD_{formal} : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal
AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas



25. Rasio Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari 16 sub-sektor lapangan usaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (\%)} = \frac{\text{Nilai tambah Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

26. Rasio Kontribusi PDRB Penyedia Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)

Rasio kontribusi sektor pariwisata dilihat dari komposit sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: (1) Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan (2) Penyediaan Jasa Makan dan Minum Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PDRB Penyediaan Akomamin (\%)} = \frac{\text{Nilai tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

27. Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri dari 3 sub-sektor lapangan usaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (\%)} = \frac{\text{Nilai tambah Sektor}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

28. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)

Proporsi jumlah UKM non pertanian pada level kabupaten merupakan perbandingan jumlah UKM non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama di level kabupaten. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Rumus perhitungan indikator ini adalah :

$$\text{Proporsi UKM Non pertanian (\%)} = \frac{\text{Jumlah UKM Non pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha non pertanian}} \times 100\%$$

29. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)

Proporsi jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) pada level kabupaten merupakan perbandingan jumlah ndustri Kecil Menengah (IKM) terhadap seluruh unit usaha industri pada tahun yang sama di level kabupaten. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Rumus perhitungan indikator ini adalah :

$$\text{Proporsi jumlah IKM (\%)} = \frac{\text{Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha Industri}} \times 100\%$$

30. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

$$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah}(\%) = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$$

31. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari komposit sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang terdiri dari 2 sub-sektor lapangan usaha. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Daerah secara tahunan, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Reparasi}(\%) = \frac{\text{Nilai tambah Sektor}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

32. Return on Asset (ROA) BUMD (%)

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Meta data didapatkan secara tahunan dari BUMD (Laporan keuangan BUMD), BKAD, dan SETDA. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Return on Asset BUMD}(\%) = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

33. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka}(\%) = \frac{\text{Jumlah pengangguran (orang)}}{\text{Jumlah angkatan kerja (orang)}} \times 100\%$$

34. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif

terhadap penduduk usia kerja. Meta data didapatkan dari Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$TPAK(\%) = \frac{Jumlah\ angkatan\ kerja\ (orang)}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 15\ tahun\ keatas\ (orang)} \times 100\%$$

35. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah bertujuan mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Meta data didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$$
$$Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi \times 0,38$$
$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i) \times Inovasi\ ke\ j}{n} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$
$$Skor\ Total = SPD + SID$$

Keterangan:
n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah
i adalah nomor indikator
j adalah nomor inovasi
SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah
SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$$

- Keterangan:
- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
 - Skor Total Maksimum adalah 250.
 - Skala IID adalah 0 s.d. 100.

36. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator dalam mengukur kondisi tutupan lahan berdasarkan jenis vegetasi (misalnya tutupan hutan, vegetasi non hutan, lahan terbuka, lahan gambut, dan lain sebagainya) di suatu wilayah. Pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan oleh KLHK/ Dinas Lingkungan Hidup dalam dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Statistik Lingkungan Hidup Daerah.

37. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air dihitung berdasarkan persentase status kualitas air yang memenuhi standar baku mutu (%). Metadata Indeks Kualitas Air diperoleh dari KLHK/ Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat.

38. Evaluasi Implementasi Kota Cerdas atau Smart City (Skala)

Evaluasi Implementasi Kota Cerdas merupakan indikaor dalam mengukur pelaksanaan program dan manajemen risiko implementasi Kota Cerdas dalam rangka Gerakan menuju 100 Kota Cerdas. *Smart city* yang dikembangkan oleh Kemkominfo terdiri dari enam dimensi yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*,

smart society dan *smart environment*. Dalam Evaluasi Implementasi Kota Cerdas terdapat 3 (tiga elemen) yang di nilai, yaitu (1) Kebijakan *Smart City*; (2) Kelembagaan *Smart City*; serta (3) Anggaran *Smart City* terhadap enam dimensi *Smart City*. Proses penilaian dilakukan menggunakan metode Kuesioner Evaluasi *Quickwins* yang dilakukan pembobotan dalam skala 1-5. Metadata indikator ini diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Komunikasi dan Informatika wilayah setempat.

39. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah

Koefisien Variasi Harga (KVH) Antarwilayah merupakan disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam satu provinsi. Semakin rendah KVH antar wilayah menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi. Metadata dari indikator KVH antar wilayah diperoleh dari Kementerian Perdagangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

40. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Meta data didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PMTB \text{ terhadap PDRB (\%)} = \frac{PMTB}{PDRB ADHK} \times 100\%$$

41. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Meta data didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Ekspor \text{ Barang dan Jasa terhadap PDRB (\%)} = \frac{Ekspor \text{ barang dan jasa}}{PDRB ADHK} \times 100\%$$

42. Persentase Rumah Layak Huni (%)

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: (1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; serta (2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Meta data didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian PUPR. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Persentase \text{ Rumah Tangga Layak Huni (\%)} = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan

JRT = Jumlah rumah tangga

43. Persentase Desa Mandiri (%)

Persentase Desa Mandiri (%) menunjukkan tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Klasifikasi status desa terdiri dari ‘Mandiri’, ‘Maju’, ‘Berkembang’, ‘Tertinggal’, dan ‘Sangat Tertinggal. Klasifikasi status desa ‘Mandiri’ merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

44. Indeks Reformasi Hukum

Indikator ini didefinisikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Perhitungan indeks reformasi hukum mengacu kepada 4 variabel yaitu:

- Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
- Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Sangat Baik
3.	BB	>70-80	Baik
4.	B	>60-70	Cukup baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Buruk
7.	D	0-30	Sangat Buruk

Perhitungan IRH dilakukan melalui self assesment oleh Pemerintah Daerah, menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri yang akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

45. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat

kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus perhitungan indeks SPBE adalah sebagai berikut:

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

dimana:

- NDj adalah nilai indeks domain ke-j;
- BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

46. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang diacu adalah:

- a. Keadilan (Fairness)
- b. Partisipasi (Participation)
- c. Akuntabilitas (Accountability)
- d. Transparansi (Transparency)
- e. Berdayaguna (useful)
- f. Aksesibilitas (accessibility)

Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Range Nilai	Kategori	Makna
0-1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan prima

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.

1. Menentukan nilai untuk setiap indikator

$$\text{Nilai per indikator: } \left(\frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$$

2. Menentukan nilai setiap aspek

$$\text{Nilai per aspek: } \sum \text{nilai per indikator}$$

3. Menentukan indeks

$$\text{Nilai indeks: } \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$$

47. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)

Merupakan gambaran dari indeks kepuasan masyarakat terhadap suatu lembaga dalam memberikan pelayanan pelatihan, yang merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

48. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah. Metode pengukuran melalui penilaian terhadap 8 aspek sistem merit dengan pembobotan sebagai berikut: 1) perencanaan kebutuhan 10%; 2) pengadaan 10%; 3) pengembangan karier 30%; 4) promosi dan mutasi 10%; 5) manajemen kinerja 20%; 6) penggajian, penghargaan dan disiplin 10%; 7) perlindungan dan pelayanan 4%; dan 8) sistem informasi 6%. Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit yaitu: Kategori IV nilai 325-400 (Sangat Baik), Kategori III nilai 250-324 (Baik), Kategori II nilai 175-249 (Kurang), dan Kategori I nilai 100-174 (Buruk).

Selain Indeks Sistem Merit, terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja instansi pemerintahan daerah, yaitu:

A. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP diketahui melalui hasil evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP.

B. Nilai Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

C. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Ukuran keberhasilan yang diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, ditandai dengan:

- tidak ada korupsi;
- tidak ada pelanggaran;
- APBN dan APBD baik;
- semua program selesai dengan baik;
- semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
- komunikasi dengan publik baik;
- penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; dan
- hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Sumber data indeks reformasi birokrasi adalah hasil penilaian implementasi kebijakan oleh leading institution, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei Employer Branding ASN.

49. Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kerawanan terhadap tindak kriminal di suatu kota pada periode tertentu. Semakin tinggi tingkat kejahatan, maka semakin tinggi pula kerawanan wilayah tersebut terhadap kejahatan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kejahatan, semakin rendah pula kerawanannya. Metode perhitungan indikator ini adalah:

$$Crime\ rate\ (\%) = \frac{Jumlah\ tindak\ pidana}{Jumlah\ penduduk} \times 100.000$$

50. Clearance Rate atau Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan (%)

Didefinisikan sebagai perbandingan antara tindak pidana yang berhasil diselesaikan dibanding jumlah tindak pidana yang dilaporkan. Nilai ideal *clearance rate* adalah 100%. Rumus perhitungan indikator *clearance rate* adalah:

$$Clearance\ rate\ (\%) = \frac{Jumlah\ tindak\ pidana\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ dilaporkan} \times 100\%$$

51. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)

Pelanggaran K3 merupakan pelanggaran yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan yang dilaporkan oleh masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP. Sehingga indikator ini menunjukkan tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Angka indikator didapatkan total pelanggaran K3 yang berhasil ditangani dibandingkan total pelanggaran K3, disajikan dalam persentase.

52. Indeks Demokrasi Daerah

Indeks Demokrasi Daerah merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode

pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru.

Kualitas demokrasi dinilai semakin baik jika angka IDI semakin tinggi. Kategori nilai dalam IDI adalah sebagai berikut

- a. Kategori Tinggi (>80)
- b. Kategori Sedang (60-80)
- c. Kategori Rendah (<60)

Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses *web scrapping* dari berbagai portal online dan revidu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilu, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding. Sementara itu, Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjangkau data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI. Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers.

53. Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB

Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Metadata indikator ini diperoleh dari data Kementerian Keuangan, Badan Penerimaan Keuangan Daerah (BPKAD), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rumus perhitungan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB adalah sebagai berikut:

$$RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Daerah_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

Keterangan:

$RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t

54. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) merupakan indikator ekonomi makro yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dan kemampuan ekonomi daerah dalam periode waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) dihitung berdasarkan dari laju perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu

tahun tertentu sebagai tahun dasar. Metadata PDRB per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

55. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Juta Rupiah)

Realisasi investasi PMA dan PMDN adalah nilai investasi yang telah direalisasikan atau ditanamkan di dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN berdampak pada pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, pengembangan SDM, diversifikasi ekonomi, peningkatan penyediaan infrastruktur, serta peningkatan daya saing daerah. Metadata dari realisasi investasi diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

56. Tingkat Inklusi Keuangan per Kabupaten (%)

Tingkat Inklusi Keuangan (%) adalah tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat Indonesia pada suatu kurun waktu tertentu. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi Masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Tingkat Inklusi Keuangan (%) diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sample penduduk). Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka dibantu dengan *system Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Metadata dari indikator ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

57. Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah dan Kabupaten (Jumlah)

Hubungan kerjasama antara pemerintah dan kabupaten menjadi tolak ukur keberhasilan kolaborasi pemangku kebijakan dan pelaku pembangunan (masyarakat, swasta, akademisi, dan lain sebagainya) dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah. Indikator ini dapat diukur melalui jumlah kerja sama daerah dan persentase kerja sama yang ditinjaklanjuti.

58. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar berikut:



Data perhitungan IDSD bersumber dari data sekunder kementerian / lembaga. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. Skor akhir IDSD dihitung melalui agregasi skor pilar daya saing dengan menggunakan metode yang sama. Indeks daya saing daerah dihitung melalui rumus berikut:

$$Skor_{i,d} = (Ni_{i,d} - N Ri / NT_i - N Ri) \times 5,$$

dimana:

$Skor_{i,d}$ adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; $Ni_{i,d}$ adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d $N Ri$ adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan NT_i adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).

59. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender, yang diukur melalui 31 indikator. Meta data didapatkan secara tahunan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan

W_j = Bobot dimensi ke-j

D_j = Dimensi ke-j

Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

D_j = Dimensi ke-j

SX_{ij} = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi

n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j

60. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006,

kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam metodologi pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a) Penyusunan indikator KUB menggunakan *exploratory factor analysis* terhadap tokoh agama atau penggiat kerukunan di seluruh Indonesia.
- b) Penyusunan *sampling frame* nasional dengan PSU desa/kelurahan.
- c) Proses koordinasi survei antara Tim Litbang dengan jejaring Litbang dan Kemenag.
- d) Pilot survei untuk menguji instrumen dan teknis survei.
- e) Proses coaching dan survei
- f) Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling* dengan populasi seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara unproporsional, dengan ukuran sampel minimal. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
- g) *Data processing, analysis data*, dan penyusunan *policy brief*.

61. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPKK) menunjukkan kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Semakin besar nilai IPKK, maka semakin meningkat kualitas keluarga. Meta data didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB, Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA.

62. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Meta data didapatkan secara tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan KB dan Badan Pusat Statistik.

63. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati pada suatu wilayah. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir

untuk berkelanjutan keanekaragaman hayati. Indeks memiliki skala nol sampai satu. Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk, sedangkan nilai satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah. Metadata indeks tersebut diperoleh dari KLHK, Kementerian Pertanian, KKP, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

64. Kualitas Lingkungan Hidup

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Meta data didapatkan secara tahunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup.

B. Persentase Layanan Sanitasi RT (%)

Akses sanitasi aman adalah rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Meta data didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang dan Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Persentase\ Layanan\ Sanitasi\ RT\ (\%) = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$$

Keterangan:

JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T

JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)

JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

C. Pengelolaan Sampah

- Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola (%)

Persentase timbulan sampah yang terkelola (%) diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di kabupaten. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Meta data didapatkan secara tahunan dari Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang, Badan Pusat Statistik (Survei Sosial Ekonomi Nasional), dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Timbulan\ sampah\ yang\ terkelola(\%) = \frac{Sampah\ terolah\ (\frac{ton}{hari})}{Timbulan\ sampah\ (\frac{ton}{hari})} \times 100\%$$

- **Proporsi Limbah B3 yang Dikelola (%)**

Proporsi Limbah B3 yang Dikelola (%) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang telah dikelola dengan baik dibandingkan dengan total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Meta data indikator ini dapat diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup daerah setempat.

65. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan

A. Ketahanan Energi

a) Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita (kWh)

Pemenuhan kebutuhan Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Meta data didapatkan secara tahunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Perusahaan Listrik Negara, dan Badan Pusat Statistik. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Kebutuhan Listrik per kapita} = \frac{KL_{pln} + KL_{nonpln}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Keterangan:

KLpk = Konsumsi listrik per kapita

KLpln = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN

KLnonpln = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN

b) Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi (RE) adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga di suatu wilayah yang telah memiliki akses listrik. Rasio elektrifikasi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi rasio elektrifikasi, semakin banyak rumah tangga yang memperoleh manfaat dari listrik, seperti penerangan, komunikasi, dan akses ke berbagai peralatan elektronik. Meta data didapatkan secara tahunan dari Badan Pusat Statistik. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Rasio Elektrifikasi (\%)} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

B. Kemandirian Pangan

a) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Meta data didapatkan secara tahunan dari Publikasi Indeks Ketahanan Pangan oleh Badan Pangan Nasional.

C. Ketahanan Air

a) Persentase Layanan Air Minum RT (%)

Persentase Layanan Air Minum RT adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$$

Keterangan:

PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki terhadap akses air siap minum perpipaan

JRTASMP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki terhadap akses air siap minum perpipaan

JRT = Jumlah rumah tangga perkotaan

66. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Meta data didapatkan secara tahunan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

67. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran dalam menilai tingkat polusi udara dalam suatu wilayah. Indeks ini diperoleh dari pengukuran konsentrasi berbagai polutan udara dalam skala tertentu. Pengukuran Indeks Kualitas Udara dilakukan oleh BMKG dan KLHK/ Dinas Lingkungan Hidup dalam dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Statistik Lingkungan Hidup Daerah.

BUPATI JEMBRANA,

I MADE KEMBANG HARTAWAN